victoria investama

Kantor Pusat
Victoria Suites, Senayan City, Panin Tower Lantai 8
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Gelora Tanah Abang
Jakarta 10270
Telp: (021) 7278-2287
Faks: (021) 7278-2287
Website: www.victoriainvestama.co.id
e-mail: corsec@victoriainvestama.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	26 Juni 2013	Periode Awal Perdagangan Waran Seri I	:	8 Juli 2013
Masa Penawaran Umum	:	28 Juni 1, 2 Juli 2013	Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I		
Tanggal Penjatahan	:	4 Juli 2013	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	1 Juli 2016
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	5 Juli 2013	- Pasar Tunai	:	6 Juli 2016
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	5 Juli 2013	Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Januari 2014
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I			Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Juli 2016
Pada Bursa Efek Indonesia	:	8 Juli 2013	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	8 Juli 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PT VICTORIA INVESTAMA TBK (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI

victoria investama

PT Victoria Investama Tbk

Kegiatan Usaha :
Bergerak dalam bidang investasi

Berkedudukan di Jakarta Indonesia

Kantor Pusat
Victoria Suites, Senayan City, Panin Tower Lantai 8
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Gelora, Tanah Abang
Jakarta 10270
Telp: (021) 7278-2287
Faks: (021) 7278-2287
Website: www.victoriainvestama.co.id
e-mail: corsec@victoriainvestama.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 16,33% (enam belas koma tiga puluh tiga persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah).

Bersamaan dengan itu juga ditawarkan sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 34,15% (tiga puluh empat koma lima belas persen) terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Badan Administrasi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini. Setiap pemegang 4 (empat) saham baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu perdagangan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan, yang berlaku mulai tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan 8 Juli 2016. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh antara lain hak suara dalam RUPS, Dividen, Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF, MELAINKAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH NAMA BAIK DAN *IMAGE* PERUSAHAAN. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG DAPAT DISEBABKAN ANTARA LAIN KARENA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN TERBATAS. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUID.

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

AAA SECURITIES

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH

(*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN SAHAM PERSEROAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2013

PT Victoria Investama Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 26 April 2013 dengan surat 047/VI/DIR/IV/2013 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara nomor 3608 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pasar Modal") dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 24 April 2013, apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen Penawaran untuk membeli saham, kecuali bila Penawaran dan pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan Bursa Efek yang berlaku di Negara tersebut atau yurisdiksi di luar Republik Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Prospektus ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI			i
DEFINISI DAN SINGKATAN			iii
RINGKASAN			vii
BAB I	**Penawaran Umum**		1
	1.1	Perseroan	1
	1.2	Penerbitan Waran Seri I	3
	1.3	Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	11
BAB II	**Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**		12
BAB III	**Pernyataan Hutang**		16
BAB IV	**Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen**		21
	1	Umum	21
	2	Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi	23
	3	Keuangan	23
	4	Manajemen Risiko	40
BAB V	**Risiko Usaha**		42
BAB VI	**Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen**		50
BAB VII	**Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak**		51
	1	Riwayat Singkat Perseroan	51
	2	Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	51
	3	Manajemen dan Pengawasan Perseroan	65
	4	Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)	67
	5	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR)	68
	6	Sumber Daya Manusia	69
	7	Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	72
	8	Keterangan Tentang Entitas	80
	9	Keterangan Tentang Entitas Asosiasi	80
	10	Hubungan Pengurusan dan Pengawasan	84
	11	Diagram Hubungan Kepemilikian Dengan Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Pemegang Saham	85
	12	Perjanjian-perjanjian Penting	85
	13	Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	89
	14	Asuransi	89
	15	Perkara Pengadilan yang Dihadapi Direksi, Komisaris, Perseroan dan Entitas Anak	89
BAB VIII	**Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak**		90
	1	Umum	91
	2	Kegiatan Usaha	91
	3	Strategi Dan Prospek Perseroan	111
BAB IX	**Ikhtisar Data Keuangan Penting**		113
BAB X	**Ekuitas**		119
BAB XI	**Kebijakan Dividen Kas**		122
BAB XII	**Perpajakan**		123

BAB XIII	**Penjaminan Emisi Efek**	125
BAB XIV	**Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal**	126
BAB XV	**Pendapat Dari Segi Hukum**	128
BAB XVI	**Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak**	152
BAB XVII	**Anggaran Dasar Perseroan**	225
BAB XVIII	**Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham**	243
BAB XIX	**Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham**	249

DEFINISI DAN SINGKATAN

AFILIASI	:	Berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
ENTITAS ANAK	:	Berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dibawah ini, yaitu : 1. kepemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah sekurang-kurangnya 50% dari modal ditempatkan dan disetor perusahan yang bersangkutan; dan 2. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia
BAE	:	Biro Administrasi Efek, berarti Pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta.
BAPEPAM dan LK	:	Berarti Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal tiga puluh Desember dua ribu lima (30-12-2005) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 184/PMK.01/2010 tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh (11-10-2010) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang saat ini telah berubah nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan.
BEI	:	Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta, dan merupakan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN	:	Berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham di Pasar Perdana.
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	:	Berarti formulir asli atau fotocopy formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
HARI BURSA	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia

HARI KALENDER	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
HARI KERJA	:	Berarti hari-hari kerja nasional biasa kecuali hari libur nasional, hari Sabtu, dan hari Minggu, dengan ketentuan apabila salah satu pihak harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja dimana oleh instansi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksana kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh instansi yang berwenang.
HARI KERJA BANK	:	Berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar bank.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
MANAJER PENJATAHAN	:	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum, atau Perseroan dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Peraturan IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/ BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
MASA PENAWARAN	:	Berarti jangka waktu dalam mana dapat diajukan pemesanan sahamsaham oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Prospektus, kecuali jika Masa Penawaran itu ditutup lebih dini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
MASYARAKAT	:	Berarti perorangan dan/atau badan badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia/ badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/ badan-badan Asing/badan hukum Asing, baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki saham saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)	:	Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
PEMEGANG REKENING	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

PENAWARAN AWAL	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tertanggal 27 Oktober dua ribu 2000, nomor Kep-41/PM/2000.
PENAWARAN UMUM	:	Berarti penawaran saham oleh Emiten kepada masyarakat melalui Pasar Modal, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
PENITIPAN KOLEKTIF	:	Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
PERNYATAAN PENDAFTARAN	:	Berarti pernyataan pendaftaran yang wajib diajukan kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat dikemudian hari guna memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF	:	Berarti pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal lain dalam hal ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
PROSPEKTUS	:	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi mengenai Emiten dan Emisi yang digunakan sebagai instrumen Penawaran Umum dengan maksud mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
PROSPEKTUS AWAL	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan, kecuali informasi mengenai jumlah saham, Harga Penawaran Saham, penjaminan emisi efek atau halhal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.8 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 (dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), diubah dengan nomor KEP-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu).
PROSPEKTUS RINGKAS	:	Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Emiten dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurangkurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
SAHAM	:	Berarti saham atas nama yang telah dikeluarkan atau masih dalam simpanan (portepel) Perseroan, masing masing bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

SAHAM YANG DITAWARKAN	:	Berarti saham atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Emiten, masing-masing bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang ditawarkan oleh Emiten kepada masyarakat dalam Penawaran Umum menurut perjanjian ini dalam sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama.
TANGGAL PEMBAYARAN	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan saham yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan ditentukan dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
TANGGAL PENCATATAN PADA BURSA	:	Berarti berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia yang akan ditentukan dalam suatu perjanjian tambahan/ perubahan atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
TANGGAL PENGEMBALIAN	:	Berarti berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia yang akan ditentukan dalam suatu perjanjian tambahan/ perubahan atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
TANGGAL PENJATAHAN	:	Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan yaitu selambat-lambatnya hari kerja kedua setelah berakhirnya Masa Penawaran, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan penjatahan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
WARAN	:	Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli Saham sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran.

Singkatan Nama-Nama Perusahaan

BVIC	:	Berarti PT Bank Victoria Internasional Tbk.
VINS	:	Berarti PT Victoria Insurance
VSI	:	Berarti PT Victoria Securities Indonesia
VMI	:	Berarti PT Victoria Manajemen Investasi

RINGKASAN

Ringkasan dibawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama ”PT Tata Sekuritas Maju” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Tata Sekuritas Maju No. 39 tanggal 26 Oktober 1989 yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH, Notaris di Serang, telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10137 HT.01.01-Th.89 tanggal 2 Nopember 1989 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1612/1989 tanggal 7 Nopember 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3537 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Selanjutnya Perseroan berubah nama menjadi “PT Victoria Sekuritas” berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tata Sekuritas Maju No. 33 tanggal 17 Desember 1999, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-112 HT.01.04.TH.2000 tanggal 4 Januari 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 248/RUB.09.03/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7962 (“**Akta No. 33/1999**”) dan kemudian berubah nama menjadi “PT Victoria Investama” berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Victoria Sekuritas No. 51 tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-36672.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061351. AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012 (“**Akta No. 51/2012**”).

Pada tanggal Prospektus, anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 116 tanggal 27 Maret 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-17098.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029189.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 serta telah diterima dan dicatat di database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-12746 tanggal 8 April 2013 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0030769.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 (“**Akta No. 116/2013**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.102 tanggal 19 April 2013 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-15909 tanggal 26 April 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038393.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 April 2013 (“**Akta No. 102/2013**”)

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 116/2013 juncto Akta No.102/2013, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan di bidang pertanian, perkebunan, telekomunikasi, perdagangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa.

2. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 116/2013 juncto Akta No.102/2013, yaitu sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**15.000.000.000**	**1.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	6.088.500.000	608.850.000.000	99,00
Suzanna Tanojo	61.500.000	6.150.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.150.000.000**	**615.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**8.850.000.000**	**885.000.000.000**	

3. Struktur Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah saham yang ditawarkan	:	sebanyak 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta) saham
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) per saham
Harga Penawaran	:	Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham
Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan	:	sebanyak 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta) saham
Perbandingan Saham Baru : Waran Seri I	:	4 : 7
Harga Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) per saham
Harga Pelaksanaan	:	Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per Waran Seri I

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp 25.620.428.135 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) atau sekitar 17,08% (tujuh belas koma nol delapan persen) akan digunakan untuk melunasi *Junior Convertible Loan Agreement* Perseroan;
2. Sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau sekitar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk melakukan setoran modal kedalam Entitas Anak Perseroan yaitu PT Victoria Securities Indonesia sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham pada nilai nominal yaitu Rp 100,- (seratus rupiah) per lembar saham;
3. Sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sekitar 13,33% (tiga belas koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk melakukan setoran modal kedalam Entitas Anak Perseroan yaitu PT Victoria Insurance sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham pada nilai nominal yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham;
4. Sebesar Rp 50.889.840.300,- (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) atau sekitar 33,93% (tiga puluh tiga koma sembilan tiga persen) akan digunakan untuk melakukan pelaksanaan atas waran seri III PT Bank Victoria International Tbk yang dimiliki oleh Perseroan sebanyak-banyaknya 508.898.403 Waran pada harga pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) per lembar saham;

5. Sisanya sebesar Rp 3.489.731.565 (tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima Rupiah) atau sekitar 2,33% (dua koma tiga tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan antara lain untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan; dan

Seluruh dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

5. Risiko Usaha

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

RISIKO PERSEROAN

1. Risiko Nama Baik dan *Image* Perusahaan
2. Risiko kesalahan dalam investasi/menganalisa peluang bisnis
3. Risiko Sebagai Perusahaan Induk
4. Risiko Persaingan Usaha

RISIKO ENTITAS ANAK

1. PT Victoria Securities Indonesia (“VSI”)
   - Risiko Penghentian Ijin Usaha
   - Risiko Operasional
   - Risiko Pasar
   - Risiko Persaingan Usaha
   - Risiko Teknologi
   - Risiko Perekonomian
   - Risiko Kebijakan Pemerintah

2. PT Victoria Insurance (“VINS”)
   - Risiko Nama Baik dan *Image* Perusahaan
   - Risiko Operasional
   - Risiko Gugatan Klaim Asuransi
   - Risiko Sumber Daya Manusia
   - Risiko Persaingan
   - Risiko Investasi
   - Risiko Teknologi
   - Risiko Valuta Asing

RISIKO ENTITAS ASOSIASI

PT Bank Victoria International Indonesia Tbk (“BVIC”)
- Risiko Kredit (*Credit Risk*)
- Risiko Pasar (*Market Risk*)
- Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)
- Risiko Operasional (*Operational Risk*)
- Risiko Hukum (*Legal Risk*)
- Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)
- Risiko Stratejik (*Strategic Risk*)
- Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KONDISI DI INDONESIA

1. Risiko Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Dan Moneter
2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan
2. Risiko Harga Saham Yang Berfluktuasi
3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Yang Akan Datang

6. Ikhtisar Data Keuangan

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVI dari Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditanda tangani oleh Suharsono SE. Ak, CPA, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan penyajian laporan posisi keuangan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perusahaan pada tahun 2012, penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 secara prospektif atau retrospektif dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akhyadi Wadisono yang ditanda tangani oleh Drs. Akhyadi Wadisono, Ak.,CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut sehubungan dengan pencatatan investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak, penyesuaian nilai wajar aset keuangan, perhitungan pajak tangguhan dan goodwill, serta reklasifikasi akun-akun tertentu, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang yang ditanda tangani oleh Dadang Mulyana, CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,kecuali untuk penyajian kembali laporan keuangan sehubungan dengan pencatatan investasi entitas asosiasi pada PT Bank Victoria International, Tbk, sesuai dengan PSAK No 15 (Revisi 2009) Investasi pada Entitas Asosiasi (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Akuntan yang mengaudit laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, mengakui investasi entitas asosiasi pada PT Bank Victoria International Tbk sebagai bagian dari portofolio efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual, sehingga terdapat kebijakan akuntansi yang berbeda dengan yang disajikan dengan laporan keuangan konsolidasian 2012, 2011 dan 2010, sehingga untuk akun tersebut telah dilakukan penyajian ulang agar memberikan informasi yang lebih relevan dan komparatif bagi pembaca laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009*)	2008*)
Jumlah Aset Lancar	225.150.105	294.209.372	423.833.004	118.935.194	104.294.717
Jumlah Aset Tidak Lancar	547.492.218	457.690.387	295.275.167	248.800.643	174.471.417
JUMLAH ASET	772.642.323	751.899.759	719.108.171	367.735.836	278.766.134
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	81.743.908	145.112.232	369.277.645	72.929.218	76.762.123
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.525.885	27.668.998	729.060	472.149	467.182
JUMLAH LIABILITAS	83.269.793	172.781.230	370.006.705	73.401.367	77.229.305
JUMLAH EKUITAS	689.372.528	579.118.530	349.101.466	294.334.467	201.536.830

Keterangan:
**) Pada tahun 2009 dan 2008, Perseroan belum mempunyai entitas anak dan telah disajikan kembali sehubungan dengan pencatatan investasi entitas asosiasi pada PT Bank Victoria International, Tbk,*

sesuai dengan PSAK No 15 (Revisi 2009) Investasi pada Entitas Asosiasi, namun penyajian laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009*)	2008*)
PENDAPATAN USAHA					
Jumlah Pendapatan Usaha	54.575.015	56.799.315	40.721.538	14.380.371	35.918.665
BEBAN USAHA					
Jumlah Beban Usaha	23.903.205	30.403.440	11.776.439	8.892.909	13.755.276
LABA USAHA	30.671.810	26.399.521	28.945.099	5.487.461	22.163.390
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Jumlah Penghasilan lain-lain– bersih	66.927.865	62.991.033	34.915.011	10.967.642	3.819.605
LABA SEBELUM PAJAK	97.599.675	89.390.554	63.860.110	16.455.103	25.982.995
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(889.596)	(386.461)	(352.052)	(251.370)	(592.232)
LABA SEBELUM LABA ENTITAS ANAK PRA-AKUISISI	96.700.079	89.400.093	63.412.644	16.203.733	25.390.763
LABA ENTITAS ANAK PRA-AKUISISI	-	-	(95.415)	-	-
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	96.700.079	89.400.093	63.412.644	16.203.733	25.390.763
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA					
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lainnya	13.553.920	31.762.971	(9.059.637)	-	-
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	110.253.999	120.767.064	54.353.006	16.203.733	25.390.763
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	96.700.079	89.004.093	63.412.644	-	-
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF	110.253.999	120.767.064	54.353.006	-	-
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	37	43	41	15	25

Keterangan:
**) Pada tahun 2009 dan 2008, Perseroan belum mempunyai entitas anak dan telah disajikan kembali sehubungan dengan pencatatan investasi entitas asosiasi pada PT Bank Victoria International, Tbk, sesuai dengan PSAK No 15 (Revisi 2009) "Investasi pada Entitas Asosiasi, namun penyajian laporan keuangan tersebut tidak diaudit.*

Rasio-Rasio Penting (*dalam persen*)

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan Usaha	-3,91%	39,49%	183,17%	-59,96%	-35,64%
Laba (Rugi) Usaha	16,18%	-8,79%	427,48%	-75,24%	-96,52%
Laba Tahun Berjalan	8,65%	40,36%	291,35%	-36,18%	-118,59%
Aset	2,80%	4,33%	95,36%	31,92%	-64,78%
Kewajiban	-52,37%	-53,86%	403,14%	-4,96%	-153,17%
Ekuitas	19,04%	65,89%	18,61%	46,05%	-18,08%
Rasio Usaha (%)					
Laba Usaha/Pendapatan Usaha	56,20%	46,48%	71,08%	38,16%	61,70%

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	202,02%	212,61%	133,47%	112,68%	70,69%
Laba Tahun Berjalan/Ekuitas (ROE)	15,99%	20,85%	15,57%	5,51%	12,60%
Laba Tahun Berjalan/Aset (ROA)	14,26%	16,11%	7,57%	4,41%	9,11%
Rasio Keuangan (%)					
Aset Lancar/Kewajiban Lancar	2,80	2,04	1,15	1,63	1,36
Kewajiban/Ekuitas (Solvabilitas)	0,12	0,29	1,06	0,25	0,38
Kewajiban/Jumlah Aset	0,11	0,23	0,51	0,20	0,28

7. Kebijakan Dividen Kas

Manajemen akan senantiasa menjalankan kebijakan dividen setiap tahunnya dimulai tahun buku 2013 dengan tetap merujuk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Manajemen Perseroan mengusulkan dasar perhitungan pembagian dividen (mana yang lebih rendah) sebagai berikut:

- 15% dari laba Entitas Anak yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki Perseroan; atau
- 25% dari penerimaan dividen yang diterima Perseroan dari seluruh Entitas Anak

8. Struktur Penyertaan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan	Tahun Dimulai Penyertaan
Entitas Anak		
PT Victoria Securities Indonesia (VSI)	99%	2011
PT Victoria Insurance (VINS)	98,75%	2010
PT Victoria Manajemen Investasi (VMI)	95%	2011
Entitas Asosiasi		
PT Bank Victoria International Tbk (BVIC)	34,86%	2005

I. PENAWARAN UMUM

1. PERSEROAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut "Penawaran Umum") sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 16,33% (enam belas koma tiga puluh tiga persen) dari Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Bersamaan dengan itu juga ditawarkan sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 34,15% (tiga puluh empat koma lima belas persen) terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum disampaikan kepada OJK. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan, yang berlaku mulai tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan 8 Juli 2016. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

victoria investama

PT Victoria Investama Tbk

Kegiatan Usaha :
Bergerak dalam bidang investasi

Kantor Pusat
Victoria Suites, Senayan City, Panin Tower Lantai 8
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Gelora, Tanah Abang
Jakarta 10270
Telp: (021) 7278-2287
Faks: (021) 7278-2287
Website: www.victoriainvestama.co.id
e-mail: corsec@victoriainvestama.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO NAMA BAIK DAN *IMAGE* PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG DAPAT DISEBABKAN ANTARA LAIN KARENA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN TERBATAS. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUID.

Perseroan didirikan dengan nama **"PT Tata Sekuritas Maju"** berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Tata Sekuritas Maju No. 39 tanggal 26 Oktober 1989 yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH, Notaris di Serang, telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10137 HT.01.01-Th.89 tanggal 2 Nopember 1989 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1612/1989 tanggal 7 Nopember 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3537 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Selanjutnya Perseroan berubah nama menjadi "**PT Victoria Sekuritas**" berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tata Sekuritas Maju No. 33 tanggal 17 Desember 1999, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-112 HT.01.04.TH.2000 tanggal 4 Januari 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 248/RUB.09.03/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7962 ("**Akta No. 33/1999**") dan kemudian berubah nama menjadi "**PT Victoria Investama**" berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Victoria Sekuritas No. 51 tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-36672.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061351.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012 ("**Akta No. 51/2012**").

Pada tanggal Prospektus, anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 116 tanggal 27 Maret 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-17098.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029189.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 serta telah diterima dan dicatat di database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-12746 tanggal 8 April 2013 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0030769. AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 ("**Akta No. 116/2013**") jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.102 tanggal 19 April 2013 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-15909 tanggal 26 April 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038393.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 April 2013 ("**Akta No. 102/2013**")

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 116/2013 juncto Akta No.102/2013, yaitu sebagai berikut :

Keterangan	**Nilai Nominal Rp100,- per saham**		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nominal (Rp)**	**%**
Modal Dasar	**15.000.000.000**	**1.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Gratamulia Pratama	6.088.500.000	608.850.000.000	99,00
Suzanna Tanojo	61.500.000	6.150.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.150.000.000**	**615.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel Saham Biasa Atas Nama	**8.850.000.000**	**885.000.000.000**	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**15.000.000.000**	**1.500.000.000.000**		**15.000.000.000**	**1.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
PT Gratamulia Pratama	6.088.500.000	608.850.000.000	99,00	6.088.500.000	608.850.000.000	82,83
Suzanna Tanojo	61.500.000	6.150.000.000	1,00	61.500.000	6.150.000.000	0,84
Masyarakat	-	-	-	1.200.000.000	120.000.000.000	16,33
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.150.000.000**	**615.000.000.000**	**100,00**	**7.350.000.000**	**735.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**8.850.000.000**	**885.000.000.000**		**7.650.000.000**	**765.000.000.000**	

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

2. PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan dan mencatatkan sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan 5 Juli 2013. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 121 tanggal 24 April 2013, Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 213 tanggal 27 Mei 2013 dan Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 162 tanggal 21 Juni 2013 Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Investama Tbk. yang keduanya dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran Seri I:
1. Kondisi Perekonomian secara makro dan mikro;
2. Prospek usaha Perseroan;
3. Pergerakan harga saham Perseroan dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas Waran Seri I begitu juga sebaliknya bila harga saham Perseroan turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas Waran Seri I.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum diajukan adalah sebesar 34,15% (tiga puluh empat koma satu lima persen). Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**15.000.000.000**	**1.500.000.000.000**		**15.000.000.000**	**1.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
PT Gratamulia Pratama	6.088.500.000	608.850.000.000	82,83	6.088.500.000	608.850.000.000	64,43
Suzanna Tanojo	61.500.000	6.150.000.000	0,84	61.500.000	6.150.000.000	0,65
Masyarakat	1.200.000.000	120.000.000.000	16,33	3.300.000.000	330.000.000.000	34,92
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**7.350.000.000**	**735.000.000.000**	**100,00**	**9.450.000.000**	**945.000.000.000**	**100,00**

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Saham Dalam Portepel	**7.650.000.000**	**765.000.000.000**		5.550.000.000	555.000.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan perubahannya, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

a. Waran Seri I berarti Surat Kepemilikan Waran Seri I yang dikeluarkan oleh PT KSEI yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru sesuai dengan syarat dan ketentuan penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti surat bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri I tersebut.
c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh pemegang Waran Seri I.
d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga yang telah ditetapkan untuk dapat menukarkan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan dan merupakan saham yang disetor penuh dimana pemegangnya akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya.

B. Hak Atas Waran Seri I

Setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Badan Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-*exercise*) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konirmasi Waran Seri I;
- Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang Waran Seri I, jumlah Waran Seri I yang dimiliki, jumlah Waran Seri I yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah

berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

Setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I dengan cara sebagai berikut:

- Bagi Pemegang Waran Seri I yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.
- Bagi Pemegang Waran Seri I dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri I maka untuk pelaksanaan hak Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I

Jangka waktu Waran Seri I adalah tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 pada pukul 16.00 WIB.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

a. Setiap Pemegang Waran Seri I berhak melakukan Pelaksanaan Waran Seri I selama Periode Pelaksanaan Waran Seri I pada jam kerja dengan melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran.

b. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada di luar Penitipan Kolektif adalah sebagai berikut:

   i. Penukaran Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.

   ii. Pada Periode Pelaksanaan Waran Seri I, para pemegang Waran Seri I yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran Seri I wajib membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I kepada Perseroan serta menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang terdiri dari:

      - Permohonan untuk melakukan pelaksanaan (selanjutnya disebut “Formulir Pelaksanaan”) ;
      - Surat Kolektif Waran Seri I asli yang akan dilaksanakan (kedua dokumen ini selanjutnya disebut “Dokumen Pelaksanaan”)
      - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan.
      - Fotokopi identitas Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran Seri I;
      - Asli surat kuasa, jikalau dilakukan dengan kuasa, yang dilampiri dengan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa;
      - Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI, apabila Pemegang Waran Seri I yang melakukan Pelaksanaan Waran Seri I berkeinginan agar Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dimasukkan dalam Penitipan Kolektif.

   iii. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I (selanjutnya disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).

   iv. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

   v. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa berlaku Pelaksanaan tidak dapat lagi melaksanakan hak pelaksanaannya menjadi saham.

   vi. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap keabsahan Waran Seri I, Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan dapat tidaknya pemodal asing melakukan pelaksanaan.

vii. Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada hari kerja selanjutnya harus sudah memberikan keputusan mengenai hal tersebut di atas kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

viii. Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

ix. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran, dimana Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

x. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat syarat dan kondisi dalam Pemberitahuan kepada pemegang Waran Seri I.

xi. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertiikat tersebut maka pemecahan atas sertiikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam syarat dan kondisi prosedur pelaksanaan Waran Seri I.

xii. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

xiii. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia.

xiv. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam syarat dan kondisi penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai risiko pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan syarat dan kondisi pemberitahuan kepada pemegang Waran Seri I.

xv. Setelah tanggal jatuh tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut rugi maupun kompensasi berupa apapun terhadap Perseroan.

c. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif adalah sebagai berikut:

i. Pemegang Waran Seri I memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran dengan menyerahkan Surat Konirmasi Waran Seri I melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;

ii. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I oleh perusahaan efek dan/atau bank kustodian kepada KSEI, maka:

- KSEI akan mendebet Waran Seri I dari masing-masing sub rekening Pemegang Waran Seri I yang memberikan instruksi Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
- segera setelah uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga

Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke Rekening Bank Khusus pada hari yang sama;

iii. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, KSEI akan menyampaikan kepada Pengelolaa Administrasi Waran Seri I dokumen sebagai berikut:
- daftar rincian Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I yang diterima KSEI;
- surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus;
- instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI

iv. 1 (satu) Hari Bursa setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dari KSEI dokumen sebagai tersebut di atas, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

v. Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan Waran Seri I diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I telah dibayar penuh (*in good fund*) dalam Rekening Bank Khusus, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan menerbitkan/ mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke sub rekening Pemegang Waran Seri I yang melakukan Pelaksanaan Waran dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya setelah melakukan pendistribusian Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut kepada Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri I.

F. Pembayaran

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas nama dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan

PT Bank Mayapada International Tbk
Kantor Pusat Operasional, Jakarta
Atas nama PT Victoria Investama Tbk
No.Rek. 100-30-01851-6

Dalam hal pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I kurang dari jumlah yang ditentukan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menolak Pelaksanaan Waran Seri I dan segera mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya lain yang dikeluarkan Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk pengembalian pembayaran tersebut (jika ada).

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/giro/yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Dalam hal pelaksanaan Waran Seri I hanya untuk sebagian jumlah Waran Seri I yang dimiliki oleh Pemegang Waran Seri I terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan.

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan menukarkan Waran Seri I menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga awal Pelaksanaan Waran I adalah sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, harga pelaksanaan dan jumlah Waran seri I, sehingga Waran seri I dapat mengalami

perubahan dimana harga pelaksanaan baru dan Waran seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I akan mengalami pengubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Bila terjadi Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena alasan apapun juga termasuk karena penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (*stock split*)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{harga nominal baru setiap saham}}{\text{harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah waran seri I baru} = \frac{\text{harga nominal lama setiap saham}}{\text{harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A= harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B= jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

b. Perubahan jumlah saham Perseroan sebagai akibat pembagian saham bonus atausaham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan.

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{A}{(A+B)} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{(A+B)}{A} \times Y$$

A = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
B = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian bonus atau saham dividen, atau tambahan saham akibat penggabungan atau peleburan.
X = Harga Awal Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

c. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas.

$$\text{Harga Pelaksanaan Waran Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{C}{(C - D)} \times Y$$

C = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas
X = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
Y = jumlah awal Waran Seri I yang beredar
D = harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)
G = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (Right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di bursa, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang puas harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang disebabkan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dengan baik dan menyetujui keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang dapat membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut, semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Ficomindo Buana Registrar
Mayapada Tower Lt.10 Suite 02 B
Jl.Jend.Sudirman Kav.28
Jakarta 12920
Telepon : (021) 5212316, Fax : (021) 5212320

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagai dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaiman ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan tanggal pelaksanaan.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama masa berlaku Pelaksanaan Waran Seri I Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku. Apabila Perseroan melakukan likuidasi atau dibubarkan, kepada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan Pelaksanaan Waran Seri I akan diberikan kesempatan untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

N. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

O. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

3. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak sebesar 16,33% (enam belas koma tiga puluh tiga persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 6.150.000.000 (enam miliar seratus lima puluh juta) saham atau 83,67% (delapan puluh tiga koma enam puluh tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini. Saham tersebut terdiri dari saham milik PT Gratamulia Pratama sebanyak 6.088.500.000 (enam miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu) saham dan saham milik Suzanna Tanojo sebanyak 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 7.350.000.000 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum ini.

Selain itu sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai saham yang ditawarkan melalui penawaran umum ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Sehubungan dengan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran, berdasarkan Akta No. 116/2013, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp620.000.000.000,- (enam ratus dua puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah); (ii) pengeluaran saham baru yang diambil bagian oleh seluruh pemegang saham secara proporsional dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp615.000.000.000,00 (enam ratus lima belas miliar Rupiah) dengan harga Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, sesuai transaksi tersebut, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.6 Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Lampiran Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-06/PM/2001 maka seluruh saham Perseroan atas nama PT Gratamulia Pratama dan Suzanna Tanojo tidak akan dialihkan kepemilikannya atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp25.620.428.135,- (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) atau sekitar 17,08% (tujuh belas koma nol delapan persen) akan digunakan untuk melunasi *Junior Convertible Loan Agreement* Perseroan. *Junior Convertible Loan Agreement ("JCLA")* diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 9 September 2011. guna melunasi hutang pemegang saham yang telah dikeluarkan sebelumnya sebagai modal disetor VSI pada awal tahun 2011,

   Ketentuan ketentuan yang berlaku dari JCLA tersebut adalah :
   - Junior Convertible Loan ("JCL") antara Perseroan dan Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd.:

Bunga	:	Tanpa Bunga
Jumlah Pinjaman	:	Rp10.660.428.135,-
Jangka Waktu	:	9 September 2011 - 2 Desember 2013
Jaminan	:	sebanyak 236.898.403 Waran Bank Victoria International milik Perseroan yang di peroleh dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ("HMETD") III dan IV BVIC.

   Syarat Kondisi dalam rangka Konversi JCL:
   a. Opsi Terhadap Saham: Perseroan memberikan Hak Opsi kepada Barron untuk mengkonversi pinjaman pokok yang belum terbayar pada waktu kapanpun terhitung sejak Perseroan tidak mempunyai izin sebagai perusahaan sekuritas hingga tanggal 2 Desember 2013 (Jangka Waktu Opsi), dengan harga per saham 1,5 kali dari nilai buku atas saham pada tanggal Perjanjian ini.
   b. Pelaksanaan Opsi Terhadap Saham: Opsi Saham dapat dilaksanakan kapan saja oleh Barron, selama pada jangka waktu opsi dapat menyajikan pemberitahuan tertulis.

   Pelunasan lebih awal Junior Convertible Loan Agreement tersebut telah mendapat persetujuan dari Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd._berdasarkan surat Perseroan tanggal 15 Maret 2013.

   - Junior Convertible Loan ("JCL") antara Perseroan dan Aldo J. Tjahaja ("Aldo")

Bunga	:	Tanpa Bunga
Jumlah Pinjaman	:	Rp14.960.000.000,-
Jatuh Tempo	:	sampai dengan 2 Desember 2013
Jaminan	:	sebanyak 272.000.000 Waran Bank Victoria International milik Perseroan yang di peroleh dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ("HMETD") III dan IV BVIC.

   Syarat Kondisi dalam rangka Konversi JCL
   a. Opsi Terhadap Saham Perseroan: Perseroan memberikan Hak Opsi kepada Bapak Aldo untuk mengkonversi pinjaman pokok yang belum terbayar pada waktu kapanpun terhitung sejak Perseroan tidak mempunyai izin sebagai perusahaan sekuritas hingga tanggal 2 Desember 2013 (Jangka Waktu Opsi), dengan harga Rp 100 (seratus Rupiah) per saham.
   b. Pelaksanaan Opsi Terhadap Saham: Opsi Saham dapat dilaksanakan kapan saja oleh Bapak Aldo, selama pada jangka waktu opsi dapat menyajikan pemberitahuan tertulis.

   Pelunasan lebih awal Junior Convertible Loan Agreement tersebut telah mendapat persetujuan dari Aldo J. Tjahaja_berdasarkan surat Perseroan tanggal 15 Maret 2013.
   Atas rencana pelunasan hutang tersebut, maka berdasarkan surat dari Aldo J. Tjahaja pada tanggal 23 April 2012 dan Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd pada tanggal 24 April 2012 menyatakan tidak akan mengkonversi piutangnya menjadi saham Perseroan.

2. Sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau sekitar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk melakukan setoran modal ke dalam Entitas Anak Perseroan yaitu PT Victoria Securities Indonesia ("VSI") sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham pada nilai nominal yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham. Dimana

selanjutnya oleh VSI akan digunakan untuk ;

a. Sebesar Rp28.000.000.000,- atau sekitar 18,66% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk portofolio obligasi.
b. Sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000,- atau sekitar 3,33% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk portofolio saham.
c. Sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000,- atau sekitar 2,67% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk pembiayaan margin.
d. Sebanyak-banyaknya Rp13.000.000.000,- atau sekitar 8,67% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk transaksi repo.

Berikut adalah proforma VSI setelah mendapatkan tambahan modal yang berasal dari hasil Penawaran Umum Perseroan:

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal			Sesudah Penambahan Modal		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**		**200.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Perseroan	495.000.000	49.500.000.000	99,00	995.000.000	99.500.000.000	99,50
Suzanna Tanojo	5.000.000	500.000.000	1,00	5.000.000	500.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	**500.000.000**	**50.000.000.000**	**100,00**	**1.000.000.000**	**100.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.500.000.000**	**150.000.000.000**		**1.000.000.000**	**100.000.000.000**	

3. Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sekitar 13,33% (tiga belas koma tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk melakukan setoran modal kedalam Entitas Anak Perseroan yaitu PT Victoria Insurance (“VINS”) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham pada nilai nominal yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham. Dimana selanjutnya oleh VINS akan digunakan untuk;
   a. Sebesar Rp2.000.000.000,- atau sekitar 1,33% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk deposito yang digunakan sebagai cadangan apabila terjadi *claim* diluar dugaan.
   b. Sebesar Rp10.000.000.000,- atau sekitar 6,67% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk porfolio obligasi
   c. Sebesar Rp8.000.000.000,- atau sekitar 5,33% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk porfolio saham.

   Berikut adalah proforma VINS setelah mendapatkan tambahan modal yang berasal dari hasil Penawaran Umum Perseroan :

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal			Sesudah Penambahan Modal		
	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**180.000**	**180.000.000.000**		**180.000**	**180.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Perseroan	79.000	79.000.000.000	98,75	99.000	99.000.000.000	99,00
Aldo Jusuf Tjahaja	1.000	1.000.000.000	1,25	1.000	1.000.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	**80.000**	**80.000.000.000**	**100,00**	**100.000**	**100.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**100.000**	**100.000.000.000**		**80.000**	**80.000.000.000**	

4. Sebesar Rp50.889.840.300,- (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) atau sekitar 33,93% (tiga puluh tiga koma sembilan tiga persen) akan digunakan untuk melakukan pelaksanaan atas waran seri III BVIC yang dimiliki oleh Perseroan pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III sebanyak-banyaknya 508.898.403

Waran pada harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per lembar saham. Selanjutnya dana hasil dari pelaksanaan waran tersebut akan oleh BVIC untuk modal kerja.

Berikut adalah proforma BVIC*, setelah dilakukannya pelaksanaan waran seri III oleh Perseroan:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Pelaksanaan Waran		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**14.000.000.000**	**1.400.000.000.000**		**14.000.000.000**	**1.400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Perseroan	2.302.017.500	230.201.750.000	34,86	2.810.915.903	281.091.590.300	39,52
PT Suryayudha Investindo Cipta	418.953.250	41.895.325.000	6,34	418.953.250	41.895.325.000	5,89
PT Nata Patindo	220.000.000	22.000.000.000	3,33	220.000.000	22.000.000.000	3,09
Suzanna Tanojo	882.000.000	88.200.000.000	13,36	882.000.000	88.200.000.000	12,40
Atrium Asia Invesment Management Pte.Ltd	584.723.619	58.472.361.900	8,86	584.723.619	58.472.190.000	8,22
Masyarakat Lainnya	2.195.426.073	219.542.607.300	33,25	2.305.760.576	230.576.057.600	30,87
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	**6.603.120.442**	**660.312.044.200**	**100,00**	**7.112.018.845**	**711.201.884.500**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**7.396.879.558**	**739.687.955.800**		**6.887.981.155**	**688.798.115.500**	

**Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo tanggal 7 Juni 2013.*

5. Sisanya sebesar Rp3.489.731.565 (tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima Rupiah) atau sekitar 2,33% (dua koma tiga tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan antara lain untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan.

   Seluruh dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

   Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam-LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, maka total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,41% (satu koma empat puluh satu persen) dari dana yang diperoleh dari penawaran Saham Perdana yang meliputi:
   1. Biaya Jasa Penjamin Emisi sekitar 0,59% yang terdiri dari:
      a. Biaya Jasa Penyelenggaraan (management fee) sekitar 0,41%;
      b. Biaya Jasa Penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,09% dan
      c. Biaya Jasa Penjualan (selling fee) sekitar 0,09%.
   2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,55% yang terdiridari:
      a. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,32%;
      b. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,15%dan
      c. Biaya jasa Notaris sekitar 0,08%.
   3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,06% yang terdiri dari BAE sekitar 0,05% dan KSEI sekitar 0,01%;
   4. Biaya Pencatatan di Bursa Efek Indonesia sekitar 0,01%; dan
   5. Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan public expose) sekitar 0,20%.

   Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut diatas akan dibayarkan dengan menggunakan kas internal Perseroan.
   Perseroan akan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal untuk setiap transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini.

Perseroan akan melaporkan dan mempertanggung jawabkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.

III. PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (bersama-sama disebut Grup) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan penyajian laporan posisi keuangan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perusahaan pada tahun 2012, penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012, secara prospektif atau retrospektif dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp83.269.794,- ribu yang terdiri dari libilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank	
Pihak berelasi	18.820.723
Pihak ketiga	9.400.000
Utang klaim – pihak ketiga	16.984
Utang reasuransi – pihak ketiga	1.889.342
Utang komisi	
Pihak berelasi	76.938
Pihak ketiga	331.236
Utang lembaga kliring dan penjaminan	3.571.953
Utang nasabah	6.055.869
Utang pajak	967.347
Biaya yang masih harus dibayar	326.306
Liabilitas asuransi	
Estimasi liabilitas klaim	453.198
Premi yang belum merupakan pendapatan	2.695.937
Uang titipan nasabah	
Pihak berelasi	1.357.383
Pihak ketiga	464.774
Liabilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	22.960.000
Pihak ketiga	11.978.683
Utang pembelian kendaraan	
Pihak berelasi	17.522
Pihak ketiga	359.713
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**81.743.908**
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	-
Utang pembelian kendaraan	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	309.194
Liabilitas imbalan kerja	1.216.692
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.525.886**
JUMLAH LIABILITAS	**83.269.794**

1. Utang Bank

Saldo hutang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp28.220.723,- ribu, yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
Pihak berelasi:	
PT Bank Victoria International Tbk	18.820.723
Pihak ketiga	
PT Bank Sinarmas Tbk	9.400.000
Jumlah	28.200.723

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangan-perpanjangan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya, terakhir pada tanggal 20 Desember 2012, PT Bank Victoria International, Tbk (BVIC) setuju untuk merubah fasilitas kredit rekening koran kepada Perseroan yang akan digunakan untuk modal kerja dari semula sebesar Rp20 miliar menjadi sebesar Rp7,5 miliar dan dikenakan tingkat bunga sebesar 12% per tahun (*floating*). Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun sampai dengan 11 Desember 2013 serta dijamin dengan piutang usaha sebesar 150% dari jumlah plafon pinjaman dan jaminan pribadi dari Aldo Jusuf Tjahaja, Direktur Utama Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah saldo terhutang adalah sebesar Rp6.870.527,- ribu.

Berdasarkan perjanjian kredit pada tanggal 24 Januari 2012, BVIC setuju untuk memberikan fasilitas kredit rekening koran kepada VSI, entitas anak, yang akan digunakan untuk modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp 12,5 miliar dan dikenakan tingkat bunga sebesar 12% per tahun (*floating*). Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 24 Januari 2014 serta dijamin dengan piutang usaha sebesar 150% dari jumlah plafon pinjaman dan jaminan pribadi dari Yangky Halim, Direktur VSI. Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah saldo terhutang adalah sebesar Rp 11.950.196,- ribu.

PT Bank Sinarmas Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan-perubahan dan /atau perpanjangan-perpanjangan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya, terakhir pada tanggal 23 Juli 2012, PT Bank Sinar Mas Tbk. setuju untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk *demand loan* yang bersifat *revolving* dan *uncommitted* dengan jumlah maksimum sebesar Rp35 miliar dan dikenakan tingkat bunga sebesar 11,5% per tahun (*subject to review*). Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun sampai dengan 25 Juni 2013 serta dijamin dengan piutang nasabah pihak ketiga dan *reverse repo* sebesar 150% dari jumlah plafon pinjaman, *escrow account* milik Perseroan dan jaminan perusahaan dari PT Gratamulia Pratama, pemegang saham Perseroan.

2. Utang Klaim – pihak ketiga

Utang klaim adalah utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung yang belum dibayar oleh Grup. Utang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar (*claim settled*). Saldo utang klaim - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp16.984,- ribu.

3. Utang reasuransi – pihak ketiga

Utang reasuransi adalah utang kepada reasuradur yang timbul sehubungan dengan liabilitas membayar premi reasuransi setelah dikurangi dengan komisi reasuransi dan klaim reasuransi. Saldo utang reasuransi – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.889.342,- ribu

4. Utang Komisi

Utang komisi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp408.174,- ribu yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
Utang Komisi	
- Pihak berelasi	76.938
- Pihak ketiga	331.236
Jumlah	408.174

5. Utang lembaga kliring dan penjaminan

Saldo utang lembaga kliring dan penjaminan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.571.953,- ribu. Akun ini merupakan penyelesaian efek bersih atas kliring transaksi yang dilakukan Grup melalui PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	*(dalam ribuan Rupiah)*
Utang transaksi bursa	
- T+3	2.979.001
- T+2	592.952
Jumlah	3.571.953

6. Utang nasabah

Utang nasabah non-kelembagaan merupakan utang atas transaksi penjualan portofolio efek oleh nasabah yang belum diselesaikan pembayarannya. Saldo utang nasabah pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp6.055.869,- ribu, yang terdiri dari

Keterangan	*(dalam ribuan Rupiah)*
Nasabah non-kelembagaan – Pihak ketiga	
- Masing-masing lebih atau sama dengan 5% dari jumlah	5.376.511
- Masing-masing dibawah 5% dari jumlah	679.358
Jumlah	6.055.869

7. Utang Pajak

Utang pajak Grup pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp967.347,- ribu yang terdiri dari:

Keterangan	*(dalam ribuan Rupiah)*
Pajak kini	419.972
Pajak pertambahan nilai	75.739
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	42.159
Pasal 21	241.878
Pasal 23	71.291
Pasal 25	29.473
Transaksi penjualan saham	86.835
Jumlah	**967.347**

8. Biaya yang masih harus dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp326.306,- ribu.

9. Liabilitas asuransi

Liabilitas asuransi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.149.135,- ribu yang terdiri dari:

Keterangan	*(dalam ribuan Rupiah)*
Estimasi klaim retensi sendiri	453.198
Premi yang belum merupakan pendapatan	2.695.937
Jumlah	3.149.135

10. Uang titipan nasabah

Utang titipan nasabah merupakan premi yang diterima dimuka atas pertanggungan dengan periode lebih dari satu tahun dan penerimaan premi yang masih dalam proses identifikasi. Uang titipan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.822.157,- ribu yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
Utang Komisi	
- Pihak berelasi	1.357.383
- Pihak ketiga	464.774
Jumlah	1.822.157

11. Liabilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun

Libilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun terdiri atas utang lain-lain dan utang pembelian kendaraan dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp34.938.683,- ribu dengan rincian utang sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
Pihak berelasi	
Aldo Jusuf Tjahaja	14.960.000
Suzanna Tanojo	8.000.000
Jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi	22.960.000
Pihak ketiga	
Barron Ventures Investment Company, Pte, Ltd, Singapura	10.660.428
Pendapatan bunga diterima dimuka	581.667
Lain-lain	736.588
Jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga	11.978.683

b. Utang pembelian kendaraan

Saldo utang lain-lain kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp377.235,- ribu.

12. Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo libilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp309.194,- ribu yang merupakan utang pembelian kendaraan pihak ketiga.

13. Liabilitas imbalan kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.216.692,- ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
Nilai kini liabilitas yang tidak didanai	1.438.822
Biaya jasa lalu yang belum diakui	2.419
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(224.549)
Jumlah	1.216.692

Komitmen dan Kontijensi

Pada tanggal 25 Januari 2011, Abdul Malik Jan melalui Kuasa Hukumnya (“Penggugat”) telah mengajukan gugatan tertulis sehubungan dengan penawaran umum perdana yang dilakukan oleh PT Media Nusantara Citra, Tbk, dimana Perusahaan termasuk salah satu tergugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register perkara No. 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.

Pada tanggal 28 Juni 2011, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengeluarkan Putusan No. 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima eksepsi daripada Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp65.416,- ribu

Pada tanggal 8 Juli 2011, Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kepada Pengadilan Tinggi Jakarta dan telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2011.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding tersebut telah mengeluarkan Putusan No. 15/PDT/2012/PT.DKI tanggal 4 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2011;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150,- ribu

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Nopember 2012. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, proses kasasi masih berlangsung

Pencabutan Negative Covenants

Terdapat transaksi pengikutan atau perjanjian-perjanjian yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik terutama terkait pembatasan pembagian deviden (negative covenants) namun sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mencabut pembatasan pembagian deviden tersebut berdasarkan surat sebagai berikut:

a. surat dari Perseroan No. 030/VI/DIR/IV/2013 tanggal 05 April 2013 yang ditujukan dan telah disetujui kembali oleh PT Bank Sinarmas Tbk. perihal Perjanjian Fasilitas Demand Loan (*Revolving)* Rp22.500.000.000,- antara PT Bank Sinarmas Tbk. dan PT Victoria Investama Tbk.
b. surat dari Perseroan No. 031/VI/DIR/IV/2013 tanggal 05 April 2013 yang ditujukan dan telah disetujui kembali oleh BVIC perihal Perjanjian Pinjaman Rekening Koran Rp7.500.000.000,- antara PT Bank Victoria International Tbk. dan PT Victoria Investama Tbk.
c. surat dari Perseroan No. 032/VI/DIR/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 yang ditujukan dan telah disetujui kembali oleh Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd. perihal *Junior Convertible Loan Agreement dated September 9, 2011.*
d. surat dari Perseroan No. 033/VI/DIR/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 yang ditujukan dan telah disetujui kembali oleh Aldo Jusuf Tjahaja perihal *Junior Convertible Loan Agreement dated September 9, 2011– Prepayment Request.*

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain, selain liabilitas yang diungkapkan dalam Prospektus ini dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang disajikan dalam Prospektus ini.

Manajemen dalam hal ini bertindak dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi liabilitas-liabilitasnya yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta disajikan dalam Prospektus ini.

Perseroan telah melunasi seluruh liabilitas yang telah jatuh tempo. Tidak terdapat liabilitas yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Perseroan atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan tindakan yang telah atau akan diambil oleh Perseroan.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan atau PT. Victoria Investama Tbk. (d/h P.T. Victoria Sekuritas d/h PT Tata Sekuritas Maju) didirikan berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Oktober 1989 dari Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., notaris di Serang, dengan nama PT Tata Sekuritas Maju. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-10137.HT.01.01-Th.89 tanggal 2 Nopember 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3537.

Sampai dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 51 tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai antara lain perubahan nama Perseroan serta maksud dan tujuan Perseroan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-36672-AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial di bidang perantara efek dan penjaminan emisi efek pada tahun 1989. Pada tanggal 27 Mei 2010, Perseroan melakukan penyertaan saham pada PT Asuransi Umum Centris (sekarang bernama PT Victoria Insurance). Pada tahun 2011 Perseroan mulai melakukan reorganisasi kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek kepada Entitas Anak-nya yaitu PT Victoria Securities Indonesia. Kemudian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Kep-177/BL/2012 dan Kep-178/BL/2012 tanggal 10 April 2012, Perseroan telah memperoleh pencabutan izin usaha di bidang perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dan menghentikan kegiatan usahanya sebagai perusahaan efek, dan mulai beroperasi secara komersial di bidang penyediaan jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi dan melakukan investasi dalam penyertaan saham baik di bidang pasar modal maupun bukan pasar modal. Terhitung sejak tanggal 5 Juli 2012, Perseroan merubah namanya dari PT Victoria Sekuritas menjadi PT Victoria Investama. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Senayan City, Panin Tower Lantai 8, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta. Dan sejak tanggal 5 Juli 2012 Perseroan mulai beroperasi dalam bidang penyediaan jasa konsultansi bisnis, manajemen dan administrasi. dan melakukan investasi dalam penyertaan saham baik di bidang pasar modal maupun bukan pasar modal.

Perseroan dan Entitas Anak yang berusaha di bidang keuangan (jasa konsultan bisnis, sekuritas dan asuransi) sangat tergantung dengan kondisi ekonomi dan pasar khususnya ekonomi dan pasar Indonesia. Perseroan melihat sepanjang tahun 2012 pasar modal Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Sepanjang year to date per 6 Desember 2012, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan indeks obligasi pemerintah (Surat Utang Negara/SUN) melalui Infovesta Government Bond Index (IGBI) masing-masing 12,31% dan 8,48%. Bahkan sepanjang periode tersebut, IHSG berkali-kali mencetak rekor tertinggi baru, terakhir di level 4.375,17 per 26 November 2012. Selain itu juga masih banyak terdapat hal-hal positif yang dapat diharapkan masih dapat menjadi sentimen positif kondisi ekonomi Indonesia, seperti fundamental ekonomi domestik yang cukup solid dengan bertahan di atas level 6% karena lebih dari 90% ditopang oleh sektor Konsumsi dan Investasi terkait dengan rencana perbaikan infrastruktur oleh pemerintah dalam jangka panjang melalui program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), masih optimisnya kepercayaan para pelaku bisnis dan masyarakat pada prospek ekonomi Indonesia yang terlihat pada indeks keyakinan konsumen dan bisnis, hingga persepsi resiko investor asing pada surat utang pemerintah Indonesia yang semakin membaik melalui angka Credit Default Swap (CDS) tenor 5 tahun yang kini berada di level 120-an basis poin. (sumber kompas.com tanggal 6 Maret 2013).

Faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan adalah kondisi perekonomian ekonomi makro. Seperti layaknya Industri jasa keuangan pada umumnya maka kondisi keuangan Perseroan sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi makro yang berdampak negatif terutama kenaikan tingkat suku bunga. Dimana bila terjadi peningkatan tingkat suku bunga, hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan pengembalian kewajiban dari sejumlah nasabah, sehingga dapat mengakibatkan Perseroan mengalami peningkatan tunggakan pembayaran dari nasabah-nasabahnya.

Selain itu, Perseroan juga mungkin akan mengalami kesulitan mencari sumber pendanaan, mengingat pada saat terjadi gejolak perekonomian maka kontraksi ekonomi dapat mengakibatkan menurunnya perputaran dana dan likuiditas di pasar uang. Hal tersebut dapat mempengaruhi kerugian finansial bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut Perseroan berusaha untuk terus mencari sumber dana yang memiliki sifat *inelastic* terhadap gejolak suku bunga seperti ekuitas, misalnya melalui Penawaran Umum Perdana Saham serta mengurangi mismatching antara aset dan liabilitas.

Perseroan menjalankan usaha di bidang investasi selalu berhubungan dengan kepentingan umum, dan diatur secara ketat oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2012 Perseroan dan Entitas Anak mempunyai utang berbunga yaitu dari utang bank sebanyak Rp28.220.723,- ribu dengan bunga berkisar antara 11,5% sampai dengan 12,5%. Utang berbunga tersebut adalah 33,89% dari total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak. Sedangkan jumlah surat berharga yang Perseroan dan Entitas Anak miliki terdiri dari penyertaan saham pada entitas asosiasi PT Bank Victoria Internasional sebesar Rp533.252.744,- ribu, deposito sebesar Rp33.904.913,- ribu dan obligasi dan saham sebesar Rp99.714.275,- ribu. Kisaran suku bunga untuk deposito dan obligasi masing-masing adalah 5,50% sampai dengan 7,50% dan 11,60% sampai dengan 13,39%. Dibandingkan tahun 2011, nilai penyertaan saham pada entitas asosiasi meningkat 21%, nilai deposito meningkat 239%, efek tersedia untuk dijual dan efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi menurun 38,3%. Perubahan nilai surat berharga ini turut mempengaruhi peningkatan total aset Perusahaan dan Entitas Anak dari Rp751.899.759,- ribu pada 2011 menjadi Rp772.642.322,- ribu pada 2012. Kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak tidak terlalu terpengaruh dengan perubahan nilai tukar karena kegiatan operasional maupun penempatan portofolio baik surat berharga serta utang berbunga adalah dalam denominasi mata uang rupiah, namun perubahan tingkat suku bunga dapat berdampak pada keputusan investasi Perseroan dalam menempatkan dananya pada instrumen investasi yang dipandang lebih menguntungkan

Industri tempat dimana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya merupakan salah satu industri dengan tingkat persaingan yang relatif tinggi. Namun hingga saat ini, Perseroan belum dapat menemukan data industri yang memuat data-data kompilasi untuk perusahaan yang bergerak di bidang investasi *investment holding*.

Dalam kerangka meningkatkan kinerja Perseroan dan Entitas Anak di masa yang akan datang, Perseroan menerapkan sejumlah strategi dalam pengembangan sebagai perusahaan jasa keuangan yang menyediaan solusi keuangan terpadu. Konsep bisnis yang dikembangkan adalah konsep *one-stop financial solutions* melalui Entitas Anak yang terdiri dari VSI yang berusaha di bidang Perantara Pedagang Efek dan Penjaminan Emisi Efek, VINS yang berusaha di bidang asuransi umum dan VMI yang ditargetkan akan bergerak dalam bidang manajer investasi serta Entitas Asosiasi BVIC yang bergerak di bidang perbankan.

Dalam mencapai target tersebut, Perseroan menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- Memperkuat struktur permodalan di masing-masing Entitas Anak dan Entitas Asosiasi agar dapat berkompetisi di industrinya masing - masing.
- Melakukan koordinasi dengan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi agar tercipta sinergi aliansi yang menguntungkan Perseroan dan para pemangku kepentingan.

Perubahan pada nilai tukar tidak akan berhubungan langsung terhadap kinerja Perseroan karena Perseroan hampir tidak memiliki eksposur dengan mata uang asing. Akan tetapi perubahan pada nilai surat berharga dan tingkat suku bunga akan memberikan dampak yang relatif besar terhadap Perseroan. Hal tersebut disebabkan sebagian besar portofolio Perseroan dialokasikan pada surat berharga yang memiliki imbal hasil yang sangat bergantung pada fluktuasi tingkat suku bunga. Untuk itu Perseroan memiliki beberapa kebijakan investasi guna mengurangi dampak atas fluktuasi suku bunga tersebut

seperti hanya melakukan investasi pada surat berharga yang memiliki *rating investment grade* serta penempatan pada saham yang masuk dalam kategori *blue chip*. Dalam melakukan kegiatan usaha REPO dan marjin, maka produk tersebut hanya akan diberikan pada investor yang memiliki *track record* baik dan memiliki jaminan yang memadai sehingga mengurangi risiko yang akan terjadi bila pada hal fluktuasi tingkat suku bunga.

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

3. KEUANGAN

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang dibahas oleh manajemen adalah Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan penyajian laporan posisi keuangan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perusahaan pada tahun 2012, penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 secara prospektif atau retrospektif dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akhyadi Wadisono dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut sehubungan dengan pencatatan investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak, penyesuaian nilai wajar aset keuangan, perhitungan pajak tangguhan dan goodwill, serta reklasifikasi akun-akun tertentu.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Berikut adalah tabel ikhtisar laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tahun-tahun pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
Jumlah Pendapatan Usaha	54.575.015	56.799.315	40.721.538
Jumlah Beban Usaha	(23.903.205)	(30.399.794)	(11.776.439)
Jumlah Laba Usaha	30.671.810	23.399.521	28.945.099
Jumlah Penghasilan Lain-lain - Bersih	66.927.865	62.991.032	34.915.011
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	97.599.675	89.390.553	63.860.110
Beban Pajak Penghasilan	(899.596)	(386.461)	(352.052)
Laba Sebelum Laba Entitas Anak Pra Akuisisi	96.700.079	89.004.092	63.508.058
Laba Entitas Anak Pra Akuisisi	-	-	(95.415)
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lainnya	13.553.920	31.762.971	(9.059.637)
Jumlah Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	**110.253.999**	**120.767.063**	**54.353.006**

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
Jumlah Aset	772.642.322	751.899.760	719.108.171
Jumlah Liabilitas	83.269.794	172.781.230	370.006.705
Jumlah Ekuitas	689.372.528	579.118.530	349.101.466

3.1. PERTUMBUHAN PENDAPATAN USAHA

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
Pendapatan hasil investasi	20.838.676	16.627.517	21.048.970
Pendapatan kegiatan penjaminan emisi dan penjualan efek	17.596.711	20.859.933	3.449.343
Pendapatan bunga - bersih	9.366.706	8.960.865	8.285.651
Pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek	4.678.956	7.082.666	7.702.906
Pendapatan premi - bersih	1.692.652	2.741.912	234.668
Pendapatan komisi - bersih	401.314	526.422	-
Jumlah Pendapatan Usaha	**54.575.015**	**56.799.315**	**40.721.538**

Pendapatan Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp54.575.015,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp2.224.300,- ribu atau turun 3,92% bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp56.799.315,- ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena turunnya pendapatan dari kegiatan penjaminan emisi dan penjualan efek sebesar Rp3.263.221,- ribu atau turun 15,64% dari Rp20.859.932,- ribu di tahun 2011 menjadi hanya sebesar Rp17.596.710,- ribu di tahun 2012. Turunnya pendapatan usaha berasal dari kegiatan penjaminan emisi dan penjualan efek dikarenakan proyek penjaminan yang dilakukan pada tahun 2012 memiliki rata-rata nilai transaksi yang lebih rendah dari tahun 2011, walaupun terjadi peningkatan frekuensi penjaminan dimana telah terjadi sebanyak 5 kali penjaminan emisi efek dan pada tahun 2012 dibandingkan 3 kali penjaminan emisi efek pada tahun sebelumnya. Selain itu juga disebabkan karena turunnya pendapatan dari kegiatan perantara perdagangan efek sebesar Rp2.403.710,- ribu atau turun 33,94% dari Rp7.082.666,- ribu di tahun 2011 menjadi Rp4.678.956,- ribu di tahun 2012. Turunnya pendapatan dari kegiatan perantara perdagangan efek dikarenakan turunnya nilai perdagangan efek oleh nasabah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp56.779.315,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp16.077.777,- ribu atau naik 39,48% bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang hanya sebesar Rp40.721.538,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena naiknya pendapatan dari kegiatan penjaminan emisi dan penjualan efek sebesar Rp17.410.590,- ribu atau naik 504,75% dari Rp3.449.343,- ribu menjadi Rp20.859.932,- ribu di tahun 2011. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya kegiatan pada jasa penasehat keuangan. Selain itu juga terjadi kenaikan dari pendapatan premi yang berasal dari VINS, Entitas Anak sebesar Rp2.507.244,- ribu atau naik 1.068,42% dari Rp234.667,- ribu di tahun 2010 menjadi Rp2.741.912,- ribu di tahun 2011. Kenaikan pendapatan

premi pada tahun 2011 dibanding pada tahun 2010 terjadi karena VINS baru menjalankan kegiatan usahanya secara optimal pada tahun 2011 setelah di akuisisi oleh Perseroan. Kenaikan Pendapatan dari kegiatan penjaminan emisi disebabkan meningkatnya kegiatan pada jasa penasehat keuangan, yang disebabkan oleh Entitas Anak menjadi penjamin emisi dari penerbitan obligasi PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk sebesar Rp250.000.000,- ribu dan penerbitan obligasi PT Serasi Autoraya sebesar Rp900.000.000.- ribu.

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Usaha
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2010, 2011 dan 2012
(dalam ribuan Rupiah)

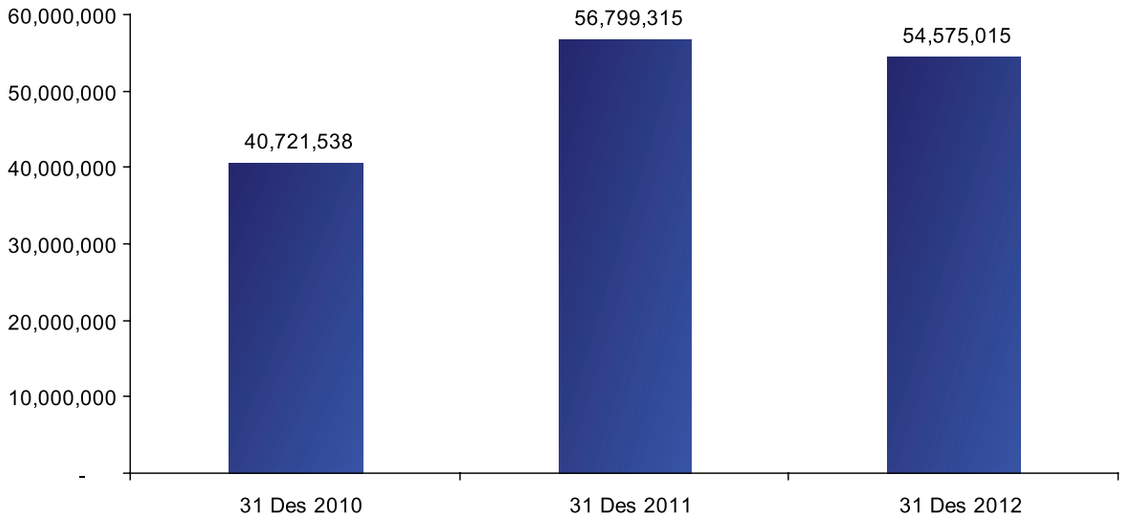

3.2. PERTUMBUHAN BEBAN USAHA

(dalam ribuan Rupiah)

Beban Usaha	31 Desember		
	2012	2011	2010
Beban kepegawaian	12.406.746	8.767.093	3.439.912
Penyusutan	2.146.090	1.439.054	780.772
Pajak-pajak	1.864.167	989.822	259.589
Sewa	1.824.604	1.671.967	976.487
Administrasi dan umum	1.453.004	2.109.552	563.079
Pemasaran	649.042	3.963.082	3.523.366
Beban klaim	617.406	382.593	26.873
Beban penjaminan dan penjualan emisi efek	605.297	7.716.518	33.451
Telekomunikasi	396.019	553.597	362.254
Transaksi bursa	371.826	260.865	223.246
Jasa profesional	278.067	309.334	240.750
Representasi dan sumbangan	277.991	400.045	256.500
Transportasi dan perjalanan dinas	245.449	535.940	441.311
Pemeliharaan dan perbaikan	217.196	820.177	464.502
Asuransi	90.468	22.655	81.242
Perijinan	58.512	177.400	94.496
Lain-lain	401.321	280.100	8.609
Jumlah Beban Usaha	**23.903.205**	**30.399.794**	**11.776.439**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah beban usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp23.903.205,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp6.496.589,- ribu atau turun 21,37% bila dibandingkan dengan jumlah beban usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp30.399.794,- ribu. Penurunan beban usaha tersebut terutama disebabkan karena turunnya beban penjaminan dan penjualan emisi efek sebesar Rp7.111.221,- ribu dari Rp7.716.518,- ribu di tahun 2011 menjadi Rp605.297,- ribu di tahun 2012. Turunnya beban penjaminan dan penjualan emisi efek disebabkan karena projek yang dikerjakan pada tahun 2012 memiliki marjin keuntungan yang lebih baik dari projek tahun 2011. Selain itu juga terjadi penurunan pada beban pemasaran sebesar Rp3.314.040,- ribu dari Rp3.963.082,- ribu pada tahun 2011 menjadi Rp649.042,- ribu di tahun 2012. Hal tersebut disebabkan penurunan beban *referral fee* yang diberikan kepada pihak ketiga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah beban usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp30.399.794,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp18.623.355,- ribu atau naik sebesar 158,14% bila dibandingkan dengan Jumlah beban usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp11.776.439,- ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan karena naiknya beban penjaminan dan penjualan emisi efek sebesar Rp7.683.067,- ribu atau naik 22.968,12% dari Rp33.451,- ribu di tahun 2010 menjadi Rp7.716.518,- ribu di tahun 2011. Naiknya beban penjaminan dan penjualan emisi efek berhubungan langsung dengan kenaikan pada kegiatan penjaminan dan penjualan emisi efek. Selain itu juga terjadi kenaikan beban kepegawaian sebesar Rp5.327.181,- ribu atau naik 154,86% dari Rp3.439.912,- ribu di tahun 2010 menjadi Rp8.767.093,- ribu di tahun 2011. Kenaikan beban kepegawaian lebih disebabkan adanya rekrutmen karyawan tetap untuk mengerjakan projek penjaminan dan penjualan emisi efek.

3.3. PERTUMBUHAN LABA

LABA USAHA

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Laba usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp30.671.810,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp4.272.289,- ribu atau naik 16,18% bila dibandingkan dengan laba usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp26.399.521,- ribu. Meskipun pada tahun 2012 Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan dalam hal jumlah pendapatan usaha yang diperoleh namun Perseroan dan Entitas Anak dapat menurunkan beban usaha yang lebih besar dibandingkan penurunan jumlah pendapatan usaha. Sehingga Perseroan dan Entitas Anak masih memperoleh peningkatan laba usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Laba usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp26.399.521,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp2.545.578,- ribu atau turun 8,79% bila dibandingkan dengan laba usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp28.945.099,- ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena naiknya beban usaha Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp18.623.355,- ribu walaupun terjadi kenaikan pendapatan usaha sebesar Rp16.077.777,- ribu, penurunan laba usaha tersebut lebih disebabkan karena kenaikan pada beban penjaminan dan penjualan emisi efek yang seiring dengan meningkatnya pendapatan.

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - *bersih*

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah penghasilan lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp66.927.865,- mengalami kenaikan sebesar Rp3.936.834,- ribu atau naik 6,25% bila dibandingkan dengan jumlah penghasilan lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp62.991.031,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena naiknya bagian laba bersih BVIC, sebesar Rp2.680.149,- ribu atau naik 3,72% dari Rp72.085.985,- ribu dan penurunan beban bunga dan keuangan selama tahun berjalan. Kenaikan laba bersih Entitas Asosiasi tersebut berasal dari meningkatnya kinerja usaha Entitas Asosiasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah penghasilan lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tangal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp62.991.032,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp28.076.021,- ribu atau naik 80,41% bila dibandingkan dengan Jumlah penghasilan lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tangal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp34.915.011,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena naiknya bagian laba bersih BVIC sebesar Rp28.302.920,- ribu dari Rp43.783.065,- ribu menjadi Rp72.085.985,-. Kenaikan laba bersih entitas asosiasi tersebut berasal dari baiknya kinerja usaha Entitas Asosiasi Perseroan yaitu BVIC.

PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp110.253.999,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp10.513.065,- ribu atau turun 8,71% bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp120.767.063,- ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penyesuaian nilai wajar efek tersedia untuk dijual - *bersih* sebesar Rp26.165.798,- ribu dari Rp23.047.522,- ribu menjadi (Rp3.118.275,- ribu).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp120.767.063,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp66.414.057,- ribu atau naik 122,19% bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp54.353.006,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan penyesuaian nilai wajar efek tersedia untuk dijual – *bersih* sebesar Rp22.698.522,- ribu atau naik 6.503,87% dari Rp349.000,- ribu di tahun 2010 menjadi Rp23.047.522,- ribu di tahun 2011. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya perubahan pada metode perhitungan harga saham BVIC yang sebelumnya menggunakan *cost method* menjadi *equity method* yang berimbas pada harga pasar saham Entitas Asosiasi yakni BVIC yang berada pada level dibawah nilai buku dinilai pada nilai buku. Selain itu jumlah pendapatan komprehensif naik disebabkan karena naiknya bagian pendapatan komprehensif lainnya dari BVIC sebesar Rp18.124.085,- ribu dari (Rp9.408.637,- ribu) di tahun 2010 menjadi Rp8.715.448,- ribu di tahun 2011.

Grafik Pertumbuhan Laba (Rugi) Usaha, Beban Usaha dan Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2010, 2011 dan 2012
(dalam ribuan Rupiah)

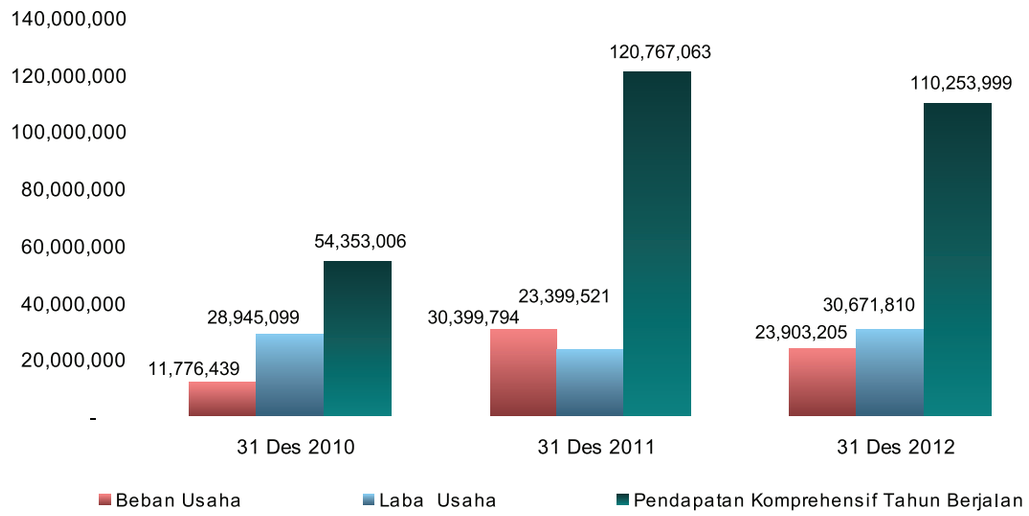

3.4. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

3.4.1. PERTUMBUHAN ASET

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas			
Pihak berelasi	4.350.943	5.845.684	15.176.477
Pihak ketiga	5.343.646	20.816.539	4.608.033
Investasi jangka pendek			
Pihak berelasi	20.120.163	72.483.759	300.000
Pihak ketiga	113.499.027	99.175.719	144.127.901
Piutang *reverse repo* - bersih	29.516.667	19.744.444	130.874.388
Piutang premi dan reasuransi			
Pihak berelasi	592.376	841.531	-
Pihak ketiga	1.861.593	3.387.941	201.244
Aset reasuransi	2.121.123	2.400.063	698.045
Piutang jasa penasehat keuangan	2.022.727	-	-
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	6.647.203	34.748.903	30.399.488
Piutang nasabah	13.195.625	14.906.605	36.928.918
Rekening nasabah	-	12.421.998	57.967.475
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	2.500.000	2.500.000	-
Pihak ketiga	22.941.654	3.279.099	1.956.965
Uang muka dan biaya dibayar di muka	437.358	1.080.565	594.070
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	-	576.522	-
Jumlah Aset Lancar	**225.150.105**	**294.209.372**	**423.833.004**

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi jangka panjang			
Pihak berelasi	533.252.774	441.828.644	281.842.792
Pihak ketiga	205.000	205.000	188.000
Aset pajak tangguhan	875.123	680.468	319.233
Properti investasi – bersih	1.080.008	1.091.432	-
Aset tetap – bersih	6.538.843	8.485.942	7.521.741
Goodwill	5.103.149	5.103.149	5.103.149
Uang jaminan	437.320	295.752	300.252
Jumlah Aset Tidak Lancar	**547.492.217**	**457.690.387**	**295.275.167**
JUMLAH ASET	**772.642.322**	**751.899.759**	**719.108.171**

Pertumbuhan Jumlah Aset

Pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp772.642.322,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp20.742.563,- ribu atau naik 2,76% bila dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp751.899.759,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan nilai investasi jangka panjang pada PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) Entitas Asosiasi sebesar 20,69% dari Rp441.828.644 ribu pada tahun 2011 menjadi Rp533.252.775,- ribu pada tahun 2012. Peningkatan jumlah aset juga disebabkan adanya kenaikan piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp19.662.555,- ribu atau 599,63% dari Rp3.279.099,- ribu pada 31 Desember 2011 menjadi Rp22.941.654,- ribu pada 31 Desember 2012.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp751.899.759,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp32.791.588,- ribu atau naik 4,56% bila dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp719.108.171,- ribu. Peningkatan jumlah aset terutama disebabkan peningkatan nilai investasi jangka panjang pada BVIC sebesar 56,76% dari Rp281.842.792,- ribu pada tahun 2010 menjadi Rp441.828.644,- ribu pada tahun 2011. Namun kenaikan tersebut diimbangi dengan penurunan sebesar 84,91% pada piutang reverse-repo dari Rp130.874.388,- ribu pada tahun 2010 menjadi Rp19.744.444,- ribu pada tahun 2011.

Kas dan Setara Kas

Tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2011

Jumlah kas dan setara kas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp9.694.589,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp16.967.634,- ribu atau turun 63,64% bila dibandingkan dengan jumlah kas dan setara kas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp26.662.223,- ribu. Penurunan tersebut dikarenakan telah jatuh temponya deposito berjangka pada PT Bank Capital Indonesia, Tbk pada tahun 2012 yang digunakan untuk pemberian piutang lain-lain kepada pihak ketiga.

Tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2010

Jumlah kas dan setara kas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp26.662.223,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp6.877.713,- ribu atau naik 34,76% bila dibandingkan dengan jumlah kas dan setara kas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2010 Rp19.784.510,- ribu. Kenaikan tersebut terutama karena naiknya kas dan setara kas pihak ketiga

sebesar Rp16.208.506,- ribu atau naik 351,74% dari Rp4.608.033,- ribu pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp20.816.539,- ribu pada tanggal 31 Desember 2011 dimana pada tahun 2011 dilakukan penempatan deposito berjangka pada PT Bank Capital Indonesia, Tbk. sehubungan penjualan portofolio namun Perseroan belum mengalokasikan dana hasil penjualan tersebut pada portofolio investasi lain.

Investasi Jangka Pendek

Tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2011

Jumlah investasi jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp133.619.190,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp38.040.288,- ribu atau turun 22,16% bila dibandingkan dengan jumlah investasi jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp171.659.478,- ribu. Penurunan ini disebabkan karena turunnya investasi jangka pendek pihak berelasi sebesar Rp52.363.596,- ribu atau turun 72,24% dari Rp72.483.759,- ribu pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp20.120.163,- ribu pada tanggal 31 Desember 2011 yang berasal dari penjualan dan/atau pencairan Obligasi korporasi.

Tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2010

Jumlah investasi jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp171.659.478,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp27.231.577,- ribu atau naik 18,85% bila dibandingkan dengan jumlah investasi jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2010 yang berjumlah Rp144.427.901,- ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan karena naiknya investasi jangka pendek pihak berelasi sebesar Rp72.183.759,- ribu atau naik 24.061,25% dari Rp300.000,- ribu pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp72.483.759,- ribu pada tanggal 31 Desember 2011 yang terutama berasal dari penempatan pada Obligasi korporasi.

Piutang Reverse Repo – *bersih*

Tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2011

Jumlah piutang reverse repo Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp29.516.667,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp9.772.223,- ribu atau naik 49,49% bila dibandingkan dengan jumlah piutang reverse repo Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp19.744.444,- ribu. Naiknya piutang reverse repo – bersih dikarenakan Perseroan melakukan kegiatan pada instrumen yang memberikan imbal hasil yang lebih baik.

Tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2010

Jumlah piutang reverse repo Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp19.744.444,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp111.129.944,- ribu atau turun 84,91% bila dibandingkan dengan jumlah piutang reverse repo Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp130.874.388,- ribu. Penurunan piutang reverse repo tersebut dikarenakan piutang tersebut telah dilunasi.

Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

Tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2011

Saldo piutang lembaga kliring dan penjaminan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp6.647.203,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp28.101.700,- ribu atau turun 80,87% bila dibandingkan dengan saldo piutang lembaga kliring dan penjaminan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp34.748.903,- ribu. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai transaksi penjualan saham pada akhir tahun 2012 dibanding pada tahun 2011.

Tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2010

Saldo piutang lembaga kliring dan penjaminan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp34.748.903,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp4.349.415,- ribu atau naik 14,31% bila dibandingkan dengan saldo piutang lembaga kliring dan penjaminan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp30.399.488,- ribu. kenaikan tersebut disebabkan karena naiknya nilai transaksi penjualan saham pada akhir tahun 2011 dibanding pada tahun 2010.

Piutang Lain-lain

Tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2011

Jumlah piutang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp25.441.654,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp19.662.555,- ribu atau naik 340.24% bila dibandingkan dengan jumlah piutang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 sejumlah Rp5.779.099,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena naiknya piutang lain-lain dari pihak ketiga sebesar Rp19.662.555,- ribu atau naik 599,63% dari Rp3.279.099,- ribu pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp22.941.654,- ribu pada tanggal 31 Desember 2011 dimana Perseroan memberikan pinjaman sebesar Rp20.000.000,- ribu kepada PT Nusamakmur Ciptasentosa pada bulan Desember 2012.

Tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2010

Jumlah piutang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp5.779.099,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp3.822.134,- ribu atau naik 195,31% bila dibandingkan dengan jumlah piutang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp1.956.965,- ribu hal tersebut terutama timbul sehubungan dengan belum disetornya modal ke Entitas Anak, VMI.

Investasi jangka Panjang

Tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2011

Jumlah investasi jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp533.457.774,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp91.424.130,- ribu atau naik 20,68% bila dibandingkan dengan jumlah investasi jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 yang berjumlah Rp442.033.644,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan laba bersih dan bagian pendapatan komprehensif lain dari BVIC.

Tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2010

Jumlah investasi jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp442.033.644,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp160.002.852,- ribu atau naik 56,73% bila dibandingkan dengan jumlah investasi jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2010 yang berjumlah Rp282.030.792,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan penambahan investasi dan peningkatan laba bersih dari BVIC.

3.4.2. PERTUMBUHAN LIABILITAS

Perseroan sangat terpengaruh atas besaran tingkat suku bunga dan perubahannya terutama terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban, serta efek kenaikan dan penurunan tingkat suku bunga akan langsung terlihat dampaknya pada laporan laba rugi Perseroan. Tidak terdapat pengakuan bunga terhutang pada tanggal laporan keuangan karena sebagian besar pinjaman dalam bentuk rekening koran

Perseroan memiliki perjanjian kredit yang dapat menyebabkan adanya peningkatan atau penurunan likuiditas, yaitu perjanjian dengan:

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit pada tanggal 20 Desember 2012, Perseroan memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Victoria International Tbk (BVIC), sebesar Rp7.500.000.000,- dan dikenakan tingkat bunga sebesar 12% per tahun (*floating*). Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun sampai dengan 11 Desember 2013. Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah saldo terutang adalah sebesar Rp6.870.527.371,-.

Berdasarkan perjanjian kredit pada tanggal 24 Januari 2012, BVIC setuju untuk memberikan fasilitas kredit rekening koran kepada VSI, entitas anak, yang akan digunakan untuk modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp12.500.000.000,- dan dikenakan tingkat bunga sebesar 12,00% per tahun (*floating*). Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 24 Januari 2014. Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah saldo terutang adalah sebesar Rp11.950.195.988,-

Tujuan kedua pinjaman tersebut diatas adalah untuk modal kerja, dimana dengan adanya perjanjian tersebut dapat meningkatkan likuiditas Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-sehari namun bila pinjaman tersebut dilunasi tidak akan mempengaruhi tingkat likuiditas Perseroan.

PT Bank Sinarmas, Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 23 Juli 2012, PT Bank Sinarmas, Tbk setuju untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk *demand loan* yang bersifat *revolving* dan *uncommitted* dengan jumlah maksimum sebesar Rp 35 miliar dan dikenakan tingkat bunga sebesar 11,5% per tahun (*subject to review*). Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun sampai dengan 25 Juni 2013. Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah saldo terutang adalah sebesar Rp9.400.000.000,-

Tujuan ketiga pinjaman tersebut diatas adalah untuk modal kerja dimana dengan adanya perjanjian tersebut dapat meningkatkan likuiditas Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-sehari namun bila pinjaman tersebut dilunasi tidak akan mempengaruhi tingkat likuiditas Perseroan

Hingga prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki kebijakan lindung nilai, karena Perseroan hampir tidak memiliki *exposure* pada mata uang asing dan nilainya tidak material dibanding total aset Perseroan.

Hingga saat ini Perseroan belum berkeinginan untuk mendapatkan hutang dalam mata uang asing. Hal ini disebabkan karena pada umumnya transaksi yang dilakukan dalam denominasi mata uang Rupiah. Dikarenakan seluruh pinjaman Perseroan merupakan pinjaman dalam bentuk mata uang Rupiah. Sehubungan dengan hal tersebut, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pengaturan lindung usaha (*hedging*) atas kewajiban dan biaya-biaya tersebut

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi Liabilitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank			
Pihak berelasi	18.820.723	20.000.000	19.978.600
Pihak ketiga	9.400.000	60.300.000	108.000.000
Utang klaim – pihak ketiga	16.984	160.142	572
Utang reasuransi – pihak ketiga	1.889.342	3.001.224	4.551

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
Utang komisi			
Pihak berelasi	76.938	124.917	-
Pihak ketiga	331.236	289.964	-
Utang repo - *bersih*	-	-	121.911.422
Utang lembaga kliring dan penjaminan	3.571.953	14.879.528	36.864.159
Utang nasabah	6.055.869	32.596.168	28.363.317
Rekening nasabah	-	4.223.834	17.079.140
Utang pajak	967.347	1.134.245	571.631
Biaya yang masih harus dibayar	326.306	1.828.017	1.343.568
Liabilitas asuransi			
Estimasi liabilitas klaim	453.198	500.158	382
Premi yang belum merupakan pendapatan	2.695.937	3.425.482	1.955.037
Uang titipan nasabah			
Pihak berelasi	1.357.383	446.075	-
Pihak ketiga	464.774	299.101	-
Liabilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	22.960.000	1.500.000	-
Pihak ketiga	11.978.683	59.267	33.188.697
Utang pembelian kendaraan			
Pihak berelasi	17.522	18.764	-
Pihak ketiga	359.713	325.346	16.569
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**81.743.908**	**145.112.232**	**369.277.645**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang – *setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun*			
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	-	14.960.000	-
Pihak ketiga	-	10.660.428	-
Utang pembelian kendaraan			
Pihak berelasi	-	23.544	-
Pihak ketiga	309.194	485.633	36.852
Liabilitas imbalan kerja	1.216.692	1.539.392	692.208
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.525.886**	**27.668.997**	**729.060**
Jumlah Liabilitas	**83.269.794**	**172.781.229**	**370.006.705**

Pertumbuhan Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 83.269.794,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp89.511.435,- ribu atau turun 51,81% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp172.781.229,- ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan turunnya utang bank Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp52.079.277,- ribu atau turun 64,86% dari Rp80.300.000,- ribu di tahun 2011 menjadi hanya sebesar Rp28.220.723,- ribu dikarenakan adanya pelunasan utang bank PT Bank Pan Indonesia, Tbk pada tanggal 18 Oktober 2012.

Tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2010

Jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp172.781.229,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp197.225.476,- ribu atau turun 53,3% bila

dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp370.006.705,- ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya pembayaran utang bank dari sebesar Rp127.978.600,- ribu menjadi Rp80.300.000,- ribu atau turun sebesar 37,25%, dan turunnya utang Repo sebesar Rp121.911.422,- ribu atau turun sebanyak 100% dikarenakan Perseroan telah melunasi utang tersebut.

Utang Bank

Tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2011

Jumlah utang bank Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp28.220.723,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp52.079.277,- ribu atau turun 64,86% bila dibandingkan dengan jumlah utang bank Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp80.300.000,- ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pelunasan utang bank PT Bank Pan Indonesia, Tbk pada tanggal 18 Oktober 2012

Tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2010

Jumlah utang bank Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp80.300.000,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp47.678.600,- ribu atau turun 37,25% bila dibandingkan dengan jumlah utang bank Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp127.978.600,- ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran sebagian utang pada PT Bank Sinarmas, Tbk sebesar Rp28.000.000,- ribu, PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp10.700.000,- ribu dan pelunasan utang pada PT Bank Capital Indonesia, Tbk sebesar Rp9.000.000,- ribu.

Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan

Tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2011

Utang lembaga kliring dan penjaminan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.571.953,- mengalami penurunan sebesar Rp11.307.575,- ribu atau turun 75,99% bila dibandingkan dengan utang lembaga kliring dan penjaminan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp14.879.528,- ribu. Penurunan tersebut disebabkan karena turunnya transaksi pembelian saham oleh nasabah pada akhir tahun 2012.

Tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2010

Utang lembaga kliring dan penjaminan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp14.879.528,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp21.984.631,- ribu atau turun 59,64% bila dibandingkan dengan utang lembaga kliring dan penjaminan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp36.864.159,- ribu. Penurunan tersebut disebabkan karena turunnya transaksi pembelian saham oleh nasabah pada akhir tahun 2011.

Utang Nasabah

Tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2011

Utang nasabah Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp6.055.869,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp26.540.299,- ribu atau turun 81,42% bila dibandingkan dengan utang nasabah Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp32.596.168,- ribu. Utang nasabah tersebut adalah utang nasabah non kelembagaan yang merupakan utang atas transaksi penjualan portofolio efek oleh nasabah yang belum diselesaikan pembayarannya. Penurunan tersebut disebabkan karena turunnya transaksi penjualan saham oleh nasabah pada akhir tahun 2012.

Tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2010

Utang nasabah Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp32.596.168,- ribu mengalami kenaikkan sebesar Rp4.232.851,- ribu atau naik 14,92% bila dibandingkan dengan utang nasabah Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp28.363.317,- ribu. Kenaikan tersebut disebabkan karena naiknya transaksi penjualan saham oleh nasabah pada akhir tahun 2011.

Utang Lain-lain Jangka Pendek

Tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2011

Utang lain lain jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebanyak Rp34.938.683,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp33.379.416,- ribu atau naik 2.140,71% bila dibandingkan dengan utang lain lain jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 yang berjumlah Rp1.559.267,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan Perseroan mengadakan perjanjian pinjaman sebesar Rp8.000.000,- ribu dengan salah satu pemegang saham Perseroan dimana pinjaman tersebut digunakan untuk penambahan modal kerja dalam rangka kelancaran kegiatan usaha Perseroan. Selain itu kenaikan utang lain-lain jangka pendek juga disebabkan utang lain-lain jangka panjang kepada salah satu direksi Perseroan dan Barron Ventures Investment Company, Pte, LTd, Singapura yang akan jatuh tempo dalam jangka satu tahun kedepan sehingga utang tersebut direklasifikasi menjadi utang lain-lain jangka pendek

Tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2010

Utang lain-lain jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebanyak Rp1.559.267,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp31.629.430,- ribu atau turun 95,3% bila dibandingkan dengan utang lain-lain jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp33.188.697,- ribu. Penurunan tersebut disebabkan adanya pelunasan utang kepada PT Emperor Finance Indonesia sebesar Rp30.000.000,- ribu dan utang kepada PT Tridaya Investindo sebesar Rp3.130.000,- ribu pada tahun 2011.

3.4.3. PERTUMBUHAN EKUITAS

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010:

(dalam ribuan Rupiah, kecuali jumlah saham dalam satuan penuh)

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
Modal saham – nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal dasar – 6.200.000.000 saham tahun 2012 dan 2011 dan 2.000.000.000 saham tahun 2010			
Modal ditempatkan dan disetor – 2.600.000.000 saham tahun 2012 dan 2011 dan 1.550.000.000 saham tahun 2010	260.000.000	260.000.000	155.000.000
Komponen ekuitas lainnya	64.135.368	50.581.448	18.818.477
Saldo Laba	360.446.806	263.811.037	174.852.778
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemiliki entitas induk	684.582.174	574.392.485	348.671.255
Kepentingan non-pengendali	4.790.354	4.726.045	430.211
Jumlah Ekuitas	**689.372.528**	**579.118.530**	**349.101.466**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp689.372.528,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp110.253.998,- ribu atau naik 19,04% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp579.118.530,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp110.189.689,- ribu atau naik 19,18% dari Rp574.392.485,- ribu pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp684.582.174,- ribu di tanggal 31 Desember 2012. Selain itu juga terjadi kenaikan saldo laba sebesar Rp96.635.769,- ribu atau naik 36,63% dari Rp263.811.037,- ribu pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp360.446.806,- ribu pada tanggal 31 Desember 2012 yang berasal dari kenaikan jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan terutama timbul sehubungan peningkatan dari bagian laba bersih dan pendapatan komprehensif lain dari Entitas Asosiasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp579.118.530,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp230.017.064,- ribu atau naik 65,89% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp349.101.466,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena naiknya ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp225.721.230,- ribu atau naik 64,74% bila dari Rp348.671.255,- ribu pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp574.392.485,- ribu. Selain itu juga terdapat kenaikan setoran modal sebesar Rp105.000.000,- ribu atau naik 67,74% dari Rp155.000.000,- ribu pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp260.000.000,- ribu pada tanggal 31 Desember 2011 dan kenaikan jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan terutama timbul sehubungan peningkatan dari bagian laba bersih dan pendapatan komprehensif lain dari Entitas Asosiasi dan meningkatnya keuntungan dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual yang dicatat sebagai komponen ekuitas lainnya.

Grafik Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2010, 2011 dan 2012
(dalam ribuan Rupiah)

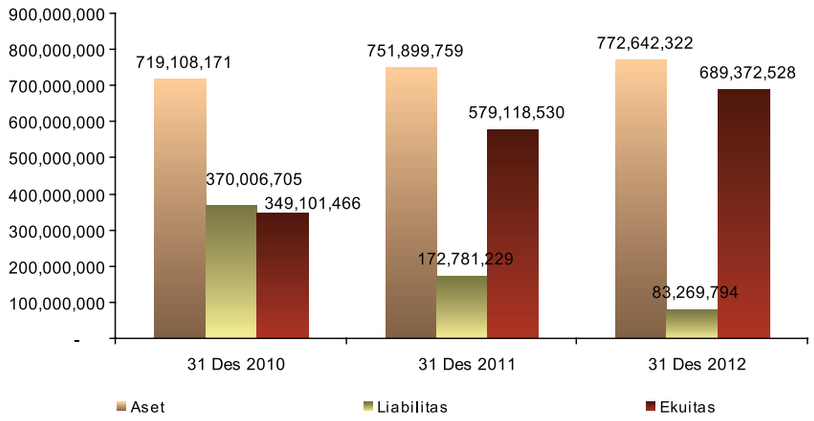

3.5. IMBAL HASIL ASET

Imbal hasil aset sebagai penunjuk tingkat produktivitas dari rata-rata aset Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba bersih, dimana akan dihitung laba bersih tahun berjalan dibagi dengan jumlah aset Perseroan.

Nilai imbal hasil aset dari Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebesar masing-masing 12,52%, 11,84% dan 8,82%.

Kenaikan imbal hasil aset di tahun 2012, 2011 dan 2010 menggambarkan meningkatnya kinerja Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba bersih.

3.6. IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas adalah suatu parameter yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba dari modal atau ekuitas yang ditanamkan dalam Perseroan. Rasio ini diperoleh dengan membagi pendapatan komprehensif tahun berjalan dengan ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebesar 14,03%, 15,37% dan 18,16%.

Tren penurunan imbal hasil di tahun 2012 terjadi disebabkan oleh karena meningkatnya komponen ekuitas lain yang berasal dari bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan keuntungan dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual, sedangkan penurunan imbal hasil di tahun 2011, selain dari berasal dari meningkatnya komponen ekuitas lain yang berasal dari bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan keuntungan dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual juga berasal dari penambahan modal disetor yang dilakukan oleh pemegang saham.

3.7. LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS

Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi seluruh Liabilitas jangka pendeknya diukur dengan perbandingan antara aset lancar dengan Liabilitas lancar, dan ini seringkali disebut juga dengan rasio lancar dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Likuiditas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 2,80 kali, 2,04 kali, dan 1,15 kali.

Tren peningkatan likuiditas di tahun 2012, 2011 dan 2010 terjadi disebabkan oleh meningkatnya modal sendiri yang dimiliki oleh Perseroan dan peningkatan kemampuan kinerja Perseroan untuk menghasilkan laba usaha , sehingga Perseroan dan Entitas Anak mempunyai kemampuan untuk melunasi sebagian besar liabilitasnya.

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi seluruh Liabilitasnya baik Liabilitas lancar maupun kewajiban tidak lancarnya. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur solvabilitas adalah membandingkan jumlah liabilitas dengan modal sendiri, dan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

Dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan modal sendiri, maka pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 diperoleh rasio masing-masing sebesar 0,12 kali, 0,3 kali dan 1,06 kali.

Tren penurunan solvabilitas ekuitas terjadi pada tahun 2012 terjadi disebabkan oleh karena pelunasan sebagian besar utang, sedangkan penurunan solvabilitas ekuitas di tahun 2011, selain dari berasal dari pelunasan sebagian besar utang juga berasal dari penambahan modal disetor yang dilakukan oleh pemegang saham.

Sedangkan solvabilitas Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan perbandingan jumlah Liabilitas dengan jumlah aset untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 0,11 kali, 0,23 kali dan 0,51 kali.

Tren penurunan solvabilitas aset di tahun 2012, 2011 dan 2010 terjadi pada tahun 2012 terjadi disebabkan oleh karena pelunasan sebagian besar utang dan penambahan modal disetor yang dilakukan oleh pemegang saham.

3.8. ARUS KAS

(dalam ribu Rupiah)

	31 Desember		
	2012	**2010**	**2011**
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(19.318.410)	36.462.265	(6.493.372)
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	56.843.896	(68.523.775)	(91.455.024)
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(54.493.118)	38.939.222	115.490.677

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp19.318.410,- ribu sebagian besar digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp21.497.237,- ribu, pembayaran lain-lain sebesar Rp20.812.791,- ribu dan untuk pembayaran kepada nasabah sebesar Rp16.631.155,- ribu. Sementara itu, penerimaan operasional sebagian berasal dari penerimaan dari lembaga kliring dan penjaminan sebesar Rp16.794.125,- ribu, penerimaan jasa penjaminan emisi dan penjualan efek sebesar Rp15.573.983,- ribu, penerimaan bunga sebesar Rp11.022.828,- ribu dan penerimaan premi sebesar Rp10.396.698,- ribu.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp36.462.265,- ribu. Arus kas sebagian besar berasal dari penjualan piutang *reverse repo* sebesar Rp109.785.331,- ribu, penerimaan dari nasabah sebesar Rp58.945.335,- ribu dan penerimaan jasa penjaminan emisi dan penjualan efek sebesar Rp20.859.932,- ribu. Sementara itu pengeluaran arus kas untuk aktivitas operasi sebagian besar digunakan untuk pembayaran utang *repo* sebesar Rp119.872.500,- ribu dan pembayaran kepada lembaga kliring dan penjaminan sebesar Rp26.334.046,- ribu.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp6.493.372,- ribu. Arus kas sebagian besar digunakan untuk pembelian piutang *reverse repo* sebesar Rp99.890.887,- ribu dan pembayaran kepada nasabah sebesar Rp38.080.433,- ribu. Sementara itu, penerimaan arus kas dari aktivitas operasi sebagian berasal dari perolehan utang *repo* sebesar Rp119.872.500,- ribu, penerimaan kegiatan perantara perdagangan efek sebesar Rp7.702.905,- ribu dan penerimaan bunga sebesar Rp6.869.047,- ribu.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp56.843.896,-. Arus kas sebagian besar diperoleh dari pencairan efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sebesar Rp58.345.392,- ribu, pencairan efek tersedia untuk dijual sebesar Rp23.422.696,- ribu. Sementara itu arus kas aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk penempatan deposito berjangka sebesar Rp26.504.913,- ribu dan penempatan efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sebesar Rp12.214.735,- ribu.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp68.523.775,- ribu. Arus kas sebagian besar digunakan untuk penempatan efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sebesar Rp87.482.072,- ribu, penambahan investasi jangka panjang sebesar Rp79.201.419,- ribu dan

penempatan efek tersedia untuk dijual sebesar Rp29.570.286,- ribu. Sementara itu arus kas yang diperoleh untuk aktivitas investasi sebagian besar berasal dari pencairan efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sebesar Rp125.762.394,- ribu.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp91.455.024,- ribu. Arus kas sebagian besar digunakan untuk penempatan efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sebesar Rp90.372.813,- ribu, penempatan efek tersedia untuk dijual sebesar Rp20.000.000,- ribu dan penambahan investasi jangka panjang sebesar Rp15.000.020,- ribu. Sementara itu arus kas yang diperoleh untuk aktivitas investasi sebagian besar berasal dari pencairan efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sebesar Rp38.514.167,- ribu dan penjualan investasi jangka panjang sebesar Rp13.843.650,- ribu.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp54.493.118,- ribu. Arus kas sebagian besar digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar Rp52.079.277,- ribu. Sementara itu, arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebagian besar berasal dari penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp6.500.000,- ribu.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp38.939.222,- ribu. Arus kas sebagian besar berasal dari penyetoran modal dari pemegang saham sebesar Rp105.000.000,- ribu. Sementara itu, arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebagian besar digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar Rp47.678.600,- ribu.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp115.490.677,- ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ini sebagian besar berasal dari penerimaan utang bank sebesar Rp103.578.600,- ribu. Sementara itu arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebagian besar digunakan untuk pembayaran bunga sebesar Rp6.178.844,- ribu.

3.9. BELANJA MODAL

Tabel dibawah ini menyajikan rincian pengeluaran investasi sesuai dengan periode masing-masing:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2012	**2011**	**2010**
Kendaraan	293.216	3.543.437	2.616.675
Renovasi Bangunan Sewa	-	713.021	3.454.867
Peralatan Kantor	97.996	739.615	1.269.714
Perlengkapan Kantor	-	485.223	841.584
Total	391.212	5.481.297	8.182.840

Sumber dana belanja modal tersebut diatas adalah dari dana internal Perseroan yaitu dari kas yang berasal dari kegiatan operasional dalam denominasi mata uang Rupiah sehingga tidak dibutuhkan adanya transaksi lindung nilai.

4. MANAJEMEN RISIKO

Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia.

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Aset dan liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga terutama terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan utang nasabah dan utang bank. Kebijakan Perseroan dan Entitas Anak adalah melakukan efisiensi penggunaan pinjaman dari bank dan melakukan investasi secara berhati-hati pada instrumen keuangan dengan tingkat bunga tetap yang memberikan imbal hasil yang memadai.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak sebagai akibat fluktuasi nilai tukar berasal dari rasio aset dibandingkan dengan liabilitas dalam mata uang asing.

Kebijakan manajemen risiko Perseroan dan Entitas Anak untuk meminimumkan dampak risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing adalah dengan menyeimbangkan nilai aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan tujuan untuk menghindari risiko kerugian dari perubahan nilai tukar mata uang asing.

Risiko pasar

Perseroan dan Entitas Anak terekspos dengan risiko pasar sehubungan dengan usaha yang dijalankan Entitas Anak yaitu usaha asuransi kerugian (VINS) dan usaha sekuritas (VSI). VINS memiliki dan menggunakan berbagai instrumen keuangan dalam mengelola usahanya. Sebagai bagian dari usaha asuransi, VINS menerima premi dari para pemegang polis dan menginvestasikan dana tersebut dalam berbagai jenis portofolio investasi. Hasil portofolio investasi inilah yang pada akhirnya menutup klaim para pemegang polis di kemudian hari. Sedangkan, VSI terekspos terhadap risiko pasar terutama muncul dari *counterparty* yang gagal memenuhi liabilitasnya atau melalui kesalahan perdagangan dan kesalahan lainnya. Dalam transaksi perdagangan di bursa, VSI bertindak sebagai prinsipal dan kemudian menovasi kontrak tersebut ke nasabah. Kegagalan nasabah menerima perdagangan akan menyebabkan VSI terkena risiko pasar. Selain itu, VSI juga menghadapi risiko pasar terkait investasi pada aset keuangan. Oleh karena nilai wajar dari portofolio investasi tergantung pada pasar keuangan, yang mana dapat berubah dari waktu ke waktu, entitas anak memiliki eksposur risiko pasar. Dalam rangka meminimalkan dampak perubahan pasar keuangan ini, entitas anak mendiversifikasi portofolionya dan memonitor berbagai pengukuran risiko, yang didasarkan atas durasi, sensitivitas dan rujukan yang disetujui Dewan Direksi.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perseroan dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk nasabah individu dan memantau exposur terkait dengan batasan-batasan tersebut. Perseroan dan Entitas Anak melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak yang diakui dan kredibel. Perseroan dan Entitas Anak memiliki kebijakan untuk semua pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi terlebih dahulu. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang ragu-ragu.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Perseroan dan Entitas Anak menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek. Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal laporan ini memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi liabilitas jangka pendek. Dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan dan Entitas Anak memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Entitas Anak dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perseroan dan Entitas Anak juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang mereka.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul sehubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Risiko operasional sesuai dengan kegiatan operasional Perseroan dan Entias Anak. Risiko Operasional selengkapnya dapat dibaca pada bab 5 mengenai Risiko Usaha. Untuk mengatasi risiko operasional tersebut Perseroan dan Entitas Anak berusaha untuk menjaga ketentuan ketentuan yang dipenuhi dalam industri Keuangan, dimana untuk perusahaan Sekuritas adalah menjaga MKBD setiap saat sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Untuk perusahaan asuransi harus menerapkan metode Risk Based Capital yang secara hukum metode ini telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan untuk perbankan dengan tetap menerapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka sebagai implementasi atas PBI dapat membangun budaya risiko dan menerapkannya dalam seluruh aktivitas operasional.

Manajemen Risiko Modal

Perseroan dan Entitas Anak berupaya untuk mencapai struktur modal yang optimal dalam mencapai tujuan usaha mereka, termasuk mempertahankan rasio modal yang sehat dan peringkat yang kuat, dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Entitas anak, VSI, diwajibkan untuk memelihara persyaratan Minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) seperti yang disebutkan dalam peraturan Bapepam-LK No.V.D.5 dan peraturan Bapepam-LK No.X.E.1, yang antara lain menentukan MKBD untuk perusahaan efek yang beroperasi sebagai perantara perdagangan efek dan penjamin emisi sebesar Rp 25 miliar. Jika hal ini tidak dipantau dan disesuaikan, tingkat modal kerja sesuai peraturan dapat berada di bawah jumlah minimum yang ditetapkan oleh regulator, yang dapat mengakibatkan berbagai sanksi mulai dari denda sampai dengan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha

Untuk mengatasi risiko ini, VSI terus mengevaluasi tingkat kebutuhan modal kerja berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang modal kerja bersih yang dipersyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang. VSI telah memenuhi persyaratan MKBD pada tanggal 31 Desember 2012 dan mempunyai modal disetor di atas ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 153/KMK.010/2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek. Selanjutnya, sehubungan dengan permodalan Entitas Anak, VINS, yang bergerak di bidang asuransi kerugian, telah dicanangkan bahwa modal disetor akan ditingkatkan mulai tahun 2013 sehingga jumlah ekuitas akan mencapai lebih dari Rp100,- miliar.

V. RISIKO USAHA

Sebelum melakukan investasi pada saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam saham mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Untuk itu calon investor agar membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha yang dihadapi Perseroan maupun Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh risiko tersebut mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan termasuk kinerja operasional dan kinerja keuangan. Dan karenanya hal tersebut mungkin dapat berdampak secara langsung terhadap penurunan harga saham Perseroan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian atas investasi saham.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO PERSEROAN

1. Risiko Nama Baik dan *Image* Perusahaan

Sebagai perusahaan yang salah satu kegiatan usahanya di bidang *advisory*, nama baik dan *image* Perseroan harus dapat dijaga dengan baik secara konsisten. Hal ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan kepada Perseroan mengenai seluruh informasi (baik teknis maupun strategis) bisnis pelanggan. Apabila terjadi rusaknya nama baik dan *image* Perseroan, maka akan butuh waktu yang lama untuk membangun kembali bisnis Perseroan sekaligus mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan atau calon pelanggan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi eksistensi serta mengganggu kelangsungan hidup Perseroan. Rusaknya nama baik dan *image* Perseroan dapat diakibatkan dari berbagai hal, yaitu antara lain:

- Kekeliruan dalam pemberian *advice*
- Tersebarnya informasi bisnis pelanggan yang seharusnya menjadi rahasia
- Keterbatasan kemampuan teknis dan analisa para *technical advisor*

2. Risiko kesalahan dalam investasi/menganalisa peluang bisnis

Sebagai perusahaan investasi, Perseroan akan selalu mencari peluang-peluang bisnis baru yang diperkirakan akan memberikan keuntungan optimal. Ada risiko bahwa Perseroan ternyata salah memilih suatu bisnis sehingga tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dampak risiko kesalahan dalam menganalisa peluang bisnis bagi kinerja Perseroan antara lain:

(i) tidak tercapainya pendapatan yang diproyeksikan,

(ii) *Break even point* atau titik impas investasi yang lebih panjang dari yang diperkirakan sehingga meningkatkan biaya (*cost of fund*).

Kesalahan dalam menganalisa ini antara lain disebabkan karena asumsi yang dipergunakan dalam menyusun studi kelayakan tidak akurat.

3. Risiko Sebagai Perusahaan Induk

Sebagai Perusahaan Induk, pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Entitas Anak. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, pendapatan Perseroan juga akan menurun.

4. Risiko Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang investasi, adanya perusahaan sejenis untuk memperebutkan pangsa pasar yang akan menimbulkan tingkat persaingan yang ketat antara perusahaan sejenis sehingga dapat berakibat menurunnya tingkat pendapatan Perseroan.

B. RISIKO ENTITAS ANAK

i. PT Victoria Securities Indonesia ("VSI")

1. Risiko Penghentian Ijin Usaha

Ijin merupakan suatu persyaratan mutlak bagi suatu kegiatan usaha. VSI memperoleh ijin usaha yang dikeluarkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia dan ijin Menteri Keuangan Republik Indonesia. Apabila VSI gagal atau lalai dalam memenuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, maka berpotensi mengakibatkan terjadinya penghentian sementara atau pencabutan ijin usahanya. Kelalaian atau kegagalan tersebut diantaranya VSI lalai menjaga minimum MKBD sesuai Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, lalai menjaga perilaku untuk terus mengikuti Peraturan Bapepam dan LK No V.G.1 dan peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan VSI dalam menjalankan usaha. Kelalaian atau kegagalan ini dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha VSI, jika terjadi penurunan pendapatan di VSI maka akan mengganggu laba bersih Perseroan.

2. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul sehubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Risiko operasional sesuai dengan kegiatan operasional VSI sehari-hari adalah:

a. Perdagangan Efek

Risiko dari perdagangan efek ini adalah kemungkinan terjadinya ketelambatan pembayaran dalam akumulasi jumlah yang signifikan oleh nasabah yang menyebabkan penurunan dalam kinerja keuangan VSI yakni Modal Kerja Besih Disesuaikan (MKBD). Hal tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya suspensi perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia akibat tidak terpenuhinya syarat MKBD yang ditetapkan.

b. Penjaminan Emisi Efek

Dalam menjalan usaha jasa penjaminan emisi efek, VSI harus mengikat diri berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dimana VSI berjanji untuk membeli semua efek berdasarkan pada jumlah pesanan yang masuk melalui VSI pada saat periode bookbuilding, apabila pada saat jadwal pembayaran terdapat investor yang mengundurkan diri maka kewajiban pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab VSI. Bila porsi penjaminan efek tersebut dalam jumlah yang besar maka akan menimbulkan problem likuiditas karena VSI harus menyediakan alokasi dana sesuai dengan jumlah nama investor yang masuk. Pembelian ini jika dalam nilai yang besar akan dapat menimbulkan masalah bagi likuiditas VSI dan dapat berdampak bagi pendapatan VSI apabila harga efek yang sudah dibeli tersebut mengalami penurunan harga, sehingga mengakibatkan VSI mengalami kerugian.

c. Penyelesaian Transaksi Efek

Penyelenggara bursa melakukan ketentuan denda dan suspensi perdagangan atas keterlambatan dalam penyelesaian transaksi efek. Keterlambatan diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan sistem, keterlambatan dalam kliring, cidera janji dari pembeli atau penjual dan sebagainya. Apabila hal-hal tersebut diatas dialami oleh VSI dapat mengakibatkan potensi kerugian pada Perseroan dan/atau VSI.

d. Perdagangan Marjin

VSI juga menyelenggarakan perdagangan marjin sebagaimana yang umumnya diselenggarakan oleh perantara pedagang efek lainnya. Yang dimaksud dengan perdagangan marjin adalah kegiatan pembiayaan kepada nasabah atas transaksi pembelian saham oleh nasabah, dimana VSI melakukan pembiayaan sejumlah tertentu dari nilai pembelian saham tertentu berdasarkan nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah sebelum transaksi dilakukan. Risiko dari kegiatan pembiayaan pembelian efek saham timbul ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya ketika fasilitas tersebut jatuh tempo. Dalam kondisi tersebut, kewajiban nasabah akan menjadi faktor pengurang MKBD. Bila nilai kewajiban nasabah tersebut cukup besar, maka hal ini berpotensi mengurangi kecukupan MKBD sesuai kebijakan yang berlaku.

3. **Risiko Pasar**
   Risiko ini timbul dikarenakan pergerakan tingkat bunga atau harga yang berlaku di pasar terhadap nilai suatu aset yang dikelola VSI di dalam portofolio balik untuk perdagangan maupun untuk investasi. Kegagalan dalam mengantisipasi risiko pasar ini dapat menimbulkan potensi kerugian finansial bagi VSI.

4. **Risiko Persaingan Usaha**
   Pasar modal adalah industri yang akan terus berkembang di masa mendatang mengingat pasar modal merupakan salah satu pilihan alternatif tempat berinvestasi yang semakin diminati oleh masyarakat. Dengan adanya prospek tersebut, semakin banyak perusahaan baik lokal atau asing yang berminat untuk turut berpartisipasi dalam industri pasar modal. Bila VSI melakukan kesalahan dalam mengambil strategi untuk menghadapi persaingan, hal tersebut akan berdampat negatif terhadap pendapatan VSI.

5. **Risiko Teknologi**
   Perkembangan usaha perusahaan efek sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan efek menjadikan teknologi sebagai salah satu kunci keunggulan kompetitif dalam memenangkan persaingan. Perusahaan efek dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan serta kepuasan bagi para nasabah yang semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan perusahaan efek. Ketidakmampuan VSI dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dapat menyebabkan hilangnya kesempatan menarik nasabah potensial dan berpindahnya nasabah-nasabah yang sudah ada kepada perusahaan efek lainnya. Hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan VSI.

6. **Risiko Perekonomian**
   Kondisi perusahaan efek sensitif terhadap perubahan perekonomian baik nasional maupun internasional. Kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan dapat menurunkan minat investor dalam melakukan investasi di pasar modal sehingga dapat memberi dampat negatif terhadap pendapatan VSI.

7. **Risiko Kebijakan Pemerintah**
   VSI sebagai perusahaan efek merupakan media perantara untuk berinvestasi bagi masyarakat yang berarti bahwa kepentingan umum selalu dilibatkan dalam segala hal. Kegiatan usaha VSI diatur secara ketat oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan VSI dalam mengantisipasi peraturan-peraturan baru yang ditetapkan Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha VSI, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja VSI.

ii. <u>PT Victoria Insurance (“VINS”)</u>

1. **Risiko Nama Baik dan *Image* Perusahaan**
   Sebagai perusahaan asuransi, nama baik dan *image* VINS harus dapat dijaga dengan baik secara konsisten. Risiko ini sangat berhubungan ketat dengan kinerja operasional VINS sebagai perusahaan penyedia jasa asuransi. Apabila terjadi rusaknya nama baik dan *image* VINS, maka akan butuh waktu yang lama untuk membangun kembali bisnis VINS sekaligus mendapatkan kepercayaan dari klien dan atau calon klien, yang pada akhirnya akan mempengaruhi eksistensi serta mengganggu kelangsungan hidup VINS. Rusaknya nama baik dan *image* Perseroan dapat diakibatkan dari berbagai hal, yaitu antara lain:
   - Keluhan klien karena kesalahpahaman dengan pihak asuransi
   - Ketidakmampuan VINS dalam membayar klaim
   - Polis asuransi yang terlalu membingungkan

2. **Risiko Operasional**
   Sebagai perusahaan asuransi, kemampuan dalam mengelola pertanggungan, cashflow, portofolio, polis dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan operasional merupakan hal yang sangat penting bagi VINS, agar tetap dapat melayani kebutuhan klien dengan baik, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan klien dan membentuk track record yang baik. Kesalahan dalam menjalankan kegiatan operasional tentunya akan berdampak buruk bagi

VINS, walaupun tergantung dari tingkat materialnya kesalahan tersebut. Misalnya kesalahan dalam menempatkan portfolio pada instrumen yang kurang likuid sehingga menghambat arus kas dan menyebabkan VINS terlambat dalam hal membayar klaim, akumulasi dari keterlambatan tersebut dapat mengakibatkan kepercayaan klien berkurang yang pada akhirnya akan membuat VINS sulit untuk mendapatkan klien baru sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan VINS sendiri.

3. **Risiko Gugatan Klaim Asuransi**
   Sebagai asuransi kerugian, risiko yang dihadapi VINS adalah memberi ganti kerugian apabila telah terjadi peristiwa yang dipertanggungkan yang menimpa tertanggung sebesar kerugian yang diderita dengan maksimum sebesar jumlah yang Ielah disepakati bersama sebagai harga pertanggungan. Jumlah penggantian kerugian yang dapat diterima oleh tertanggung relatif tinggi, apabila dibandingkan dengan premi yang dibayarkannya. Apabila terjadi beberapa klaim dengan akumulasi jumlah klaim yang besar dari sejumlah tertanggung dalam waktu yang bersamaan atau relatif bersamaan, hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan VINS, dalam hal ini arus kas VINS.

4. **Risiko Sumber Daya Manusia**
   Dalam industri asuransi, sumber daya manusia sangat berperan dalam menjaga kelangsungan usaha. Industri asuransi merupakan bisnis kepercayaan, sehingga perlu untuk mempunyai sumber daya manusia yang professional dan memiliki *soft competencies* yang prima. Apabila tidak mempunyai sumber daya manusia yang handal, maka hal ini dapat mengakibatkan benturan proses bisnis internal dan eksternal. Adanya ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, perancangan kode etik dalam bisnis asuransi, apabila VINS tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka akan dapat mempengaruhi pendapatan VINS.

5. **Risiko Persaingan**
   Dengan semakin banyaknya pelaku bisnis di bidang asuransi kerugian yang dimiliki oleh kelompok usaha yang besar/kuat, maka dengan sendirinya mengakibatkan pula semakin tinggi persaingan pada bisnis asuransi kerugian. Sejalan dengan itu terjadi pula persaingan yang kurang sehat di pasar asuransi, antara lain penurunan tarif premi, potongan harga lebih besar dan perluasan jaminan. Sebagai akibatnya apabila hal ini terjadi dan berkelanjutan dalam waktu yang relatif lama, maka akan memberikan dampak penurunan atas pemasaran produk asuransi VINS yang pada akhirnya dapat menurunkan laba VINS.

6. **Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah**
   Perubahan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah dalam bidang industri asuransi yang bisa terjadi dari waktu ke waktu ada yang dapat mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha VINS yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan VINS.

7. **Risiko Investasi**
   Sesuai himbauan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, VINS melakukan investasi dalam berbagai bentuk, seperti deposito, obligasi, penyertaan saham dalam perusahaan lain, serta bentuk-bentuk investasi lainnya. Apabila terjadi penurunan suku bunga, penurunan harga obligasi atau penurunan kinerja dan laba perusahaan di mana VINS melakukan investasi, hal ini dapat mempengaruhi pendapatan investasi VINS yang selanjutnya menurunkan kinerja keuangan VINS secara umum.

8. **Risiko Teknologi**
   Perkembangan teknologi pada saat ini memungkinkan untuk mengelola data dan administrasi atau *customer database* yang cepat dan akurat. Dengan semakin tingginya persaingan antar pelaku bisnis asuransi kerugian, maka teknologi menjadi suatu hal yang mendasar untuk meningkatkan produktivitas dan efesiensi kerja serta melaksanakan prinsip kepuasan pelanggan. Apabila VINS tidak mengikuti dan melakukan pengembangan teknologi, maka dapat menurunkan pelayanan kepada tertanggung yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja VINS.

9. Risiko Ekonomi

Faktor risiko yang berasal dari luar perusahaan antara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial dan politik baik nasional maupun internasional yang dapat berakibat kurang baik bagi dunia usaha pada umumnya. Apabila terjadi penurunan kondisi perekonomian dan mengingat industri asuransi kerugian bagi sebagian masyarakat di Indonesia pada saat ini belum merupakan kebutuhan primer, maka akan mempengaruhi pemasaran produk VINS yang pada akhirnya dapat menurunkan laba VINS.

10. Risiko Valuta Asing

Sehubungan dengan adanya sebagian risiko yang dijamin dalam mata uang asing, maka apabila terjadi perubahan pada kurs mata uang asing terhadap rupiah akan memberatkan pembayaran klaim yang harus dilakukan dalam mata uang asing tersebut sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi laba VINS, walaupun pada saat ini *exposure* VINS pada mata uang asing masih sangat kecil sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja secara keseluruhan.

C. RISIKO ENTITAS ASOSIASI

i. PT Bank Victoria International Indonesia Tbk ("BVIC")

BVIC sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha perbankan memiliki beberapa risiko, yaitu:

1. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BVIC.

Dalam mengelola risiko kredit, BVIC telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya, dan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Selain kredit, BVI juga dapat menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti transaksi antar Bank, pembelian surat-surat berharga, dan penyertaan serta kewajiban komitmen dan kontijensi .

Pemberian kredit dalam jumlah yang signifikan atau terkonsentrasi pada satu dan/atau sekelompok debitur, produk, industri tertentu, dan letak geografis dapat meningkatkan risiko kredit yang mempunyai dampak pengaruh negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan BVIC di masa mendatang.

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan kondisi pasar.

Risiko pasar melekat pada kegiatan dan aktivitas BVIC baik di banking book maupun di trading book, yang dipengaruhi oleh variabel pasar diantaranya yaitu suku bunga dan ekuitas seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenisnya), kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

Salah satu variabel pasar adalah risiko suku bunga, dimana penyesuaian terhadap tingkat suku bunga pada sisi aset maupun liabilitas tidak selalu dilakukan pada saat bersamaan. Hal ini mengakibatkan BVIC rentan terhadap perubahan tingkat suku bunga pasar. Tidak ada jaminan bahwa perubahan suku bunga yang cepat di masa mendatang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha BVIC.

3. **Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)**
   Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan BVIC dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BVIC.

   Risiko likuiditas dapat timbul dalam situasi dimana BVIC tidak dapat mencairkan atau menjual asetnya karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut.

   Risiko likuiditas juga melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrumen utang. Kondisi dana pihak ketiga yang mayoritas berada dalam jangka pendek dibandingkan dengan penyaluran kredit BVIC yang bersifat jangka panjang apabila BVIC tidak mampu mengelola dana masyarakat sehingga memiliki masa pengendapan yang lebih panjang, maka BVI akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana dari masyarakat.

4. **Risiko Operasional (*Operational Risk*)**
   Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BVIC.

   Apabila penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan operasional BVIC tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengganggu kelangsungan usaha BVIC dan pada akhirnya dapat menurunkan kinerja usaha BVIC.

   Kelangsungan usaha BVIC juga bergantung pada kemampuan BVIC dalam menyikapi kemajuan teknologi dan perkembangan industri perbankan yang dilakukan dengan biaya rendah dan secara tepat waktu. Tidak terdapat jaminan bahwa BVIC tidak akan mengalami permasalahan dalam penerapan teknologi maupun standar industri baru.

5. **Risiko Hukum (*Legal Risk*)**
   Risiko hukum adalah risiko akibat tuntuan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut antara lain disebabkan adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna.

   Sebagai sebuah perusahaan yang berdiri dalam yuridiksi hukum Indonesia, BVIC harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku regulator industri perbankan di Indonesia. Selain itu, BVIC juga harus mengikuti segala bentuk peraturan perundangan yang berlaku di masyarakat baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha BVIC. Kegagalan BVIC dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku dapat mengakibatkan timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada BVI. Apabila tuntutan-tuntutan hukum yang diajukan kepada BVIC memiliki nilai yang material, maka hal tersebut dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja keuangan BVIC.

6. **Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)**
   Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BVIC. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BVIC. Kegagalan BVIC dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap BVIC. Apabila risiko ini dihadapi oleh BVIC, maka dalam waktu singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap BVIC yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan *volume* aktivitas BVIC.

7. **Risiko Strategis (*Strategic Risk*)**
   Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko strategis ini antara lain dapat disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi BVIC yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya BVIC terhadap perubahan eksternal. Ketidakmampuan BVIC dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis BVIC di masa yang akan datang.

8. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat BVIC tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri Perbankan, BVIC diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun bank Indonesia. Selain itu, BVIC juga wajib tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya seperti: peraturan yang mengatur Penjaminan Simpanan, Perseroan Terbatas, Perpajakan dan peraturan di bidang pasar modal (OJK dan BEI).

Pada umumnya, risiko kepatuhan melekat pada BVIC sebagai sebuah lembaga perbankan, seperti: risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); Kualitas Aset Produktif; Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); penerapan tata kelola yang baik (GCG) dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Ketidakmampuan BVIC untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha BVIC dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha BVIC.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KONDISI DI INDONESIA

Perseroan berbentuk badan hukum di Indonesia dimana seluruh kegiatan operasi dan aset-asetnya berada di Indonesia. Seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan adalah warga negara Indonesia yang berbasis di Indonesia. Karena semua kegiatan usaha Perseroan secara substansial dilaksanakan di Indonesia, Perseroan dapat terkena dampak negatif dari kebijakan-kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan kondisi sosial, bencana alam, regulasi dalam bidang hukum, ekonomi dan politik, serta perkembangan dunia internasional diluar kontrol Perseroan yang memperngaruhi Indonesia, seperti akan diuraikan di bawah ini. Hal ini dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha, prospek serta kondisi keuangan serta hasil usaha Perseroan.

1. Risiko Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Dan Moneter

Krisis ekonomi yang menghantam Asia Tenggara termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, di Indonesia dicirikan oleh berbagai hal seperti depresiasi nilai tukar mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingginya tingkat suku bunga, kerusuhan sosial dan situasi politik yang bergejolak. Kondisi ini memiliki dampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban hutangnya.

Perusahaan-perusahaan Indonesia belum seluruhnya bangkit dari krisis ekonomi bahkan banyak perusahaan yang saat ini masih dalam tahap restrukturisasi kewajiban pembayaran hutang-hutangnya atau terlibat dalam sengketa yang berasal dari kegagalan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran hutang-hutangnya. Baru-baru ini, krisis keuangan global yang didorong oleh krisis *subprime mortage* di Amerika Serikat menyebabkan kegagalan institusi-institusi keuangan Amerika Serikat yang dengan cepat berubah menjadi krisis kredit global. Kegagalan bank-bank Amerika Serikat diikuti oleh kegagalan sejumlah bank Eropa dan penurunan berbagai indeks saham dunia yang juga diikuti penurunan nilai pasar ekuitas dan komoditas dunia, termasuk Indonesia.

Menurunnya kondisi ekonomi dunia telah berdampak negatif bagi kinerja perekonomian Indonesia, yang tercermin dalam menurunnya pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga serta melemahnya kegiatan investasi yang disebabkan oleh menurunnya permintaan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian dalam dunia ekonomi. Melambatnya perekonomian di Indonesia juga dapat mengakibatkan kegagalan dari debitur lainnya yang dapat memiliki dampak negatif terdahap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

2. **Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah**
   Dalam mengatasi meningkatnya ketidakpastian kondisi politik dan ekonomi seperti lambannya proses restrukturisasi utang perusahaan, makin beratnya beban keuangan negara, belum lancarnya pelaksanaan otonomi daerah, ketidakpastian hukum, serta pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, pemerintah akan terus membuat strategi-strategi untuk mengatasi dampak dari ketidakpastian tersebut. Strategi utama yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan mewujudkan kebijakan ekonomi makro dan mikro secara konsisten, baik melalui kebijakan fiskal, moneter, maupun sektor riil dengan didukung oleh penciptaan stabilitas keamanan dan politik.

Seluruh kebijakan tersebut saling melengkapi sehingga dapat menunjang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Hal ini juga sangat penting untuk mengatasi unsur ketidakpastian yang semakin tinggi. Perubahan yang signifikan terhadap peraturan batasan-batasan khususnya kebijakan moneter dalam hal mengatur standar bunga pinjaman, giro wajib minumum, dan lainnya yang menyebabkan naik turunnya suku bunga, sehingga dapat memperngaruhi kinerja keuangan Perseroan.

E. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. **Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan**
   Investor yang membeli saham dalam penawaran umum ini memiliki risiko tidak likuidnya perdagangan saham-saham yang ditawarkan yang dapat disebabkan antara lain karena tujuan pembelian saham Perseroan adalah sebagai investasi jangka panjang. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. **Risiko Harga Saham Yang Berfluktuasi**
   Fluktuasi perdagangan saham Perseroan di BEI yang mengakibatkan turunnya harga saham Perseroan dapat mengakibatkan kerugian bagi investor. Penurunan harga saham Perseroan dapat diakibatkan diantaranya oleh:
   - Prospek bisnis dan kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak;
   - Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil usaha berdasarkan realisasi kegiatan usaha dibandingkan dengan perkiraan investor;
   - Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan, atau negara Indonesia;
   - Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia

3. **Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Yang Akan Datang**
   Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat idjamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini bisa disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Victoria Investama Tbk dan Entitas Anak yang tejadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 28 Mei 2013 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi dan Tamara dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan penyajian laporan posisi keuangan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perusahaan pada tahun 2012, penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 secara prospektif atau retrospektif dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, yang perlu diungkapkan dalam prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama **"PT Tata Sekuritas Maju"** berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT. Tata Sekuritas Maju" No. 39 tanggal 26 Oktober 1989 yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH, Notaris di Serang, telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10137 HT.01.01-Th.89 tanggal 2 Nopember 1989 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1612/1989 tanggal 7 Nopember 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3537 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Selanjutnya Perseroan berubah nama menjadi "**PT Victoria Sekuritas**" berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tata Sekuritas Maju No. 33 tanggal 17 Desember 1999, dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-112 HT.01.04.TH.2000 tanggal 4 Januari 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 248/RUB.09.03/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7962 ("**Akta No. 33/1999**") dan kemudian berubah nama menjadi "**PT Victoria Investama**" berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Victoria Sekuritas No. 51 tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-36672.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061351.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012, ("**Akta No. 51/2012**").

Dalam rangka perubahan menjadi perseroan terbuka, Anggaran Dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 116 tanggal 27 Maret 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-17098.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029189.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 serta telah diterima dan dicatat di database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-12746 tanggal 8 April 2013 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0030769.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 ("**Akta No. 116/2013**"), yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Victoria Investama Tbk. Pada tanggal Prospektus, anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.102 tanggal 19 April 2013 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-15909 tanggal 26 April 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038393.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 April 2013 ("**Akta No. 102/2013**").

2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak didirikan hingga saat ini adalah sebagai berikut :

Tahun 1989

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**500**	**500.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Aan Kurniawan	60	60.000.000,-	40,00
Barnas	45	45.000.000,-	30,00
Harry Prananto Suryokusumo	45	45.000.000,-	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**150**	**150.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**350**	**350.000.000,-**	

Sampai dengan tanggal Prospektus, bukti setor oleh Aan Kurniawan, Barnas, dan Harry Prananto Suryokusumo tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan kepada konsultan hukum, namun demikian, Direksi Perseroan dalam Surat Pernyataan tanggal 25 April 2013 dan Pemegang Saham Utama yaitu PT Gratamulia Pratama memberikan pernyataan sehubungan dengan pengalihan dan peningkatan modal dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2013. Direksi dan Pemegang Saham Utama masing-masing menyatakan bertanggung jawab terhadap tuntutan-tuntutan dari pihak ketiga mengenai setiap pengalihan hak atas saham yang telah terjadi dan menyatakan bahwa Perseroan telah menerima seluruh setoran modal dari pemegang saham sejak pendirian sampai dengan tanggal Surat Pernyataan.

Tahun 1990

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 28 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH, Notaris di Serang ("**Akta No. 33/1990**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui penjualan (i) saham milik Aan Kurniawan sebanyak 60 (enam puluh) saham senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) kepada Achmad Basya Dono sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 34 tanggal 28 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH, Notaris di Jakarta; (ii) saham milik Barnas sebanyak 45 (empat puluh lima) saham senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) kepada Hinggawaty Djajasamudra sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 35 tanggal 28 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH, Notaris di Jakarta; (iii) saham milik Harry Prananto Suryokusumo sebanyak 45 (empat puluh lima) saham senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) kepada Kitty Twysel sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 36 tanggal 28 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH, Notaris di Jakarta. Sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 33/1990 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**500**	**500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Achmad Basya Dono	60	60.000.000	40,00
Hinggawaty Djajasamudra	45	45.000.000	30,00
Kitty Twysel	45	45.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**150**	**150.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**350**	**350.000.000**	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 28 Desember 1990 dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH, Notaris di Serang, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-935 HT.01.04.Th 91 tanggal 18 Maret 1991, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 228/1991 tanggal 25 Maret 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1991, Tambahan No. 1297 ("**Akta No. 37/1990**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 37/1990 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000,00**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Achmad Basya Dono	800	800.000.000,00	80,00
Hinggawaty Djajasamudra	150	150.000.000,00	15,00
Kitty Twysel	50	50.000.000,00	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000**	**1.000.000.000,00**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**4.000**	**4.000.000.000,00**	

Terdapat penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebagai berikut:

a. Achmad Basya Dono sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) saham sebesar Rp740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta Rupiah);
b. Hinggawaty Djajasamudra sebanyak 105 (seratus lima) saham sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta Rupiah); dan
c. Kitty Twysel sebanyak 5 (lima) saham sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Sampai dengan tanggal Prospektus, bukti setor oleh Achmad Basya Dono,Hinggawaty Djajasamudra, Kitty Twysel tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan kepada konsultan hukum, namun demikian, Direksi Perseroan dalam Surat Pernyataan tanggal 25 April 2013 dan Pemegang Saham Utama yaitu PT Gratamulia Pratama memberikan pernyataan sehubungan dengan pengalihan dan peningkatan modal dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2013. Direksi dan Pemegang Saham Utama masing-masing menyatakan bertanggung jawab terhadap tuntutan-tuntutan dari pihak ketiga mengenai setiap pengalihan hak atas saham yang telah terjadi dan menyatakan bahwa Perseroan telah menerima seluruh setoran modal dari pemegang saham sejak pendirian sampai dengan tanggal Surat Pernyataan.

Antara tanggal 28 Desember 1990 sampai dengan tanggal 16 Maret 1995 telah terjadi pengalihan saham dalam Perseroan oleh Hinggawaty Djajasamudra kepada Rusman Adji Samanu sejumlah 150 (seratus lima puluh) saham dalam Perseroan. Dengan dilaksanakannya pengalihan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Achmad Basya Dono	800	800.000.000,-	80,00
Rusman Adji Samanu	150	150.000.000,-	15,00
Kitty Twysel	50	50.000.000,-	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000**	**1.000.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**4.000**	**4.000.000.000,-**	

Sampai dengan tanggal Prospektus, dokumen sehubungan dengan pengalihan saham dalam Perseroan antara tanggal 28 Desember 1990 sampai dengan tanggal 16 Maret 1995 tidak dapat diperlihatkan, namun demikian, Direksi Perseroan dalam Surat Pernyataan tanggal 25 April 2013 dan Pemegang Saham Utama yaitu PT Gratamulia Pratama memberikan pernyataan sehubungan dengan pengalihan dan peningkatan modal dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2013. Direksi dan Pemegang Saham Utama masing-masing menyatakan bertanggung jawab terhadap tuntutan-tuntutan dari pihak ketiga mengenai setiap pengalihan hak atas saham yang telah terjadi dan menyatakan bahwa Perseroan telah menerima seluruh setoran modal dari pemegang saham sejak pendirian sampai dengan tanggal Surat Pernyataan.

Tahun 1995

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 28 tanggal 16 Maret 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 28/1995**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui untuk mengeluarkan saham dari simpanan sebanyak 800 (delapan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) yang seluruhnya diambil oleh Rusman Adji Samanu, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 28/1995 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Achmad Basya Dono	800	800.000.000,-	44,44
Rusman Adji Samanu	950	950.000.000,-	52,78
Kitty Twysel	50	50.000.000,-	2,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.800**	**1.800.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**3.200**	**3.200.000.000,-**	

Sampai dengan tanggal Prospektus, bukti setor Rusman Adji Samanu tidak dapat diperlihatkan Perseroan kepada konsultan hukum, namun demikian, Direksi Perseroan dalam Surat Pernyataan tanggal 25 April 2013 dan Pemegang Saham Utama yaitu PT Gratamulia Pratama memberikan pernyataan sehubungan dengan pengalihan dan peningkatan modal dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2013. Direksi dan Pemegang Saham Utama masing-masing menyatakan bertanggung jawab terhadap tuntutan-tuntutan dari pihak ketiga mengenai setiap pengalihan hak atas saham yang telah terjadi dan menyatakan bahwa Perseroan telah menerima seluruh setoran modal dari pemegang saham sejak pendirian sampai dengan tanggal Surat Pernyataan.

Selanjutnya berdasarkan Akta No. 28/1995, seluruh pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui dilakukannya penjualan dan pengalihan saham milik: (i) Achmad Basya Dono sebanyak 800 (delapan ratus) saham; (ii) Rusman Adji Samanu sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) saham; dan (iii) Kitty Twysel sebanyak 50 (lima puluh) saham seluruhnya kepada PT Gratamulia Pratama, sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 29 tanggal 16 Maret 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta. Sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	1.800	1.800.000.000,-	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.800**	**1.800.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**3.200**	**3.200.000.000,-**	

Tahun 1996

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No. 90 tanggal 15 Pebruari 1996 yang dibuat di hadapan Purbandari, SH, pengganti dari Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 90/1996**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengeluaran saham dari simpanan sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) yang seluruhnya diambil oleh PT Gratamulia Pratama, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 90/1996 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	3.600	3.600.000.000,-	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.600**	**3.600.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**1.400**	**1.400.000.000,-**	

Sampai dengan tanggal Prospektus, bukti setor PT Gratamulia Pratama dan Ivan Halim tidak dapat diperlihatkan Perseroan kepada konsultan hukum, namun demikian, sesuai dengan data Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan (d/h PT Tata Sekuritas Maju) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 1997 dan 1996 yang disajikan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material No. R-012/A.S/III-98 tanggal 25 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto, dilaporkan bahwa dalam Laporan Perubahan Ekuitas modal disetor Perseroan pada 31 Desember 1996 sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta Rupiah).

Tahun 1997

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No. 148 tanggal 23 April 1997 yang dibuat oleh H. Abdul Kadir Usman, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 148/1997**"), diketahui bahwa seluruh pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui dilakukannya pengalihan saham-saham milik PT Gratamulia Pratama dalam Perseroan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) saham kepada Ivan Halim. Sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 148/1997 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	3.240	3.240.000.000,-	90,00
Ivan Halim	360	360.000.000,-	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.600**	**3.600.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**1.400**	**1.400.000.000,-**	

Sampai dengan tanggal Prospektus, bukti setor PT Gratamulia Pratama dan Ivan Halim tidak dapat diperlihatkan Perseroan kepada konsultan hukum, namun demikian, sesuai dengan data Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan (d/h PT Tata Sekuritas Maju) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 1997 dan 1996 yang disajikan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material No. R-012/A.S/III-98 tanggal 25 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto, dilaporkan bahwa dalam Laporan Perubahan Ekuitas modal disetor Perseroan pada 31 Desember 1997 sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah). Dengan demikian dibandingkan 31 Desember 1996, terdapat tambahan modal disetor sebesar Rp11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta Rupiah).

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No. 64 tanggal 6 Agustus 1997 dibuat di hadapan H. Abdul Kadir Usman, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9506 HT.01.04.Th.97 tanggal 16 September 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 1569/BH.09.03/X/97 tanggal 14 September 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7899 ("**Akta No. 64/1997**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 64/1997 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	11.250	11.250.000.000,-	90,00
Ivan Halim	1.250	1.250.000.000,-	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**12.500**	**12.500.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**37.500**	**37.500.000.000,-**	

Sampai dengan tanggal Prospektus, bukti setor PT Gratamulia Pratama dan Ivan Halim tidak dapat diperlihatkan Perseroan kepada konsultan hukum, namun demikian, sesuai dengan data Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan (d/h PT Tata Sekuritas Maju) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 1997 dan 1996 yang disajikan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material No. R-012/A.S/III-98 tanggal 25 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto, dilaporkan bahwa dalam Laporan Perubahan Ekuitas modal disetor Perseroan pada 31 Desember 1997 sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah). Dengan demikian dibandingkan 31 Desember 1996, terdapat tambahan modal disetor sebesar Rp11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta Rupiah).

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No. 47 tanggal 8 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan Purbandari, SH, Notaris pengganti dari Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Laporan Perubahan Data Perseroan No. C-19703 HT.01.04. TH.99 tanggal 7 Desember 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 247/BH.09.03/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 2004, Tambahan No. 658 ("**Akta No. 47/1997**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 47/1997 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	13.500	13.500.000.000,-	90,00
Ivan Halim	1.500	1.500.000.000,-	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**15.000**	**15.000.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**35.000**	**35.000.000.000,-**	

Sampai dengan tanggal Prospektus, bukti setor PT Gratamulia Pratama dan Ivan Halim tidak dapat diperlihatkan Perseroan kepada konsultan hukum, namun demikian, sesuai dengan data Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan (d/h PT Tata Sekuritas Maju) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 1997 dan 1996 yang disajikan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material No. R-012/A.S/III-98 tanggal 25 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto, dilaporkan bahwa dalam Laporan Perubahan Ekuitas modal disetor Perseroan pada 31 Desember 1997 sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah). Dengan demikian dibandingkan 31 Desember 1996, terdapat tambahan modal disetor sebesar Rp11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta Rupiah).

Tahun 1998

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 160 tanggal 30 Maret 1998 yang dibuat oleh Soekaimi, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 160/1998**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui dilakukannya pengalihan saham-saham milik Ivan Halim dalam Perseroan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham kepada PT Cahaya Lintang Purnama berdasarkan Akta Penegasan Jual Beli Saham No. 161 tanggal 30 Maret 1998, dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta. Sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 160/1998 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000,00**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	13.500	13.500.000.000,00	90,00
PT Cahaya Lintang Purnama	1.500	1.500.000.000,00	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**15.000**	**15.000.000.000,00**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**35.000**	**35.000.000.000,00**	

Tahun 1999

Sesuai dengan Akta Berita Acara No. 110 tanggal 31 Agustus 1999 yang dibuat oleh Soekaimi, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 110/1999**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui dilakukannya pengalihan saham-saham (i) milik PT Cahaya Lintang Purnama dalam Perseroan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham kepada BVIC berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 111 tanggal 31 Agustus 1999, dibuat di hadapan Soekaimi, SH, Notaris di Jakarta; dan (ii) milik PT Gratamulia Pratama sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) saham kepada BVIC berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 112 tanggal 31 Agustus 1999, dibuat di hadapan Soekaimi, SH, Notaris di Jakarta. Sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 110/1999 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	11.250	11.250.000.000,-	75
BVIC	3.750	3.750.000.000,-	25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**15.000**	**15.000.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**35.000**	**35.000.000.000,-**	

Sesuai dengan Akta No. 33/1999, diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 33/1999 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	21.250	21.250.000.000,-	85,00
BVIC	3.750	3.750.000.000,-	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.000**	**25.000.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**25.000**	**25.000.000.000,-**	

Sampai dengan tanggal Prospektus, bukti setor PT Gratamulia Pratama dan PT Bank Victoria Internasional tidak dapat diperlihatkan Perseroan kepada konsultan hukum, namun demikian, sesuai dengan data Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan (d/h PT Tata Sekuritas Maju) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 1999 dan 1998 yang disajikan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material No. R/070/03/00 tanggal 30 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto, dilaporkan bahwa dalam Laporan Perubahan Ekuitas terdapat tambahan modal disetor sejumlah sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Tahun 2000

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Victoria Sekuritas No. 8 tanggal 4 Mei 2000 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat Kementerian Kehakiman Republik Indonesia sesuai Penerimaan Laporan Perubahan Data Perseroan No. C-10673 HT.01.04.TH.2000 tanggal 25 Mei 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 675/RUB.09.03/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000 ("**Akta No. 8/2000**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan sejumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Gratamulia Pratama secara tunai sebagaimana dibuktikan dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000 dan 1999 yang disajikan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material No. R/049/04/01 tanggal 29 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto, dilaporkan bahwa dalam Laporan Perubahan Ekuitas terdapat tambahan modal disetor sejumlah Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 8/2000 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	33.750	33.750.000.000,-	90,00
BVIC	3.750	3.750.000.000,-	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**37.500**	**37.500.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**12.500**	**12.500.000.000,-**	

Tahun 2002

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 30 Desember 2002 yang dibuat oleh George Handojo Hermawi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-04741 HT.01.04.TH.2003 tanggal 7 Maret 2003, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 577/RUB.09.03/V/2003 tanggal 14 Mei 2003 ("**Akta No. 6/2002**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan sejumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Gratamulia Pratama secara tunai sebagaimana dibuktikan dalam Laporan Keuangan No. 02.407/RB/AD/GA/03 tanggal 25 Februari 2003 per 31 Desember 2002 dan 2001 dan Laporan Akuntan Independen yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman yang disajikan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dilaporkan bahwa dalam Laporan Perubahan Ekuitas terdapat tambahan modal disetor sejumlah Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 6/2002 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	46.250	46.250.000.000,-	92,50
BVIC	3.750	3.750.000.000,-	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**50.000**	**50.000.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Tahun 2003

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 54 tanggal 17 Februari 2003 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Akta Perubahan Pemegang Saham No. C-UM.02.01.6874 tanggal 23 Maret 2003, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tanggal 14 Mei 2003 ("**Akta No. 54/2003**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui dilakukannya pengalihan saham-saham milik BVIC dalam Perseroan yaitu (i) sebanyak 3.375 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham kepada PT Gratamulia Pratama sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 55 tanggal 17 Pebruari 2003 dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, SH, Notaris di Jakarta; dan (ii) sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham kepada FX Gunawan Tenggaraharja sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 56 tanggal 17 Pebruari 2003 dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, SH, Notaris di Jakarta. Sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 54/2003 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	49.625	49.625.000.000,-	99,25
FX Gunawan Tenggaraharja	375	375.000.000,-	0,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**50.000**	**50.000.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Tahun 2004

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 95 tanggal 23 Agustus 2004 dibuat oleh Eliwaty Tjitra, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-25763 HT.01.04.TH.2004 tanggal 14 Oktober 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 0805/RUB.09.05/IV/2005 tanggal 4 April 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 10 Mei 2005, Tambahan No. 4672 ("**Akta No. 95/2004**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2004 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200.000**	**200.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	49.625	49.625.000.000,-	99,25
FX Gunawan Tenggaraharja	375	375.000.000,-	0,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**50.000**	**50.000.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**150.000**	**150.000.000.000,-**	

Tahun 2005

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 19 Juli 2005 dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-22317 HT.01.04.TH.2005 tanggal 10 Agustus 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 2182/RUB.09.05/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 26 Agustus 2005, Tambahan No. 9181 ("**Akta No. 17/2005**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui untuk menurunkan nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**200.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	496.250.000	49.625.000.000,-	99,25
FX Gunawan Tenggaraharja	3.750.000	375.000.000,-	0,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**500.000.000**	**50.000.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**1.500.000.000**	**150.000.000.000,-**	

Tahun 2006

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 5 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-20236 HT.01.04.TH.2006 tanggal 11 Juli 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 6462/RUB.09.05/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006 ("Akta No. 3/2006"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar

Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp67.500.000.000,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan sejumlah 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Gratamulia Pratama dan telah disetor dalam Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang disajikan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material No. R.2.1/046/03/07 tanggal 02 Februari 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dilaporkan bahwa dalam Laporan Perubahan Ekuitas terdapat tambahan modal disetor sejumlah Rp17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 3/2006 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**200.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	671.250.000	67.125.000.000,-	99,44
FX Gunawan Tenggaraharja	3.750.000	375.000.000,-	0,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**675.000.000**	**67.500.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**1.325.000.000**	**132.500.000.000,-**	

Tahun 2007

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 5 Pebruari 2007 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham No. W7-HT.01.10-2264 tanggal 23 Pebruari 2007 ("**Akta No. 02/2007**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui dilakukannya pengalihan saham-saham milik FX Gunawan Tenggaraharja dalam Perseroan sebanyak 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham kepada Suzanna Tanojo sesuai dengan perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 11 Januari 2007 yang dibuat di bawah tangan antara para pihak. Sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 02/2007 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**200.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	671.250.000	67.125.000.000,-	99,44
Suzanna Tanojo	3.750.000	375.000.000,-	0,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**675.000.000**	**67.500.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**1.325.000.000**	**132.500.000.000,-**	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 1 November 2007 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. C-UM.HT.10-3584 tanggal 16 November 2007 ("Akta No. 1/2007"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp67.500.000.000,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan sejumlah 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang diambil bagian seluruhnya oleh Suzanna Tanojo secara tunai sebagaimana

dibuktikan dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang disajikan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material tanggal 1 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang, dilaporkan bahwa dalam Laporan Perubahan Ekuitas terdapat tambahan modal disetor sejumlah Rp32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 1/2007 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**200.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	671.250.000	67.125.000.000,-	67,13
Suzanna Tanojo	328.750.000	32.875.000.000,-	32,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000.000**	**100.000.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**1.000.000.000**	**100.000.000.000,-**	

Tahun 2009

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 20 November 2009 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-22191 tanggal 8 Desember 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081873.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 8 Desember 2009 ("**Akta No. 34/2009**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp127.500.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan sejumlah 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang diambil bagian seluruhnya oleh Suzanna Tanojo yang telah dibayar secara tunai sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor rekening Giro Perseroan per tanggal 23 November 2009. Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 34/2009 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**200.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	671.250.000	67.125.000.000,-	52,65
Suzanna Tanojo	603.750.000	60.375.000.000,-	47,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.275.000.000**	**127.500.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**725.000.000**	**72.500.000.000,-**	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-01472 tanggal 20 Januari 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004515.AH.01.09. Tahun 2010 Tanggal 20 Januari 2010 ("**Akta No. 20/2009**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp127.500.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) menajadi sebesar Rp155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar) dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan sejumlah 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)

yang diambil bagian seluruhnya oleh Suzanna Tanojo yang telah dibayar secara tunai sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor Bank Victoria tanggal 15 Desember 2009. Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 20/2009 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**200.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	671.250.000	67.125.000.000,-	43,31
Suzanna Tanojo	878.750.000	87.875.000.000,-	56,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.550.000.000**	**155.000.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**450.000.000**	**45.000.000.000,-**	

Tahun 2011

Sesuai dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 17 tanggal 7 Juni 2011 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-30487.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049106. AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 17 Juni 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 18 September 2012, Tambahan No. 51440 ("**Akta No. 17/2011**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp620.000.000.000,- (enam ratus dua puluh miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**6.200.000.000**	**620.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	671.250.000	67.125.000.000,-	43,31
Suzanna Tanojo	878.750.000	87.875.000.000,-	56,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.550.000.000**	**155.000.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**4.650.000.000**	**465.000.000.000,-**	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 41 tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-25593 tanggal 8 Agustus 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00065529.AH.01.09. Tahun 2011 Tanggal 8 Agustus 2011 ("**Akta No. 41/2011**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar) menjadi sebesar Rp260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan sejumlah 1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta Rupiah) saham dengan nilai nominal sebesar Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah) yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Gratamulia Pratama yang telah dibayar secara tunai sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor Bank Victoria No. 1187646 tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp1.244.880.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan bukti setor Panin Bank tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp103.755.120.000,- (seratus tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 41/2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**6.200.000.000**	**620.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	1.721.250.000	172.125.000.000,-	66,20
Suzanna Tanojo	878.750.000	87.875.000.000,-	33,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.600.000.000**	**260.000.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**3.600.000.000**	**360.000.000.000,-**	

Tahun 2013

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 344 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat oleh Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-07389 tanggal 1 Maret 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017520.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 1 Maret 2013 ("**Akta No. 344/2013**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB telah menyetujui penjualan 852.750.000 (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham senilai Rp85.275.000.000,- (delapan puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) milik Suzanna Tanojo kepada PT Gratamulia Pratama sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 345 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta. Sehingga susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 344/2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**6.200.000.000**	**620.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	2.574.000.000	257.400.000.000,-	99,00
Suzanna Tanojo	26.000.000	2.600.000.000,-	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.600.000.000**	**260.000.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**3.600.000.000**	**360.000.000.000,-**	

Berdasarkan Akta No. 116/2013 juncto Akta No. 102/2013, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp620.000.000.000,- (enam ratus dua puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah); (ii) pengeluaran saham baru yang diambil bagian oleh seluruh pemegang saham secara proporsional dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp615.000.000.000,- (enam ratus lima belas miliar Rupiah).

Dengan dilakukannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor tersebut, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**15.000.000.000**	**1.500.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Gratamulia Pratama	6.088.500.000	608.850.000.000,-	99,00
Suzanna Tanojo	61.500.000	6.150.000.000,-	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.150.000.000**	**615.000.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel Saham Biasa Atas Nama	**8.850.000.000**	**885.000.000.000,-**	

Tambahan setoran modal sebesar Rp351.450.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu miliar empat ratus lima puluh Rupiah) merupakan kapitalisasi Laba Ditahan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2012 berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 31 Desember 2012 yang disajikan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan penyajian laporan posisi keuangan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perusahaan pada tahun 2012, penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 secara prospektif atau retrospektif dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana SahamNomor 135/T&T-GA/SH/2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara.

Tidak ada lagi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan selain yang telah diungkapkan di atas.

3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 33 tanggal 13 Maret 2013 dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.10-09643 tanggal 15 Maret 2013, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0023052.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 susunan kepengurusan di Perseroan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Suzanna Tanojo
Komisaris Independen	:	Peter Rulan Isman

DIREKSI

Direktur Utama	:	Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Cendrasuri Ependy
Direktur	:	Rebecca Wahjutirto Tanoyo

Berikut dibawah ini adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan :

DEWAN KOMISARIS

SUZANNA TANOJO
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Tulung Agung pada tahun 1958. Menyelesaikan studi dari Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1982. Memulai karir pada PT Unggul Indah Corporation Tbk, dengan jabatan sebagai CFO (1986-1995), PT Apac Citra Centertex Tbk dan anak perusahaan PT Apac Inti Corpora dengan jabatan terakhir sebagai CFO (1995-2003) dan PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (1996-2003) sebagai CFO. Selain berkarir di Perseroan juga sebagai Pengusaha yang bergerak di bidang Industri Tekstil, Industri Kimia, Properti dan Keuangan di dalam kelompok grup Victoria (1995-sekarang) dan menjabat sebagai Komisaris PT Bank Victoria International Tbk (2006 – sekarang). Sejak tahun 2012 sampai saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.

PETER RULAN ISMAN
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1971. berpengalaman dalam bidang keuangan sejak tahun 1993 hingga tahun 2005, pernah menjabat sebagai Direktur PT Redialindo Mandiri (1998-1999), sebagai Direktur Utama PT Victoria Kapitalindo International (1999-2003), dan sebagai Direktur Utama PT Victoria Sekuritas (2003-2005). Sejak tahun 2005 hingga tahun 2012 beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk dibidang perdagangan batu bara, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Cakrawala Sejahtera Sejati (2012-sekarang) yang juga bergerak dalam bidang perdagangan batu bara, selanjutnya pada tahun 2013 beliau diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan.

DIREKSI

ALDO JUSUF TJAHAJA
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1973. Meraih gelar Bachelor of Science dari University of Oregon, USA pada tahun 1995. Memiliki ijin WMI (Wakil Manajer Investasi), Ijin Broker Bursa Berjangka (BBJ) dan sertifikasi JATS (Jakarta Automated Trading System). Memulai karirnya sebagai analis kredit di PT Bank Aspac, Jakarta (1995-1996). Posisi lain diantaranya sebagai Equity Sales di PT Sasson Securities Indonesia (1996-1997), kemudian Wakil Direktur Utama PT Ciptamahardhika Sekuritas (1997-1999), Vice President PT Henan Putihrai Sekuritas (1999-2000), Direktur Asset Management PT Ekokapital Sekuritas (2003-2009), Direktur Utama PT Victoria Sekuritas (2009-2012), Komisaris Utama PT Victoria Securities Indonesia (2012 – sekarang) dan sejak tahun 2009 sampai sekarang sebagai Direktur Utama Perseroan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Perseroan.

CENDRASURI EPENDY
Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, 33 tahun, lahir di Palembang pada tahun 1980, mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2007. Memulai karir sebagai akuntan pada PT Kotaminyak Internusa pada tahun 2003, kemudian beliau juga berpengalaman menjadi manajer akuntansi dan pajak di PT Bumimerak Terminalindo yang bergerak dibidang bulk chemical terminal, sejak tahun 2005 hingga tahun 2010, dan pada tahun 2013 beliau diangkat menjadi Direktur Perseroan yang bertanggung jawab atas keuangan Perseroan.

REBECCA WAHJUTIRTO TANOYO
Direktur

Warga Negara Indonesia, 26 tahun, lahir di Surabaya pada tahun 1987. Mendapatkan gelar Bachelor of Arts dari University of San Fransisco, USA pada tahun 2010. Memulai karir pada PT Wings Surya sebagai Marketing Manager. Sejak tahun 2012 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Perseroan yang bertanggung jawab atas Sumber Daya Manusia dan kegiatan umum Perseroan.

Berdasarkan RUPS Perseroan jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah Rp1.967.300.000,- Rp985.500.000,- dan Rp645.500.000,- sedangkan jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp992.156.883,- Rp565.877.048,- dan Rp 866.354.536,-.

Komite Audit

Komite ini bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan masukan Dewan Komisaris berdasarkan laporan atau permasalahan lain yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam kaitannya dengan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Berdasarkan Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

Saat ini Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bursa No. I-A.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 31 Maret 2013, Perseroan menyatakan akan membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK serta peraturan Bursa Efek Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Dalam menjalankan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menetapkan Rebecca Ayuyantrie sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 28 Maret 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.004/VI-DIR/III2013 tentang “Pengangkatan Sebagai Corporate Secretary”. Adapun tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, yaitu:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

4. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perkembangan dunia usaha telah menumbuhkan kesadaran dari berbagai pihak mengenai pentingnya GCG dalam mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Negara, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mendukung penerapan GCG untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan asas GCG menciptakan keunggulan bagi suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Menyadari hal ini, maka Perseroan berkomitmen untuk berperan aktif dengan senantiasa memastikan penerapan asas-asas GCG secara konsisten pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan dengan mewujudkan:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite dan Satuan Kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal perusahaan.
c. Penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
d. Rencana strategis perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perusahaan (RKAP).
e. Transparansi informasi, termasuk di antaranya kondisi keuangan Perusahaan.

Penerapan Asas GCG
Sistem pengelolaan perusahaan yang berlaku di Perseroan dirancang dengan memperhatikan penerapan asas keterbukaan, akuntanbilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran sebagaimana tercantum dalam pedoman umum GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Keterbukaan
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perseroan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik dan pemegang saham, sesuai dengan peraturan OJK maupun atas inisiatif sendiri. Laporan-laporan diterbitkan secara berkala dan tepat waktu, mencakup Laporan Keuangan Semester, dan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, serta Laporan Tahunan. Informasi juga diberikan melalui media cetak dan elektronik, dan paparan publik bila diperlukan.

Akuntabilitas
Perseroan memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menegakkan prinsip akuntabilitas, antara lain pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan Perseroan, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku Perusahaan.

Pertanggungjawaban
Perseroan senantiasa mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik.

Independensi
Perseroan memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil, namun dimungkinkan untuk mendapatkan saran dari konsultan independen, hukum, sumber daya manusia dan komite-komite untuk menunjang kelancaran tugasnya.

Kewajaran dan Kesetaraan
Perseroan menerapkan perlakuan yang setara baik kepada publik, otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, maupun para pemangku kepentingan. Hubungan dengan karyawan dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar.

5. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Tanggung jawab sosial Perseroan (CSR) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara Perseroan dengan semua *stakeholder*, termasuk nasabah, karyawan, Pemerintah bahkan kompetitor. Tanggung jawab sosial merupakan konsep dimana Perseroan secara sukarela menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat untuk memberi manfaat yang lebih baik dan dibutuhkan. Perseroan masih dalam proses melakukan evaluasi dan penelaahan lebih lanjut mengenai kegiatan yang akan dilakukan.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan berpandangan bahwa karyawan yang terlatih dengan baik dan memiliki motivasi dan integritas yang tinggi merupakan komponen utama bagi keberhasilan usaha. Para karyawan Perseroan diberikan pelatihan di dalam Perseoran (*in house*) dengan program-program pelatihan informal oleh manajer-manajer divisi maupun oleh konsultan profesional yang didatangkan dari luar Perseroan.

Di samping itu Perseroan dan Entitas Anak juga mendorong para karyawannya untuk memperoleh izin/sertifikasi yang diberlakukan pada bidang usaha yang dilakukan masing-masing. Perseroan memberikan insentif untuk memotivasi karyawan, baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Para karyawan dievaluasi secara periodik atas dasar kehadiran, prestasi kerja dan keahlian mereka. Perseroan senantiasa berusaha menjaga hubungan baik dengan para karyawannya.

Guna menciptakan kebersamaan antar karyawan, Perseroan juga mengadakan program rekreasi bersama, Perseroan juga menyediakan fasilitas kesejahteraan kepada para karyawannya sebagai berikut :

- Tingkat upah dan gaji yang telah memenuhi ketentuan serta standar Upah Minimum Regional (UMR);
- Kenaikan gaji secara berkala;
- Tunjangan Hari Raya;
- Asuransi kesehatan berupa rawat inap dan rawat jalan;
- Konstribusi iuran untuk Jamsostek.

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan, namun memiliki peraturan perusahaan yang telah disesuaikan dengan peraturan ketenagakerjaan. Perseroan sampai dengan saat ini tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

Tabel berikut adalah komposisi pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2009 menurut jenjang jabatan, jenjang tingkat pendidikan, jenjang usia dan status.

Perseroan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 5 orang karyawan. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, dan status karyawan dimana Komisaris dan Direksi tidak termasuk dalam pengelompokan karyawan.

Data Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	31 Desember											
	2012				2011				2010			
	Perseroan	VSI	BVIC	VINS	Perseroan	VSI	BVIC	VINS	Perseroan	VSI	BVIC	VINS
Sarjana (S1 & S2)	5	26	482	6	25	-	375	42	25	-	327	16
Sarjana Muda (D3)	-	-	184	10	-	-	170	1	-	-	143	-
Non Sarjana	0	8	423	13	12	-	380	1	12	-	349	1
Total	**5**	**34**	**1.089**	**29**	**37**	**-**	**925**	**44**	**37**		**819**	**17**

Data Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Desember											
	2012				2011				2010			
	Perseroan	VSI	BVIC	VINS	Perseroan	VSI	BVIC	VINS	Perseroan	VSI	BVIC	VINS
Manajer	3	2	272	9	1	-	227	2	2	-	211	2
Pelaksana	2	32	817	20	36	-	698	42	35	-	608	15
Total	**5**	**34**	**1.089**	**29**	**37**	**-**	**925**	**44**	**37**	**-**	**819**	**17**

Data Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember											
	2012				2011				2010			
	Perseroan	VSI	BVIC	VINS	Perseroan	VSI	BVIC	VINS	Perseroan	VSI	BVIC	VINS

≤ 30 Tahun	2	3	547	13	6	-	464	7	15	-	424	3
31 – 40 Tahun	2	25	320	6	25	-	286	23	16	-	258	7
≥ 41 Tahun	1	6	222	10	6	-	175	14	6	-	137	7
Total	**5**	**34**	**1.089**	**29**	**37**	**-**	**925**	**44**	**37**	**-**	**819**	**17**

Data Karyawan Menurut Status

Status	31 Desember											
	2012				2011				2010			
	Perseroan	VSI	BVIC	VINS	Perseroan	VSI	BVIC	VINS	Perseroan	VSI	BVIC	VINS
Pegawai Tetap	5	31	563	23	33	-	433	41	34	-	341	16
Pegawai Kontrak	-	3	526	6	5	-	492	3	3	-	478	1
Total	**5**	**34**	**1.089**	**29**	**37**	**-**	**925**	**44**	**37**	**-**	**819**	**17**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, VMI belum memiliki karyawan, karena perusahaan belum beroperasi.

Piagam Unit Audit Dan Unit Audit Internal Perseroan

Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 28 Nopember 2008, dimana Perseroan diwajibkan untuk membentuk Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Perseroan juga telah menunjuk dan mengangkat Christine Wahyu Indrayani sebagai Kepala Satuan Audit Internal diangkat berdasarkan surat penunjukan tanggal 27 Mei 2013. Berikut adalah tabel mengenai pengalaman kerja Christine Wahyu Indrayani:

Masa Kerja	Perusahaan	Jabatan
2003 - 2004	IC – Universitas Bandar Lampung	Staff Accounting
2005 - sekarang	PT Grahacitra Adhitama	Staff Accounting

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
g. bekerja sama dengan Komite Audit;
h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.;
j. Melakukan kaji ulang (*review*) dan penilaian atas kesehatan, kecukupan dan pelaksanaan sistem keuangan dan akuntansi serta sistem lainnya dan memastikan bahwa semua telah terkendali dengan baik sesuai dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan.
k. Melakukan pengujian atas efektivitas dan efisiensi di semua jajaran manajemen dalam memanfaatkan semua aset Perseroan dan tingkat kepatuhannya dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
l. Mengkaji ulang tingkat integritas dari manajemen data yang dikembangkan oleh Perseroan;
m. Memastikan bahwa aset Perseroan diadministrasikan dengan baik dan benar serta dilindungi dari hal-hal yang dapat merugikan Perseroan;
n. Memastikan bahwa setiap kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan selalu secara konsisten diusahakan;

Merekomendasikan peningkatan pengendalian internal agar manajemen dapat mengelola Perseroan lebih efisien, dan pengendalian resiko secara terukur, serta memastikan semua ketentuan pemerintah dan Perseroan dilaksakan dengan tertib.

7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Gratamulia Pratama ("GP")

Riwayat Singkat

PT Gratamulia Pratama (selanjutnya disebut "**GP**") adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia. PT GP didirikan secara sah serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya dalam rangka UU No. 40/2007.

PT GP didirikan dengan nama "**PT Pratama Mulia Indah**", berdasarkan Akta Pendirian No. 112 tanggal 23 Nopember 1992 yang kemudian berubah nama menjadi "**PT Gratamulia Pratama**" berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 30 Agustus 1994, keduanya dibuat di hadapan Anthony Djoenardi, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.242 HT.01.01.Th.94 tanggal 10 Oktober 1994, dan telah telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 23 Agustus 2005, Tambahan No.8924.

Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar GP telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 12/2013**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GP, maksud dan tujuan GP adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan PT GP adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum industri, agrobisnis pengadaan barang, jasa transportasi, pembangunan, design interior, percetakan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT GP dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk import eksport, antar pulau dan lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain.
b. Mendirikan pabrik-pabrik dari berbagai macam industri misalnya alat-alat rumah tangga, bahan-bahan bangunan serta memasarkan hasil-hasil industrinya.
c. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, perikanan, pertanian dan eksploitasi hutan serta pengelolaan hasil-hasilnya.
d. Menjalankan usaha dalam bidang leveransir supplier, distributor grosir komisioner, wakil atau agen, baik dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri.
e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
f. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi dan pengangkutan di darat pengepakan, ekspedisi dan pergudangan, termasuk pula penyediaan sarana pelayanan segala macam kendaraan bermotor berupa perbengkelan dan services station.
g. Menjalankan usaha pembangunan termasuk sebagai pemborong kontraktor, pelaksana pengawas dari pekerjaan pembuatan bangunan-bangunan, gedung-gedung, jalanan jembatan lapangan pengairan penggalian dan pegurugan tanah serta pembuatan taman hias, kolam ikan, dekorasi ruangan/kamar dan lain sebagainya, serta pemasangan instalasi listrik, air, gas, dan telekomunikasi.
h. Merenovasi ruang-ruang kantor, gedung, dan bangunan-bangunan lainnya.
i. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, penerbitan dan penjilidan"

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 12/2013, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham GP sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**400.000**	**400.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Suzanna Tanojo	160.082	160.082.000.000,-	85,21
Christien Tanoyo	27.793	27.793.000.000,-	14,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**187.875**	**187.875.000.000,-**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	**212.125**	**212.125.000.000,-**	

Susunan Pengurus dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GP yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 10 November 2008, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-04153.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004892.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 19 Januari 2009 sebagai berikut:

KOMISARIS
Komisaris : Christien Tanoyo/Liauw Tjeuw Hwien

DIREKSI
Direktur : Suzanna Tanojo

8. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

8.1. PT Victoria Securities Indonesia (VSI)

Riwayat Singkat
VSI didirikan dengan nama “PT Victoria Securities Indonesia” berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.60 tanggal 11 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.244 tanggal 31 Maret 2011, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-18593.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 13 April 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0029646.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 April 2011, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 24 Agustus 2012, Tambahan No. 39451. Anggaran dasar yang berlaku saat ini adalah anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian.

Kegiatan Usaha
Maksud dan tujuan VSI sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar VSI ini adalah menjalankan usaha selaku Perusahaan Efek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, VSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha sebagai Perantara pedagang Efek;
b. Menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi/Penasihat Investasi;
c. Menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek.

Permodalan
Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan VSI adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing bernilai Rp100,00 (seratus Rupiah)

Modal Ditempatkan : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 500.000.000 (lima ratus juta) saham.
Modal Disetor : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).
100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai kepada VSI oleh para pemegang saham. Susunan para pemegang saham VSI dengan struktur permodalan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
Perseroan	495.000.000	49.500.000.000	99,00
Suzanna Tanojo	5.000.000	500.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**500.000.000**	**50.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**1.500.000.000**	**150.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi VSI yang sedang menjabat adalah sebagaimana dimuat dalam (i) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT VSI yang keputusannya dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT VSI No.135 tanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta Barat, yang laporan Perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-32625 tanggal 6 September 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0080094.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 6 September 2012 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 17 Juni 2013 dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pememegang Saham menyetujui pengunduran diri Herlambang Halim sebagaimana dinyatakan dalam surat pengunduran diri tanggal 3 Juni 2013, sampai dengan tanggal Prospektus akta tersebut sedang dalam proses pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan dari Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH tertanggal 19 Juni 2013, yaitu sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Antonius Tjipto
Komisaris : Aldo Jusuf Tjahaja

DIREKSI
Direktur Utama : Iwan
Direktur : Setiawan Budiman
Direktur : Yangky Halim
Direktur : R. Agustinus Wisnu Widodo

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan VSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sedangkan untuk laporan keuangan VSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akhyadi Wadisono dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan dengan penyesuaian nilai wajar aset keuangan.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2011	2012
Jumlah Aset	-	51.699.724	80.694.888
Jumlah Liabilitas	-	8.579	24.766.317
Jumlah Ekuitas	-	51.691.145	55.928.571
Jumlah Pendapatan Usaha	-	1.635.209	22.616.697
Jumlah Beban Usaha	-	40.018	16.102.852
Laba Tahun Berjalan	-	1.691.145	4.237.425

Analisa singkat atas perubahan signifikan

Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset VSI pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp80.694.888,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp28.995.164,- ribu atau naik 56,08% bila dibandingkan dengan jumlah aset VSI pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp51.699.724,- ribu. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya piutang reverse repo sebesar Rp22.060.000,- ribu, piutang repo tersebut adalah efek ekuitas yang dibeli oleh VSI dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pemiliki efek pada tanggal tertentu pada harga jual yang telah disepakati. dan portofolio efek dari pihak ketiga sebesar Rp10.037.125,- ribu dan piutang nasabah sebesar Rp13.195.624,- ribu, piutang nasabah tersebut pada umumnya merupakan pembiayaan transaksi marjin kepada nasabah dengan jaminan pada umumnya berupa kas dan saham nasabah.

Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp24.766.317,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp.24.757.738,- ribu atau mengalami kenaikan sebesar 288.585,36% dibandingkan dengan jumlah liabiliatas pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp8.579,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya utang bank sebesar Rp11.950.195,- ribu, utang bank tersebut adalah utang VSI kepada PT Bank Victoria International Tbk (“BVIC”), dimana BVIC setuju untuk memberikan fasilitas kredit rekening koran yang akan digunakan untuk modal kerja oleb VSI. Selain itu terdapat juga utang lembaha kliring dan penjaminan sebesar Rp3.571.953,- ribu dan adanya utang nasabah sebesar Rp6.055.869,- ribu.

Pendapatan Usaha

Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah pendapatan usaha untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp22.616.697,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp 20.981.488,- ribu atau naik 1.283,11% bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan usaha untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp1.635.209,- ribu. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar Rp7.654.915,- ribu atau naik 714,74% bila dibandingkan dengan pendapatan bunga bersih untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang hanya sebesar Rp1.071.009,- ribu. Selain itu terdapat juga kenaikan pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek sebesar Rp3.713.893,- ribu atau naik 658,26% dibandingkan dengan pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang hanya sebesar Rp564.200,- ribu.

Beban Usaha

Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah beban untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp16.102.852,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp16.062.832,- ribu atau naik 40.139,02% bila dibandingkan dengan juumlah beban untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang hanya sebesar Rp40.018,- ribu. Kenaikan tersebut karena kenaikan beban usaha VSI, sehubungan dengan VSI baru beroperasi komersial sejak awal tahun 2012.

Laba Tahun Berjalan

Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah laba tahun berjalan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp4.237.425,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp2.546.280,- ribu atau naik 150,57% bila dibandingkan dengan jumlah laba tahun berjalan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang hanya sebesar Rp1.691.145,- ribu. Kenaikan tersebut karena adanya kenaikan pendapatan usaha VSI sebesar Rp20.981.488,- ribu atau naik 1.283,11% bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan usaha untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp1.635.209,- ribu.

8.2. PT Victoria Insurance (VINS)

Riwayat Singkat

VINS didirikan dengan nama "**PT Asuransi Agung Asia**" yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian PT Asuransi Agung Asia No. 58 tanggal 11 Mei 1978, yang diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 55 tanggal 9 Agustus 1978, keduanya dibuat di hadapan Haji Bebasa Daeng Lalo, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/272/20 tanggal 14 Agustus 1978, didaftarkan dalam Buku Register pada Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 367/1978 tanggal 20 September 1978, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 1978, Tambahan No. 595 . (yang selanjutnya disebut sebagai **"Akta Pendirian**"). Anggaran dasar VINS pada saat pendirian adalah sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Anggaran Dasar tesebut telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 123 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-27845 tanggal 26 Agustus 2011 dan telah di daftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0071203.AH.01.09 Tahun 2011 (selanjutnya disebut sebagai "**Akta No. 123/2011"**).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar VINS , kegiatan usaha VINS adalah menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian, dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian termasuk menerbitkan polis-polis;
b. Menerima pembayaran premi-preimi dalam hubungannya dengan polis-polis atau kontrak-kontrak asuransi;
c. Menetapkan atau membayarkan tuntutan-tuntutan atau polis-polis atau kontrak-kontrak asuransi yang dikeluarkan atau yang diadakan oleh perseroan;
d. Menjalankan setiap kegiatan dan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat tersebut di atas dan bentuk sebagaimana disyaratkan dengan tidak

mengurangi ketentuan peraturan Negara Republik Indonesia satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya".

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 123/2011, struktur permodalan VINS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 180.000 (seratus delapan puluh ribu) lembar saham, dengan nominal setiap saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham
Modal Disetor	:	Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).

Susunan pemegang saham VINS berdasarkan struktur modal sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**180.000**	**180.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor:			
Perseroan	79.000	79.000.000.000,-	98,75
Aldo Jusuf Tjahaja	1.000	1.000.000.000,-	1,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**80.000**	**80.000.000.000,-**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**100.000**	**100.000.000.000,-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi VINS yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham VINS tanggal 23 Juli 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham VINS No. 126 tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.10-32778 tanggal 7 September 2012, dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT VINS No. 181 tanggal 30 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan VINS No. AHU-AH.01.10-08822 tanggal 11 Maret 2013. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Sulistijowati
Komisaris	:	Daroel Oeloem Aboebakar
Komisaris Independen	:	Vivekanand Atmaram Tolani

DIREKSI

Direktur Utama	:	Loekito Saggitariono
Direktur	:	Albert Nugroho Adijuwono

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan VINS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan dengan penerapan PSAK No. 28 (Revisi 2012)

tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK No. 62 tentang Kontrak Asuransi, sedangkan untuk laporan keuangan VINS untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akhyadi Wadisono dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan dengan penyesuaian nilai wajar aset keuangan dan perhitungan pajak tangguhan.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2011	2012
Jumlah Aset	44.547.973	88.238.183	88.473.590
Jumlah Liabilitas	2.087.891	8.899.244	8.015.829
Jumlah Ekuitas	42.460.082	79.338.939	80.457.761
Jumlah Pendapatan	1.577.033	6.638.978	8.745.753
Jumlah Beban	1.330.485	4.358.615	6.808.356
Laba Tahun Berjalan	228.995	2.313.775	1.874.837

Analisa singkat atas perubahan signifikan

Jumlah Aset

Pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset VINS pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp88.238.183,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp43.690.210,- ribu atau naik sebesar 98,07% bila dibandingkan dengan jumlah aset VINS pada tanggal 31 Desember 2010 yang hanya sebesar Rp44.547.973,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena naiknya jumlah investasi VINS sebesar Rp34.668.667,- ribu atau naik 88,18% dari Rp39.315.660,- ribu di tahun 2010 menjadi Rp73.984.327,- ribu di tahun 2011. Investasi tersebut berupa dapat berupa deposito berjangka dan efek tersedia untuk dijual yang masing-masing naik 20,48% dan 106,3% dari masing-masing sebesar Rp8.300.000,- ribu dan Rp31.015.660,- ribu di tahun 2010 menjadi masing-masing sebesar Rp10.000.000,- ribu dan Rp63.984.327,- ribu di tahun 2011.

Jumlah Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah liabilitas VINS pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp8.889.244,- ribu atau mengalami kenaikan sebesar 326,23% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas VINS pada tanggal 31 Desember 2010 yang hanya sebesar Rp2.087.891,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya utang reasuransi pihak ketiga dari Rp4.550 ribu di tahun 2010 menjadi Rp3.001.224,- ribu di tahun 2011, naiknya liabilitas asuransi dari premi yang belum merupakan pendapatan dari Rp1.955.037,- di tahun 2010 menjadi Rp3.425.481,- ribu di tahun 2011.

JumlahEkuitas

Pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah ekuitas VINS pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp79.338.939,- ribu pada tanggal 31 Desember 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp36.878.857,- atau naik 86,85% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas VINS pada tanggal 31 Desember 2010. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp40.000.000,- ribu.

Jumlah Pendapatan

Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah pendapatan VINS untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp6.638.978,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp5.061.945,- ribu atau naik 80,00% dari Rp1.577.033,- ribu untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Kenaikan tersebut terutama karena naiknya jumlah pendapatan premi dan hasil investasi VINS yang masing-masing naik sebesar Rp2.510.890,- ribu dan Rp1.831.427,- atau masing-masing naik 1.070% dan 199% dari masing-masing Rp234.667,- ribu dan Rp920.429,- ribu pada tahun 2010 menjadi masing-masing Rp2.745.558,- dan Rp2.751.857,- ribu pada tahun 2011.

Beban

Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah beban untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp6.808.356,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp2.449.741,- ribu atau naik 56,2% bila dibandingkan dengan juumlah beban untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang hanya sebesar Rp4.358.615,- ribu. Kenaikan tersebut karena adanya kenaikan dari beban klaim bruto sebesar Rp589.405,- ribu atau naik 95,9% sejalan dengan peningkatan jumlah pendapatan premi dan kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp 1.276.058,- ribu atau naik 64,5%.

Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah beban untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp4.358.615,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp3.028.130,- ribu atau naik 227,6% bila dibandingkan dengan jumlah beban usaha untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp1.330.485,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan dari beban klaim bruto dan beban gaji dan tunjangan yang masing-masing naik sebesar Rp586.810,- ribu dan Rp1.450.103,- ribu atau naik masing-masing 2.120,57% dan 274,7% dari masing-masing Rp27.672,- ribu dan Rp527.860,- ribu pada tahun 2010 menjadi masing-masing Rp614.482,- ribu dan Rp1.977.963,- ribu pada tahun 2011.

Laba Tahun Berjalan

Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Laba tahun berjalan VINS untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp2.313.775,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp2.084.819,- ribu atau naik 910,4% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp228.995,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya pendapatan premi bruto sebesar Rp6.239.660,- ribu atau naik 198,53% dari Rp3.142.863,- ribu di tahun 2010 menjadi Rp9.382.523,- ribu.

8.3. PT Victoria Manajemen Investasi (VMI)

Riwayat Singkat

VMI didirikan dengan nama “PT Victoria Manajemen Investasi” berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Victoria Manajemen Investasi No. 30 tanggal 6 April 2011 dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-29505.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0047596.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011. Aggaran dasar VMI terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-13711 tanggal 12 April 2013 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033170.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 12 April 2013.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha VMI adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar VMI, yaitu sebagai Perusahaan Efek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, VMI dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang jasa keuangan bidang Manajer Investasi.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-13711 tanggal 12 April 2013 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033170.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 12 April 2013, struktur permodalan VMI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) terdiri atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) terdiri atas 25.000 (dua puluh lima ribu) saham.
Modal Disetor	:	Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).

Susunan pemegang saham berdasarkan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.000.000.000**	**100.000.000.000,00**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor:			
Perseroan	237.500.000	23.750.000.000,00	95,00
Aldo Jusuf Tjahaja	6.250.000	625.000.000,00	2,50
Yangky Halim	6.250.000	625.000.000,00	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**250.000.000**	**25.000.000.000,00**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**750.000.000**	**75.000.000.000,00**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Komisaris dan Direksi VMI yang sedang menjabat adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham VMI No. 307 tanggal 21 Desember 2012, dibuat dihadapan Suwarni Sukiman S.H., Notaris di Jakarta, yang pelaporannya telah diterima olleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No AHU-AH.01-10-06384 tanggal 25 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0015110.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

KOMISARIS
Komisaris : Sugiman Binsar

DIREKSI
Direktur : Wira Kusuma

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan VMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sedangkan untuk laporan keuangan VMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 tidak diaudit .

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2011	2012
Jumlah Aset	-	25.000.000.000	24.900.000.000
Jumlah Liabilitas	-	-	-
Jumlah Ekuitas	-	25.000.000.000	24.900.000.000
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Jumlah Beban	-	-	10.000.000
Laba (Rugi) Bersih	-	-	(10.000.000)

9. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK (BVIC)

Riwayat singkat
BVIC didirikan dengan nama PT Bank Victoria, berdasarkan Akta Pendirian No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, sebagaimana diubah dengan Akta No 30 tanggal 8 Juni 1993, yang keduanya dibuat di hadapan Amrul Partomoan Pohan S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, yang seluruhnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4903.HT.01.01 TH 93, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 342/LEG/1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, Tambahan 2602.

Anggaran dasar terakhir BVIC adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 112 tanggal 27 Juni 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.76606.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099270.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 11 tanggal 5 Februari 2011, Tambahan No. 111 jo. Akta No 59 tanggal 7 Juni 2011, dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU.36593.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0059633 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 jo. Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Umum Luar Biasa BVIC No 21 tanggal 8 Oktober 2012, dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-AH.01.10-37171 tanggal 16 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0090572.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012.

Kegiatan Usaha
Adapun maksud dan tujuan BVIC sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta No 59 tanggal 7 Juni 2011, dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU.36593.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0059633 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 adalah berusaha dalam bidang Bank Umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas BVIC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,deposito berjangka,sertifikat deposito,tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. memberikan kredit baik kredit jangka menegah,panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   i surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   ii surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
   iii kertas perbendaharaan engara dan surat jaminan pemerintah;
   iv Sertifikat Bank Indonesia;
   v Obligasi;
   vi surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
   vii. surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di busa efek;
k. membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kedit dan kegiatan wali amanat;
m. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia;
n. melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lambaga keuangan.
o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, sewa guna usaha, perusahaan miodal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kedit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
q. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk malakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia.
r. mengusahaka usaha-usaha yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kegiatan Usaha Utama

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,deposito berjangka,sertifikat deposito,tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. memberikan kredit baik kredit jangka menegah,panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   i. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   ii. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
   iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
   iv. Sertifikat Bank Indonesia;
   v. Obligasi;
   vi. surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
   vii. surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di busa efek;
i. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia;
j. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk malakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia.

Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
a. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
b. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
c. membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
d. melakukan kegiatan anak piutang, usaha kartu kedit dan kegiatan wali amanat;
e. melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lambaga keuangan.
f. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
g. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kedit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
h. mengusahaka usaha-usaha yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Umum Luar Biasa BVIC No. 21 tanggal 8 Oktober 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana penerimaan

pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-AH.01.10-371771 tanggal 16 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0090572.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012, struktur permodalan BVIC adalah:

Modal Dasar	:	Rp1.400.000.000.000,- (satu trilyun empat ratus milyar Rupiah) terdiri atas 14.000.000.000 (empat belas milyar) saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp654.768.457.600,- (enam ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) terdiri atas 6.547.684.576 (enam milyar lima ratus empat puluh tujuh enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam) saham.
Modal Disetor	:	Rp654.768.457.600,- (enam ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah).

Susunan pemegang saham berdasarkan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**14.000.000.000**	**1.400.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor:			
Perseroan	2.302.017.500	230.201.750.000,-	35,16
PT Suryayudha Investindo Cipta	418.953.250	41.895.325.000,-	6,40
PT Nata Patindo	220.000.000	22.000.000.000,-	3,36
Suzana Tanojo	882.000.000	88.200.000.000,-	13,47
Atrium Asia Investmenet Managemen Pte. Ltd	418.953.250	41.895.325.000,-	6,40
Masyarakat Lainnya	2.305.760.576	230.576.057.600,-	35,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**6.547.684.576**	**654.768.457.600,-**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**7.452.315.424**	**745.231.542.400,-**	

Susunan pemegang saham BVIC pada tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan Daftar Pemegang Saham BVIC yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek BVIC tanggal 7 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**14.000.000.000**	**1.400.000.000.000,00**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor:			
Perseroan	2.302.017.500	230.201.750.000	34,86
PT Suryayudha Investindo Cipta	418.953.250	41.895.325.000	6,34
PT Natapatindo	220.000.000	22.000.000.000	3,33
Suzanna Tanojo	882.000.000	88.200.000.000	13,36
Atrium Asia Investmenet Managemen Pte. Ltd	584.723.619	58.472.361.900	8,86
Masyarakat Lainnya	2.195.426.073	219.542.607.300	33,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**6.603.120.442**	**660.312.044.200**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**7.396.879.558**	**739.687.955.800**	

Pengurusan dan Pengawasan
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini adalah:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/ Komisaris Independen	:	Daniel Budi Rahayu
Komisaris/Komisaris Independen	:	Gunawan Tenggaraharja
Komisaris/Komisaris Independen	:	Zaenal Abidin
Komisaris	:	Suzanna Tanojo

DIREKSI

Direktur Utama	:	Eko Rachmansyah Gindo
Direktur	:	Oliver Simorangkir
Direktur	:	Gregorius Andrew Andryanto Haswin
Direktur	:	Ramon Marlon Runtu
Direktur Kepatuhan	:	Tamunan

Susunan Komisaris dan Direksi BVIC yang sedang menjabat adalah berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BVIC No. 22 tanggal 8 Oktober 2012, dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta, sebagaimana penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-AH.01.10-40190 tanggal 12 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-00979.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris BVIC telah dilaporkan kepada Bank Indonesia dan telah diterima oleh Bank Indonesia melalui Surat BI tentang No. 14/67 DPB3/PB3-2/Rahasia Tanggal 19 Oktober 2012 Perihal Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BVIC, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Pengawasan Bank Indonesia.

10. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan Entitas Anak dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum:

No.	Nama	GP	Perseroan	VSI	VINS	VMI	BVIC
1	Christien Tanoyo	K	-	-	-	-	-
2	Suzanna Tanojo	D	KU	-	-	-	K
3	Peter Rulan Isman	-	KI	-	-	-	-
4	Aldo Jusuf Tjahja	-	DU	K	-	-	-
5	Cendrasuri Ependy	-	DTA	-	-	-	-
6	Rebecca Wahjutirto Tanoyo	-	D	-	-	-	-
7	Antonius Tjipto	-	-	KU	-	-	-
8	Iwan	-	-	DU	-	-	-
9	Setiawan Budiman	-	-	D	-	-	-
10	Yangky Halim	-	-	D	-	-	-
11	R. Agustinus Wisnu Widodo	-	-	D	-	-	-
12	Sulistijowati	-	-	-	KU	-	-
13	Daroel Oeloem Aboebakar	-	-	-	K	-	-
14	Vivekananda Atmaram Tolani	-	-	-	KI	-	-
15	Loekito Sagittariono	-	-	-	DU	-	-
16	Albert Nugroho Adijuwono	-	-	-	D	-	-
17	Sugiman Binsar	-	-	-	-	K	-
18	Wira Kusuma	-	-	-	-	D	-
19	Daniel Budi Rahayu	-	-	-	-	-	KU/KI

No.	Nama	GP	Perseroan	VSI	VINS	VMI	BVIC
20	Gunawan Tenggaraharja	-	-	-	-	-	KI
21	Zaenal Abidin	-	-	-	-	-	KI
22	Eko Rachmansyah Gindo	-	-	-	-	-	DU
23	Oliver Simorangkir	-	-	-	-	-	D
24	Gregorius Andrew Andryanto Haswin	-	-	-	-	-	D
25	Ramon Marlon Runtu	-	-	-	-	-	D
26	Tamunan	-	-	-	-	-	D

Keterangan:

KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen	DTA	:	Direktur Tidak Terafiliasi

11. DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

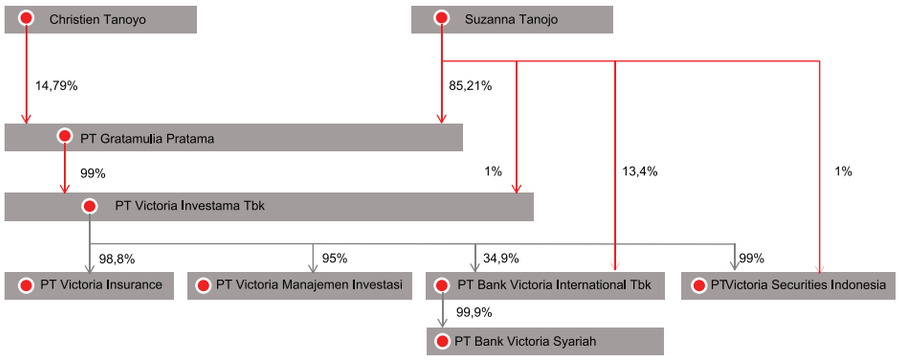

12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

12. 1 Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 25 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Dahlia, SH, Notaris di Jakarta juncto Akta Suplesi Perjanjian Kredit No. 23 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Hartojo, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 010/P-012/DL/V/2013-7 tanggal 15 Mei 2013.	PT Bank Sinarmas dan Perseroan	Fasilitas kredit berupa pinjaman sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp22.500.000.000,00 dalam bentuk fasilitas *Demand Loan (Revolving)*. Saldo terhutang per 31 Desember 2012 sebesar Rp9.400.000.000,- (sembilan miliar empat ratus juta Rupiah) atau sebesar 37,98% dari total liabilitas dari pihak ketiga per 31 Desember 2012. Bunga sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) per tahun.	25 Juni 2008 - 25 Juni 2013 (Berdasarkan Surat Sinarmas No. SKL.451/2013/CM/ CR-KCU tanggal 21 Juni 2013, diterangkan antara lain bahwa fasilitas sedang dalam proses approval perpanjangan untuk sampai dengan 25 Juni 2014 dan sehubungan dengan hal tersebut dilakukan perpanjangan sementara fasilitas kredit sampai dengan 25 Juli 2013.)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
2.	Junior Convertible Loan Agreement tertanggal 9 September 2011 (JCLA)	Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd. dan Perseroan	Pinjaman sebesar Rp10.660.428.135,00. atau sebesar 43,01% dari total liabilitas dari pihak ketiga per 31 Desember 2012. Pinjaman tidak dikenakan bunga.	9 September 2011 – 2 Desember 2013
3.	Call Option Agreement tanggal 9 September 2011	Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd (“Barron”) dengan Perseroan	Perseroan menerbitkan dan menjual 236.898.403 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga) opsi waran, dimana masing-masing penawaran pembelian atas 1 opsi waran dilaksanakan dengan pemberitahuan, setara dengan harga nilai nominal Opsi Waran. Opsi dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sebagian, kapanpun sebelum tanggal 3 Desember 2013. Nilai call option agreement itu adalah sebesar Rp10.660.428.135,- atau sebesar 43,07% dari total liabilitas dari pihak ketiga per 31 Desember 2012.	Sampai dengan 2 Desember 2013
4.	Perjanjian Sewa No. MGP.009/V/LA-OFF/2011 tanggal 12 Mei 2011	PT Manggala Gelora Perkasa (“PT MGP”) dengan Perseroan	Sewa ruangan di Lantai 8, Unit A, Panin Tower, Senayan City seluas 467,10 m2.	1 Januari 2010-1 Januari 2016
5.	Perjanjian Sewa No. MGP.012/V/ LA-OFF/2011 tanggal 30 Mei 2011 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Pengalihan No. MGP.003/XII/ASSGN-OFF/2012 tanggal 24 Desember 2012	PT Manggala Gelora Perkasa (“PT MGP”), dan Perseroan	Perjanjian Sewa Menyewa untuk sewa ruangan di Lantai 8, Unit B, Panin Tower, Senayan City seluas 311,40 m2.	1 Januari 2010-1 Januari 2016
6.	Perjanjian Sewa No. MGP.003/II/LA-OFF/2011 tanggal 4 Februari 2011 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Pengalihan No. MGP.002/II/ASSGN-OFF/2012 tanggal 1 Februari 2013	PT MGP dan Perseroan	Perjanjian Sewa Menyewa untuk sewa ruangan di Lantai 20, Unit B, Panin Tower, Senayan City seluas 446,44 m2 kepada Perseroan.	7 Februari 2011-6 September 2014
7.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 31 Maret 2010, sebagaimana diubah terakhir dengan Adendum Perjanjian Sewa Menyewa (Antena VSAT di Area Atap/ Rooftop Gedung Senayan City) tanggal 4 Maret 2013	PT MGP dengan Perseroan	Sewa Menyewa (Antena VSAT di Area Atap/Rooftop Gedung Senayan City), Jalan Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.	10 Desember 2011 - 9 Desember 2014
8.	Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9430342735-PK-003 tanggal 11 April 2011	PT BCA Finance dengan Perseroan	Fasilitas pembiayaan konsumen dengan jumlah Rp279.760.000,00 atau sebesar 1,13% dari total liabilitas dari pihak ketiga per 31 Desember 2012.. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Fortuner 4x2 G M/T Diesel tahun 2011, No. Rangka MHFZR69G9B3018941, No. Mesin 2KD5226851.	11 April 2011 -11 Maret 2014
9.	Akta Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham (Perjanjian Repo Saham) No. 141 tanggal 13 Desember 2012, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perpanjangan Perjanjian Repo Saham) No.: 141B/REPO-MYRX/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013	Benny Tjokrosaputro dan Perseroan	Penjualan dan Pembelian Kembali Saham	14 Desember 2012 – 10 September 2013

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
10.	Perjanjian Leasing: a. No. 0162/KPM/VI/11 tanggal 17 Juni 2011 b. No.0130/KPM/V/11 tanggal 18 Mei 2011 c. No.0113/KPM/V/11 tanggal 18 Mei 2011	PT Bank Pan Indonesia Tbk (”Bank Panin”) dan Perseroan	a. Fasilitas Kredit Pemilikan Mobil dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp363.200.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) atau sebesar 1,47% dari total liabilitas dari pihak ketiga per 31 Desember 2012.. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) unit mobil Honda All New Accord tahun 2011, No. Rangka MRHCP2640BP120372, No. Mesin K24Z24950485. b. Fasilitas Kredit Pemilikan Mobil dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta Rupiah) atau sebesar 0,59% dari total liabilitas dari pihak ketiga per 31 Desember 2012. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina A/T tahun 2011, No. Rangka MHB1CG1ABJ06048, No. Mesin HR15981557A. c. Fasilitas Kredit Pemilikan Mobil dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp116.440.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) atau sebesar 0,47% dari total liabilitas dari pihak ketiga per 31 Desember 2012. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G M/T tahun 2011, No. Rangka MHFM1BA3JBK308831, No. Mesin K3DH32935.	a. 17 Juni 2011 – 17 Juni 2014 b. 18 Mei 2011 – 18 Mei 2014 c. 2 Mei 2011 – 2 Mei 2014
11.	Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perjanjian Repo Saham) No. 001/VI/REPO-BTEK/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perubahan Perjanjian Repo Saham) No. 01E/VI/REPO-BTEK/V/2013 tanggal 12 Juni 2013, seluruhnya dibuat di bawah tangan.	Dwi Nugroho dan Perseroan	Penjualan dan pembelian kembali saham	13 Pebruari 2013 – 13 Agustus 2013
12.	Perjanjian Repo Saham No. 005/VI/ REPO-DN/IV/2013 tanggal 18 April 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Perjanjian Repo Saham No. : 005C/VI/REPO-BTEK/V/2013 tanggal 01 Juni 2013, seluruhnya dibuat di bawah tangan.	Dwi Nugroho dan Perseroan	Penjualan dan pembelian kembali saham	18 April 2013 – 17 Juli 2013

12.2 Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup & Keterangan Lainnya	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 21 tanggal 11 Desember 2006 *juncto* Akta Pengubahan I Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 60 tanggal 23 Mei 2007 *juncto* Akta Pengubahan II Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 86 tanggal 24 April 2012 *juncto* Akta Pengubahan III Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 95 tanggal 11 Januari 2013, yang seluruhnya dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta	PT Bank Victoria, Tbk dan Perseroan	Pinjaman Rekening Koran (PRK) sampai jumlah setinggi-tingginya Rp7.500.000.000,00 Saldo terhutang per 31 Desember 2012 sebesar Rp6.870.527.371,- (enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah) atau sebesar 15,89% dari total liabilitas dari pihak berelasi per 31 Desember 2012. Bunga sebesar 12% (dua belas persen) efektif per tahun. Perjanjian ini merupakan perjanjian afiliasi yang terjadi antara Perseroan dan Entitas Asosiasi.	11 Desember 2006 - 11 Desember 2013

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup & Keterangan Lainnya	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Pinjaman No. 249/VI-DIR/ XII/2012 tanggal 21 Desember 2012	Suzanna Tanojo dan Perseroan	Pinjaman sebesar Rp8.000.000.000,00, bunga sebesar 8% (delapan persen) per tahun atau sebesar 18,50% dari total liabilitas dari pihak berelasi per 31 Desember 2012. Perjanjian ini merupakan perjanjian afiliasi yang terjadi antara Perseroan dan Pemegang saham Perseroan.	21 Desember 2012 – 21 Desember 2013
3.	Junior Convertible Loan Agreement tertanggal 9 September 2011 (JCLA)	Aldo Jusuf Tjahaja dan Perseroan	Pinjaman sebesar Rp14.960.000.000,00. atau sebesar 34,60% dari total liabilitas dari pihak berelasi per 31 Desember 2012 Pinjaman tidak dikenakan bunga. Perjanjian ini merupakan perjanjian afiliasi yang terjadi antara Perseroan dan Entitas Asosiasi.	9 September 2011 – 2 Desember 2013
4.	Call Option Agreement tanggal 9 September 2011	Aldo Jusuf Tjahaja (“Aldo”) dengan Perseroan	Perseroan menerbitkan dan menjual 272,000,000 (dua ratus tujuh puluh dua) opsi waran, dimana masing-masing penawaran pembelian atas 1 opsi waran dilaksanakan dengan pemberitahuan, setara dengan harga nilai nominal Opsi Waran. Opsi dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sebagian, kapanpun sebelum tanggal 3 Desember 2013. Nilai perjanjian tersebut adalah sebesar Rp14.960.000.000,- atau sebesar 34,60% dari total liabilitas dari pihak berelasi per 31 Desember 2012. Perjanjian ini merupakan perjanjian afiliasi yang terjadi antara Perseroan dan Direksi Perseroan.	Sampai dengan 2 Desember 2013
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan tanggal 23 Januari 2013	Perseroan dan PT VSI	Sewa ruangan yang terletak di Panin Tower Senayan City Lantai 8, Jalan Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Perjanjian ini merupakan perjanjian afiliasi yang terjadi antara Perseroan dan Entitas Anak.	23 Januari 2013 – 23 Januari 2014
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan tanggal 7 Maret 2013	Perseroan dan PT VINS	Sewa ruangan yang terletak di Panin Tower Senayan City Lantai 20 Unit B, Jalan Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Perjanjian ini merupakan perjanjian afiliasi yang terjadi antara Perseroan dan Entitas Anak.	7 Maret 2013 – 6 Maret 2014
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tanggal 23 Januari 2013	Perseroan dan VSI	VI menyewakan 5 mobil kepada VSI untuk keperluan kantor. Perjanjian ini merupakan perjanjian afiliasi yang terjadi antara Perseroan dan Entitas Anak	23 Januari 2013 – 23 Januari 2014

Terdapat *negative covenant* yang dapat merugikan merugikan pemegang saham berkenaan dengan pembatasan pembagian dividen, namun sehubungan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ketentuan pembatasan pembagian dividen tersebut telah dicabut.

13. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan, pada tanggal Prospektus ini, memiliki dan/atau menguasai dengan sah tanah yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4348 atas tanah yang terletak di Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta seluas 68 m^2 (enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00018/Cideng/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 2011 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan jangka waktu kepemilikan hak selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tanggal 9 Oktober 2031. Nilai buku atas tanah tersebut pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.080.008.154,- (satu miliiar delapan puluh juta delapan ribu seratus lima puluh empat Rupiah).

14. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak menandatangani perjanjian asuransi dengan pihak lain atas harta kekayaan Perseroan.

15. PERKARA PENGADILAN YANG DIHADAPI DIREKSI, KOMISARIS, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan sedang terlibat dalam perkara perdata No. 155/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.Jkt.Pst antara Abdul Malik Jan sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi 39 dalam kasus perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pelaksanaan IPO PT Media Nusantara Citra,Tbk dimana perkara tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung. Perkara sebagaimana tersebut di atas, dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan.

Selain perkara sebagaimana tersebut di atas, Perseroan tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan juga tidak pernah menerima somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan, yang bersifat material dan berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Perseroan.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. UMUM

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang investasi dan juga sebagai perusahaan induk grup usaha Victoria, adapun beberapa perusahaan yang menjadi bagian dari grup usaha Victoria sekaligus berstatus Entitas Anak adalah PT Victoria Securities Indonesia, PT Victoria Insurance, dan PT Victoria Manajemen Investasi yang hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan dan satu Entitas Asosiasi yaitu : PT Bank Victoria International, Tbk.

Perseroan didirikan pada tahun 1989 dengan nama PT Tata Sekuritas Maju, yang kemudian mengganti namanya menjadi PT Victoria Sekuritas pada tahun 2000. Sejak awal pendiriannya, Perseroan berfokus pada aktivitas pasar modal antara lain sebagai perantara pedagang efek, penasehat investasi dan penjamin emisi efek. Dalam perkembangannya pada tahun 2012, Perseroan melakukan reorganisasi kegiatan usaha perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek kepada entitas anak yaitu PT Victoria Securities Indonesia, dan Perseroan kemudian berlaku sebagai perusahaan induk grup usaha Victoria yang berfokus pada kegiatan usaha Investasi.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan di bidang pertanian, perkebunan, telekomunikasi, perdagangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat :

a. Menjalankan usaha industri untuk produksi pipa baja perangkat dan sistem komunikasi, barang-barang elektronik dan elektrik, kimia/petrokimia, serta mendirikan dan menjalankan berbagai rupa usaha industri lainnya dan memperdagangkan hasil-hasilnya.
b. Menjalankan usaha dalam bidang kontraktor/pemborong bangunan, pabrik bahan bangunan dan bahan konstruksi, gedung, jalan, jembatan, pengairan, instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi, baik sebagai perencana maupun sebagai pelaksana.
c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penyediaan dan pematangan lahan, termasuk antara lain menyelenggarakan pendirian gedung-gedung baru, rehabilitasi gedung-gedung yang sudah ada dan melakukan penjualan serta sewa menyewa gedung-gedung.
d. Berusaha dalam bidang pembangunan, pemilikan pengelolaan perumahan (*real estate*), kawasan industri, gedung kantor, apartemen, condominium, properti serta pusat perdagangan (shopping centre) dan berusaha sebagai developer dengan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, termasuk pula pembebasan tanah (*landclearing*), pemerataan, pemetaan, perkavlingan dan penjualan tanah baik tanah untuk perumahan maupun tanah untuk industri berikut juga segala bangunan yang berada diatasnya.
e. Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor, dagang antar pulau (interinsulair) dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat.
f. Bertindak sebagai leveransir, grossir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain baik dari luar negeri.
g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
h. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas.

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan investasi papan atas dalam skala internasional dan memberikan jasa pelayanan keuangan terpadu (*one stop financial solutions*) yang terpercaya melalui Entitas Anak.

Misi Perseroan adalah:
a. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang berprospek baik guna memaksimalkan nilai pemegang saham;
b. Memberikan pelayanan dan jasa informasi terkini di bidang keuangan yang terintegrasi bagi *customer;*
c. Mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui pengembangan yang berkelanjutan.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Tata Sekuritas Maju dan mendapatkan ijin sebagai Perantara Perdagangan Efek pada tahun 1989. Kemudian Perseroan menjadi Anggota Bursa Efek Jakarta pada tahun 1995 dilanjutkan menjadi Anggota Bursa Efek Surabaya pada tahun 1999. Pada tahun 2000, Perseroan mengganti nama menjadi PT Victoria Sekuritas dan pada tahun tersebut pula Perseroan mendapatkan ijin sebagai Perusahaan Penjamin Emisi Efek. Ijin transaksi marjin, Perseroan dapatkan dari Bursa Efek Jakarta pada tahun 2005. Pada tahun 2011, Perseroan melakukan reorganisasi dan membentuk badan usaha baru yang bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek, dengan Perseroan menjadi Induk bagi entitas baru tersebut. Dengan adanya perubahan tersebut Perseroan menjadi perusahaan investasi yang memiliki beberapa Entitas Anak.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah menjadi perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan juga bertindak sebagai perusahaan induk, memberikan jasa penasehat keuangan dan *structure finance*, dan memberikan dukungan serta layanan jasa lainnya kepada Entitas Anak.

Perseroan saat ini memiliki penyertaan pada 3 (tiga) Entitas Anak, dan 1 (satu) Entitas Asosiasi dengan struktur kepemilikan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
1.	PT Victoria Securities Indonesia	Jakarta	Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek	99%	Operasi
2.	PT Victoria Insurance	Jakarta	Asuransi Umum	98,75%	Operasi
4.	PT Victoria Manajemen Investasi	Jakarta	Akan dikembangkan menjadi Manajer Investasi	95%	Belum Beroperasi
Entitas Asosiasi					
1.	PT Bank Victoria International Tbk	Jakarta	Perbankan	34,86%	Operasi

1.1 PT Victoria Securities Indonesia (“VSI”)

VSI merupakan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, dimana kegiatan usaha tersebut merupakan hasil reorganisasi dari kegiatan usaha Perseroan pada tahun 2011. VSI menawarkan jasa keuangan bagi klien perorangan maupun berbentuk badan usaha lokal dan asing yang ingin mendapatkan akses kedalam pasar modal di Indonesia.

Visi VSI adalah Menjadi "Perusahaan Sekuritas papan atas yang memberikan jasa pelayanan terpadu (*one stop solutions*) dan terpercaya di Pasar Modal Indonesia".

Sedangkan misi VSI adalah:
- Menyediakan fasilitas jasa terbaik bagi nasabah ritel maupun institusi;
- Memberikan pelayanan yang terintegrasi bagi para calon emiten, emiten maupun nasabah baik untuk produk berbasis ekuitas, *fixed income* maupun *hybrid product;*
- Memberikan jasa informasi terkini di bidang keuangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah;
- Turut serta mengembangkan Pasar Modal Indonesia.

VSI memiliki Rencana Usaha Strategis sebagai berikut :
- Pengembangan Sumber Daya Manusia yang handal, kompeten dan memiliki etika yang baik;
- Menyediakan infrastruktur yang memadai untuk menunjang berbagai kegiatan operasional;
- Pengembangan cabang-cabang pada beberapa provinsi di Indonesia;

- Berperan aktif dalam kegiatan penjaminan emisi efek di Pasar Modal Indonesia;
- Menyediakan jasa penasihat keuangan dalam rangka restrukturisasi keuangan dan struktur modal serta jasa *fund raising*;
- Memiliki kemampuan untuk menerbitkan produk-produk baru beserta *derivatives*-nya;
- Pengembangan Divisi Riset yang independen dan senantiasa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang terbaik bagi para nasabah;
- Memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam melakukan perdagangan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti: SUN, SUKUK dan ORI;
- Melakukan penetrasi pada pasar *online trading.*

VSI berlokasi di Senayan City, Panin Tower Lt. 8, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270.

Kinerja VSI terus berkembang seiring dengan bertumbuhnya pasar modal di Indonesia. Berikut adalah perkembangan Modal Disetor dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) VSI dari 31 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2012.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2008*	**2009***	**2010***	**2011)***	**2012)***
Modal Disetor	100	155	155	50	50
MKBD	120	252	211	45	38

** VSI baru berdiri*

Pendapatan VSI diperoleh dari 3 (tiga) divisi, yaitu :

i. Divisi Perdagangan Saham

Divisi perdagangan saham merupakan salah satu lini usaha VSI untuk melayani jasa transaksi jual dan beli saham, baik itu untuk kepentingan nasabah ritel mapun institusi. Divisi ini tidak hanya diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan eksekusi transaksi secara cepat dan akurat, namun juga mampu memberikan rekomendasi berdasarkan analisa dan informasi. Perseroan juga memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan transaksi marjin.

Tim VSI yang berpengalaman, berkomitmen untuk menyediakan layanan berkualitas kepada klien dan berdasarkan sistem informasi yang komprehensif dan terstruktur dengan baik, menyediakan informasi yang akurat dan terkini pada posisi portofolio investasi. Dengan sistem *remote trading*, VSI percaya peluang untuk tumbuh di pasar saham akan menjadi tidak terbatas.

Produk dan layanan yang diberikan oleh divisi perdagangan saham adalah:
- Perantara perdagangan saham
- Layanan nasabah korporasi dan perorangan
- Repo saham
- Agen penjual

Berikut adalah tabel perkembangan nasabah, nilai, volume dan frekuensi transaksi VSI dari divisi Perdagangan Saham

	31 Desember				
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Jumlah Nasabah	500	595	394	387	389
Total Nilai Transaksi (1)	4.642	7.355	6.723	6.448	4.092
Total Volume(2)	3.603	13.802	9.274	13.222	5.644
Total Frekuensi Transaksi (3)	77.237	136.180	164.714	151.389	121.054

(1) dalam jutaan Rupiah
(2) dalam jutaan lembar
(3) dalam kali

ii. Divisi Perdagangan *Fixed Income*

Divisi perdagangan *fixed income* melayani perdagangan transaksi jual dan beli obligasi, baik itu obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Transaksi perdagangan obligasi dilakukan melalui bursa maupun di luar bursa (*over the counter*). Perseroan senantiasa membantu nasabahnya untuk mendapatkan harga yang terbaik. VSI bertujuan untuk menjadi salah satu pemain utama di pasar fixed income. Pengetahuan yang mendalam dan basis nasabah yang luas memungkinkan VSI untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam perdagangan obligasi pemerintah maupun korporasi.

Tim pemasaran VSI terdiri dari para profesional yang memiliki keahlian dalam perdagangan dan instrumen fixed income, baik dengan investor domestik maupun luar negeri.

Berikut adalah produk dan layanan dari divisi perdagangan *fixed income*

1. Pasar Perdana
   Peserta lelang dalam pelaksanaan lelang surat utang negara dan lelang surat berharga syariah negara.
2. Pasar Sekunder
   a. Pedagang perantara transaksi obligasi negara dan surat berharga syariah negara
   b. Pedagang perantara transaksi oblgasi negara ritel dan surat berharga syariah negara ritel
   c. Pedagang perantara transaksi obligasi dan sukuk korporasi
   d. Peserta lelang dalam pelaksanaan lelang *buyback* dan *debt switching*
3. Repo Obligasi

Kinerja divisi perdagangan fixed income mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan perdagangan obligasi dalam negeri. Berikut adalah tabel perkembangan perdagangan obligasi yang dilakukan oleh VSI.

(dalam miliar Rupiah)

Perdagangan	31 Desember				
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Obligasi Pemerintah	1.577	1.180	5.802	3.168	3.368
Obligasi Korporasi	1.259	760	371	3.216	3.373
Total	2.836	1.940	6.173	6.384	6.741
Frekuensi	310	218	1178	430	471

iii. Divisi *Corporate Finance*

Divisi *corporate finance* memberikan jasa penjaminan emisi saham dan obligasi, *arranger* serta penasehat keuangan. Divisi *corporate finance* akan terus memperkuat tim, memfokuskan diri dalam bisnis penjaminan emisi dan jasa penasehat keuangan dan akan tetap aktif dalam pelaksanaan penawaran umum perdasana saham (IPO) beberapa perusahaan besar dan menengah di Indonesia. Selain itu juga berkomitmen untuk selalu selektif dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga hanya menangani emiten-emiten yang berkinerja dan bereputasi baik, serta tetap mempertahankan posisinya dalam kompetisi penjaminan emisi obligasi dan saham. Terlepas dari persaingan pasar yang semakin kuat, divisi *corporate finance* optimis bahwa kualitas layanan yang baik, terintegritas dan penguasaan mendalam akan bidang pekerjaan merupakan modal terbesar yang menjadi bekal untuk menjalankan kegiatan usaha VSI dimasa yang akan datang. Sehingga dengan demikian akan terwujud meningkatnya kepercayaan klien, industri pasar modal nasional dan masyarakat luas yang pada dasarnya juga berakar pada komitmen VSI untuk selalu melampaui ekspektasi para klien.

Mengingat masih mudanya usia pasar modal di Indonesia, dan masih banyaknya pengusaha di Indonesia yang membangun kegiatan usahanya tanpa memperhatikan pasar modal sebagai alternatif sumber pendanaan, menjadikan VSI yakin dengan tim penasehat keuangan yang VSI memiliki saat ini, VSI dapat hadir untuk membantu klien dalam merestrukturisasi keuangan klien sehingga memberikan nilai tambah yang optimal bagi bisnisnya. Lebih jauh lagi VSI juga membantu persiapan klien dalam rangka memasuki pasar modal untuk mencari pendanaan melalui mekanisme penawaran perdana kepada publik.

Divisi *corporate finance* memiliki keunggulan yang ditawarkan yaitu antara lain:
- Menawarkan *fee* yang kompetitif
- Komitmen dan tanggung jawab terhadap proses penjaminan
- Kreatifitas untuk menciptakan nilai tambah bagi klien

Berikut adalah produk dan jasa yang ditawarkan oleh divisi *corporate finance*
- Penjamin Emisi
  Tim profesional VSI menyediakan berbagai layanan satu atap yang efektif untuk mendapatkan pendanaan melalui penawaran perdana saham maupun obligasi (IPO) kepada klien VSI. VSI yakin bahwa pemahaman yang mendalam tentang bisnis dan industri klien sangat penting untuk secara efektif memaksimalkan nilai usahanya. Komitmen VSI dalam IPO akan terus berlanjut hingga ke pasar sekunder. VSI juga senantiasa memberikan dukungan sebagai penasehat aksi korporasi di masa yang akan datang untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga menguntungkan pemegang saham.

Jasa yang ditawarkan adalah pejaminan emisi perdana saham dan penerbitan obligasi.
- Arranger
  Dalam melaksanakan kegiatan sebagai arranger, VSI membantu klien untuk mencari pendanaan bersifat hutang, yang dapat melalui mekanisme langsung melalui bank maupun investor langsung dengan berbagai instrument yang dinilai paling baik dan tepat untuk klien VSI.

Jasa yang ditawarkan adalah penerbitan *medium term note* dan *bank financing.*
- Jasa penasehat keuangan
  VSI menyediakan layanan yang berkaitan dengan merger dan akuisisi, divestasi, termasuk mengindentifikasi dan menghubungi target atau pembeli, membantu negosiasi Letter of Intent dan persetujuan pembelian dan memberikan nasehat pada struktur transaksi.
  Jasa yang ditawarkan adalah merger & akuisisi, penawaran tender, restrukturisasi, penawaran umum terbatas, privatisasi & divestasi, pelepasan & penempatan aset, mitra strategis & keuangan.
- Agen Penjual
  VSI juga dapat bertindak sebagai agen penjualan dalam pelaksanaan penawaran umum perdana saham, obligasi korporasi dan sukuk korporasi.

Berikut adalah pendapatan divisi *corporate finance* :

Perdagangan	31 Desember				
	2008*	2009*	2010*	2011*	2012*
Penjaminan Obligasi*	120	139	824	1.237	1.741
Penjaminan Saham*	215	4	13	4	1
Jumlah Penjaminan	335	143	837	1.241	1742

**dalam miliar Rupiah*

2.2 PT Victoria Insurance (VINS)

PT Victoria Insurance ("**VINS**") mulai beroperasi sebagai salah satu perusahaan asuransi nasional dibawah payung grup usaha Victoria sejak Agustus 2010. VINS berlokasi di Senayan City, Panin Tower Lantai 20, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270. VINS menyediakan jasa asuransi umum, baik program standard maupun khusus, termasuk asuransi: kebakaran, kendaraan bermotor, angkutan laut, *engineering*, *surety bond*, kepada pelanggan antara lain: *multi-finance*, perbankan, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, swasta dan individu.

Visi VINS adalah menjadi perusahaan asuransi umum nasional terbaik di kelasnya dalam memberikan nilai-nilai kepada tertanggung, mitra usaha, pegawai, pemegang saham dan masyarakat.

Sedangkan misi VINS adalah :
- kehati-hatian.
- Memenuhi ketentuan dan peraturan yang terkait dengan bisnis VINS.
- Membangun hubungan saling menguntungkan dengan mitra bisnis

- Menciptakan interaksi kerja yang saling memdukung dan likungan kerja yang kondusif
- Menjamin kesejahteraan pegawai
- Memastikan nilai premium bagi pemegang saham dengan pengelolaan modal dan risiko secara efisien dan menguntungkan
- Meningkatkan hubungan komunitas melalui program tanggung jawab sosial

Strategi VINS adalah:
- Mengembangkan basis pelanggan dan bisnis di sektor produk asuransi dan surety bonds, serta produk-produk khusus, dan melakukan perluasan jaringan pemasaran di daerah-daerah prospektif diluar Jakarta serta meningkatkan kemampuan personil pemasaran underwriting dan pelayanan klaim.
- Menerapkan disiplin atas kegiatan underwriting, manajemen risiko dan strategi investasi yang konservatif untuk menjaga likuiditas yang cukup agar pembayaran klaim tepat waktu dengan cara fokus pada peluang underwriting yang menguntungkan, bukan pangsa pasar, dengan seleksi risiko secara prudent, penentuan harga yang benar dan penyesuaian portofolio bisnis agar tetap fleksibel dan responsif terhadap peluang.
- Menjaga citra terpercaya dengan keterbukaan dan membangun keyakinan dalam hubungan tertanggung dengan cara lebih responsif terhadap klaim dan keluhan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan.

Produk Asuransi

Asuransi Kebakaran

Perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan harta benda akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap, yang terjadi tiba-tiba dan tak terduga.
- Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI). Menutup kerugian akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap. Disamping jaminan tersebut, perlindungan juga diberikan terhadap risiko : Kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat orang lain, pembangkitan rakyat, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, badai, dan kerusakan karena air, biaya pembersihan puing, tertabrak kendaraan, asap industri, pencurian disertai dengan kebongkaran.
- *Industrial All Risk* (IAR) atau *Property All Risk* (PAR) Menutup kerugian atau kerusakan harta benda (persediaan, peralatan, mesin, dll) yang berada di lokasi yang diasuransikan sebagai akibat kebakaran, pencurian, banjir dan sebab-sebab lainnya sepanjang tidak dikecualikan dalam polis (*exclusion*). Polis ini juga dapat diperluas dengan tambahan premi untuk menjamin kerugian lain, misalnya *sub-limit Machinery Breakdown*, kerusuhan, pemogokan dan huru-hara.

Asuransi Pengangkutan Barang

Perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang selama pengangkutan melalui darat/laut/udara, sejak meninggalkan gedung atau tempat penyimpanan menuju gudang/tempat tujuan (domestik/internasional), serta kerugian dari biaya-biaya yang timbul akibat kecelakaan atau sebab lain yang ditegaskan dalam polis.

Asuransi Kendaraan Bermotor

Perlindungan kerugian atas kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor dan tuntutan pihak ketiga akibat tabrakan, terbalik, tergelincir dari jalan, kebakaran, kecelakaan oleh tindakan jahat, pencurian dan sebab lainnya sesuai polis.
- All Risk, perlindungan menyeluruh kerusakan dan/atau kerugian atas kendaraan baik sebagian maupun keseluruhan akibat kecelakaan, pencurian, musnah atau rusak terbakar.
- Total Loss Only (TLO), menutup hanya kerugian/kerusakan total kendaraan akibat kecelakaan tiba-tiba dan tak terduga, hilangnya kendaraan karena dicuri atau musnah terbakar, dimana biaya perbaikannya ≥ 75% dari harga kendaraan.

Asuransi Alat Berat

Perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan alat berat akibat risiko-risiko yang dijamin.
- Comprehensive, perlindungan menyeluruh atas kerugian sebagian maupun kerugian total.
- Total Loss Only, hanya melindungi terhadap kerugian total saja, yakni bilamana biaya perbaikan ≥ 75% dari harga alat berat.

Alat berat yang dapat diasuransikan excavator, bulldozer, wheel loader, dump truck, logging truck, crane, forklift dan sejenisnya.

Asuransi Rekayasa

Perlindungan terhadap kerugian akibat kerusakan material proyek dan kewajiban kepada pihak ketiga dalam masa pembangunan atau saat pemasangan termasuk masa pemeliharaan
- Asuransi kontruksi, penutupan risiko dalam pembangunan jalan, jembatan, gedung dan lain-lain.
- Asuransi pemasangan, menutup risiko dalam instalasi mesin pabrik, menara dan lain lain
- Asuransi peralatan elektronik, menutup risiko kerusakan peralatan elektronik, misalnya akibat korslet, sambaran petir.
- Asuransi Kerusakan Mesin, menutup risiko kerusakan mesin-mesin pabrik yang tiba-tiba dan tak terduga, tidak termasuk kerusakan karena masalah pemeliharaan (wear and tear).
- Asuransi Ketel Uap & Bejana tekan, menutup resiko akibat meledaknya ketel uap dan bejana tekan secara tiba-tiba dan tak terduga.

Asuransi Tanggung Gugat

Perlindungan untuk membebaskan Tertanggung atas resiko tanggung jawab hukum kepada Pihak Ketiga berupa cidera badan atau kerusakan harta.

Asuransi Uang

Perlindungan atas kerugian dan kehilangan uang oleh sebab apa pun, selama penyimpanan dalam safe box, cashier box (*Cash in Safe*), maupun dalam perjalanan ke/dari bank (*Cash in Transfer*). Uang termasuk cek, surat berharga.

Asuransi Kebongkaran

Perlindungan atas kerugian harta benda yang diasuransikan akibat pembongkaran yang disertai tindakan pemaksaan, kekerasan dan pengrusakan, tidak termasuk pengrusakan oleh tertanggung sendiri atau orang yang bekerja bagi tertanggung.

Asuransi Kecelakaan Diri

Perlindungan terhadap resiko akibat kecelakaan yang menyebabkan tertanggung: meninggal dunia, cacat tetap atau cacat sementara, cidera badan yang memerlukan pengobatan dan perawatan.

Surety Bond

Jaminan kepada pemilik proyek (obligee) atas risiko kerugian akibat kegagalan penerima pekerjaan (principal, misalnya: kontraktor/supplier/ konsultan) dalam melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak dan atau ketentuan peraturan. Surety Bond termasuk Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Uang Muka.

Jaringan Reasuransi

Didukung oleh Perusahaan Reasuransi & Asuransi dan Broker Reasuransi lokal maupun Internasional terkemuka, antara lain:

- PT Reasuransi Nasional Indonesia
- PT Maskapai Reasuransi Indonesia
- PT Tugu Reasuransi Indonesia
- PT Reasuransi International Indonesia
- PT Asuransi Eksport Indonesia
- PT Jasaraharja Putera Insurance

Berikut adalah tabel pertumbuhan pendapatan premi asuransi dari masing-masing produk asuransi yang VINS miliki:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kebakaran	936.945	1.046.848	1.499.201	4.475.629	4.905.587
Pengangkutan Barang	149.675	167.232	239.410	714.721	723.236
Kendaraan Bermotor	711.056	794.463	1.137.844	3.396.853	1.381.804
Rekayasa	65.606	73.301	105.125	269.908	55.156
Tanggung Gugat	-	-	-	176.306	187.003
Kecelakaan Diri	-.036	10.095	14.599	113.811	18.291
Surety Bond	91.927	102.710	146.684	229.194	146.661
Aneka	-	-	-	6.100	112.328
Total	**1.955.173**	**2.102.210**	**2.927.394**	**9.376.483**	**7.530.066**

1.3 PT Bank Victoria International Tbk ("BVIC")

BVIC memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994. Di samping itu, Perseroan juga memperoleh izin usaha sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia dengan Surat Izin No. 29/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997 yang kemudian diperpanjang melalui Surat No. 5/6/KEP.Dir.PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003 dan telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia melalui suratnya No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008.

BVIC menawarkan produk-produk jasa perbankan pada umumnya. Produk penghimpunan dana ditawarkan dalam bentuk rekening giro, tabungan dan deposito berjangka, layanan pembayaran gaji karyawan (*payroll*). Dalam menjalankan kegiatan usahanya. BVIC senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan perbankan yang berlaku.

BVIC mempunyai visi untuk menjadi salah satu Bank retail nasional yang kokoh, sehat, efisien serta terpercaya. Sedangkan misi BVIC adalah:

- Memberikan kualitas layanan yang terbaik kepada para nasabah secara konsisten dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Memperbaiki pengelolaan risiko dan keuangan secara terus-menerus.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berprinsip dan berdedikasi dengan mendukung pengembangan kemampuan pribadi.
- Senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BVIC berkantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta 10270 dan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, Perseroan telah melakukan perluasan dan relokasi jaringan Kantor Operasionalnya. Hingga prospektus diterbitkan BVIC telah memiliki 98 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 3 Kantor Cabang, 62 Kantor Cabang Pembantu dan 32 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Dalam rangka mengembangkan diversifikasi usaha bank pada kegiatan perbankan berbasis syariah, Perseroan telah melakukan akuisisi terhadap Bank Swaguna pada bulan Agustus 2007 dimana akuisisi Perseroan atas 99,80% saham Bank Swaguna telah disetujui oleh Bank Indonesia dan pada September

2007, Perseroan telah merealisasi penempatan modal pada Bank Swaguna, sehingga menjadikan Perseroan sebagai Pemegang Saham Pengendali dan Bank Swaguna dapat memenuhi ketentuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Bank Swaguna memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor-kantor cabang di Bekasi, Cirebon, Bandung, Tegal dan Denpasar. Pada 1 April 2010 Bank Swaguna menjadi Bank Syariah dan diubah namanya menjadi Bank Victoria Syariah dimana kepemilikan Perseroan saat ini atas Bank Victoria Syariah mencapai 99,98%. Hingga Prospektus ini diterbitkan Bank Victoria Syariah memiliki 1 Kantor Pusat, 7 kantor cabang, 10 kantor cabang Pembantu

Di bawah ini akan dirinci lebih jauh mengenai kegiatan usaha utama BVIC selaku bank yang terdiri dari penghimpunan dana, penempatan dana serta pendapatan imbal jasa (*fee based income*).

a. Penghimpunan Dana

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, BVIC menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Kegiatan operasional perbankan BVI selain didanai dari modal sendiri dan laba ditahan, juga diperoleh melalui dana masyarakat yang dihimpun melalui giro, tabungan dan deposito berjangka.

Pada saat ini komposisi dana yang dihimpun oleh BVIC masih didominasi oleh dana simpanan deposito berjangka. Biaya pendanaan dari deposito umumnya lebih mahal dibandingkan dengan tabungan dan giro, oleh karena itu di masa mendatang BVI berusaha untuk meningkatkan jumlah tabungan dan giro yang umumnya berbiaya rendah. Tabel berikut ini menunjukan komposisi berbagai sumber dana Perseroan:

TABEL KOMPOSISI DANA YANG DIHIMPUN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%
Giro	871.451	142,93	358.724	100,38	179.021	35,61	132.011	(29,35)	186.840	(18,09)
Tabungan	874.291	39,60	626.286	47,66	424.153	34,28	315.869	62,21	194.724	10,21
Deposito Berjangka	9.769.990	18,22	8.263.998	(0,35)	8.292.893	59,14	5.211.096	40,39	3.711.853	16,71
Jumlah	**11.515.732**	**24,52**	**9.249.008**	**3,97**	**8.896.067**	**57,20**	**5.658.976**	**38,25**	**4.093.417**	**14,17**

Dalam menghimpun dana masyarakat, BVIC menawarkan beberapa produk seperti:

1. Rekening Giro : Bentuk simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro dengan jasa giro yang menarik.
2. Tabungan Victoria : Bentuk simpanan dana pihak ketiga dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka dengan mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui ATM Victoria yang bekerja sama dengan jaringan ATM BCA serta adanya fasilitas autodebet pembayaran tagihan PLN Praqtis dan tagihan Telkom.
3. Tabungan V-Junior : Bentuk simpanan dana pihak ketiga (dikhususkan untuk anak dan remaja) dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka dengan mendapatkan hadiah-hadiah langsung yang menarik.
4. Tabungan V-Pro : Bentuk simpanan dana pihak ketiga (dikhususkan untuk para profesional) yang mempunyai suku bunga yang kompetitif dan point reward dengan bermacam-macam hadiah yang menarik dan mempunyai kemudahan bertransaksi melalui ATM Victoria yang bekerja sama dengan jaringan ATM BCA serta adanya fasilitas autodebet pembayaran tagihan PLN Praqtis dan Telkom.

5.	Tabungan V-Bisnis	:	Bentuk simapanan dana pihak ketiga yang dapat menampung dana nasabah baik perorangan maupun non perorangan dengan suku bunga yang dihitung secara threshold rata-rata bulanan.
6.	Tabungan V-Plan	:	Produk tabungan berjangka dimana nasabah mendapat perlindungan asuransi secara gratis serta dapat memilih hadiah secara langsung sesuai keinginan nasabah masing-masing.
7.	Tabungan Victoria DAHSYAT Sato Boom	:	Merupakan modifikasi produk dari tabungan victoria yang memberikan benefit berupa hadiah langsung berupa cashback yang dikreditkan langsung ke rekening nasabah untuk setiap penempatan fresh fund baru yang diblokir selama jangka waktu 3 bulan.
8.	Tabungan Victoria DAHSYAT Gadget	:	Merupakan modifikasi produk dari tabungan victoria yang memberikan hadiah langsung berupa gadget New iPad 3 untuk setiap penempatan fresh fund yang diblokir selama jangka waktu 1 s/d 5 tahun.
9.	Tabungan Victoria DAHSYAT	:	Merupakan modifikasi produk dari tabungan victoria yang memberikan benefit berupa cashback yang dikreditkan langsung ke rekening nasabah untuk setiap penempatan dana fresh fund baru yang diblokir selama jangka waktu 6 dan 12 bulan.
10.	Tabungan Ku	:	Rekening Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan bersama oleh bank-bank di Indonesia, guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11.	Deposito Berjangka	:	Simpanan berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan bunga yang bersaing.
12.	Deposito Harian (On Call)	:	Simpanan dana pihak ketiga dalam jangka pendek (di bawah 1 bulan) dengan bunga yang menarik.
13.	Tabungan Karyawan	:	Rekening tabungan untuk karyawan, yang digunakan untuk pembayaran gaji (payroll).

b. Penempatan Dana

Sasaran utama dari penyaluran dana meliputi pemberian kredit/fasilitas pinjaman, penempatan pada bank lain, investasi sementara dalam bentuk surat berharga dan penyertaan.

Dalam menempatkan dananya, BVIC menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik. Kredit diberikan melalui suatu proses studi kelayakan yang selektif dengan cara melakukan penelitian secermat mungkin sebelum dibawa ke Komite Kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

BVIC menyediakan berbagai produk pinjaman untuk tujuan komersil dan konsumsi. Adapun jenis-jenis fasilitas kredit yang ditawarkan BVIC:

1.	*Kredit Modal Kerja*	:	Kredit Modal Kerja merupakan pinjaman yang diberikan untuk kebutuhan modal kerja, biasanya dalam jangka waktu pendek (1 tahun).
2.	*Kredit Investasi*	:	Kredit Investasi merupakan pinjaman yang diberikan untuk membiayai barang modal dan jasa yang diperlukan untuk investasi, umumnya dalam jangka waktu menengah/panjang (lebih dari 1 tahun).
3.	*Kredit Usaha Kecil (KUK)*	:	Pemberian kredit ini difokuskan pada kegiatan ritel dan konsumer melalui produk-produk kredit Perseroan.
4.	*Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)*	:	Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen, pada Perseroan disebut V-Home, merupakan kredit pemilikan rumah yang memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan seperti: proses cepat, suku bunga kompetitif, plafon kredit yang fleksibel dan kemudahan memilih pengembang.

5. *Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)* : Kredit Kendaraan Bermotor, pada Perseroan disebut V-To, merupakan pinjaman untuk pembelian mobil baru/bekas dengan jangka waktu cicilan maksimum 4 tahun, suku bunga kompetitif serta dilindungi oleh asuransi kecelakaan. Persetujuan bisa didapat dalam 2 - 3 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap.
6. *Kredit Multi Guna (KMG)* : Kredit Multi Guna merupakan kredit yang diberikan kepada perorangan dengan jaminan rumah, ruko, atau apartemen miliknya untuk berbagai keperluan baik investasi maupun konsumtif antara lain: pembelian barang modal, biaya pendidikan, renovasi rumah, pembelian perlengkapan rumah dan lain sebagainya.
7. *Bank Garansi* : Bank Garansi yang diberikan kepada Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia dan telah menjadi nasabah Perseroan baik pemegang rekening giro/deposito maupun sebagai nasabah kredit. Maksimal nilai Bank Garansi adalah jumlah yang dibayarkan dikurangi kontra garansi berupa setoran tunai/deposito, sedangkan jangka waktu Bank Garansi paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal realisasi Bank Garansi.
8. *Chanelling* : Merupakan bentuk kerjasama pembiayaan, dimana Bank menyalurkan kredit yang diberikan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
9. *Asset Sales* : Merupakan bentuk kerjasama pembiayaan kredit, dimana Bank membeli portofolio kredit yang diberikan ke end user dari BPR atau LKBB.
10 *Joint Financing* : Merupakan bentuk kerjasama pembiayaan kredit, dari Bank dan BPR atau LKBB kepada end user.

Berikut ini disajikan tabel yang merinci perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif BVIC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008:

PERKEMBANGAN ASET PRODUKTIF

(dalam jutaan Rupiah setelah dikurangi penyisihan kerugian)

Jenis	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%
Giro pada Bank lain - bersih	6.899	52,77	4.516	112,02	2.130	7,52	1.981	-60,71	5.042	400,7
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain -bersih	1.438.492	-27,58	1.986.318	-16,12	2.367.964	158,29	916.800	138,62	384.205	94,64
Surat-surat berharga	3.951.593	23,16	3.208.374	-13,06	3.690.205	20,6	3.059.755	16,83	2.618.920	5,72
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji akan dijual kembali	-	-	-	-	-	-	70.926	-	-	-
Kredit	7.580.958	36,38	5.558.636	74,4	3.187.219	17,46	2.713.514	27,82	2.122.976	8,69
Penyertaan saham	60	106,90	29	-	9.247.547	-	29	-52,46	61	-
Jumlah	**12.978.002**	20,64	**10.757.873**	**16,55**	**9.229.948**	**36,49**	**6.762.295**	**31,79**	**5.131.204**	**8,46**

Dalam tabel perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif BVIC diatas terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun atas penyaluran kredit dan penempatan pada efek-efek. Hal ini sesuai dengan kebijakan BVIC untuk meningkatkan performanya melalui peningkatan aset produktif yang memberikan *yield* lebih baik terutama dalam bentuk kredit terutama pada sektor ritel dan komersial. Selain itu BVIC juga menerapkan strategi untuk mengoptimalkan aset produktif yang relatif aman dan memberikan imbal hasil yang menguntungkan yang tercermin dari peningkatan atas efek-efek yang dimiliki BVIC.

Kredit yang diberikan merupakan komponen aset produktif yang utama bagi BVIC. Di dalam menyalurkan kreditnya, BVIC senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Komite Kebijakan Perkreditan menetapkan strategi dan arah perkreditan yang tepat dan sehat dengan memperhatikan aspek hukum, distribusi/komposisi penyalurannya pada sektor usaha, jangka waktu dan segmen pasar.
- Komite Kredit menerapkan kebijakan pemberian kredit yang hati-hati. Komite Kredit bertugas untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa kualitatif maupun analisa kuantitatif yang memadai.

Adapun langkah–langkah yang dilakukan BVIC dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut:
- BVIC menempuh proses pemberian kredit yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, proses dokumentasi dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit.
- BVIC melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu kredit yang kolektibilitasnya non-lancar dan kredit lancar yang cenderung memburuk.
- BVIC tidak akan mengkapitalisasi tunggakan bunga kredit yang melebihi 3 (tiga) bulan.
- Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet didasarkan prinsip perkreditan yang sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- Tata cara penyelesaian agunan kredit yang diambil alih BVIC didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

c. Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Diarahkan untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan dan relokasi jaringan kantor serta kemitraan dengan lembaga/ badan usaha/ instansi lainnya.

Untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, Perseroan memberikan jasa-jasa sebagai berikut:

i	Kartu ATM Victoria	:	Kartu ATM untuk menarik dana, debit rekening dan *check* saldo setiap saat melalui seluruh jaringan ATM BCA dimana sejak Januari 2005, nasabah BVI dapat melakukan transaksi perbankan
ii	Kliring/RTGS	:	Layanan pengiriman maupun penerimaan uang antar Bank
iii	Pemindahbukuan/ *Transfer*	:	Dengan telah terhubungnya seluruh jaringan kantor Perseroan secara *on-line*, maka kegiatan *transfer*/pengiriman uang kepada seluruh kantor Perseroan akan efektif pada hari yang sama
iv	Transaksi *Money Changer*	:	Jasa pelayanan baik bagi nasabah maupun non nasabah untuk melakukan penukaran/jual beli berbagai mata uang asing
v	Pemindahbukuan Otomatis	:	Melakukan pemindahbukuan otomatis setiap saat dengan jumlah yang diinginkan nasabah ke rekening lainnya
vi	Bank Garansi	:	Melayani pembukaan berbagai jenis *Bank Garansi* seperti *Bid Bond, Advance Payment Bond, Performance Bond* dan untuk keperluan pabean
vii	PLN Praqtis	:	Melakukan kerjasama dengan PLN untuk melakukan penerimaan pembayaran rekening listrik secara *online*
viii	Pembayaran Telkom	:	Melakukan kerjasama dengan PT. Finnet Indonesia, untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bentuk layanan pembayaran rekening telepon, Flexi, dan internet Speedy
ix	Pembayaran Gaji Karyawan (*Payroll*)	:	Layanan bagi nasabah perusahaan untuk memberikan kemudahan dalam hal pembayaran gaji karyawannya

2.4 PT Victoria Manajemen Investasi (“VMI”)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan VMI belum melakukan kegiatan operasi dan masih dalam proses pengkajian untuk dikembangkan menjadi perusahaan manajer investasi.

3. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

3.1 Umum

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

PDB Indonesia telah menunjukkan angka yang menggembirakan, yaitu bertumbuh 6,2% ditahun 2012 yang merupakan angka pertumbuhan rata-rata selama 5 tahun terakhir (kecuali di tahun 2009, hanya tumbuh 4,6% karena krisis global). Pertumbuhan PDB terutama didukung oleh tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan juga tingkat investasi asing maupun domestik.

Tingkat PDB dan Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

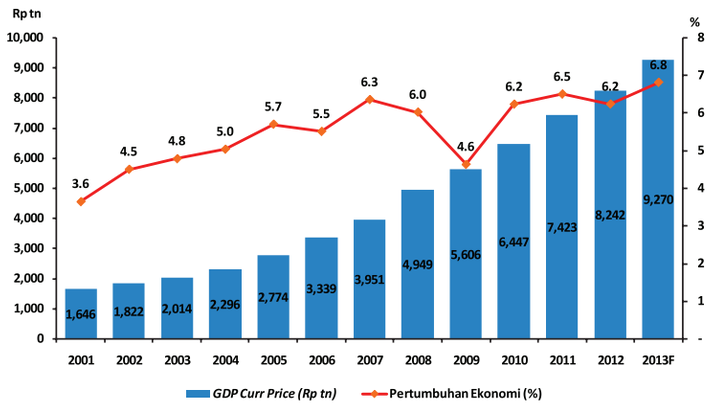

Sumber: BPS, AAAS April 2013

Komposisi PDB 2012

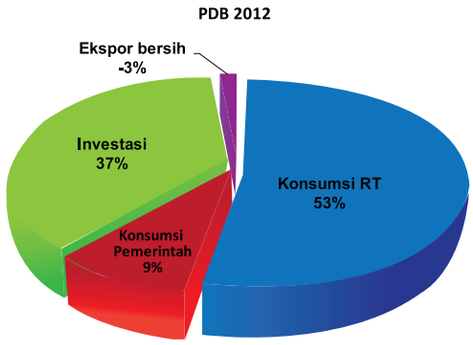

Sumbe : BPS, AAAS April 2013

Peningkatan segmen penduduk dengan tingkat penghasilan menengah yang meningkat signifikan menjadi faktor pendorong besarnya tingkat konsumsi domestik yang memberikan sumbangan terhadap PDB sebesar 52,7%. Riset yang dilakukan oleh Mc Kinsey mengenai potensi Indonesia mengatakan bahwa saat ini Indonesia:

1. Berada pada urutan ke 16 sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia,
2. Memiliki 45 juta penduduk kelas menengah,
3. 53% penduduk Indonesia berdiam di kota dan menyumbang 74% dari PDB Indonesia
4. Memiliki 55 juta pekerja terlatih
5. Dan US$0,5 triliun potensi pasar di bidang consumer & services, pertanian, perikanan, sumber daya alam dan pendidikan.
6. Di tahun 2030 hal tersebut diatas diharapkan dapat berkembang menjadi:
7. Urutan ke 7 negara dengan perekonomian terbesar di dunia
8. Memiliki 135 juta penduduk kelas menengah

9. 71% penduduk Indonesia berdiam di kota dan menyumbang 86% dari PDB Indonesia
10. Memiliki 113 juta pekerja terlatih
11. Dan US$1,8 triliun potensi pasar consumer & services, pertanian, perikanan, sumber daya alam dan pendidikan.

Situasi perekonomian Indonesia yang kondusif beberapa tahun terakhir juga dapat dilihat dari tingkat hutang perusahaan-perusahaan publik yang rata-rata masih berada pada tingkat yang rendah. Optimisme pengusaha, investor serta suku bunga yang rendah mendorong perusahaan untuk melakukan investasi jangka panjang (*capital expenditure*).

Defisit Transaksi Berjalan: Perlu Perhatian Namun Belum Pada Taraf Mengkhawatirkan.

Defisit transaksi berjalan yang berlangsung belakangan ini menekan kurs IDR hingga mengalami pelemahan. Hal ini terutama disebabkan oleh nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan karena karena perlambatan perekonomian global dan turunnya harga komoditas sumber daya alam. Sebaliknya impor Indonesia meningkat sehingga menyebabkan terjadinya defisit transaksi berjalan yang di tahun 2012 mencapai US$24,18 milyar atau 2,7% dari PDB, sedangkan ditahun sebelumnya, 2011, neraca berjalan Indonesia berada dalam posisi surplus sebesar US$1,7 milyar. Hal ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan walaupun belum sampai pada tahap yang mengkhawatirkan karena Indonesia sedang berkembang dan masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap bahan baku dan barang modal impor. Hal ini juga dapat di atasi dengan peningkatan penanaman modal asing. Selain itu, *Foreign Reserve* Indonesia juga berada pada tingkat yang cukup tinggi, cukup untuk menjaga pelemahan IDR lebih jauh. Pada dasarnya, negara yang sedang berkembang dapat mengalami defisit transaksi berjalan pada jangka pendek untuk meningkatkan produktivitas dan ekspor di jangka menengah dan panjang.

Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*)

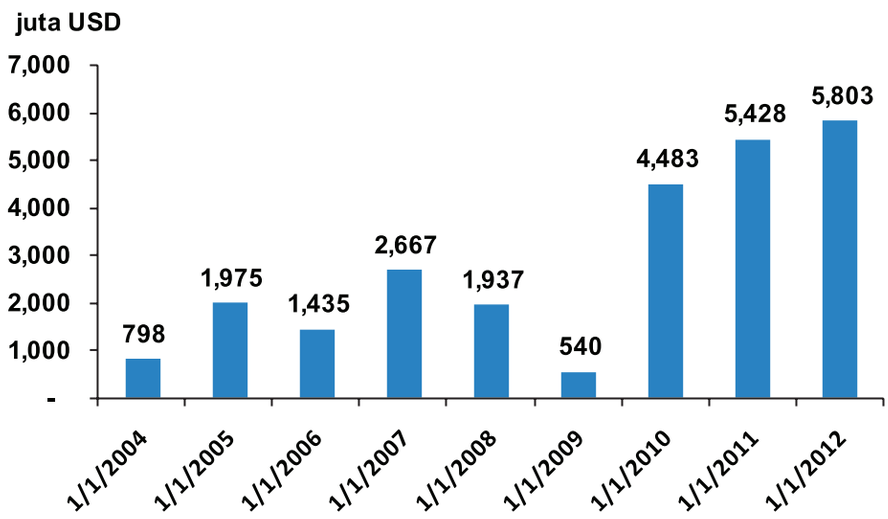

Sumber : Bloomberg April 2013

Cadangan Devisa (*Foreign Reserves*)

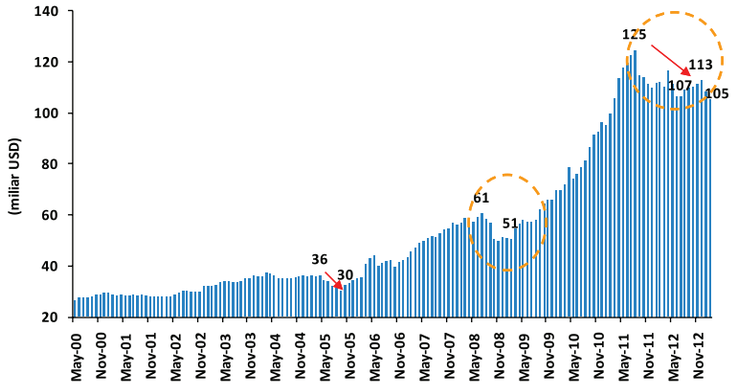

Sumber : Bloomberg April 2013

Indikator kesehatan ekonomi lainnya adalah tingkat hutang terhadap PDB Indonesia yang terus membaik, serta rating Indonesia yang sekarang sudah mencapai tingkat Investor Grade. Rating ini menandakan bahwa resiko Indonesia berada pada tingkat "layak investasi". Demikian juga dengan angka pengangguran yang terus menurun**.**

Tingkat Hutang dibandingkan dengan PDB (*Debt to GDP*)

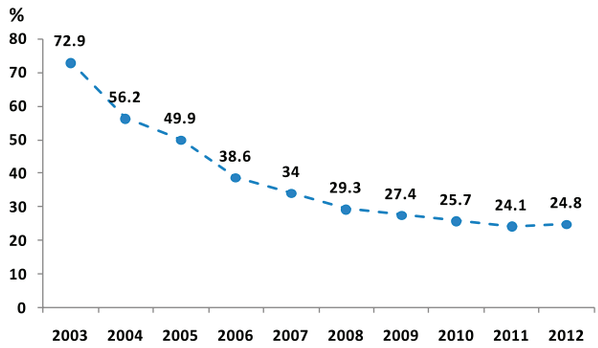

Sumber : Bloomberg April 2013

Peringkat Investasi Indonesia / *Investment Rating*

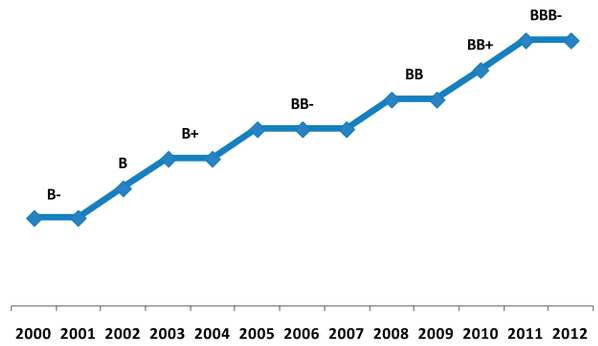

Sumber : Bloomberg April 2013

Tingkat Pengangguran (*Unemployment Rate*)

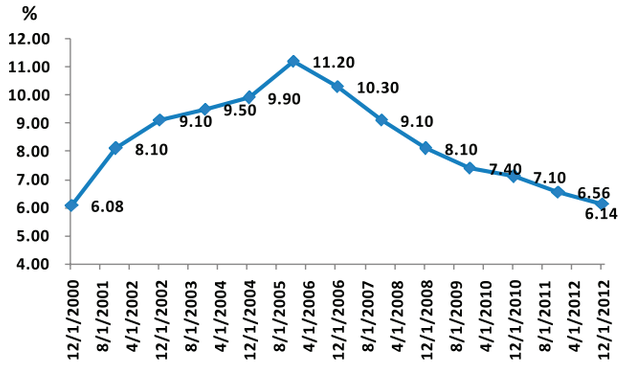

Sumber : Bloomberg April 2013

Sektor Perbankan:

Sektor perbankan memiliki fungsi strategis dalam perekonomian karena menjalankan fungsi intermediasi, yaitu sebagai penghubung antara sektor yang memerlukan dana dan sektor yang berkelebihan dana. Jika hal ini berjalan dengan baik, perekonomian akan dapat berjalan lancar. Fungsi intermediasi perbankan Indonesia terus menunjukkan perbaikan yang menggembirakan yang dapat dilihat dari rasio LDR yang terus meningkat. Situasi perkenonomian yang kondusif ditandai dengan suku bunga yang relatif rendah membuat bisnis ini berkembang pesat beberapa tahun belakangan.

Sektor perbankan yang menunjang laju pertumbuhan ekonomi menikmati pertumbuhan bisnis yang signifikan. Pertumbuhan laba bersih bank masih menunjukkan tren yang positif. Selain itu, potensi pertumbuhan sektor ini juga masih besar jika dilihat dari tingkat penetrasi produk perbankan terhadap masyarakat Indonesia yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Bertumbuhnya bisnis di sektor perbankan yang disertai oleh ketatnya peraturan BI mengenai kehati-hatian bank, ditandai dengan terus menurunnya tingkat NPL perbankan dalam beberapa tahun belakangan ini.

Tingkat Penetrasi Bank di negara - negara ASEAN

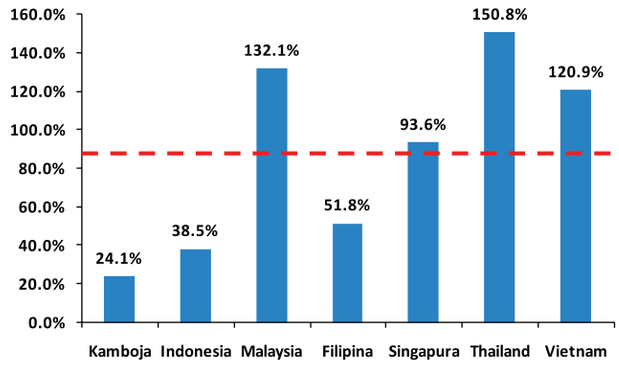

Sumber : Bank Dunia 2011

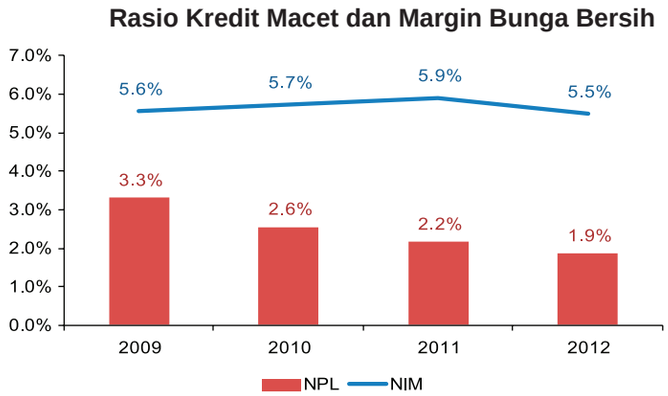

Sumber : Bank Indonesia April 2013

Namun situasi *booming* juga mengundang persaingan yang lebih ketat di sektor perbankan. Bank berlomba-lomba untuk mencari nasabah baik dari sisi pendanaan (tabungan), maupun dari sisi kredit.

Dari sisi kepengawasan, BI melakukan fungsinya dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Ditengah pertumbuhan kredit, BI mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan rasio Loan to Value (menaikkan persentase *down payment*) yang sifatnya meredam pertumbuhan kredit di sektor kredit kendaraan bermotor serta kredit kepemilikan rumah.

Pasar Saham

Pasar saham Indonesia mengalami kemajuan yang pesat belakangan ini dengan index IHSG bertumbuh no 2 terbesar di antara indeks-indeks negara Asia lainnya. IHSG naik hingga ke 4.800 di tahun 2012 yang didukung oleh baiknya kinerja laporan keuangan emiten. Kinerja emiten yang baik diharapkan masih akan dapat bertahan sampai akhir tahun 2013, didukung oleh suku bunga yang relatif rendah.

Diperkirakan faktor-faktor dalam maupun luar negeri masih akan membuat IHSG mengalami fluktuasi yang cukup besar di tahun ini. Faktor dalam negeri antara lain, potensi pelemahan IDR, tingkat inflasi yang lebih tinggi diatas ekspektasi. Sedangkan faktor luar negeri berasal dari belum berakhirnya krisis Eropa, perlambatan pertumbuhan ekonomi di China dan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat yang relative stagnan.

Di tahun 2012 IHSG bertumbuh didukung oleh meningkatnya nilai kapitalisasi pasar. Kontribusi sektor industri yang memiliki pertumbuhan market cap diatas 20% dikontribusikan oleh (1) sektor konstruksi, (2) perdagangan, (3) infrastruktur serta (4) kimia dasar dengan pertumbuhan masing-masing mencapai 53,3%, 45,9%, 32,6% dan 27,5%.

Sementara itu sektor yang mengalami pertumbuhan harga tertinggi di 2012 yaitu (1) sektor konstruksi, (2) infrastruktur, (3) kimia dasar serta (4) perdagangan. Rata-rata pertumbuhan saham yang berbasis keempat industri tersebut diatas memberikan pertumbuhan selama setahun (2011 – 2012) diatas 20% atau diatas pertumbuhan IHSG yang hanya sebesar 12,9%.

Ke depannya, peranan pasar modal akan makin penting dalam membantu perusahaan mencari sumber pendanaan. Hal ini juga ditunjang dengan pertumbuhan perekonomian yang baik, jumlah investor serta jumlah emiten yang akan terus bertambah.

Walaupun fundamental pasar saham Indonesia cukup kuat karena didukung oleh kinerja emiten yang baik, fluktuasi yang disebabkan oleh faktor eksternal tidak dapat dihindari. Namun fluktuasi pasar yang besar dapat juga dianggap sebagai potensi untuk meningkatkan frekuensi jual beli saham.

Pasar Obligasi

Obligasi Pemerintah Indonesian: Masih Diminati Asing

Menurut laporan Asian Development Bank, ADB Asian Bond Monitor, obligasi pemerintah Indonesia termasuk yang paling diminati oleh investor asing dibandingkan dengan obligasi negara ASEAN. Permintaan akan obligasi pemerintah di sepanjang tahun 2012 relatif tinggi, semua lelang yang dilakukan rata-rata terserap bahkan terkadang mengalami kelebihan permintaan. Di pasar sekunder, obligasi pemerintah Indonesia termasuk likuid dan mengalami peningkatan nilai transaksi harian ke Rp8 – Rp10 triliun di tahun 2012, dibandingkan dengan Rp5 – Rp8 triliun di tahun 2011.

Kepemilikan asing di obligasi pemerintah terus mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya resiko Indonesia yang diikuti juga oleh peningkatan rating ke investment grade. Selain itu, yield obligasi Indonesia yang relatif lebih menarik ketimbang obligasi negara ASEAN lainnya.

Dalam jangka panjang, yield obligasi akan bergerak seiring dengan perkembangan ekspektasi inflasi. Hal ini dapat di lihat di grafik dibawah ini yang menunjukkan pergerakan paralel antara moving average yield dari SUN dan tingkat inflasi.

Namun dalam jangka pendek dan aktivitas perdagangan harian, pasar obligasi dapat saja bergerak fluktuatif karena kebutuhan akan likuiditas jangka pendek serta berbagai persepsi dan interpretasi pasar terhadap resiko yang akan muncul.

Dengan perekonomian yang bertumbuh, kebutuhan pemerintah maupun sektor swasta akan instrumen hutang obligasi masih akan bertambah. Besar kemungkinannya bahwa defisit APBN pemerintah di tahun 2013 akan ditalangi oleh penerbitan obligasi sebesar kurang lebih Rp173 triliun.

Interest Rate Differential dan Kurs USD IDR

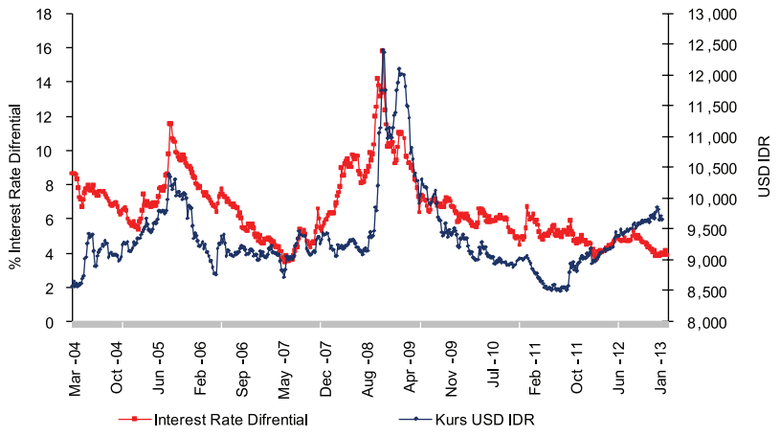

Sumber : Bloomberg, AAAS April 2013

Sumber : Bloomberg, AAAS April 2013

Bond Yield Curve

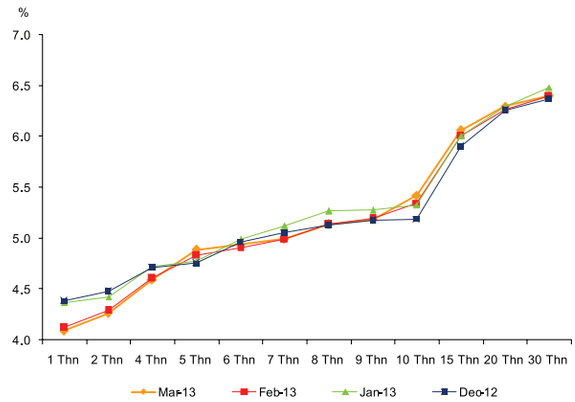

Sumber : Bloomberg, AAAS April 2013

Current SUN Yield Curve & (A) Rating Corporate Bond Yield Curve

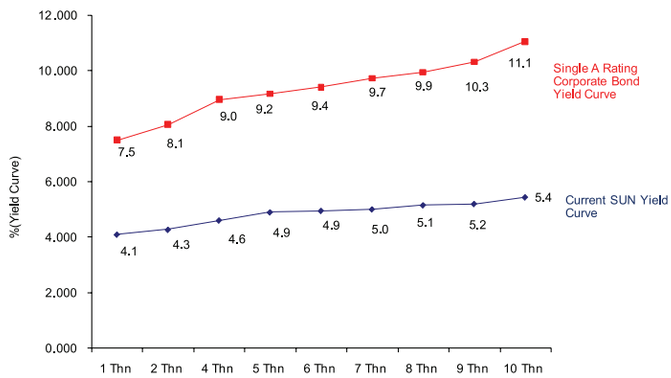

Sumber : Bloomberg, AAAS April 2013

Yield Curve Table

Yield Curve Table					
	Mar-13	Feb-13	Jan-13	Dec-12	Nov-12
1 Thn	4,090	4,123	4,370	4,383	4,544
2 Thn	4,262	4,293	4,427	4,477	4,741
4 Thn	4,595	4,608	4,724	4,712	4,836
5 Thn	4,885	4,832	4,775	4,755	4,979
6 Thn	4,937	4,907	4,990	4,967	5,108
7 Thn	4,992	4,994	5,121	5,059	5,197
8 Thn	5,137	5,141	5,267	5,129	5,286
9 Thn	5,184	5,195	5,276	5,175	5,349
10 Thn	5,421	5,350	5,329	5,191	5,377
15 Thn	6,058	6,005	6,011	5,905	5,924
20 Thn	6,296	6,269	6,299	6,258	6,225
30 Thn	6,398	6,398	6,484	6,372	6,429

Sumber : Bloomberg, AAAS April 2013

***Spread* (bps)**

Spread (bps)				
Tenor	AAA	AA	A	BBB
0,1	156,46	191,32	242,69	479,88
1	212,42	288,22	338,70	632,13
2	232,10	323,85	378,91	655,87
3	243,75	340,19	394,31	674,41
4	257,36	354,19	406,63	709,64
5	271,97	367,26	421,97	750,94
6	284,76	377,55	439,91	787,48
7	293,86	383,77	458,25	814,17
8	298,72	385,73	474,97	830,42
9	299,72	384,06	488,87	837,91
10	297,69	379,72	499,49	839,02

Sumber : Bloomberg, AAAS April 2013

Porsi Kepemilikan Bank, Asing, Reksadana di SUN

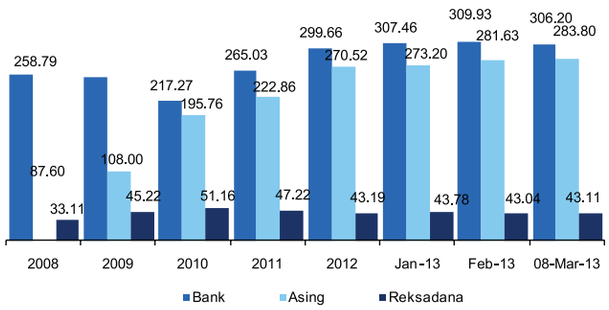

Sumber : DJPU, AAAS April 2013

Industri Asuransi: Potensi Besar Untuk Tumbuh

Dalam laporan terbarunya, Fitch Ratings memberikan perkiraan positif untuk sektor asuransi jiwa dan asuransi umum di Indonesia untuk tahun 2013. Bisnis asuransi di Indonesia akan terdorong oleh semakin berkembangnya pasar domestik. Perkembangan sektor perlindungan jiwa, properti, kesehatan ini akan ditopang oleh meningkatnya kemakmuran di Indonesia dan kesadaran akan kemungkinan terjadinya musibah. Potensi pertumbuhan asuransi di Tanah Air masih menjanjikan, selain penetrasi perusahaan asuransi yang rendah juga karena pertumbuhan kalangan kelas menengah yang relatif cepat.

Selain McKinsey, salah satu perusahaan *advisory* terkemuka Boston Consulting Group (BCG) mengadakan riset terhadap (potensi) golongan konsumen kelas menengah di 7 pulau, 33 provinsi, 99 kota dan 393 kabupaten di Indonesia. BCG memperkirakan bahwa golongan konsumen kelas menengah yang sekarang berjumlah 74 juta jiwa, akan menjadi dua kali lipat sebesar 141 juta jiwa di tahun 2020. Pola konsumsi juga akan bergeser misalnya ke produk konsumer yang lebih berkualitas, peralatan elektronik, kendaraan serta, jasa keuangan. Pola pertumbuhan konsumen kelas menengah yang cukup pesat di Indonesia, diyakini akan memperkuat serta menstabilkan perekonomian Indonesia yang memang memiliki karakter konsumsi domestik yang kuat.

Dalam rilis resminya Fitch Media Department, tanggal 15 Oktober 2011, dikatakan penetrasi asuransi di Indonesia saat ini sebesar 1,7%; masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan prosentase di AS yang menembus 8,1%, 11,8% di Inggris dan 4% di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Saat ini baru sekitar 3% masyarakat Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan. Hal ini menandakan tingkat penetrasi yang masih rendah, sehingga potensi pertumbuhannya masih besar. Dilaporkan Fitch, premi sektor asuransi di Indonesia tumbuh 15,5% yoy mencapai Rp 68,9 triliun pada semester pertama 2012.

Para pelaku berharap agar kestabilan ekonomi makro terjaga, termasuk inflasi yang rendah, mengingat ketergantungan aneka produk tabungan dan investasi pada inflasi.

Menurut data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, penetrasi pasar asuransi secara nasional baru mencapai 1,67 persen terhadap produk domestik bruto. Indonesia memiliki 45 perusahaan asuransi jiwa dan 4 perusahaan reasuransi. Selain itu, berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, saat ini hanya sekitar 20 persen total aset di Indonesia yang dilindungi asuransi.

Persyaratan regulasi, termasuk persyaratan modal minimum ke Rp70 miliar pada tahun 2012 dan Rp100 miliar pada tahun 2014, akan mendorong konsolidasi pasar. Jumlah perusahaan asuransi akan menyusut, karena asuransi yang lebih kecil akan bergabung dengan perusahaan lain untuk memenuhi persyaratan modal.

3.2 Rencana Usaha Strategis Perseroan

Sebagai perusahaan induk yang memiliki 3 tiga Entitas Anak dan 1 Entitas Asosiasi yang semuanya bergerak dalam bidang keuangan, Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam hal melakukan kerjasama antar perusahaan dan juga potensi *cross selling* dalam menjalankan pemasarannya. Pangsa pasar yang dapat diraih Perseroan juga besar dan menjangkau berbagai kebutuhan keuangan kliennya seperti : kegiatan *fund raising* baik dalam bentuk instrumen ekuitas, *fixed income* dan *hybrid product*.

Dalam mencapai visi dan misi, Perseroan menetapkan beberapa Rencana Usaha Strategis (*Strategic Business Plan*) Perseroan beserta Entitas Anak Perseroan sebagai berikut :

I. Memperkuat Struktur Modal

- Untuk menjadi suatu perusahaan financial yang sukses, salah satu syarat terpenting yang harus dipenuhi dalam *capital intensive industry* ini adalah struktur permodalan yang kuat. Dengan demikian, Perseroan merencanakan untuk memperkuat struktur modal melalui pasar modal sebagai basis utama kekuatan.
- Dengan memiliki modal yang besar dapat memberikan fleksibilitas utk meningkatkan *leverage ratio* pada saat dibutuhkan. Selain itu, dengan eksisnya Perseroan dalam pasar modal membuat Perseroan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan akibat dari transparansi yang diwajibkan sebagai perusahaan publik.

II. Menjalan Rencana Usaha Strategis

a. Meningkatkan kepemilikan pada BVIC

Perseroan melihat adanya potential growth pada BVIC sebagai bank swasta nasional yang mempunyai aset diatas Rp 10 triliun.

b. Pengembangan Financial Advisory dengan memanfaatkan integrasi antar Entitas Anak

Sebagai nilai tambah bagi *customer*, Perseroan akan memberikan jasa layanan penasehat keuangan sebelum merekomendasikan produk *fund raising* yang diperlukan. Kebutuhan produk *fund raising* tersebut nantinya dapat dijalankan oleh Entitas Anak.

c. Pengembangan Corporate Planning Team Yang Bertugas Untuk Melakukan Analisa Kinerja Pada Entitas Anak Serta Potensi Pengembangan Usaha Kedepan

- VSI: dalam jangka menengah, bertujuan untuk dapat menjadi agen penjual surat berharga pemerintah yang mengharuskan perusahaan sekuritas memiliki 5 cabang termasuk wilayah Indonesia Timur. Untuk itu VSI telah menyiapkan 5 *years business plan* dengan pengembangan cabang agar dapat memenuhi syarat tersebut.
- VINS: saat ini sedang mengembangkan *source of business* dari usaha asuransi. seperti yang diketahui, bisnis *insurance* ditinjau dari *source of business*-nya terbagi atas *captive* dan *non captive market*. Pengembangan dalam captive market memerlukan SDM yang banyak serta jumlah cabang yang banyak dalam melakukan ekspansi usaha. Kami cenderung untuk melakukan pengembangan usaha melalui *non captive* atau *broker*, sehingga peningkatan *revenue* dan *profit* akan terjadi walalupun VINS akan mengalami penurunan margin;
- VMI: saat ini kami sedang menyiapkan business model untuk *asset management* melalui VMI.

III. Melakukan Koordinasi Dengan Entitas Anak

Dengan melakukan koordinasi dengan Entitas Anak dapat Perseroan dapat menghasilkan sinergi aliansi yang menguntungkan Perseroan dan para pemangku kepentingan seperti kegiatan menjembatani bank, sekuritas dan *insurance* yang berpotensi untuk menciptakan *Cross-selling product*.

3.3 Prospek Usaha Perseroan

Sebagai *one stop financial service company*, Perseroan memberikan layanan terpadu antar lini usaha Entitas Anak dari sektor keuangan yaitu perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan *financial advisory,* asuransi, dan melalui Entitas Asosiasi yakni perbankan konvensional maupun syariah. Kedepannya, untuk melengkapi jasa keuangan yang telah dimiliki, Perseroan merencanakan untuk membangun bidang usaha *multifinance* dan *asset management*. Saat ini Perseroan sedang mengembangkan *business model untuk asset management* dan juga *life insurance* melalui Entitas Anak.

Keunggulan kompetitif yang dapat Perseroan berikan adalah solusi finansial yang tepat sasaran, hal tersebut dapat Perseroan jalankan melalui 5 pilar usaha yang saling berhubungan yaitu:

1. Layanan finansial terintegrasi terlaksana berkat
2. networking yg luas memungkinkan Perseroan untuk
3. melakukan *cross-selling* product yg didukung oleh
4. SDM yang handal dan berpengalaman dan
5. sistem informasi terkini.

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% dan dukungan modal pemegang saham dapat mendorong Perseroan untuk menjadi salah satu penyedia layanan terpadu (*one stop financial solution*) yang terbaik di Indonesia.

3.4 Strategi Pemasaran Perseroan

Karena Perseroan bergerak dalam bidang investasi oleh karena itu tidak ada kegiatan pemasaran seperti produk perusahaan lainnya. Strategi Perseroan adalah berusaha melihat peluang investasi yang dapat memberikan tingkat investasi yang menarik. Perseroan menyadari bahwa kepercayaan pemodal, kualitas pelayanan dan objektivitas merupakan modal yang sangat berharga. Oleh karena itu, Perseroan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan baik kualitas teknis maupun profesionalisme seluruh individu yang ada di Perseroan.

Sedangkan untuk Entitas Anak yaitu PT Victoria Securities Indonesia (”VSI”), Saat ini VSI selaku entitas anak Perseroan masih dalam tahap pengembangan jaringan pemasaran. Hampir seluruh nasabah VSI yang terdiri dari institusi dan perorangan berada di wilayah Jakarta. Adapun strategi pengembangan VSI adalah memperkuat jaringan pemasaran yang telah ada selama ini, selain itu VSI juga berencana untuk membuka cabang baik di Jakarta maupun di luar kota Jakarta, dimana diharapkan dari pembukaan cabang-cabang tersebut dapat menambah jumlah nasabah dan dapat memenuhi kualifikasi sebagai pedagang perantara efek obligasi negara seperti SUN, Sukuk dan ORI dimasa yang akan datang.

Selain itu Entitas Anak lainnya yaitu VINS, karena masih berskala usaha yang relatif kecil sehingga memudahkan VINS untuk berfokus pada segmen *non-captive market*, yaitu suatu pasar yang dapat dipenetrasi dengan menjalin kerjasama dengan agen-agen asuransi sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan volume transaksi yang besar, selain itu VINS juga melakukan pemasaran dengan bekerja sama dengan BVIC yang memiliki daftar nasabah yang besar sehingga memungkinkan VINS untuk mengeluarkan produk *cross selling* yang dapat ditawarkan pada nasabah-nasabah BVIC.

3.5 Persaingan Usaha Perseroan & Entitas Anak

Pendapatan Perseroan sangat tergantung pada pendapatan di Entitas Anak Perseroan yang bergerak dalam lini usaha sebagai berikut :

- Perantara pedagang efek
  Pada tahun 2012, melalui Entitas Anak yaitu VSI mencatat nilai transaksi perdagangan saham sebesar Rp4.092,- juta dengan menempati posisi ke-69, dimana secara keseluruhan terdapat 121 sekuritas yang terdiri atas 98 sekuritas lokal dan 23 sekuritas asing pada tahun tersebut (data disadur dari IDX Statistics 2012). Persaingan terjadi antara lain dalam hal harga (biaya komisi transaksi), kualitas pelayanan transaksi dan ragam pelayanan tepat sasaran yang dapat ditawarkan kepada klien.
  Untuk menghadapi persaingan tersebut, VSI akan terus memperbaiki pelayanan dan meningkatkan fasilitas serta teknologi yang ditawarkan kepada nasabah.

- Penjaminan emisi efek
  Underwriting Fee (imbalan Jasa Penjaminan) merupakan sumber penghasilan pada unit usaha ini. Tingginya persaingan di penjaminan emisi efek khususnya untuk penjaminan emisi obligasi mengakibatkan terjadinya tren penurunan imbalan jasa pejaminan sejak beberapa tahun terakhir hingga ada perusahaan sekuritas yang hanya menawarkan imbalan jasa sebesar 0,03% saat ini. Meskipun demikian, penjaminan emisi saham masih memberikan imbalan jasa penjaminan yang cukup menarik yaitu sekitar 2%. VSI memiliki keunggulan dalam hal kredibilitas dan basis nasabah yang bervariasi, baik institusi maupun ritel. Namun ada pula beberapa calon emiten yang mensyaratkan tingkat minimal nilai MKBD. Selain itu, sebagai antisipasi terhadap Peraturan BAPEPAM-LK No. V.D.5 tahun 2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) maka beberapa perusahaan efek telah mulai mengambil inisiatif dengan meningkatkan MKBD.

  Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal disetor dalam VSI setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

  Selain itu, agar dapat terus bersaing di pasar modal maka VSI telah menjalin kerjasama dengan Perseroan dengan mengedepankan kelengkapan jasa pelayanan keuangan yang dapat ditawarkan kepada nasabah. Sebagai contoh, pada umumnya perusahaan sekuritas hanya menjalankan permintaan dari emiten untuk melakukan fund raising dalam bentuk equity ataupun fixed income product. Melalui grup Victoria, VSI akan mulai memberikan jasa pelayanan financial advisory dimana VSI akan menelaah secara cermat kondisi pada emiten apakah perlu dilakukan restrukturisasi perusahaan ataupun *refinancing* untuk mencapai struktur modal yang optimal guna meningkatkan nilai pemegang saham. Berdasarkan analisa tersebut, maka calon emiten akan dianjurkan untuk membuat tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh emiten sebelum memasuki tahap penawaran umum. Dengan demikian VSI memiliki andil dalam memberikan value creation dan value added pada calon emiten, dimana value-value tersebut saat ini belum banyak ditawarkan oleh perusahaan sekuritas lainnya. Sebagai tambahan, untuk keperluan fund raising yang berhubungan dengan pasar modal, maka dapat dilakukan kerjasama dengan perusahaan Entitas Asosiasi Perseroan yaitu BVIC, dalam bentuk referral untuk pengajuan fasilitas kredit

- Asuransi
  VINS berkomitmen untuk menjalankan kebijakan *underwriting* yang sehat di tengah persaingan yang sangat kompetitif khususnya persaingan pada tarif premi. Segmen pasar di sektor ritel akan tetap menjadi prioritas Perseroan untuk dikembangkan disamping meluncurkan produk baru yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan premi Perseroan.
  Peluang Perseroan untuk mengembangkan pangsa pasar masih sangat terbuka mengingat posisi Perseroan secara nasional relatif masih kecil khususnya pada bisnis asuransi umum. Pada tahun 2012 VINS berhasil membukukan total pendapatan premi sebesar Rp 7,53 miliar, relatif kecil bila dibandingkan dengan premi bruto asuransi umum yang tercatat sebesar Rp 38,8 triliun menurut data statistik Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Pendapatan Premi tersebut menunjukkan pangsa pasar yang berhasil diraih hanya sebesar 0,02%. Upaya untuk menguatkan pangsa pasar akan terus dilakukan baik melalui peningkatan kualitas layanan bagi nasabah serta volume penjualan dan mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk melaksanakan upaya-upaya pengembangan, maka Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini bermaksud untuk meningkatkan modal disetor dalam VINS hingga menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVI dari Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditanda tangani oleh Suharsono SE. Ak, CPA, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan penyajian laporan posisi keuangan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perusahaan pada tahun 2012, penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 secara prospektif atau retrospektif dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akhyadi Wadisono yang ditanda tangani oleh Drs. Akhyadi Wadisono, Ak.,CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut sehubungan dengan pencatatan investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak, penyesuaian nilai wajar aset keuangan, perhitungan pajak tangguhan dan goodwill, serta reklasifikasi akun-akun tertentu, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang yang ditanda tangani oleh Dadang Mulyana, CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,kecuali untuk penyajian kembali laporan keuangan sehubungan dengan pencatatan investasi entitas asosiasi pada PT Bank Victoria International, Tbk, sesuai dengan PSAK No 15 (Revisi 2009) Investasi pada Entitas Asosiasi (tidak diaudit)

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Akuntan yang mengaudit laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, mengakui investasi entitas asosiasi pada PT Bank Victoria International Tbk sebagai bagian dari portofolio efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual, sehingga terdapat kebijakan akuntansi yang berbeda dengan yang disajikan dengan laporan keuangan konsolidasian 2012, 2011 dan 2010, sehingga untuk akun tersebut telah dilakukan penyajian ulang agar memberikan informasi yang lebih relevan dan komparatif bagi pembaca laporan keuangan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009*)	2008*)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas					
Pihak berelasi	4.350.943	5.845.684	15.176.477	805.767	828.598
Pihak ketiga	5.343.646	20.816.539	4.608.033	1.436.463	1.753.936
Investasi jangka pendek					
Pihak berelasi	20.120.163	72.483.759	300.000	300.000	19.000.000
Pihak ketiga	113.499.027	99.175.719	144.127.901	46.691.997	3.030.239
Piutang *reverse repo* - bersih	29.516.667	19.744.444	130.874.388	29.142.500	63.165.593
Piutang premi dan reasuransi					
Pihak berelasi	592.376	841.531	-	-	-
Pihak ketiga	1.861.593	3.387.941	201.244	-	-
Aset reasuransi	2.121.123	2.400.063	698.045	-	-
Piutang jasa penasehat keuangan	2.022.727	-	-	-	
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	6.647.203	34.748.903	30.399.488	14.709.301	5.035.512
Piutang nasabah	13.195.625	14.906.605	36.928.918	23.454.803	3.186.480
Rekening nasabah	-	12.421.998	57.967.475	1.446.170	7.426.703
Piutang lain-lain					
Pihak berelasi	2.500.000	2.500.000	-	-	-

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009*)	2008*)
Pihak ketiga	22.941.654	3.279.099	1.956.965	96.022	116.206
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	437.358	1.080.565	594.070	852.170	751.450
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	-	576.522	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	**225.150.105**	**294.209.372**	**423.833.004**	**118.935.193**	**104.294.717**
ASET TIDAK LANCAR					
Investasi jangka panjang					
Pihak berelasi	533.252.774	441.828.644	281.842.792	246.311.993	173.248.356
Pihak ketiga	205.000	205.000	188.000	140.000	140.000
Aset pajak tangguhan	875.123	680.468	319.233	276.532	243.017
Preperti investasi – bersih	1.080.008	1.091.432	-	-	-
Aset tetap – bersih	6.538.843	8.485.942	7.521.741	1.782.366	819.744
Goodwill	5.103.149	5.103.149	5.103.149	-	-
Uang jaminan	437.320	295.752	300.252	289.752	20.300
Jumlah Aset Tidak Lancar	**547.492.217**	**457.690.387**	**295.275.167**	**248.800.643**	**174.471.417**
JUMLAH ASET	**772.642.322**	**751.899.759**	**719.108.171**	**367.735.836**	**278.766.134**
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank					
Pihak berelasi	18.820.723	20.000.000	19.978.600	20.000.000	-
Pihak ketiga	9.400.000	60.300.000	108.000.000	4.400.000	66.400.000
Utang klaim – pihak ketiga	16.984	160.142	572	-	-
Utang reasuransi – pihak ketiga	1.889.342	3.001.224	4.551	-	-
Utang komisi					
Pihak berelasi	76.938	124.917	-	-	-
Pihak ketiga	331.236	289.964	-	-	-
Utang repo – bersih	-	-	121.911.422	-	-
Utang lembaga kliring dan penjaminan	3.571.953	14.879.528	36.864.159	18.736.268	3.180.150
Utang nasabah	6.055.869	32.596.168	28.363.317	12.826.731	3.324.887
Rekening nasabah	-	4.223.834	17.079.140	700.739	992.799
Utang pajak	967.347	1.134.245	571.631	367.722	989.044
Biaya masih harus dibayar	326.306	1.828.017	1.343.568	764.182	1.344.979
Liabilitas asuransi					
Estimasi liabiilitas klaim	453.198	500.158	382	-	-
Premi yang belum merupakan pendapatan	2.695.937	3.425.482	1.955.037	-	-
Uang titipan nasabah					
Pihak berelasi	1.357.383	446.075	-	-	-
Pihak ketiga	464.774	299.101	-	-	-
Biaya masih harus dibayar	326.306	1.828.017	1.343.568	764.182	1.344.979
Liabilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	22.960.000	1.500.000	-	15.000.000	-
Pihak ketiga	11.978.683	59.267	33.188.697	41.076	378.828
Utang pembelian kendaraan					
Pihak berelasi	17.522	18.764	-	-	-
Pihak ketiga	359.713	325.346	16.569	92.500	151.435
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**81.743.908**	**145.112.232**	**369.277.645**	**72.929.218**	**76.762.122**

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009*)	2008*)
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	-	14.960.000	-	-	-
Pihak ketiga	-	10.660.428	-	-	-
Utang pembelian kendaraan					
Pihak berelasi	-	23.544	-	-	-
Pihak ketiga	309.194	485.633	36.852	-	92.500
Liabilitas imbalan kerja	1.216.692	1.539.392	692.208	472.149	374.682
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.525.886**	**27.668.997**	**729.060**	**472.149**	**467.182**
EKUITAS					
Modal saham – nilai nominal Rp100,- per saham					
Modal dasar – 6.200.000.000 saham tahun 2012 dan 2011 dan 2.000.000.000 saham tahun 2010, 2009 dan 2008					
Modal ditempatkan dan disetor – 2.600.000.000 saham tahun 2012 dan 2011 dan 1.550.000.000 saham tahun 2010 dan 2009 serta 1.000.000.000 saham tahun 2008	260.000.000	260.000.000	155.000.000	155.000.000	100.000.000
Komponen ekuitas lainnya	64.135.368	50.581.448	18.818.477	27.878.114	6.284.208
Saldo laba	360.446.806	263.811.037	174.852.778	111.456.355	95.252.622
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	684.582.174	574.392.485	348.671.255	294.334.469	201.536.830
Kepentingan non-pengendali	4.790.354	4.726.045	430.211	-	-
Jumlah Ekuitas	**689.372.528**	**579.118.530**	**349.101.466**	**294.334.469**	**201.536.830**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**772.642.322**	**751.899.759**	**719.108.171**	**367.735.836**	**278.766.134**

Keterangan:
*) Pada tahun 2009 dan 2008, Perseroan belum mempunyai entitas anak dan telah disajikan kembali sehubungan dengan pencatatan investasi entitas asosiasi pada PT Bank Victoria International, Tbk, sesuai dengan PSAK No 15 (Revisi 2009) “Investasi pada Entitas Asosiasi, namun penyajian laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009*)	2008*)
PENDAPATAN USAHA					
Pendapatan hasil investasi	20.838.676	16.627.517	21.048.970	(2.134.755)	11.700.772
Pendapatan kegiatan penjaminan emisi dan penjualan efek	17.596.711	20.859.933	3.449.343	425.842	9.152.966
Pendapatan bunga – bersih	9.366.706	8.960.865	8.285.651	6.972.347	9.104.374
Pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek	4.678.956	7.082.666	7.702.906	9.116.936	5.960.553
Pendapatan premi – bersih	1.692.652	2.741.912	234.668	-	-
Pendapatan komisi - bersih	401.314	526.422	-	-	-
Jumlah Pendapatan Usaha	**54.575.015**	**56.799.315**	**40.721.538**	**14.380.370**	**35.918.665**
BEBAN USAHA					
Beban kepegawaian	12.406.746	8.767.093	3.439.912	1.864.207	1.760.170
Penyusutan	2.146.090	1.439.054	780.772	246.362	268.657
Pajak – pajak	1.864.167	989.822	259.589	-	-
Sewa	1.824.604	1.671.967	976.487	136.430	235.200
Administrasi dan umum	1.453.004	2.109.552	563.079	926.545	951.817
Pemasaran	649.042	3.963.082	3.523.366	3.892.131	7.828.503
Beban klaim	617.406	382.593	26.873	-	-
Beban penjaminan dan penjualan emisi efek	605.297	7.716.518	33.451	-	-
Telekomunikasi	396.019	553.597	362.254	549.049	515.722
Transaksi bursa	371.826	260.865	223.246	124.176	261.035
Jasa profesional	278.067	309.334	240.750	58.000	658.749
Representasi dan sumbangan	277.991	400.045	256.500	156.000	100.000
Transportasi dan perjalanan dinas	245.449	535.940	441.311	298.181	595.715
Pemeliharaan dan perbaikan	217.196	820.177	464.502	465.584	503.716
Asuransi	90.468	26.655	81.242	-	-
Perijinan	58.512	177.400	94.496	109.626	15.109
Lain-lain	401.321	280.100	8.609	66.618	60.883
Jumlah Beban Usaha	**23.903.205**	**30.399.794**	**11.776.439**	**8.892.909**	**13.755.276**
LABA USAHA	**30.671.810**	**26.399.521**	**28.945.099**	**5.487.461**	**22.163.389**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Bagian laba bersih entitas asosiasi	74.766.135	72.085.985	43.783.065	17.973.427	11.951.991
Penghasilan bunga	558.566	1.035.677	424.397	364.785	363.106
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih	52.106	(224.061)	-	-	-
Keuntungan penjualan aset tetap	25.979	490.862	114.626	-	-
Beban bunga dan keuangan	(8.155.914)	(10.251.007)	(8.766.412)	(7.094.922)	(8.833.540)
Lain-lain – bersih	(319.007)	(146.423)	(640.665)	(275.648)	338.048
Jumlah Penghasilan lain-lain– bersih	**66.927.865**	**62.991.033**	**34.915.011**	**10.967.642**	**3.819.605**
LABA SEBELUM PAJAK	**97.599.675**	**89.390.554**	**63.860.110**	**16.455.103**	**25.982.994**

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009*)	2008*)
LABA SEBELUM LABA ENTITAS ANAK PRA-AKUISISI	**96.700.079**	**89.004.093**	**63.508.058**	**16.203.733**	**25.390.763**
LABA ENTITAS ANAK PRA-AKUISISI	**-**	**-**	**(95.415)**	**-**	**-**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**96.700.079**	**89.004.093**	**63.412.643**	**16.203.733**	**25.390.763**
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA					
Penyesuaian nilai wajar efek tersedia untuk dijual – bersih	(3.118.276)	23.047.523	349.000	-	-
Bagian pendapatan komprehensif lainnya dari entitas asosiasi	16.672.196	8.715.448	(9.408.637)	-	-
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lainnya	13.553.920	31.762.971	(9.059.637)	-	-
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	110.253.999	120.767.064	54.353.006	16.203.733	25.390.763
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA					
Entitas induk	96.635.769	88.958.259	63.396.423	-	-
Kepentingan non-pengendali	64.310	45.834	16.220	-	-
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**96.700.079**	**89.004.093**	**63.412.643**	**-**	**-**
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA					
Entitas induk	110.189.689	120.721.230	54.336.786	-	-
Kepentingan non-pengendali	64.310	45.834	16.220	-	-
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF	**110.253.999**	**120.767.064**	**54.353.006**	**-**	**-**
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**37**	**43**	**41**	**15**	**25**

Keterangan:
*) Pada tahun 2009 dan 2008, Perseroan belum mempunyai entitas anak dan telah disajikan kembali sehubungan dengan pencatatan investasi entitas asosiasi pada PT Bank Victoria International, Tbk, sesuai dengan PSAK No 15 (Revisi 2009) “Investasi pada Entitas Asosiasi, namun penyajian laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Rasio-Rasio Penting (*dalam persen*)

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan Usaha	-3,92%	39,48%	183,17%	-59,96%	20,37%
Laba (Rugi) Usaha	16,18%	-8,79%	427,48%	-75,24%	-7,78%
Laba Tahun Berjalan	8,65%	40,36%	291,35%	-36,18%	-38,86%
Aset	2,76%	4,56%	95,55%	31,92%	-24,30%
Kewajiban	-51,81%	-53,30%	404,09%	-4,96%	-60,5%
Ekuitas	19,04%	65,89%	18,61%	46,05%	16,69%
Rasio Usaha (%)					
Laba Usaha/Pendapatan Usaha	56,20%	46,48%	71,08%	38,16%	61,70%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	177,19%	156,70%	155,72%	112,68%	70,69%
Laba Tahun Berjalan/Ekuitas (ROE)	14,03%	15,37%	18,16%	5,51%	12,60%
Laba Tahun Berjalan/Aset (ROA)	12,52%	11,84%	8,82%	4,41%	9,11%
Rasio Keuangan (%)					
Aset Lancar/Liabilitas Lancar	2,75	2,03	1,15	1,63	1,36
Liabilitas /Ekuitas (Solvabilitas)	0,12	0,30	1,06	0,25	0,38
Liabilitas /Jumlah Aset	0,11	0,23	0,51	0,20	0,28

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan penyajian laporan posisi keuangan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perusahaan pada tahun 2012, penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 secara prospektif atau retrospektif dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham. dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akhyadi Wadisono dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut sehubungan dengan pencatatan investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak, penyesuaian nilai wajar aset keuangan, perhitungan pajak tangguhan dan goodwill, serta reklasifikasi akun-akun tertentu.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
Modal saham – nilai nominal Rp100,- per saham			
Modal dasar – 6.200.000.000 saham tahun 2012 dan 2011 dan 2.000.000.000 saham tahun 2010			
Modal ditempatkan dan disetor – 2.600.000.000 saham tahun 2012 dan 2011 dan 1.550.000.000 saham tahun 2010	260.000.000	260.000.000	155.000.000
Komponen ekuitas lainnya	64.135.368	50.581.448	18.818.477
Saldo laba	360.446.806	263.811.037	174.852.778
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	684.582.174	574.392.485	348.671.255
Kepentingan non-pengendali	4.790.354	4.726.045	430.211
JUMLAH EKUITAS	**689.372.528**	**579.118.530**	**349.101.466**

Peristiwa Setelah Tanggal Posisi Pelaporan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 26 Pebruari 2013 sebagaimana telah diaktakan dalam akta No. 344 pada tanggal yang sama dari Suwarni Sukiman, S.H, notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui pengalihan sebagian saham milik Suzanna Tanojo sebanyak 852.750.000 saham kepada PT Gratamulia Pratama, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**6.200.000.000**	**620.000.000.000,00**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	2.574.000.000	257.400.000.000,00	99,00
Suzanna Tanojo	26.000.000	2.600.000.000,00	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.600.000.000**	**260.000.000.000,00**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**3.600.000.000**	**360.000.000.000,00**	

Akta perubahan ini diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Suratnya No. AHU-AH.01.10-07389 tanggal 1 Maret 2013.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 116 tanggal 27 Maret 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp620.000.000.000,- (enam ratus dua puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah); (ii) pengeluaran saham baru yang diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp615.000.000.000,- (enam ratus lima belas miliar Rupiah). Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-17098-AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013.

Dalam rangka menegaskan tata cara penyetoran penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 116 tanggal 27 Maret 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.102 tanggal 19 April 2013 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara telah menyetujui bahwa peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perusahaan tanggal 27 Maret 2013 yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 116 tanggal 27 Maret 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta dilakukan melalui kapitalisasi laba ditahan sebesar Rp 355 miliar atau sejumlah 3.550.000.000 saham yang dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham, sehingga komposisi pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**15.000.000.000**	**1.500.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Gratamulia Pratama	6.088.500.000	608.850.000.000,-	99,00
Suzanna Tanojo	61.500.000	6.150.000.000,-	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.150.000.000**	**615.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**8.850.000.000**	**885.000.000.000**	

Akta perubahan ini diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Suratnya No. AHU-AH.01.10-15909 tanggal 26 April 2013.

Selain perubahan tersebut diatas sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012

Perseroan dengan surat No.047/VI/DIR/IV/2013 tanggal 26 April 2013 telah mengajukan kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dan harga penawaran Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan total nilai Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah).

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Biaya Emisi	Komponen ekuitas lainnya	Saldo Laba	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan pada tanggal 31 Desember 2012	260.000	-	-	64.135	360.447	4.790	689.372
Proforma Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2012 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan IPO.							
Saham sejumlah 1.200.000.000 saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- per saham dan harga penawaran Rp125,- per saham	120.000	30.000	-				150.000
Pelaksanaan 2.100.000.000 Waran seri I dengan nilai nominal Rp100,- per saham dan harga pelaksanaan Rp125,- per saham	210.000	52.500	-				262.500
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 setelah IPO	590.000	82.500	-	64.135	360.447	4.790	1.101.872

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN KAS

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penih termasuk saham baru yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana maupun dari pelaksanaan waran mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya yang telah disetor penuh termasuk hak atas dividen.

Sesuai anggaran dasar Perseroan, laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (**"RUPS"**) tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen akan senantiasa menjalankan kebijakan dividen setiap tahunnya dimulai tahun buku 2013 dengan tetap merujuk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan hasil keputusan RUPST Manajemen Perseroan mengusulkan dasar perhitungan pembagian dividen (mana yang lebih rendah) sebagai berikut:

- 15% dari laba Entitas Anak yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki Perseroan; atau
- 25% dari penerimaan dividen yang diterima Perseroan dari seluruh Entitas Anak

Terdapat transaksi pengikatan atau perjanjian-perjanjian yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik terutama terkait pembagian dividen, namun sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas Perseroan, *negative covenants* tersebut telah dicabut berdasarkan:

a. surat dari Perseroan No. 030/VI/DIR/IV/2013 tanggal 05 April 2013 yang ditujukan dan telah disetujui kembali oleh PT Bank Sinar Mas Tbk. perihal Perjanjian Fasilitas Demand Loan (*Revolving)* Rp22.500.000.000,- antara PT Bank Sinar Mas Tbk. dan PT Victoria Investama Tbk.
b. surat dari Perseroan No. 031/VI/DIR/IV/2013 tanggal 05 April 2013 yang ditujukan dan telah disetujui kembali oleh PT Bank Victoria International Tbk. perihal Perjanjian Pinjaman Rekening Koran Rp7.500.000.000,- antara PT Bank Victoria International Tbk. dan PT Victoria Investama Tbk.
c. surat dari Perseroan No. 032/VI/DIR/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 yang ditujukan dan telah disetujui kembali oleh Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd. perihal *Junior Convertible Loan Agreement dated September 9, 2011.*
d. surat dari Perseroan No. 033/VI/DIR/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 yang ditujukan dan telah disetujui kembali oleh Aldo Jusuf Tjahaja perihal *Junior Convertible Loan perihal Agreement dated September 9, 2011– Prepayment Request.*

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan terakhir atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Peraturan pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2c,tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2d diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun

2009 tentang pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen atas saham yang diumumkan oleh Perseroan dari laba yang ditahan dan dibagikan kepada pemegang saham asing dikenakan pemotongan pajak penghasilan di Indonesia, dengan tarif pada saat ini sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang dibagikan (untuk pembagian dividen secara tunai) atau dari nilai pembagian atas bagian saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (normalnya dihitung berdasarkan nilai nominal saham untuk pembagian dividen dalam bentuk saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (”P3B”) dengan Indonesia, serta memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-03/PJ.03/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah apabila penerima dividen merupakan penerima yang sesungguhnya atas dividen tersebut dan dapat menunjukkan surat keterangan domisili asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di negara asal.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggangan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Victoria Investama Tbk., No.120 tanggal 24 April 2013, Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 214 tanggal 27 Mei 2013 dan Addendum II No. 163 tanggal 21 Juni 2013 yang seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual pada Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum Saham Perdana.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		%
		(Jumlah saham)	(Jumlah Rupiah)	
1	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas	1.200.000.000	150.000.000.000	100
	TOTAL	**1.200.000.000**	**150.000.000.000**	**100**

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

B. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Emisi, maka ditetapkan harganya adalah sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Penetapan harga penawaran juga mempertimbangkan berbagai faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Kinerja keuangan;
3. Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, dan prospek usaha;
4. Status dan perkembangan terakhir Perseroan;
5. Mempertimbangkan kinerja saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

PENENTUAN HARGA SAHAM TERSEBUT DIATAS TELAH DIBUAT SECARA WAJAR OLEH PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1.	**Akuntan Publik**	**Tjahjadi dan Tamara** Gedung Jaya Lantai 4 Jl. M.H Thamrin No. 12 Jakarta 10340
	No. STTD	184/BL/STTD-AP/2012
	Tanggal STTD	4 Januari 2012
	Keanggotaan Asosiasi	IAPI No. Reg IAPI 1794 IAI Wilayah Jakarta No. Anggota 41601
	Surat Penunjukan	No.051/Prop/T7T/SH/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan publik bertanggungjawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesional Akuntansi Publik.

2.	**Notaris**	**Humberg Lie, SH, SE, M.Kn** Jalan Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
	No. STTD	04/BL/STTD-N/2006
	Tanggal STTD	27 Juni 2006
	Keanggotaan Asosiasi	011.005.033.120179. SK No. AHU-10-AH.02.02-TH 2010
	Surat Penunjukan	235-A/VI/DIR/XI/2012 Tanggal 13 November 2012

Ruang lingkup tugas notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan administrasi saham dan waran sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Pedoman kerja berdasarkan Pernyataan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

3.	**Konsultan Hukum**	**Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office** Office 8, Lantai 15 Unit H SCBD Lot 28 Jalan Senopati Raya No. 8B Jakarta 12190
	No.STTD	540/PM/STTD-KH/2004
	Tanggal STTD	24 Agustus 2004
	Keanggotaan Asosiasi	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Nomor Anggota 200427 Perhimpunan Advokat Indonesia, Tanda Pengenal Advokat No.A.99.10636
	Surat Penunjukan	No. 219/VIS/DIR/IX/2012 tanggal 21 September 2012

Sesuai dengan standar profesi dan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku, ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan penelaahan secara cermat dan seksama atas segala aspek hukum Perseroan serta memberikan pendapat dari segi hukum yang obyektif atas Perseroan. Pemeriksaan aspek hukum atas Perseroan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan sehingga memberikan informasi kepada masyarakat dan mendukung pernyataan serta informasi yang dimuat dalam prospektus, khususnya yang berkaitan dengan hukum. Konsultan hukum bertanggung-jawab atas pendapat yang diberikan mengenai aspek hukum.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Pelaksanaan Uji Tuntas yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005.

4. Biro Administrasi Efek **PT Ficomindo Buana Registrar**

Mayapada Tower Lt.10 Suite 02 B
Jl.Jend.Sudirman Kav.28
Jakarta 12920

Surat Penunjukkan 025/VI/DIR/III/2013 Tanggal 26 Maret 2013

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pedoman kerja berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK terkait Penawaran Umum Perdana Saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Ref. No.: 8236/MMIK/VI/2013 Jakarta, 21 Juni 2013

PT VICTORIA INVESTAMA, TBK
Senayan City Panin Tower Lt. 8
Jalan Asia Afrika Lot 19
Jakarta Pusat 10270

Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Victoria Investama, Tbk:

PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS
Equity Tower Lantai 22
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT VICTORIA INVESTAMA, TBK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office, berkantor di Office 8, lantai 15 Suite H, SCBD Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal di bawah pendaftaran No.540/PM/STTD-KH/2004, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200427 telah ditunjuk oleh PT Victoria Investama, Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**") sesuai dengan Surat Perseroan No. 219/VIS/DIR/IX/2012 tanggal 21 September 2012 perihal Surat Penunjukan untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia berupa saham Perseroan sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 16,33% (enam belas koma tiga puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum Saham Perdana Victoria Investama"**).

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Victoria Investama, Perseroan dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, yang merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Saham**") telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 120 tanggal 24 April 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 214 tanggal 27 Mei 2013 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 163 tanggal 21 Juni 2013 seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E, M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Apabila masih ada sisa saham yang tidak dibeli oleh masyarakat, dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal, maka sisa saham tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk dibeli oleh Penjamin Pelaksana Emisi Saham.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Victoria Investama juga ditawarkan sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I yang menyertai saham biasa atas nama atau sebesar 34,15% (tiga puluh empat koma lima belas persen) terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum disampaikan kepada OJK. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan, yang berlaku mulai tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan 8 Juli 2016. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Dalam rangka penerbitan Waran Seri I, Perseroan telah membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Investama, Tbk No. 121 tanggal 24 April 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Investama, Tbk No. 213 tanggal 27 Mei 2013 dan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Investama, Tbk No. 162 tanggal 21 Juni 2013 seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E, M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Selain itu Perseroan juga telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Biro Administrasi Efek dan telah menandatangani (i) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 122 tanggal 24 April 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 34 tanggal 10 Juni 2013 dan (ii) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Investama Tbk No. 123 tanggal 24 April 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Investama Tbk No. 215 tanggal 27 Mei 2013 dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Investama Tbk No. 164 tanggal 21 Juni 2013, seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E, M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana Victoria Investama setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk:

1. Sebesar Rp25.620.428.135,00 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) atau sekitar 17,08% (tujuh belas koma nol delapan persen) akan digunakan untuk melunasi *Junior Convertible Loan Agreement* Perseroan. *Junior Convertible Loan Agreement ("JCLA")* diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 9 September 2011. guna melunasi hutang pemegang saham yang telah dikeluarkan sebelumnya sebagai modal disetor VSI pada awal tahun 2011,

   Ketentuan ketentuan yang berlaku dari JCLA tersebut adalah:
   - <u>Junior Convertible Loan ("JCL") antara Perseroan dan Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd.:</u>
     Bunga : Tanpa Bunga
     Jumlah Pinjaman: Rp10.660.428.135,00
     Jangka Waktu : 9 September 2011 - 2 Desember 2013
     Jaminan : sebanyak 236.898.403 Waran Bank Victoria International milik Perseroan yang di peroleh dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ("HMETD") III dan IV BVIC.
     Syarat Kondisi dalam rangka Konversi JCL:
     a) Opsi Terhadap Saham: Perseroan memberikan Hak Opsi kepada Barron untuk mengkonversi pinjaman pokok yang belum terbayar pada waktu kapanpun terhitung sejak Perseroan tidak

mempunyai izin sebagai perusahaan sekuritas hingga tanggal 2 Desember 2013 (Jangka Waktu Opsi), dengan harga per saham 1,5 kali dari nilai buku atas saham pada tanggal Perjanjian ini.

b) Pelaksanaan Opsi Terhadap Saham: Opsi Saham dapat dilaksanakan kapan saja oleh Barron, selama pada jangka waktu opsi dapat menyajikan pemberitahuan tertulis.

Pelunasan lebih awal Junior Convertible Loan Agreement tersebut telah mendapat persetujuan dari Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd. berdasarkan surat Perseroan tanggal 15 Maret 2013.

– Junior Convertible Loan ("JCL") antara Perseroan dan Aldo J. Tjahaja ("Aldo")

Bunga : Tanpa Bunga
Jumlah Pinjaman: Rp14.960.000.000,00
Jatuh Tempo : sampai dengan 2 Desember 2013
Jaminan : sebanyak 272.000.000 Waran Bank Victoria International milik Perseroan yang di peroleh dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ("HMETD") III dan IV BVIC.

Syarat Kondisi dalam rangka Konversi JCL

a) Opsi Terhadap Saham Perseroan: Perseroan memberikan Hak Opsi kepada Bapak Aldo untuk mengkonversi pinjaman pokok yang belum terbayar pada waktu kapanpun terhitung sejak Perseroan tidak mempunyai izin sebagai perusahaan sekuritas hingga tanggal 2 Desember 2013 (Jangka Waktu Opsi), dengan harga Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham.

b) Pelaksanaan Opsi Terhadap Saham: Opsi Saham dapat dilaksanakan kapan saja oleh Bapak Aldo, selama pada jangka waktu opsi dapat menyajikan pemberitahuan tertulis.

Pelunasan lebih awal Junior Convertible Loan Agreement tersebut telah mendapat persetujuan dari Aldo J. Tjahaja berdasarkan surat Perseroan tanggal 15 Maret 2013.

Atas rencana pelunasan hutang tersebut, maka berdasarkan surat dari Aldo J. Tjahaja pada tanggal 23 April 2012 dan Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd pada tanggal 24 April 2012 menyatakan tidak akan mengkonversi piutangnya menjadi saham Perseroan.

2. Sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau sekitar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk melakukan setoran modal ke dalam Entitas Anak Perseroan yaitu PT Victoria Securities Indonesia ("VSI") sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham pada nilai nominal yaitu Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham. Dimana selanjutnya oleh VSI akan digunakan untuk:

(i) Sebesar Rp28.000.000.000,00 atau sekitar 18,66% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk portofolio obligasi.
(ii) Sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000,00 atau sekitar 3,33% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk portofolio saham.
(iii) Sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000,00 atau sekitar 2,67% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk pembiayaan margin.
(iv) Sebanyak-banyaknya Rp13.000.000.000,00 atau sekitar 8,67% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk transaksi repo.

Berikut adalah proforma VSI setelah mendapatkan tambahan modal yang berasal dari hasil Penawaran Umum Perseroan:

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal			Sesudah Penambahan Modal		
	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		%	Nilai Nominal Rp100,00per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**		**200.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Perseroan	495.000.000	49.500.000.000	99,00	995.000.000	99.500.000.000	99,50
Suzanna Tanojo	5.000.000	500.000.000	1,00	5.000.000	500.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	**500.000.000**	**50.000.000.000**	**100,00**	**1.000.000.000**	**100.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.500.000.000**	**150.000.000.000**		**1.000.000.000**	**100.000.000.000**	

3. Sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) atau sekitar 13,33% (tiga belas koma tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk melakukan setoran modal kedalam Entitas Anak Perseroan yaitu PT Victoria Insurance ("VINS") sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham pada nilai nominal yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham. Dimana selanjutnya oleh VINS akan digunakan untuk;
   (i) Sebesar Rp2.000.000.000,00 atau sekitar 1,33% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk deposito yang digunakan sebagai cadangan apabila terjadi *claim* diluar dugaan.
   (ii) Sebesar Rp10.000.000.000,00 atau sekitar 6,67% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk porfolio obligasi
   (iii) Sebesar Rp8.000.000.000,00 atau sekitar 5,33% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk porfolio saham.

Berikut adalah proforma VINS setelah mendapatkan tambahan modal yang berasal dari hasil Penawaran Umum Perseroan :

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal			Sesudah Penambahan Modal		
	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**180.000**	**180.000.000.000**		**180.000**	**180.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Perseroan	79.000	79.000.000.000	98,75	99.000	99.000.000.000	99,00
Aldo Jusuf Tjahaja	1.000	1.000.000.000	1,25	1.000	1.000.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	**80.000**	**80.000.000.000**	**100,00**	**100.000**	**100.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**100.000**	**100.000.000.000**		**80.000**	**80.000.000.000**	

4. Sebesar Rp50.889.840.300,00 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) atau sekitar 33,93% (tiga puluh tiga koma sembilan tiga persen) akan digunakan untuk melakukan pelaksanaan atas waran seri III BVIC yang dimiliki oleh Perseroan pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III sebanyak-banyaknya 508.898.403 Waran pada harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per lembar saham. Selanjutnya dana hasil dari pelaksanaan waran tersebut akan oleh BVIC untuk modal kerja.

Berikut adalah proforma BVIC*, setelah dilakukannya pelaksanaan waran seri III oleh Perseroan:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Pelaksanaan Waran		
	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		%	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**14.000.000.000**	**1.400.000.000.000**		**14.000.000.000**	**1.400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Perseroan	**2.302.017.500**	**230.201.750.000**	**34,86**	2.810.915.903	281.091.590.300	39,52
PT Suryayudha Investindo Cipta	**418.953.250**	**41.895.325.000**	**6,34**	418.953.250	41.895.325.000	5,89
PT Nata Patindo	**220.000.000**	**22.000.000.000**	**3,33**	**220.000.000**	**22.000.000.000**	3,09
Suzanna Tanojo	**882.000.000**	**88.200.000.000**	**13,36**	882.000.000	88.200.000.000	12,40
Atrium Asia Invesment Management Pte.Ltd	**584.723.619**	**58.472.361.900**	**8,86**	584.723.619	58.472.190.000	8,22
Masyarakat Lainnya	**2.195.426.073**	**219.542.607.300**	**33,25**	2.305.760.576	230.576.057.600	30,87
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	**6.603.120.442**	**660.312.044.200**	**100,00**	**7.112.018.845**	**711.201.884.500**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**7.396.879.558**	**739.687.955.800**		**6.887.981.155**	**688.798.115.500**	

**Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo tanggal 7 Juni 2013.*

5. Sisanya sebesar Rp3.489.731.565,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima Rupiah) atau sekitar 2,33% (dua koma tiga tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan antara lain untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan.

Seluruh dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Victoria Investama dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Victoria Investama (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**") atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum, atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK telah terpenuhi.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Laporan Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Victoria Investama, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana No. 8231/MMIK/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 ("**Laporan Uji Tuntas**").

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT Victoria Investama, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana No. 8206/MMIK/V/2013 tanggal 10 Juni 2013.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Uji Tuntas dilakukan dan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut dibawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum.

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Uji Tuntas, maka Laporan Uji Tuntas meliputi: (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Uji Tuntas Perseroan, dan (b) aspek hukum penawaran umum saham perdana sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal, dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012.

2. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:

   3.1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang perseroan terbatas dan pasar modal.

   3.2. Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.

4. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 21 Juni 2013.

5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Victoria Investama sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

6. Kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (Lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.01/HKHPM/2005), dengan

ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.

8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.

9. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan Uji Tuntas terhadap dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak (-pihak) ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Victoria Investama, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut diatas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UU No. 40/2007**").

2. Perseroan didirikan dengan nama "**PT Tata Sekuritas Maju**" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Tata Sekuritas Maju No. 39 tanggal 26 Oktober 1989 yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH, Notaris di Serang, telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10137 HT.01.01-Th.89 tanggal 2 Nopember 1989 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1612/1989 tanggal 7 Nopember 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3537 ("**Akta Pendirian**").

   Selanjutnya Perseroan berubah nama menjadi "**PT Victoria Sekuritas**" berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tata Sekuritas Maju No. 33 tanggal 17 Desember 1999, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan

dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-112 HT.01.04.TH.2000 tanggal 5 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 248/RUB.09.03/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7962 dan kemudian berubah nama menjadi "**PT Victoria Investama**" berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Victoria Sekuritas No. 51 tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-36672.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061351.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012, Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 18 September 2012, Tambahan No. 51440 ("**Akta No. 51/2012**").

3. Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung sejak Perseroan didirikan pada tahun 1989, perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

3.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 28 Desember 1990 dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Serang, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-935 HT.01.04.Th 91 tanggal 18 Maret 1991, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 228/1991 tanggal 25 Maret 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1991, Tambahan No. 1297 ("**Akta No. 37/1990**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah) dari sebelumnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

3.2 Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 26 Oktober 1992 dibuat di hadapan Soedarno, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-7624 HT.01.04.TH.96 tanggal 6 Maret 1996, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1614/A N07/96 PN.JAK.SEL tanggal 29 Oktober 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7898 ("**Akta No. 27/1992**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk merubah maksud dan tujuan Perseroan.

3.3 Akta Berita Acara Rapat No. 28 tanggal 16 Maret 1995, yang dibuat dihadapan Ny. Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 28/1995**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dari sebelumnya Rp1.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah).

Perseroan belum melakukan pendaftaran dan pengumuman untuk Akta No. 28/1995 Berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka para pengurus Perseroan atas perbuatan mereka, terikat secara pribadi untuk keseluruhannya terhadap pihak ketiga. Tambahan setoran modal berdasarkan Akta No. 90/1996 telah efektif diterima oleh Perseroan.

3.4 Akta Risalah Rapat No. 90 tanggal 15 Februari 1996, yang dibuat dihadapan Purbandari, S.H., Notaris Pengganti dari H. Abdul Kadir Usman,S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 90/1996**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) dari sebelumnya Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) menjadi Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus Rupiah).

Perseroan belum melakukan pendaftaran dan pengumuman untuk Akta No. 90/1996. Berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka para pengurus Perseroan atas perbuatan mereka, terikat secara pribadi untuk keseluruhannya terhadap pihak ketiga. Tambahan setoran modal berdasarkan Akta No. 90/1996 telah efektif diterima oleh Perseroan.

3.5 Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 149 tanggal 23 April 1997 dibuat di hadapan H. Abdul Kadir Usman, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9506 HT.01.04.Th.97 tanggal 16 September 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 1569/BH.09.03/X/97 tanggal 14 September 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7899 ("**Akta No. 149/1997**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk merubah pasal 2 dan pasal 3 anggaran dasar Perseroan serta menyesuaikan anggaran dasar dengan UU No. 1/1995.

3.6 Akta Risalah Rapat No. 64 tanggal 6 Agustus 1997 dibuat di hadapan H. Abdul Kadir Usman, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9506 HT.01.04.Th.97 tanggal 16 September 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 1569/BH.09.03/X/97 tanggal 14 September 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7899 ("**Akta No. 64/1997**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan serta merubah pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan peningkatan modal dasar Perseroan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp8.900.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah).

3.7 Akta Perubahan No. 130 tanggal 15 Agustus 1997 dibuat di hadapan H. Abdul Kadir Usman, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9506 HT.01.04.Th.97 tanggal 16 September 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 1569/BH.09.03/X/97 tanggal 14 September 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7899 ("**Akta No. 130/1997**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk merubah pasal 3 anggaran dasar Perseroan.

3.8 Akta Risalah Rapat No. 47 tanggal 8 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan Purbandari, S.H., Notaris Pengganti dari H. Abdul Kadir Usman, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Laporan Perubahan Data Perseroan No. C-19703 HT.01.04.TH.99 tanggal 7 Desember 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 247/BH.09.03/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 2004, Tambahan No. 658 ("**Akta No. 47/1997**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah dari semula sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

3.9 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tata Sekuritas Maju No. 33 tanggal 17 Desember 1999, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-112 HT.01.04.TH.2000 tanggal 5 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 248/RUB.09.03/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7962 ("**Akta No. 33/1999**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Tata Sekuritas Maju menjadi "**PT Victoria Sekuritas**", peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dari semula sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah).

3.10 Akta Risalah Rapat No. 8 tanggal 4 Mei 2000 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Laporan Perubahan Data Perseroan No. C-10673 HT.01.04.TH.2000 tanggal 25 Mei 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 675/RUB.09.03/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000 ("**Akta No. 8/2000**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroansebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) dari semula sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

3.11 Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 30 Desember 2002 yang dibuat di hadapan George Handojo Hermawi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Laporan Perubahan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-04741 HT.01.04.TH.2003 tanggal 7 Maret 2003, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 577/RUB.09.03/V/2003 tanggal 14 Mei 2003 ("**Akta No. 6/2002**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan sejumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah).

3.12 Akta Berita Acara Rapat No. 95 tanggal 23 Agustus 2004 dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-25763 HT.01.04.TH.2004 tanggal 14 Oktober 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 0805/RUB.09.05/IV/2005 tanggal 4 April 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 10 Maret 2005, Tambahan No. 4672 ("**Akta No. 95/2004**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan sebelumnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

3.13 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 19 Juli 2005 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-22317 HT.01.04.TH.2005 tanggal 10 Agustus 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 2182/RUB.09.05/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 26 Agustus 2005, Tambahan No. 9181 ("**Akta No. 17/2005**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui (i) perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseran Terbuka, (ii) penurunan nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah),(iii) Penawaran Umum kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, (iv) perubahan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, (v) perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perseroan terbuka.

3.14 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 5 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-20236 HT.01.04.TH.2006 tanggal 11 Juli 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 6462/RUB.09.05/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006 ("**Akta No. 3/2006**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan sejumlah 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah).

3.15 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 1 November 2007 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. C-UM.HT.10-3584 tanggal 16 November 2007 ("**Akta No. 1/2007**"),

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dari semula sebesar Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

3.16 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tanggal 29 Juli 2008 dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-67577.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089542.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Februari 2009, Tambahan No. 5015 ("**Akta No. 43/2008**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah telah menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan yang tertutup dan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 40/2007.

3.17 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 20 November 2009 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-22191 tanggal 8 Desember 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081873.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 8 Desember 2009 ("**Akta No. 34/2009**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp127.500.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan sejumlah 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

3.18 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-01472 tanggal 20 Januari 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004515.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 20 Januari 2010 ("**Akta No. 20/2009**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp127.500.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar) dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan sejumlah 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

3.19 Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 17 tanggal 7 Juni 2011 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-17806 tanggal 10 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047038.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-30487.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049106.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 18 September 2012, Tambahan No. 51440 ("**Akta No. 17/2011**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp620.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh miliar Rupiah) sehingga merubah pasal 4, serta merubah pasal 5, pasal 7, dan pasal 11 anggaran dasar Perseroan.

3.20 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 41 tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-25593 tanggal 8 Agustus 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00065529.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 8 Agustus 2011 ("**Akta No. 41/2011**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar) menjadi sebesar Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan sejumlah 1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta Rupiah) saham dengan nilai nominal sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah)

3.21 Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Victoria Sekuritas No. 51 tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-

36672.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061351.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012 ("**Akta No. 51/2012**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Victoria Sekuritas menjadi "**PT Victoria Investama**".

3.22 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 116 tanggal 27 Maret 2013 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-17098.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029189.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-12746 tanggal 8 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030769.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 ("**Akta No. 116/2013**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar sebesar Rp880.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang semula sebesar Rp620.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh miliar Rupiah) berubah menjadi Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp355.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang semula sebesar Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp615.000.000.000,00 (enam ratus lima belas miliar Rupiah), perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, Penawaran Umum Saham Perdana, perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

3.23 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 116 tanggal 27 Maret 2013 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-12746 tanggal 8 April 2013 yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-17098.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 ("**Akta No. 102/2013**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 8 sampai dengan Pasal 24 dan menambah Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 116/2013 jo. Akta No. 102/2013 sebagaimana dimaksud dalam butir 3.22 dan butir 3.23.

Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan berikut dengan perubahan-perubahannya tersebut selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar**". Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankannya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 116/2013 adalah sebagai berikut:

" 1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan di bidang pertanian, perkebunan, telekomunikasi, perdagangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas serta untuk menunjang kegiatan utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha industri untuk produksi pipa baja perangkat dan sistem komunikasi, barang-barang elektronik dan elektrik, kimia/petrokimia, serta mendirikan dan menjalankan berbagai rupa usaha industri lainnya dan memperdagangkan hasil-hasilnya.

b. Menjalankan usaha dibidang kontraktor/pemborong bangunan, pabrik bahan bangunan dan bahan konstruksi, gedung, jalan, jembatan, pengairan, instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi, baik sebagai perencana maupun sebagai pelaksana.

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penyediaan dan pematangan lahan, termasuk antara lain menyelenggarakan pendirian gedung-gedung baru, rehabilitasi gedung-gedung yang sudah ada dan melakukan penjualan serta sewa menyewa gedung-gedung.

d. Berusaha dalam bidang pembangunan, pemilikan pengelolaan perumahan (real estate), kawasan industri, gedung kantor, apartemen, condominium, properti serta pusat perdagangan (shopping centre) dan berusaha sebagai developer dengan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, termasuk pula pembebasan tanah (landclearing), pemerataan, pemetaan, perkavlingan dan penjualan tanah baik tanah untuk perumahan maupun tanah untuk industri berikut juga segala bangunan yang ada di atasnya;

e. Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor, dagang antar pulau (interinsulair) dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat;

f. Bertindak sebagai leveransir, grossir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain baik dari luar negeri;

g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;

h. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas."

Pada tanggal Pendapat Hukum, maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas, merupakan kegiatan usaha utama Perseroan yang telah sesuai dengan ketentuan UU No. 40/2007 dan Angka 4 huruf c Peraturan No.IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1**"). Perseroan tidak menjalankan kegiatan

usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 huruf d Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, dengan demikian Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan yang berlaku, sesuai dengan Akta No. 116/2013, yaitu sebagai berikut:

   Modal Dasar : Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham;

   Modal Ditempatkan : Rp615.000.000.000,00 (enam ratus lima belas miliar Rupiah) yang terdiri dari 6.150.000.000 (enam miliar seratus lima puluh juta) saham;

   Modal Disetor : Rp615.000.000.000,00 (enam ratus lima belas miliar Rupiah).

   Struktur permodalan Perseroan sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku, sesuai dengan struktur permodalan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 116/2013, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**15.000.000.000**	**1.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Gratamulia Pratama	6.088.500.000	608.850.000.000	99,00
Suzanna Tanojo	61.500.000	6.150.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.150.000.000**	**615.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**8.850.000.000**	**885.000.000.000**	

   Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 UU No. 40 Tahun 2007. Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 6.150.000.000 (enam miliar seratus lima puluh juta) saham. Susunan Pemegang saham sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum adalah benar, sah, sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Sebagian dokumen pengalihan hak atas saham dan bukti setor untuk peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan yang terjadi setelah pendirian Perseroan sampai dengan tahun 1995 tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan. Namun demikian, setoran untuk peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan yang tidak dapat diperlihatkan tersebut dapat dibuktikan telah disetor ke dalam kas Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan dan ditegaskan dengan Surat Pernyataan dari Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu PT Gratamulia Pramana tertanggal 24 Mei 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang Saham Utama Perseroan dalam Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2013 menyatakan bertanggung jawab terhadap tuntutan-tuntutan dari pihak ketiga mengenai setiap pengalihan hak atas saham yang telah terjadi dan menyatakan bahwa Perseroan telah menerima seluruh setoran modal dari pemegang saham sejak pendirian sampai dengan tanggal Surat Pernyataan. Pengalihan hak atas saham sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum adalah benar, sah, sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 33 tanggal 13 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasar No. AHU-AH.01.10-09643 tanggal 15 Maret 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023052.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan No. Pendaftaran 09.05.1.70.49138 tanggal 24 April 2013, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Suzanna Tanojo
Komisaris Independen	:	Peter Rulan Isman

Direksi

Direktur Utama	:	Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Cendrasuri Ependy
Direktur	:	Rebecca Wahjutirto Tanoyo

Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diangkat berdasarkan Akta No. 33/2013 adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bursa No. I-A. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 31 Maret 2013, Perseroan menyatakan akan membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK serta peraturan Bursa Efek Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

9. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menetapkan Rebecca Ayuyantrie sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 28 Maret 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.004/VI-DIR/III2013 tentang Pengangkatan Sebagai *Corporate Secretary*.

10. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 40/2007 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Victoria Investama No. 116 tanggal 27 Maret 2013 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara.

11. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin, persetujuan-persetujuan, dan pengesahan-pengesahan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan, yang dilakukan oleh Perseroan yang dalam hal ini termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha Perseroan. Pada tanggal Pendapat Hukum seluruh ijin-ijin yang dimiliki Perseroan masih berlaku.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki sebanyak 1 (satu) bidang tanah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4348 atas tanah yang terletak di Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta seluas 68 m^2 (enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00018/Cideng/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 2011 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan jangka waktu kepemilikan hak selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tanggal 9 Oktober 2031.

Kepemilikan atas aset tanah Perseroan tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, tanah milik Perseroan sebagaimana tersebut di atas tidak sedang menjadi jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa, atau perkara dalam bentuk apapun.

13. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:

14.1 Perseroan telah memberlakukan peraturan perusahaan dengan Nomor Pengesahan 253/PP/B/IV/D/2013 tanggal 8 April 2013 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta cq. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja dengan No. Reg. 62/IV, telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan No. 2853/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun mulai tanggal ditetapkan.

14.2 Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program-program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT Jamsostek (Persero).

14.3 Perseroan telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah minimum bagi seluruh tenaga kerjanya dengan mendasarkan kepada gaji terendah dikalangan karyawan Perseroan dan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat Perseroan berlokasi.

14.4 Perseroan telah melakukan kewajibannya atas pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawannya dimana Perseroan berlokasi pada Departemen Tenaga Kerja.

14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

15.1 Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangan Perseroan konsolidasi dengan Anak Perusahaan ("**Anak Perusahaan I**") yaitu sebagai berikut:

15.1.1 PT Victoria Securities Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta ("**PT VSI**"), yang anggaran dasar terakhirnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 60 tanggal 11 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 244 tanggal 31 Maret 2011, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-18593.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 13 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0029646.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 April 2011. Perseroan memiliki 495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT VSI.

15.1.2 PT Victoria Insurance, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta ("**PT VINS**"), yang anggaran dasar terakhirnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 123 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-27845 tanggal 26 Agustus 2011 dan telah di daftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0071203.AH.01.09 Tahun 2011. Perseroan memiliki 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) atau sebesar 98,75% (sembilan

puluh delapan koma tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT VINS.

15.1.3 PT Victoria Manajemen Investasi, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta ("**PT VMI**"), yang anggaran dasar terakhirnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-13711 tanggal 12 April 2013 dan telah di daftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0033170.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 12 April 2013. Perseroan memiliki 237.500.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp23.750.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT VMI.

15.2 Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan kurang dari 50% (lima puluh persen) ("**Anak Perusahaan II**") yaitu PT Bank Victoria International Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta ("**PT BVIC**"), yang anggaran dasar terakhirnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PT BVIC No. 21 tanggal 8 Oktober 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-AH.01.10-37171 tanggal 16 Oktober 2012, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0090572.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012. Perseroan memiliki 2.302.017.500 (dua miliar tiga ratus dua juta tujuh belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp230.201.750.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar 35,16% (tiga puluh lima koma enam belas persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT BVIC.

Pada tanggal Pendapat Hukum, penyertaan oleh Perseroan secara langsung pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan secara sah, memperoleh persetujuan dari instansi terkait dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia utamanya dalam rangka UU No. 40/2007 serta sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan maupun Anak Perusahaan tidak sedang terkait dalam suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun.

15. Anak Perusahaan I dan Anak Perusahaan II telah didirikan secara sah sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait serta dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Anak Perusahaan I dan Anak Perusahaan II.

16. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan I dan Anak Perusahaan II telah diangkat dengan sah sesuai ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan I dan Anak Perusahaan II dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Anak Perusahaan I dan Anak Perusahaan II.

Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan I dan Anak Perusahaan II belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan pada masing-masing domisili Anak Perusahaan I dan Anak Perusahaan II. Sehubungan dengan belum didaftarkannya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan I dan Anak Perusahaan II oleh Direksi Anak Perusahaan I dan Anak Perusahaan II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UU No. 3 Tahun 1982, Direksi Anak Perusahaan I dan Anak Perusahaan II diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

17. Permodalan pada Anak Perusahaan I dan Anak Perusahaan II sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan I dan Anak Perusahaan II dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Khusus untuk PT VINS, sebagian dokumen pengalihan hak atas saham dan bukti setor untuk peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam PT VINS yang terjadi pada saat pendirian PT VINS di tahun 1978 sampai dengan tahun 2004 tidak dapat diperlihatkan oleh PT VINS. Namun demikian, setoran untuk peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan yang tidak dapat diperlihatkan tersebut dapat dibuktikan telah disetor ke dalam kas PT VINS sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Keuangan PT VINS dan ditegaskan dengan Surat Pernyataan dari Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu Perseroan tertanggal 24 Mei 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang Saham Utama PT VINS dalam Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2013 menyatakan bertanggung jawab terhadap tuntutan-tuntutan dari pihak ketiga mengenai setiap pengalihan hak atas saham yang telah terjadi dan menyatakan bahwa Perseroan telah menerima seluruh setoran modal dari pemegang saham sejak pendirian sampai dengan tanggal Surat Pernyataan.

18. Anak Perusahaan I, kecuali PT VMI dan Anak Perusahaan II, telah mempunyai ijin dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan seluruh ijin yang dimiliki masih berlaku. Sebagai perusahaan efek, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP- 334 /BL/2007 Tentang Perizinan Perusahaan Efek - Peraturan Nomor V.A.1, PT VMI wajib memperoleh izin sebagai perusahaan efek yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, PT VMI belum memperoleh izin sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan belum diperolehnya izin sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, maka PT VMI belum dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar PT VMI.

19. Kepemilikan harta kekayaan oleh Anak Perusahaan I, baik berupa harta tetap maupun harta bergerak, telah dimiliki dengan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan dokumen yang mendukung kepemilikan harta tersebut. PT VMI tidak memiliki harta kekayaan baik berupa harta tetap maupun harta bergerak.

    Harta yang dimiliki Anak Perusahaan I tidak sedang dijaminkan, diagunkan, dipersengketakan dengan pihak ketiga.

20. PT VSI dan PT VINS telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, sedangkan PT VMI belum beroperasi sehingga tidak berkewajiban untuk memenuhi ketentuan bidang ketenagakerjaan. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas PT VMI, PT VMI tidak mempunyai karyawan sehingga tidak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban dibidang perburuhan.

21. Perjanjian-perjanjian antara Anak Perusahaan I dengan pihak ketiga telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan I dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Anak Perusahaan I. Perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat, serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian yang dapat membatasi kepentingan dan hak pemegang saham publik.

22. Anak Perusahaan I tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Anak Perusahaan I mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Anak Perusahaan I.

23. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material sehubungan kegiatan usaha Perseroan dan perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan dari Bank Sinarmas dan BVIC, yang mana atas perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan tersebut tidak terdapat pembatasan dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Victoria Investama. Namun demikian terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk meminta persetujuan dari BVIC dan melakukan pemberitahuan kepada Bank Sinarmas dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan status badan hukum Perseroan.

    Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BVIC sesuai dengan persetujuan yang dibubuhkan dalam surat permohonan yang disampaikan oleh Perseroan kepada BVIC No. 031/VI/DIR/IV/2013 tanggal 5 April 2013 perihal Perjanjian Pinjaman Rekening Koran Rp7.500.000.000,00 antara BVIC dan Perseroan dan telah memberitahukan kepada Bank Sinarmas sesuai dengan Surat Perseroan No. 030/VI/DIR/IV/2013 tanggal 5 April 2013 perihal Perjanjian Fasilitas Demand Loan (*Revolving*) (*Uncommited*) Rp22.500.000.000,00 antara Bank Sinarmas dan Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan tanda penerimaan surat 000105 tanggal 6 April 2013.

    Berdasarkan Surat No. 031/VI/DIR/IV/2013, pembatasan sehubungan dengan pembagian deviden dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang mewajibkan memperoleh persetujuan dari BVIC juga sudah dihapus dan berdasarkan Surat No. 030/VI/DIR/IV/2013, pembatasan sehubungan dengan pembagian deviden dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang mewajibkan memperoleh persetujuan dari Bank Sinarmas juga sudah dihapus. Dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tidak ada pembatasan yang merugikan publik.,

24. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Victoria Investama, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

    25.1 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 120 tangggal 24 April 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 214 tangggal 27 Mei 2013 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 163 tangggal 21 Juni 2013, seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H.,S.E.,M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.

    25.2 Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Investama Tbk No. 121 tangggal 24 April 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Investama Tbk No. 213 tangggal 27 Mei 2013 dan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Investama Tbk No. 162 tangggal 21 Juni 2013, seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H.,S.E.,M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.

    25.3 Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 122 tangggal 24 April 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 34 tanggal 10 Juni 2013 keduanya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H.,S.E.,M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Ficomindo Buana Registrar.

    25.4 Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Investama Tbk No. 123 tangggal 24 April 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Investama Tbk No. 215 tangggal 27 Mei 2013 dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Investama Tbk No. 164 tangggal 21 Juni 2013, seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H.,S.E.,M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Ficomindo Buana Registrar.

    25.5 Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0016/PE/KSEI/0413 tanggal 24 April 2013, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

25.6 Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 24 April 2013, dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK. Penawaran Umum Saham Perdana Victoria Investama serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, dan (iii) seluruhnya masih berlaku.

25. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana Victoria Investama setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk:

a. Sebesar Rp25.620.428.135,00 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) atau sekitar 17,08% (tujuh belas koma nol delapan persen) akan digunakan untuk melunasi *Junior Convertible Loan Agreement* Perseroan. *Junior Convertible Loan Agreement ("JCLA")* diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 9 September 2011. guna melunasi hutang pemegang saham yang telah dikeluarkan sebelumnya sebagai modal disetor VSI pada awal tahun 2011,

Ketentuan ketentuan yang berlaku dari JCLA tersebut adalah:

– <u>Junior Convertible Loan ("JCL") antara Perseroan dan Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd.:</u>

Bunga : Tanpa Bunga
Jumlah Pinjaman: Rp10.660.428.135,00
Jangka Waktu : 9 September 2011 - 2 Desember 2013
Jaminan : sebanyak 236.898.403 Waran Bank Victoria International milik Perseroan yang di peroleh dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ("HMETD") III dan IV BVIC.

Syarat Kondisi dalam rangka Konversi JCL:

a) Opsi Terhadap Saham: Perseroan memberikan Hak Opsi kepada Barron untuk mengkonversi pinjaman pokok yang belum terbayar pada waktu kapanpun terhitung sejak Perseroan tidak mempunyai izin sebagai perusahaan sekuritas hingga tanggal 2 Desember 2013 (Jangka Waktu Opsi), dengan harga per saham 1,5 kali dari nilai buku atas saham pada tanggal Perjanjian ini.
b) Pelaksanaan Opsi Terhadap Saham: Opsi Saham dapat dilaksanakan kapan saja oleh Barron, selama pada jangka waktu opsi dapat menyajikan pemberitahuan tertulis.

Pelunasan lebih awal Junior Convertible Loan Agreement tersebut telah mendapat persetujuan dari Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd. berdasarkan surat Perseroan tanggal 15 Maret 2013.

– <u>Junior Convertible Loan ("JCL") antara Perseroan dan Aldo J. Tjahaja ("Aldo")</u>

Bunga : Tanpa Bunga
Jumlah Pinjaman: Rp14.960.000.000,00
Jatuh Tempo : sampai dengan 2 Desember 2013
Jaminan : sebanyak 272.000.000 Waran Bank Victoria International milik Perseroan yang di peroleh dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ("HMETD") III dan IV BVIC.

Syarat Kondisi dalam rangka Konversi JCL

a) Opsi Terhadap Saham Perseroan: Perseroan memberikan Hak Opsi kepada Bapak Aldo untuk mengkonversi pinjaman pokok yang belum terbayar pada waktu kapanpun terhitung sejak Perseroan tidak mempunyai izin sebagai perusahaan sekuritas hingga tanggal 2 Desember 2013 (Jangka Waktu Opsi), dengan harga Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham.
b) Pelaksanaan Opsi Terhadap Saham: Opsi Saham dapat dilaksanakan kapan saja oleh Bapak Aldo, selama pada jangka waktu opsi dapat menyajikan pemberitahuan tertulis.

Pelunasan lebih awal Junior Convertible Loan Agreement tersebut telah mendapat persetujuan dari Aldo J. Tjahaja berdasarkan surat Perseroan tanggal 15 Maret 2013.

Atas rencana pelunasan hutang tersebut, maka berdasarkan surat dari Aldo J. Tjahaja pada tanggal 23 April 2012 dan Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd pada tanggal 24 April 2012 menyatakan tidak akan mengkonversi piutangnya menjadi saham Perseroan.

b. Sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau sekitar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk melakukan setoran modal ke dalam Entitas Anak Perseroan yaitu PT Victoria Securities Indonesia ("VSI") sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham pada nilai nominal yaitu Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham. Dimana selanjutnya oleh VSI akan digunakan untuk:

(i) Sebesar Rp28.000.000.000,00 atau sekitar 18,66% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk portofolio obligasi.
(ii) Sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000,00 atau sekitar 3,33% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk portofolio saham.
(iii) Sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000,00 atau sekitar 2,67% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk pembiayaan margin.
(iv) Sebanyak-banyaknya Rp13.000.000.000,00 atau sekitar 8,67% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk transaksi repo.

Berikut adalah proforma VSI setelah mendapatkan tambahan modal yang berasal dari hasil Penawaran Umum Perseroan:

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal			Sesudah Penambahan Modal		
	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		%	Nilai Nominal Rp100,00per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**		**200.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Perseroan	495.000.000	49.500.000.000	99,00	995.000.000	99.500.000.000	99,50
Suzanna Tanojo	5.000.000	500.000.000	1,00	5.000.000	500.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	**500.000.000**	**50.000.000.000**	**100,00**	**1.000.000.000**	**100.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.500.000.000**	**150.000.000.000**		**1.000.000.000**	**100.000.000.000**	

c. Sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) atau sekitar 13,33% (tiga belas koma tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk melakukan setoran modal kedalam Entitas Anak Perseroan yaitu PT Victoria Insurance ("VINS") sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham pada nilai nominal yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham. Dimana selanjutnya oleh VINS akan digunakan untuk;

(i) Sebesar Rp2.000.000.000,00 atau sekitar 1,33% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk deposito yang digunakan sebagai cadangan apabila terjadi *claim* diluar dugaan.
(ii) Sebesar Rp10.000.000.000,00 atau sekitar 6,67% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk porfolio obligasi
(iii) Sebesar Rp8.000.000.000,00 atau sekitar 5,33% dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk porfolio saham.

Berikut adalah proforma VINS setelah mendapatkan tambahan modal yang berasal dari hasil Penawaran Umum Perseroan:

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal			Sesudah Penambahan Modal		
	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**180.000**	**180.000.000.000**		**180.000**	**180.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Perseroan	79.000	79.000.000.000	98,75	99.000	99.000.000.000	99,00
Aldo Jusuf Tjahaja	1.000	1.000.000.000	1,25	1.000	1.000.000.000	1,00
Jumlah Modal	**80.000**	**80.000.000.000**	**100,00**	**100.000**	**100.000.000.000**	**100,00**

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal			Sesudah Penambahan Modal		
	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Ditempatkan & Disetor Penuh						
Jumlah Saham Dalam Portepel	**100.000**	**100.000.000.000**		**80.000**	**80.000.000.000**	

d. Sebesar Rp50.889.840.300,00 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) atau sekitar 33,93% (tiga puluh tiga koma sembilan tiga persen) akan digunakan untuk melakukan pelaksanaan atas waran seri III BVIC yang dimiliki oleh Perseroan pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III sebanyak-banyaknya 508.898.403 Waran pada harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per lembar saham. Selanjutnya dana hasil dari pelaksanaan waran tersebut akan oleh BVIC untuk modal kerja.

Berikut adalah proforma BVIC*, setelah dilakukannya pelaksanaan waran seri III oleh Perseroan:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Pelaksanaan Waran		
	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		%	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**14.000.000.000**	**1.400.000.000.000**		**14.000.000.000**	**1.400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Perseroan	**2.302.017.500**	**230.201.750.000**	**34,86**	2.810.915.903	281.091.590.300	39,52
PT Suryayudha Investindo Cipta	**418.953.250**	**41.895.325.000**	**6,34**	418.953.250	41.895.325.000	5,89
PT Nata Patindo	**220.000.000**	**22.000.000.000**	**3,33**	**220.000.000**	**22.000.000.000**	3,09
Suzanna Tanojo	**882.000.000**	**88.200.000.000**	**13,36**	882.000.000	88.200.000.000	12,40
Atrium Asia Invesment Management Pte.Ltd	**584.723.619**	**58.472.361.900**	**8,86**	584.723.619	58.472.190.000	8,22
Masyarakat Lainnya	**2.195.426.073**	**219.542.607.300**	**33,25**	2.305.760.576	230.576.057.600	30,87
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	**6.603.120.442**	**660.312.044.200**	**100,00**	**7.112.018.845**	**711.201.884.500**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**7.396.879.558**	**739.687.955.800**		**6.887.981.155**	**688.798.115.500**	

**Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo tanggal 7 Juni 2013.*

e. Sisanya sebesar Rp3.489.731.565,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima Rupiah) atau sekitar 2,33% (dua koma tiga tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan antara lain untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan.

Seluruh dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

Dalam hal penggunaan dana oleh Perseroan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan maka pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan dalam hal penggunaan dana oleh Perseroan memenuhi ketentuan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama maka pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan juga diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada BEI

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. I-E, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

26. Pada tanggal Pendapat Hukum Perseroan sedang terlibat dalam perkara perdata yang sedang dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan No. Perkara 155/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.Jkt.Pst antara Abdul Malik Jan sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai salah satu Termohon Kasasi (Termohon Kasasi 39) dalam kasus perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pelaksanaan IPO PT Media Nusantara Citra,Tbk. Perkara sebagaimana tersebut di atas, dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan.

    Selain perkara sebagaimana tersebut di atas, Perseroan tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan.

27. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, dan harta kekayaan Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,
MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR KUSDIHARDJO

Helen Joni Marsinih, S.H.
STTD No.540/PM/ STTD-KH/2004
Tanda Pengenal Advokat No. 99.10636
Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:
1. Yang terhormat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia

XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
DAN 1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
PT VICTORIA INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Aldo Jusuf Tjahaja
Alamat kantor	:	Senayan City Panin Tower Lantai 8 Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain	:	Simprug Garden V Blok E.9 Rt.007/Rw.003 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Nomor telepon	:	021 - 7278 2310
Jabatan	:	Direktur Utama

menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Victoria Investama ("Perusahaan") dan entitas anak (bersama-sama disebut "Grup").

2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar.

   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Mei 2013

METERAI TEMPEL
EC7E2ABF297011451
6000 DJP

Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Utama

Morison International

TJAHJADI & TAMARA

Registered Public Accountants
License No. 486/KM.1/2011
Gedung Jaya 4th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 12, Jakarta 10340, Indonesia
Phone : (62-21) 3917 163/64
Fax : (62-21) 3910 165

Laporan Auditor Independen

No. 0201/T&T-GA/SH/2013

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
P.T. Victoria Investama (d/h P.T. Victoria Sekuritas)

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian P.T. Victoria Investama (d/h P.T. Victoria Sekuritas) [Perusahaan] dan entitas anak (bersama-sama disebut Grup) tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, perubahan ekuitas konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akhyadi Wadisono yang laporannya bertanggal 29 Pebruari 2012 yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Laporan posisi keuangan Perusahaan tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang yang laporannya bertanggal 1 Maret 2010 yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, Grup kemudian telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010, dan laporan posisi keuangan 1 Januari 2010/31 Desember 2009, di mana laporan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akhyadi Wadisono, yang dalam laporannya bertanggal 29 Januari 2013 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan disertai paragraf penjelasan terutama mengenai pencatatan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi, penyesuaian nilai wajar aset keuangan, perhitungan pajak tangguhan dan *goodwill*, serta reklasifikasi akun-akun tertentu yang mengakibatkan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. Victoria Investama (d/h P.T. Victoria Sekuritas) dan entitas anak tanggal 31 Desember 2012, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perusahaan pada tahun 2012, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan merubah penyajian laporan posisi keuangan konsolidasian dari *unclassified* menjadi *classified* sehingga laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009 telah disajikan kembali.

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 secara keseluruhan. Informasi tambahan konsolidasian terlampir pada halaman 68 sampai dengan 71 mengenai informasi keuangan P.T. Victoria Investama (induk perusahaan saja) disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan ditujukan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan ekuitas secara individu, serta bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tambahan konsolidasian tersebut adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan dan telah menjadi obyek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian, dan menurut pendapat kami, dalam segala hal yang material telah disajikan secara wajar, dalam hubungannya dengan laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2012 secara keseluruhan.

Seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup telah menerapkan revisi Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 secara prospektif atau retrospektif.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 0121/T&T-GA/SH/2013 bertanggal 3 April 2013 dan 0135/T&T-GA/SH/2013 bertanggal 19 April 2013 atas laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang direvisi yang mulai berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 dan penyesuaian sehubungan penerapan PSAK No. 28 (Revisi 2012) tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK No. 62 tentang Kontrak Asuransi yang diterapkan secara retrospektif. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan tambahan beberapa penyajian dan pengungkapan pada Catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan pada Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian.

TJAHJADI & TAMARA

Suharsono, SE, Ak, CPA
Izin No. AP.0003

28 Mei 2013

P.T. VICTORIA INVESTAMA (d/h P.T. VICTORIA SEKURITAS) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009

	Catatan	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp	31 Desember 2010 Rp	1 Januari 2010/ 31 Desember 2009 *) Rp
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	2g,2j,4				
Pihak berelasi	2f,30	4.350.943.277	5.845.683.720	15.176.476.694	805.766.816
Pihak ketiga		5.343.646.425	20.816.538.614	4.608.033.524	1.436.463.009
Investasi jangka pendek	2g,5				
Pihak berelasi	2f,30	20.120.162.508	72.483.758.634	300.000.000	300.000.000
Pihak ketiga		113.499.026.671	99.175.719.480	144.127.901.440	46.691.997.289
Piutang *reverse repo* - setelah dikurangi pendapatan bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp 675.000.001 tahun 2012, Rp 255.555.556 tahun 2011, Rp 1.125.611.946 tahun 2010 dan Rp 717.500.000 tahun 2009	2g,2n,6	29.516.666.666	19.744.444.444	130.874.388.054	29.142.500.000
Piutang premi dan reasuransi	2g,2k,2l				
Pihak berelasi	2f,30	592.376.370	841.531.221	-	-
Pihak ketiga		1.861.593.083	3.387.940.787	201.244.679	-
Aset reasuransi	2l,2t	2.121.122.552	2.400.063.232	698.044.566	-
Piutang jasa penasehat keuangan	2g	2.022.727.273	-	-	
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	2g,7	6.647.203.292	34.748.902.700	30.399.487.844	14.709.300.931
Piutang nasabah	2g,8	13.195.624.496	14.906.604.999	36.928.918.054	23.454.803.245
Rekening nasabah	2m,9	-	12.421.998.064	57.967.475.099	1.446.170.196
Piutang lain-lain	2g				
Pihak berelasi	2f,10,30	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-
Pihak ketiga	11	22.941.654.341	3.279.099.124	1.956.964.737	96.022.481
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2o	437.357.794	1.080.565.332	594.069.659	852.169.662
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka		-	576.522.010	-	-
Jumlah Aset Lancar		225.150.104.748	294.209.372.361	423.833.004.350	118.935.193.629
ASET TIDAK LANCAR					
Investasi jangka panjang	2d,12				
Pihak berelasi	2f,30	533.252.774.363	441.828.643.951	281.842.791.466	246.311.993.509
Pihak ketiga		205.000.000	205.000.000	188.000.000	140.000.000
Aset pajak tangguhan	2x,29	875.122.934	680.467.757	319.233.470	276.531.660
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 19.991.846 tahun 2012 dan Rp 8.567.934 tahun 2011	2q,13	1.080.008.154	1.091.432.066	-	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 5.017.510.243 tahun 2012, Rp 2.909.198.843 tahun 2011, Rp 1.791.456.384 tahun 2010 dan Rp 1.358.657.354 tahun 2009	2p,2r,14	6.538.843.226	8.485.942.626	7.521.740.984	1.782.365.566
Goodwill	1c,2c	5.103.148.824	5.103.148.824	5.103.148.824	-
Uang jaminan		437.320.000	295.752.000	300.252.000	289.752.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		547.492.217.501	457.690.387.224	295.275.166.744	248.800.642.735
JUMLAH ASET		772.642.322.249	751.899.759.585	719.108.171.094	367.735.836.364

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

* Pada tahun 2009, Perusahaan belum mempunyai entitas anak.

	Catatan	31 Desember 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp	31 Desember 2010 Rp	1 Januari 2010/ 31 Desember 2009 *) Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank	2h,15				
Pihak berelasi	2f,30	18.820.723.359	20.000.000.000	19.978.600.000	20.000.000.000
Pihak ketiga		9.400.000.000	60.300.000.000	108.000.000.000	4.400.000.000
Utang klaim - pihak ketiga	2s	16.984.218	160.142.423	572.196	-
Utang reasuransi - pihak ketiga	2l	1.889.342.262	3.001.224.033	4.550.961	-
Utang komisi	2h				
Pihak berelasi	2f,30	76.938.338	124.917.383	-	-
Pihak ketiga		331.235.951	289.964.344	-	-
Utang *repo* - setelah dikurangi beban bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp 531.911.648 tahun 2010	2h,2n,16	-	-	121.911.421.685	-
Utang lembaga kliring dan penjaminan	2h,7	3.671.953.000	14.879.527.500	36.864.159.000	18.736.268.500
Utang nasabah	2h,8	6.055.869.060	32.596.168.222	28.363.317.574	12.826.731.394
Rekening nasabah	2m,9	-	4.223.834.091	17.079.139.917	700.739.332
Utang pajak	2x,17	967.346.986	1.134.244.691	571.630.976	367.721.557
Biaya yang masih harus dibayar	2h	326.306.088	1.828.016.503	1.343.567.870	764.181.872
Liabilitas asuransi	2t				
Estimasi liabilitas klaim		453.197.419	500.158.144	381.465	-
Premi yang belum merupakan pendapatan		2.695.937.150	3.425.481.698	1.955.037.246	-
Uang titipan nasabah					
Pihak berelasi	2f,30	1.357.382.751	446.075.215	-	-
Pihak ketiga		464.774.233	299.100.299	-	-
Liabilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun	2h				
Utang lain-lain	2h				
Pihak berelasi	2f,10,30	22.960.000.000	1.500.000.000	-	15.000.000.000
Pihak ketiga	18	11.978.682.589	59.267.105	33.188.697.091	41.075.532
Utang pembelian kendaraan					
Pihak berelasi	2f,30	17.522.300	18.764.264	-	-
Pihak ketiga		359.712.632	325.346.272	16.569.251	92.500.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		81.743.908.338	145.112.232.187	369.277.645.232	72.929.218.187
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2h				
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	2f,10,30	-	14.960.000.000	-	-
Pihak ketiga	18	-	10.660.428.135	-	-
Utang pembelian kendaraan					
Pihak berelasi	2f,30	-	23.543.980	-	-
Pihak ketiga		309.193.393	485.633.384	36.851.921	
Liabilitas imbalan kerja	2w,19	1.216.692.065	1.539.392.222	692.207.819	472.149.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.525.885.458	27.668.997.721	729.059.740	472.149.000
Jumlah Liabilitas		83.269.793.796	172.781.229.908	370.006.704.972	73.401.367.187
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham					
Modal dasar - 6.200.000.000 saham tahun 2012 dan 2011 dan 2.000.000.000 saham tahun 2010 dan 2009					
Modal ditempatkan dan disetor - 2.600.000.000 saham tahun 2012 dan 2011 dan 1.550.000.000 saham tahun 2010 dan 2009	2h,21	260.000.000.000	260.000.000.000	155.000.000.000	155.000.000.000
Komponen ekuitas lainnya	22	64.135.368.106	50.581.448.006	18.818.477.005	27.878.114.150
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya		360.446.805.951	263.811.037.000	174.852.778.096	111.456.355.027
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		684.582.174.057	574.392.485.006	348.671.255.101	294.334.469.177
Kepentingan non-pengendali	2b,20	4.790.354.396	4.726.044.671	430.211.021	-
Jumlah Ekuitas		689.372.528.453	579.118.529.677	349.101.466.122	294.334.469.177
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		772.642.322.249	751.899.759.585	719.108.171.094	367.735.836.364

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

* Pada tahun 2009, Perusahaan belum mempunyai entitas anak.

P.T. VICTORIA INVESTAMA (d/h P.T. VICTORIA SEKURITAS) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011, DAN 2010

	Catatan	2012	2011	2010
		Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN USAHA	2v			
Pendapatan hasil investasi	23	20.838.676.048	16.627.517.039	21.048.969.840
Pendapatan kegiatan penjaminan emisi dan penjualan efek	24	17.596.710.651	20.859.932.447	3.449.343.685
Pendapatan bunga - bersih	25	9.366.705.667	8.960.865.299	8.285.650.948
Pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek	26	4.678.956.168	7.082.666.207	7.702.905.900
Pendapatan premi - bersih		1.692.652.335	2.741.912.314	234.667.949
Pendapatan komisi - bersih		401.313.907	526.422.018	-
Jumlah Pendapatan Usaha		54.575.014.974	56.799.315.324	40.721.538.322
BEBAN USAHA	2v			
Beban kepegawaian	2w,19,27	12.406.746.131	8.767.092.830	3.439.912.149
Penyusutan	2p,2q,13,14	2.146.089.479	1.439.054.429	780.771.759
Pajak-pajak		1.864.166.673	989.821.822	259.588.577
Sewa		1.824.604.232	1.671.966.600	976.486.667
Administrasi dan umum		1.453.004.002	2.109.552.221	563.079.419
Pemasaran		649.041.991	3.963.082.413	3.523.365.592
Beban klaim		617.405.950	382.592.786	26.872.824
Beban penjaminan dan penjualan emisi efek		605.297.278	7.716.518.181	33.451.344
Telekomunikasi		396.018.715	553.596.653	362.254.267
Transaksi bursa		371.826.365	260.865.348	223.245.834
Jasa profesional		278.067.381	309.334.150	240.750.000
Representasi dan sumbangan		277.990.675	400.044.616	256.500.000
Transportasi dan perjalanan dinas		245.446.646	535.940.345	441.310.518
Pemeliharaan dan perbaikan		217.196.486	820.176.647	464.502.300
Asuransi		90.468.229	22.654.513	81.242.364
Perijinan		58.511.771	177.400.200	94.496.500
Lain-lain		401.320.862	260.100.305	8.608.766
Jumlah Beban Usaha		23.903.204.866	30.399.784.059	11.776.438.882
LABA USAHA		30.671.810.108	26.399.521.265	28.945.099.440
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Bagian laba bersih entitas asosiasi	2d,12	74.766.134.733	72.085.985.106	43.783.065.438
Penghasilan bunga		558.566.089	1.035.677.205	424.397.165
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	2e	52.106.263	(224.061.003)	-
Keuntungan penjualan aset tetap		25.979.167	490.861.675	114.626.012
Beban bunga dan keuangan	28	(8.155.913.708)	(10.251.006.961)	(8.766.412.400)
Lain-lain - bersih		(319.007.807)	(146.423.441)	(640.665.655)
Jumlah Penghasilan Lain-lain - Bersih		66.927.864.737	62.991.032.581	34.915.010.560
LABA SEBELUM PAJAK		97.599.674.845	89.390.553.846	63.860.110.000
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2x,29	(899.596.169)	(386.461.292)	(352.051.808)
LABA SEBELUM LABA ENTITAS ANAK PRA-AKUISISI		96.700.078.676	89.004.092.554	63.508.058.392
LABA ENTITAS ANAK PRA-AKUISISI		-	-	(95.414.805)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		96.700.078.676	89.004.092.554	63.412.643.587
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA				
Keuntungan (kerugian) dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual	2g,5	(3.118.275.579)	23.047.522.715	349.000.000
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	2d,12	16.672.195.679	8.715.448.286	(9.408.637.145)
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lainnya		13.553.920.100	31.762.971.001	(9.059.637.145)
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		110.253.998.776	120.767.063.555	54.353.006.442
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Entitas induk		96.635.768.951	88.958.259.904	63.396.423.069
Kepentingan non-pengendali	2b,20	64.309.725	45.833.650	16.220.518
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		96.700.078.676	89.004.092.554	63.412.643.587
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Entitas induk		110.189.689.051	120.721.229.905	54.336.785.924
Kepentingan non-pengendali		64.309.725	45.833.650	16.220.518
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF		110.253.998.776	120.767.063.555	54.353.006.442
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		37	43	41

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

P.T. VICTORIA INVESTAMA (d/h P.T. VICTORIA SEKURITAS) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

	Catatan	Modal ditempatkan dan disetor	Komponen ekuitas lainnya: Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	Komponen ekuitas lainnya: Keuntungan (kerugian) dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual	Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 1 Januari 2010		155.000.000.000	27.878.114.150	-	111.456.355.027	294.334.469.177	-	294.334.469.177
Kepentingan non-pengendali pada entitas anak		-	-	-	-	-	413.990.503	413.990.503
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan		-	(9.408.637.145)	349.000.000	63.396.423.069	54.336.785.924	16.220.518	54.353.006.442
Saldo 31 Desember 2010		155.000.000.000	18.469.477.005	349.000.000	174.852.778.096	348.671.255.101	430.211.021	349.101.466.122
Penambahan setoran modal	21	105.000.000.000	-	-	-	105.000.000.000	-	105.000.000.000
Penambahan kepentingan non-pengendali pada entitas anak		-	-	-	-	-	4.250.000.000	4.250.000.000
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan		-	8.715.448.286	23.047.522.715	88.958.258.904	120.721.229.905	45.833.650	120.767.063.555
Saldo 31 Desember 2011		260.000.000.000	27.184.925.291	23.396.522.715	263.811.037.000	574.392.485.006	4.726.044.671	579.118.529.677
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan		-	16.672.195.679	(3.118.275.579)	96.635.768.951	110.189.689.051	64.309.725	110.253.998.776
Saldo 31 Desember 2012		260.000.000.000	43.857.120.970	20.278.247.136	360.446.805.951	684.582.174.057	4.790.354.396	689.372.528.453

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

P.T. VICTORIA INVESTAMA (d/h P.T. VICTORIA SEKURITAS) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

	Catatan	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari (pembayaran kepada) lembaga kliring dan penjaminan	7	16.794.124.908	(26.334.046.356)	2.437.703.587
Penerimaan jasa penjaminan emisi dan penjualan efek	24	15.573.983.378	20.859.932.447	3.449.343.685
Penerimaan (pembayaran) kepada nasabah	8	(16.631.154.686)	58.945.334.912	(38.080.432.947)
Penerimaan bunga	25	11.022.827.512	11.341.154.729	6.869.046.999
Penerimaan premi		10.396.697.846	6.114.573.229	1.290.568.536
Penerimaan kegiatan perantara perdagangan efek	26	4.678.956.168	7.082.666.207	7.702.905.920
Penerimaan komisi		394.606.469	941.303.745	-
Penerimaan (pembayaran) klaim reasuransi		(382.917.813)	3.430.395.793	4.550.961
Pembayaran klaim		(1.347.046.193)	(454.912.442)	(26.071.749)
Pembayaran premi reasuransi		(6.491.607.998)	(6.589.343.103)	-
Pembayaran atas pembelian piutang *reverse repo*	6	(124.607.997.778)	(72.513.189.307)	(143.044.636.940)
Penerimaan atas penjualan piutang *reverse repo*	6	114.319.886.667	182.298.520.692	43.153.750.000
Perolehan utang *repo*	16	-	-	119.872.500.000
Pembayaran utang *repo*	16	-	(119.872.500.000)	-
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan		(21.497.237.329)	(27.745.416.503)	(9.550.036.372)
Pembayaran lain-lain		(20.812.790.956)	(324.245.684)	(207.119.115)
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) operasi		(18.589.669.805)	37.180.228.359	(6.127.927.435)
Pembayaran pajak penghasilan	29	(728.740.495)	(717.963.597)	(365.444.800)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(19.318.410.300)	36.462.264.762	(6.493.372.235)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pencairan efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	5	58.345.392.193	125.762.394.425	38.514.167.551
Pencairan efek tersedia untuk dijual	5	23.422.696.151	-	
Penerimaan hasil investasi	23	11.049.627.620	5.539.684.454	2.143.844.005
Pencairan deposito berjangka	5	2.600.000.000	930.000.000	530.000.000
Hasil penjualan aset tetap	14	229.625.000	3.577.470.216	735.510.703
Penjualan investasi jangka panjang	12	14.200.000	-	13.843.650.336
Perolehan aset tetap	14	(97.996.000)	(4.349.546.678)	(6.604.256.403)
Penempatan efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	5	(12.214.735.500)	(87.482.072.009)	(90.372.813.125)
Penempatan deposito berjangka	5	(26.504.913.461)	(2.630.000.000)	(7.120.000.000)
Perolehan properti investasi	13	-	(1.100.000.000)	-
Penempatan efek tersedia untuk dijual	5	-	(29.570.285.919)	(20.000.000.000)
Penambahan investasi jangka panjang	12	-	(79.201.419.093)	(15.000.020.000)
Arus kas keluar bersih dari akuisisi entitas anak		-	-	(8.125.107.566)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		56.843.896.003	(68.523.774.604)	(91.455.024.499)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan utang bank	15	98.600.000.000	367.500.000.000	370.408.430.524
Pembayaran utang bank	15	(150.679.276.641)	(415.178.600.000)	(266.829.830.524)
Penerimaan dari pihak berelasi	10	8.000.000.000	16.460.000.000	-
Pembayaran kepada pihak berelasi	10	(1.500.000.000)	-	-
Penerimaan utang lain-lain dari pihak ketiga	18	-	10.660.428.135	33.130.000.000
Pembayaran utang lain-lain kepada pihak ketiga	18	-	(33.130.000.000)	(15.000.000.000)
Pembayaran utang pembelian kendaraan		(460.075.575)	(331.883.272)	(39.078.828)
Pembayaran bunga	28	(8.453.766.119)	(12.540.722.905)	(6.178.844.045)
Penyetoran modal dari pemegang saham	21	-	105.000.000.000	-
Penyetoran modal oleh pemegang saham non-pengendali entitas anak yang dikonsolidasi		-	500.000.000	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(54.493.118.335)	38.939.221.958	115.490.677.127
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(16.967.632.632)	6.877.712.116	17.542.280.393
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4	26.662.222.334	19.784.510.218	2.242.229.825
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	9.694.589.702	26.662.222.334	19.784.510.218

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

P.T. Victoria Investama (d/h P.T. Victoria Sekuritas) [Perusahaan] didirikan berdasarkan akta No. 39 tanggal 26 Oktober 1989 dari Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., notaris di Serang, dengan nama PT Tata Sekuritas Maju. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-10137.HT.01.01-Th.89 tanggal 2 Nopember 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3537. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 51 tanggal 19 Juni 2012 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama Perusahaan serta maksud dan tujuan Perusahaan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-36672-AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial di bidang perantara efek dan penjaminan emisi efek pada tahun 1989, dan sejak tanggal 28 Mei 2012, Perusahaan mulai beroperasi secara komersial di bidang penyediaan jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada masyarakat dan melakukan investasi dalam penyertaan saham baik di bidang pasar modal maupun bukan pasar modal.

Terhitung sejak tanggal 5 Juli 2012, Perusahaan merubah namanya dari P.T. Victoria Sekuritas menjadi P.T. Victoria Investama. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Senayan City, Panin Tower Lantai 8, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Kep-177/BL/2012 dan Kep-178/BL/2012 tanggal 10 April 2012, Perusahaan telah memperoleh pencabutan izin usaha di bidang perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dan menghentikan kegiatan usahanya sebagai perusahaan efek.

PT Gratamulia Pratama adalah entitas induk Perusahaan. Perusahaan dan entitas anak (Grup) tergabung dalam kelompok usaha Victoria Group.

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

		2012	2011 dan 2010
Dewan Komisaris			
Komisaris Utama	:	Suzanna Tanojo	Suzanna Tanojo
Komisaris	:	Arianto Syarief	Arianto Syarief
Direksi			
Direktur Utama	:	Aldo Jusuf Tjahaja *)	Aldo Jusuf Tjahaja ***)
Direktur	:	Rebecca Wahjutirto Tanoyo **)	Yangky Halim ****) R. Agustinus Wisnu Widodo *****)
Sekretaris Perusahaan	:	Rebecca Ayuyantrie	-

*) Membawahi bidang operasional, pemasaran, teknologi informasi, pengembangan bisnis, akuntansi dan keuangan.
**) Membawahi bidang umum, administrasi dan sumber daya manusia.
***) Membawahi bidang pemasaran, teknologi informasi dan pengembangan bisnis.
****) Membawahi bidang akuntansi, keuangan dan operasional.
*****) Membawahi bidang umum, administrasi dan sumber daya manusia.

Manajemen kunci mencakup Direksi dan Komisaris Perusahaan.

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Jumlah karyawan Grup adalah sebanyak 70 orang, 75 orang dan 52 orang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Gaji dan tunjangan lain yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebagai berikut:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Dewan Komisaris	1.967.300.000	985.500.000	645.500.000
Dewan Direksi	992.156.883	565.877.048	866.354.536
Jumlah	2.959.456.883	1.551.377.048	1.511.854.536

b. Restrukturisasi Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Pengalihan Aset dan Liabilitas tanggal 12 Januari 2012 yang telah diaktakan dengan Akta No. 14 dari notaris Fathiah Helmi, S.H., yang kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Pengalihan Aset dan Liabilitas tanggal 20 Januari 2012 yang juga telah diaktakan dengan Akta No. 26 dari notaris yang sama, Perusahaan dan entitas anak, PT Victoria Securities Indonesia (VSI), membuat perjanjian pengalihan aset dan liabilitas Perusahaan dalam rangka perubahan kegiatan usaha utama Perusahaan sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek kepada VSI, yang telah memperoleh persetujuan baik dari Pemegang Saham Perusahaan maupun Pemegang Saham VSI, serta persetujuan dari Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Transaksi pengalihan aset dan liabilitas ini efektif sejak tanggal diterbitkannya Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa bagi VSI yaitu tanggal 20 Januari 2012.

Sebagai akibat dari transaksi pengalihan ini, maka pada dan terhitung sejak tanggal efektif pengalihan:

- aset dan liabilitas Perusahaan termasuk semua hak, piutang, wewenang dan liabilitas Perusahaan berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum tanggal efektif pengalihan, yang dialihkan berdasarkan perjanjian pengalihan pada tanggal efektif pengalihan beralih kepada dan menjadi hak/kepunyaan serta liabilitas/beban dari dan akan dijalankan/dilaksanakan oleh VSI dan atas keuntungan atau kerugian serta tanggungan atau risiko VSI.

- semua hak dan liabilitas Perusahaan berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga termasuk hak dan liabilitas Perusahaan berdasarkan perjanjian dengan nasabah, BEI, KPEI, KSEI dan dengan PT Bank Mandiri selaku Bank Pembayaran terkait dengan transaksi bursa beralih kepada dan menjadi hak dan liabilitas dari dan akan dijalankan VSI, kecuali perjanjian utang/kredit antara Perusahaan dengan para kreditornya.

Perusahaan telah membuat pemberitahuan secara tertulis mengenai telah efektifnya pengalihan dan penyerahan aset dan liabilitas kepada para kreditur, nasabah dan pemilik ruangan kantor serta pihak-pihak lain.

Pengalihan aset dan liabilitas oleh Perusahaan ke VSI dilakukan berdasarkan nilai buku (*book value*) yang tercantum dengan laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 20 Januari 2012 dan dalam keadaan apa adanya (*as is*) yaitu aset sebesar Rp 146.736.568.700 dan liabilitas sebesar Rp 120.938.703.181 sehingga selisihnya sebesar Rp 25.797.865.519 harus dilunasi seluruhnya oleh VSI kepada Perusahaan selambat-lambatnya tanggal 29 Pebruari 2012.

1. UMUM (Lanjutan)

b. Restrukturisasi Perusahaan (lanjutan)

Berikut ini adalah rincian aset dan liabilitas yang dialihkan oleh Perusahaan ke VSI:

	Rp
Aset	
Kas dan bank	5.731.650.353
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	39.309.864.374
Piutang nasabah	100.854.761.775
Piutang lain-lain	3.500.000
Uang muka	25.078.500
Penyertaan pada Bursa Efek	135.000.000
Aset tetap - bersih	613.813.698
Uang jaminan	62.900.000
Jumlah Aset yang Dialihkan	146.736.568.700
Liabilitas	
Utang lembaga kliring dan penjaminan	33.120.191.000
Utang nasabah	86.515.086.445
Utang lain-lain	71.347.749
Biaya masih harus dibayar	585.466.987
Liabilitas imbalan pasca kerja	646.611.000
Jumlah Liabilitas yang Dialihkan	120.938.703.181

c. Entitas Anak

Perusahaan memiliki secara langsung lebih dari 50% pemilikan terhadap entitas anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasi Komersial	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi		
					2012	2011	2010
			%		Rp '000	Rp '000	Rp '000
PT Victoria Securities Indonesia (VSI)	Jakarta	Perantara perdagangan efek, manajer investasi/ penasihat investasi dan penjamin emisi efek	99	2012	80.694.889	51.699.725	-
PT Victoria Insurance (VINS)	Jakarta	Asuransi kerugian	98,75	1991	88.473.591	88.238.183	44.547.974
PT Victoria Manajemen Investasi (VMI)	Jakarta	Manajer investasi (belum beroperasi)	85	-	24.990.000	25.000.000	-

Pada tanggal 27 Mei 2010, Perusahaan melakukan penyertaan saham pada PT Asuransi Umum Centris (sekarang bernama PT Victoria Insurance) melalui penerbitan saham dalam portepel sebanyak 30.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000/lembar dengan persentase kepemilikan sebesar 75%. Kemudian berdasarkan akta pengikatan jual beli saham No. 17 tanggal 7 Juli 2010 yang dilanjutkan dengan akta jual beli saham No. 35 tanggal 3 September 2010 antara Perusahaan dengan PT Centris Mekarlestari, dimana PT Centris Mekarlestari setuju untuk mengalihkan seluruh sahamnya di PT Asuransi Umum Centris sebanyak 9.000 lembar kepada Perusahaan dengan harga sebesar Rp 9 miliar. Sehubungan dengan akuisisi saham PT Asuransi Umum Centris, Perusahaan mengakui *goodwill* sebesar Rp 5.103.148.824 dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Grup menetapkan nilai terpulihkan dari *goodwill* dan menentukan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas *goodwill* tersebut pada tanggal 31 Desember 2012. Nilai terpulihkan atas aktivitas tersebut dinilai dengan mengacu pada nilai pakai unit kas yang dihasilkan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

PERNYATAAN KEPATUHAN

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait di bawah ini, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan secara efektif tanggal 1 Januari 2012 secara prospektif atau retrospektif.

Sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perusahaan pada tahun 2012 seperti yang dijelaskan dalam Catatan 1a atas laporan keuangan konsolidasian, dimana Perusahaan tidak lagi beroperasi di bidang perantara efek dan penjaminan emisi efek, maka pada tahun 2012, laporan posisi keuangan konsolidasian yang sebelumnya disajikan tanpa mengelompokkan ke dalam unsur lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang (*unclassified statement of financial position)* diubah menjadi dengan mengelompokkan ke dalam unsur lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang (*classified statement of financial position)*. Perubahan penyajian tersebut mengakibatkan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009 disajikan kembali.

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang signifikan yang diterapkan secara konsisten oleh Grup dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost)*, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah.

Penerapan Revisi atas PSAK yang lain

Pada tanggal 1 Januari 2012, Grup telah menerapkan PSAK yang telah direvisi berikut yang dianggap relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian namun tidak menimbulkan dampak signifikan:

- PSAK No. 13 (Revisi 2011), "Properti Investasi"
- PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap"
- PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 30 (Revisi 2011), "Sewa"
- PSAK No. 46 (Revisi 2010), "Akuntansi Pajak Penghasilan"
- PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

Efektif untuk periode yang dimulai atau setelah 1 Januari 2013, PSAK yang telah direvisi yang dianggap relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah: PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup sedang mengevaluasi dampak dari standar dalam laporan keuangan konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Grup yang dikendalikan oleh Perusahaan. Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional dari *investee* untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Pengendalian juga dianggap ada apabila induk perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari 50% hak suara.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Grup.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasian.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal entitas induk memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang hak suara suatu entitas jika terdapat:

a) kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain:
b) kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas induk berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
c) kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar Direksi atau badan pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau badan tersebut; atau
d) kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau badan pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui Direksi atau badan tersebut.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non Pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit. Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka entitas induk:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercata setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi komprehensif, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas induk, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

KNP pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Efektif 1 Januari 2011, KNP pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akusisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat KNP adalah jumlah KNP pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi KNP atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Jumlah pendapatan komprehensif diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Sebelumnya, KNP diukur pada pengakuan awal pada proporsi KNP dalam biaya historis dari aset bersih yang dapat diidentifikasi dari pihak yang diakuisisi (*acquiree*). Bila kerugian dari KNP melebihi kepentingannya dalam ekuitas entitas anak, kelebihan dan setiap kerugian lebih lanjut yang diatribusikan kepada KNP dibebankan kepada pemegang saham mayoritas kecuali KNP tersebut mempunyai liabilitas mengikat dan dapat menanggung rugi tersebut.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan KNP disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

c. Kombinasi Bisnis

Grup menerapkan PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis" yang diterapkan bagi kombinasi bisnis yang terjadi pada atau setelah awal tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011.

PSAK No. 22 (Revisi 2010) menjelaskan transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis guna meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya tentang kombinasi bisnis dan dampaknya.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disajikan dalam beban usaha.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Jika proses akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, maka Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasiannya. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara restrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Grup menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi lebih tidak dapat diperoleh. Namun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan melalui laba atau rugi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* disajikan pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (UPK) dari Grup yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu dalam UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari penghentian operasi. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut disajikan berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

d. Investasi Jangka Panjang

Investasi pada entitas asosiasi

Grup menerapkan PSAK No. 15 (Revisi 2009), "Investasi pada Entitas Asosiasi". PSAK revisi ini mengatur akuntansi investasi dalam entitas asosiasi dalam hal penentuan pengaruh signifikan, metode akuntansi yang harus diterapkan, penurunan nilai investasi dan laporan keuangan tersendiri.

Entitas asosiasi adalah suatu perusahaan dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan, namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial dan operasional *investee*.

Investasi Grup pada entitas asosiasi disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK No. 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan". Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Grup atas laba atau rugi bersih, dan penerimaan dividen dari *investee* sejak tanggal perolehan.

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika ada, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepemilikan Grup dalam entitas asosiasi.

Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Investasi Jangka Panjang (lanjutan)

Penyertaan pada bursa efek

Penyertaan pada Bursa Efek, yang mewakili kepentingan kepemilikan di bursa dan memberikan hak pada Grup untuk menjalankan usaha di bursa, dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat keanggotaan di bursa dievaluasi dan diturunkan langsung ke jumlah terpulihkan.

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun yang bersangkutan. Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 kurs yang digunakan masing-masing adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
1 Poundsterling Inggris	15.579	13.969	13.894
1 Euro	12.810	11.739	11.956
1 Dollar Amerika Serikat	9.670	9.068	8.991
1 Dollar Singapura	7.907	6.974	6.981
1 Yen Jepang	112	117	110
1 Won Korea	9	8	8

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk, dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual.

Pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup yaitu:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:

   1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
   2. Memiliki pengaruh signifikan atas Grup;
   3. Personil manajemen kunci Grup atau entitas induk dari Grup.

b. Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:

   1. Entitas dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama.
   2. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain atau sebaliknya (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga atau sebaliknya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Grup.

6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a.

7. Orang yang diidentifikasi dalam huruf a.1 memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas.

Semua transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, akan diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

g. Aset Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Grup telah menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", dan PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

PSAK No. 50 (Revisi 2010), berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan akan saling hapus. PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa depan suatu entitas yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntasi yang diterapkan untuk instrumen tersebut.

PSAK No. 55 (Revisi 2011), menetapkan prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. PSAK ini memberikan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.

PSAK No. 60, mensyaratkan pengungkapan signifikansi masing-masing instrumen keuangan untuk posisi keuangan dan kinerja, serta sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dihadapi Grup selama periode berjalan dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana Grup mengelola risiko tersebut. PSAK ini diterapkan secara prospektif sesuai dengan ketentuan transisi awalnya.

Penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2010), PSAK No. 55 (Revisi 2011) dan PSAK No. 60 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Seluruh aset keuangan Grup diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL)
- Dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)
- Tersedia untuk dijual (AFS)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengukuran awal. Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Grup memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan FVTPL, aset keuangan AFS dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan Grup diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengukuran awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan FVTPL diakui sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Grup, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci; atau

Setelah pengakuan awal, aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan pada Catatan 5.

Kelompok aset keuangan ini meliputi akun portofolio efek berupa saham dan obligasi.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau karena perubahan kondisi ekonomi. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya – "Penyesuaian nilai wajar efek tersedia untuk dijual", kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Jika aset keuangan dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada penyesuaian perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual, direklas ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS) [lanjutan]

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diklasifikasikan sebagai AFS diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat hak Grup untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Kelompok aset keuangan ini meliputi akun investasi jangka pendek berupa saham dan obligasi.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan lainnya milik Grup dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasikan sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi komprehensif ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Kelompok aset keuangan ini meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang *reverse repo*, piutang premi dan asuransi, piutang jasa penasehat keuangan, piutang lembaga kliring dan penjaminan, piutang nasabah dan piutang lain-lain.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode perolehan yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehan dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjaman akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perusahaan menggunakan model statistik dari tren historis atau probabilitas wanprestasi, waktu pemulihan kembali dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit terkini sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan kerugian aktual yang jumlahnya akan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang ditentukan oleh model historis. Tingkat wanprestasi, tingkat kerugian dan waktu yang diharapkan untuk pemulihan di masa datang akan diperbandingkan secara berkala terhadap hasil aktual untuk memastikan estimasi tersebut masih memadai.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam periode yang bersangkutan sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum ditentukan pengakuannya.

Pengecualian pada instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif konsolidasian hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lainnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reklasifikasi aset keuangan

Grup tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan dari atau ke kelompok aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Grup hanya dapat melakukan reklasifikasi atas aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (atau sebaliknya). Untuk aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, reklasifikasi dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan maka sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasikan menjadi investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual (*tainting rule*). Apabila terdapat reklasifikasi dari klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo ke tersedia untuk dijual, maka aset keuangan tersebut akan dihitung nilai wajarnya dan selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat harus dicatat pada ekuitas.

Nilai wajar aset keuangan

Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Hirarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas dan ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya emisi langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas milik Grup diakui dan dikurangi langsung ke ekuitas. Keuntungan atau kerugian tidak diakui pada laba rugi atas pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas milik Grup.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diakui pada nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dimana beban bunga diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif, kecuali untuk liabilitas jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan mengalokasikan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman.

Liabilitas keuangan Grup meliputi utang bank, utang lembaga kliring dan penjaminan, utang nasabah, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar dan utang pembelian kendaraan.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

i. Saling Hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Grup saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

j. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Piutang

Piutang premi meliputi tagihan premi kepada tertanggung/agen/broker sebagai akibat transaksi asuransi. Dalam hal Grup memberikan potongan premi kepada tertanggung, maka potongan tersebut langsung dikurangkan dari piutang preminya.

Grup menelaah penurunan piutang secara berkala. Jika ada bukti obyektif bahwa piutang tersebut menurun, Grup mengurangi nilai tercatat piutang sebesar yang dapat dipulihkan dan mengakui rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Grup mengumpulkan bukti obyektif bahwa terdapat penurunan nilai piutang dengan menggunakan proses yang diterapkan untuk aset keuangan atas biaya yang diamortisasi. Rugi penurunan nilai tersebut juga dihitung mengikuti metode yang sama yang digunakan untuk aset keuangan yang disajikan pada Catatan 2g.

l. Reasuransi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan kontrak reasuransi untuk membatasi kemungkinan kerugian yang timbul dari eksposur tertentu. Premi reasuransi *outward* diakui pada periode yang sama dengan periode pengakuan premi bisnis langsung yang terkait atau bisnis reasuransi *inward* yang dipertanggungkan.

Liabilitas reasuransi terdiri dari utang premi untuk kontrak reasuransi *outward* dan diakui sebagai beban pada saat jatuh tempo.

Aset reasuransi termasuk saldo yang akan ditagih ke perusahaan reasuransi atas beban klaim. Aset reasuransi diukur secara konsisten dengan jumlah yang terkait dengan pertanggungan yang mendasari dan sesuai dengan ketentuan kontrak reasuransi. Reasuransi dicatat sebagai aset kecuali terdapat hak saling hapus. Dalam hal demikian, liabilitas yang terkait dikurangi untuk memperhitungkan reasuransi.

Pengujian penurunan nilai dilakukan terhadap aset reasuransi. Nilai tercatat aset reasuransi diturunkan ke nilai yang dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban dalam laba rugi. Aset diturunkan nilainya jika terdapat bukti obyektif bahwa Grup mungkin tidak akan dapat menerima seluruh jumlah tagihan ke penanggung.

m. Rekening Nasabah

Sebelum 1 Januari 2012, penerimaan dana dari nasabah dalam rangka pembelian efek, pembayaran dan penerimaan atas transaksi pembelian dan penjualan efek untuk nasabah dicatat sebagai rekening nasabah. Saldo dana pada rekening nasabah disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian Grup sebagai liabilitas sedangkan kekurangan dana pada rekening nasabah disajikan sebagai aset.

Setelah 1 Januari 2012, rekening nasabah adalah rekening yang dimiliki oleh nasabah perusahaan efek dalam kaitannya dengan transaksi jual beli efek oleh nasabah. Rekening nasabah berisi catatan mengenai efek dan dana yang dititipkan nasabah kepada perusahaan efek. Rekening nasabah tidak memenuhi kriteria pengakuan aset keuangan oleh Grup, sehingga tidak dapat dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Grup, namun harus dicatat secara *off balance sheet* pada buku pembantu dana dan buku pembantu efek.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

n. Transaksi *Repo/Reverse Repo*

Transaksi *repo* bukan merupakan suatu penghentian pengakuan. Grup mengakui liabilitas sebesar nilai pembelian kembali dikurangi beban bunga yang belum diamortisasi.

Transaksi *reverse repo* dinyatakan dalam laporan keuangan konsolidasian sebesar nilai penjualan kembali dikurangi pendapatan bunga yang belum diamortisasi.

Pendapatan (beban) bunga yang timbul atas perjanjian *reverse repo* (*repo*) ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode kontrak dengan metode suku bunga efektif.

o. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Aset Tetap

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Grup menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No. 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap", yang berdampak pada pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat dan biaya penyusutan dan kerugian atas penurunan nilai harus diakui dalam kaitannya dengan aset tersebut. PSAK revisi ini tidak berdampak secara signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Grup menerapkan model biaya setelah pengakuan awal aset tetap. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Masa Manfaat (Tahun)	Penyusutan (Persentase)
Renovasi bangunan sewa	5	20%
Kendaraan	4 - 8	12,5% - 25%
Peralatan kantor	4 - 8	12,5% - 25%
Perlengkapan kantor	4 - 8	12,5% - 25%

Aset tetap disusutkan sampai dengan nilai sisanya.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun yang bersangkutan.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi komprehensif konsolidasian pada periode bersangkutan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

q. Properti Investasi

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Grup menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2011), "Properti Investasi", yang menggantikan PSAK No. 13 (Revisi 2007), "Properti Investasi", dimana properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai untuk kepentingan disewakan untuk memperoleh pendapatan sewa jangka panjang dan/atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Grup mengukur properti investasi setelah pengakuan awal dengan menggunakan metode biaya.

Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan.

Properti investasi selain tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 20 tahun.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada tanggal pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi komprehensif konsolidasian.

s. Utang Klaim

Utang klaim adalah utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung yang belum dibayar oleh Grup. Utang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar (*claim settled*).

t. Liabilitas Asuransi

Liabilitas asuransi diukur sebesar jumlah estimasi berdasarkan perhitungan teknis asuransi.

Premi Belum Merupakan Pendapatan

Premi belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi, dan disajikan dalam jumlah bruto. Porsi reasuransi atas premi belum merupakan pendapatan disajikan sebagai bagian dari aset reasuransi.

Sebelum 1 Januari 2012, premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara agregatif dengan menggunakan presentase sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK/06/2003 yaitu 40% dari premi neto untuk polis dengan masa pertanggungan lebih dari 1 (satu) bulan dan 10% dari premi neto untuk polis dengan masa pertanggungan tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Persentase tersebut berlaku untuk asuransi selain kendaraan. Untuk asuransi kendaraan menggunakan persentase sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 74/PMK.010/2007, yaitu 40% dari premi neto.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

t. Liabilitas Asuransi (lanjutan)

Premi Belum Merupakan Pendapatan (lanjutan)

Efektif tanggal 1 Januari 2012, PSAK No. 28 (Revisi 2012), setelah merujuk ke PSAK No. 36 (Revisi 2012), mengatur liabilitas kontrak asuransi yang berjangka waktu lebih dari satu tahun diukur dengan menggunakan salah satu dari:

a. konsep nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan ditambah dengan nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan di masa depan.
b. kebijakan akuntansi sebelumnya.

Efektif tanggal 1 Januari 2012, PSAK No. 62 mengatur perubahan kebijakan akuntansi dengan tujuan untuk penyajian dan informasi akuntansi yang lebih relevan dan handal.

Sebelum 1 Januari 2012, premi yang belum merupakan pendapatan disajikan neto setelah dikurangi dengan beban premi reasuransi dan beban akuisisi polis.

Efektif tanggal 1 Januari 2012, sesuai dengan PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi", aset reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan disajikan secara terpisah sebagai aset reasuransi.

Dampak perubahan-perubahan tersebut diterapkan secara retrospektif dan mengakibatkan penyajian kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana diungkapkan pada Catatan 36.

Perubahan cadangan premi yang belum merupakan pendapatan, cadangan asuransi jangka panjang dan aset reasuransi dari premi yang belum merupakan pendapatan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun terjadinya perubahan.

Estimasi Liabilitas Klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan estimasi jumlah liabilitas yang menjadi tanggungan sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan. Perusahaan tidak mengakui setiap provisi untuk kemungkinan klaim masa depan sebagai liabilitas jika klaim tersebut timbul berdasarkan kontrak asuransi yang tidak ada pada akhir periode pelaporan (seperti provisi katastrofa dan povisi penyetaraan).

Sebelum 1 Januari 2012, estimasi liabilitas klaim diakui setelah dikurangi jumlah pemulihan klaim dan reasuransi.

Efektif tanggal 1 Januari 2012, sesuai dengan PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi", estimasi pemulihan klaim dan reasuransi disajikan terpisah dalam akun aset reasuransi.

Dampak perubahan-perubahan tersebut diterapkan secara retrospektif dan mengakibatkan penyajian kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana diungkapkan pada Catatan 36.

u. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan liabilitas dan estimasi andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi liabilitasnya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan liabilitas kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

u. Provisi (lanjutan)

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK No. 23 (Revisi 2010), "Pendapatan". PSAK No 23 (Revisi 2010) ini mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan.

Pendapatan

Pendapatan Premi

Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dari reasuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko (misalnya pada penutupan jenis pertanggungan asuransi konstruksi), maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko.

Premi selain kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo.

Premi dari polis bersama (*coinsurance*) diakui sebesar proporsi premi Perusahaan.

Grup mereasuransikan sebagian risiko atas akseptasi pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi sesuai periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau liabilitas atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar liabilitas yang dibukukan sehubungan dengan kontrak reasuransi tersebut.

Porsi reasuransi atas premi belum merupakan pendapatan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan premi yang belum merupakan pendapatan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

Hasil Investasi

Hasil investasi dari bunga deposito berjangka dan obligasi diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghasilan dividen diakui pada saat surat pemberitahuan pembagian dividen diterima. Keuntungan atau kerugian penjualan efek diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek

Perdagangan transaksi efek yang lazim dicatat pada tanggal perdagangan, seolah-olah transaksi efek telah diselesaikan. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi efek yang merupakan tanggungan dan risiko Grup dicatat berdasarkan tanggal perdagangan. Transaksi efek pelanggan dilaporkan pada tanggal penyelesaian dan pendapatan komisi dan beban terkait dilaporkan pada tanggal perdagangan. Jumlah piutang dan utang dari transaksi efek yang belum mencapai tanggal penyelesaian kontrak dicatat bersih pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek (lanjutan)

Pencatatan utang dan piutang dana dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang timbul karena Transaksi Bursa dilakukan secara *netting* yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.

Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena Transaksi Bursa di pasar reguler dilakukan secara *netting* untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.

Komisi dan biaya terkait kliring dicatat berdasarkan tanggal perdagangan saat terjadinya transaksi efek.

Pendapatan denda dari keterlambatan pembayaran oleh nasabah atas rekening nasabah dan efek obligasi diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Pendapatan Jasa Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek

Pendapatan jasa penjaminan dan penjualan emisi efek meliputi keuntungan, kerugian, dan jasa, setelah dikurangi biaya sindikasi, yang timbul dari penawaran efek dimana Grup bertindak sebagai penjamin emisi atau agen. Pendapatan dari konsesi penjualan dicatat pada tanggal penyelesaian, dan jasa penjaminan emisi diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi telah selesai dan jumlah pendapatan telah dapat ditentukan.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari aset keuangan diakui apabila kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke Grup dan jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Pendapatan bunga diakui atas dasar berlalunya waktu dengan mengacu pada pokok aset keuangan dan suku bunga efektif yang berlaku yang merupakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur aset keuangan ke nilai tercatat bersih dari aset pada pengakuan awal.

Keuntungan/kerugian dari transaksi aset keuangan, pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi keuntungan/kerugian yang timbul dari penjualan aset keuangan dan keuntungan/ kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan/penurunan nilai wajar aset keuangan.

Komisi

Komisi yang diberikan kepada pialang asuransi, agen dan perusahaan asuransi lain sehubungan dengan penutupan pertanggungan dicatat sebagai beban komisi. Komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi dicatat sebagai pengurangan beban komisi dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Dalam hal jumlah komisi yang diperoleh lebih besar dari jumlah beban komisi, selisih tersebut disajikan sebagai pendapatan komisi-bersih dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Beban

Beban klaim

Beban klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim reasuransi diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban (lanjutan)

Beban klaim (lanjutan)

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan, diakui sebagai estimasi liabilitas klaim yang diukur berdasarkan perhitungan teknis asuransi. Perubahan estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Porsi reasuransi atas estimasi liabilitas klaim ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan estimasi liabilitas klaim berdasarkan syarat dan ketentuan kontrak reasuransi terkait.

Beban Penjaminan dan Penjualan Emisi Efek

Beban yang timbul sehubungan dengan proses penjaminan emisi diakumulasikan dan dibebankan pada saat pendapatan penjaminan emisi diakui. Pada saat diketahui bahwa kegiatan penjaminan emisi tidak diselesaikan dan emisi efek dibatalkan, maka beban penjaminan emisi tersebut dibebankan pada laba rugi komprehensif konsolidasian.

Beban usaha lainnya diakui pada periode saat terjadinya.

w. Imbalan Pasca Kerja

Grup menghitung dan mencatat imbalan kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Tidak ada pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Efektif 1 Januari 2012, Grup menetapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan kerja". Berdasarkan PSAK tersebut, keuntungan dan kerugian aktuarial diukur dengan menggunakan dua alternatif yaitu menggunakan pendekatan koridor dan pendekatan komprehensif lain. Grup menggunakan pendekatan koridor dalam mengukur keuntungan dan kerugian aktuarial.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

x. Pajak Penghasilan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Grup menerapkan PSAK No. 46 (revisi 2010), yang mengharuskan Grup untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

x. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Beban pajak kini disajikan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Grup yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, di luar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi.

y. Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing berjumlah 2.600.000.000 saham, 2.075.000.000 saham dan 1.550.000.000 saham.

z. Informasi Segmen

Grup menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi", yang mengatur pengungkapan yang akan memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi.

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

z. Informasi Segmen (lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Grup menyatakan informasi berdasarkan segmen usaha sebagai berikut: perantara pedagang efek dan penjamin emisi, dan asuransi kerugian. Informasi segmen sekunder berdasarkan wilayah geografis tidak disajikan karena hampir seluruh aktivitas usaha Grup dilakukan di Jakarta.

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode laporan keuangan konsolidasian. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan hasil yang memerlukan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang terpengaruh di masa depan.

Pertimbangan Manajemen

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen Grup membuat berbagai pertimbangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Pertimbangan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut adalah:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi lain yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Manajemen melakukan penelaahan terhadap akun piutang tertanggung tertentu manakala terdapat bukti objektif bahwa tertanggung yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya kepada Grup. Pertimbangan akan mencakup pada informasi, fakta dan situasi yang tersedia termasuk, namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan nasabah tersebut, status kredit berdasarkan catatan dari pihak ketiga, faktor pasar dan hal-hal lainnya yang telah diketahui untuk mencatat penyisihan penurunan nilai piutang sehingga nilai tercatat piutang dapat mencerminkan nilai yang dapat diperoleh atau diterima oleh Grup. Penyisihan ini senantiasa ditelaah secara periodik dan disesuaikan kembali ketika terdapat informasi tambahan yang secara signifikan berpengaruh terhadap jumlah penyisihan yang ada.

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (Lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Estimasi Liabilitas Klaim

Frekuensi dan kompleksitas klaim dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang sangat signifikan diantaranya adalah meningkatnya jumlah kasus/klaim yang belum diproses dalam waktu yang sudah lama serta estimasi inflasi karena pada umumnya proses penyelesaian klaim memerlukan waktu yang cukup lama.

Perjanjian reasuransi meliputi program *excess of loss*, *proportional treaty* dan *catastrophe*. Dampak dari perjanjian reasuransi adalah Grup tidak menderita seluruh kerugian klaim yang terjadi dalam satu tahun. Sebagai tambahan terhadap keseluruhan program reasuransi Grup, unit bisnis individu dimungkinkan untuk membeli tambahan proteksi reasuransi.

Klaim dalam kontrak asuransi umum terutang berdasarkan terjadinya klaim. Grup berkewajiban terhadap semua peristiwa yang dipertanggungkan yang terjadi selama periode polis, bahkan jika kerugian diketahui setelah akhir periode polis. Sebagai hasilnya liabilitas klaim diselesaikan dalam jangka waktu yang lama dan merupakan elemen terbesar dari provisi klaim yang berhubungan dengan klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR). Ada beberapa variabel yang mempengaruhi jumlah dan saat arus kas dari kontrak ini. Terutama berhubungan dengan risiko inheren aktivitas bisnis yang dilakukan pemegang polis dan prosedur manajemen risiko yang terapkan.

Estimasi beban klaim meliputi biaya langsung yang terjadi dalam penyelesaian klaim, dikurangi dengan nilai subrogasi dan pemulihan lainnya. Grup melakukan semua tahapan yang relevan untuk memperoleh informasi yang relevan berkenaan dengan eksposur klaimnya. Namun demikian adanya ketidakpastian dalam menetapkan provisi klaim, maka hasil akhir yang akan membuktikan adanya perbedaan dengan jumlah liabilitas yang sebenarnya. Liabilitas asuransi ini meliputi provisi untuk IBNR, klaim yang sudah dilaporkan tetapi belum disetujui dan risiko yang belum berakhir periode polisnya pada akhir periode laporan. Terdapat beberapa teknik penaksiran dalam menghitung estimasi beban klaim yang belum dibayar (baik yang sudah dilaporkan maupun belum), perbedaan penggunaan teknik akan menghasilkan jumlah yang berbeda.

Instrumen Keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu berdasarkan nilai wajar pada pengakuan awal, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Grup.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Properti Investasi

Masa manfaat setiap aset tetap dan properti investasi Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan properti investasi dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan properti investasi.

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (Lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Penurunan Nilai *Goodwill*

Menentukan apakah suatu *goodwill* turun nilainya memerlukan estimasi nilai pakai unit penghasil kas dimana *goodwill* dialokasikan. Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi aliran kas masa depan yang diharapkan yang timbul dari unit penghasil kas dengan menggunakan tingkat pertumbuhan yang sesuai dan tingkat diskonto yang sesuai untuk perhitungan nilai kini.

4. KAS DAN SETARA KAS

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Kas	4.000.000	4.000.000	1.502.800
Bank			
Rupiah			
Pihak berelasi			
PT Bank Victoria International, Tbk	4.350.943.277	5.845.683.720	15.176.476.694
Pihak ketiga			
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	2.252.490.930	-	-
PT Bank Pan Indonesia, Tbk	1.508.305.380	1.406.931.785	319.154.640
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	907.012.210	677.998.002	3.467.165.811
PT Bank Central Asia, Tbk	417.649.710	402.871.528	422.515.649
PT Bank Capital Indonesia, Tbk	116.177.843	54.799.944	29.399.075
PT Bank Sinarmas, Tbk	63.960.536	10.565.545	5.625.705
PT Bank Permata, Tbk	48.344.107	9.633.645	-
PT Bank Bangkok	11.613.677	-	-
PT CIMB Niaga, Tbk	3.353.994	6.549.840	8.332.399
PT Bank Mutiara, Tbk	999.188	-	-
Jumlah pihak ketiga	5.329.907.575	2.569.350.289	4.252.193.279
Dollar Amerika Serikat			
Pihak ketiga			
PT Bank Pan Indonesia, Tbk	9.738.850	692.797.572	354.337.445
Jumlah bank	9.690.589.702	9.107.831.581	19.783.007.418
Deposito berjangka - Rupiah			
PT Bank Capital Indonesia, Tbk	-	17.550.390.753	-
Jumlah	9.694.589.702	26.662.222.334	19.784.510.218
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	-	5,5% - 6,25%	-

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari:

	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp
Pihak berelasi:			
Deposito berjangka	1.800.000.000	-	300.000.000
Efek tersedia untuk dijual	18.320.162.508	31.032.758.634	-
Efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	41.451.000.000	-
Jumlah	20.120.162.508	72.483.758.634	300.000.000
Pihak ketiga:			
Deposito berjangka	32.104.913.461	10.000.000.000	8.000.000.000
Efek tersedia untuk dijual	28.084.200.000	41.934.050.000	20.349.000.000
Efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	53.309.913.210	47.241.669.480	115.778.901.440
Jumlah	113.499.026.671	99.175.719.480	144.127.901.440
Jumlah	133.619.189.179	171.659.478.114	144.427.901.440

a. Deposito berjangka

	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp
Deposito wajib - Rupiah			
Pihak ketiga			
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
PT Bank Mayapada International, Tbk	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
PT Bank Capital Indonesia, Tbk	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
PT Bank Mutiara, Tbk	1.600.000.000	1.600.000.000	1.400.000.000
PT Bank Kesawan	1.600.000.000	-	-
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-	200.000.000	530.000.000
PT Bank Mega, Tbk	-	470.000.000	470.000.000
PT Bank Hana	-	150.000.000	250.000.000
PT Bank Pan Indonesia, Tbk	-	200.000.000	200.000.000
PT Bank Permata, Tbk	-	150.000.000	150.000.000
PT Bank Kaltim	-	430.000.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	-	-	200.000.000
Jumlah deposito wajib	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
Deposito biasa - Rupiah			
Pihak berelasi			
PT Bank Victoria International, Tbk	1.800.000.000	-	300.000.000
Pihak ketiga			
PT Bank Capital Indonesia, Tbk	10.000.000.000	1.000.000.000	-
PT Bank Mutiara, Tbk	9.104.913.461	-	-
PT Bank Mayapada International, Tbk	5.000.000.000	-	-
PT Bank Kesawan	-	1.000.000.000	-
Jumlah deposito biasa	25.904.913.461	2.000.000.000	300.000.000
Jumlah deposito berjangka	33.904.913.461	10.000.000.000	8.300.000.000
Tingkat bunga per tahun			
Deposito wajib	7,00%-7,50%	5,50%-6,50%	5,00%-6,00%
Deposito biasa	5,50%-7,50%	6,25%-7,00%	6,50%-7,00%

5. INVESTASI JANGKA PENDEK (Lanjutan)

a. Deposito berjangka (lanjutan)

Deposito berjangka diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Nilai wajar dari deposito berjangka adalah sebesar nilai tercatatnya.

Deposito wajib merupakan dana jaminan dalam bentuk deposito berjangka 1 tahun atas nama VINS, entitas anak. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 dan pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003, perusahaan asuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya 20% dari modal sendiri yang dipersyaratkan atau hasil penjumlahan 1% dari premi neto ditambah 0,25% dari premi reasuransi, mana yang lebih besar. Berdasarkan peraturan tersebut, surat utang atau surat berharga lain yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia dapat juga digunakan sebagai dana jaminan.

Pada tanggal 29 Januari 2013, VINS telah menyetorkan deposito wajib tambahan sebesar Rp 6 milyar dan telah memenuhi ketentuan sehubungan peraturan di atas.

b. Efek tersedia untuk dijual

	2012		2011		2010	
	Peringkat	Rp	Peringkat	Rp	Peringkat	Rp
Pihak berelasi						
Obligasi						
Subordinasi Bank Victoria I		-	idBBB	8.078.497.653		-
Pihak ketiga						
Obligasi						
Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008	idA	11.000.000.000	idA	10.997.755.844	idA	5.000.000.000
Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 Seri C	idAA	8.000.000.000	idAA	8.000.000.000	idAA	8.000.000.000
Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008	idAA-	6.125.115.372	idAA-	6.148.833.924		-
Subordinasi Bank Syariah Mandiri		-	idA+	14.332.687.998		-
Saham						
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk		1.001.000.000		1.001.000.000		-
PT Panin Insurance Tbk		-		1.011.510.500		-
PT Jakarta Setiabudi International Tbk		-		-		7.000.000.000
Jumlah		26.126.115.372		41.491.788.266		20.000.000.000
Ditambah:						
Keuntungan belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual		20.278.247.136		23.396.522.715		349.000.000
Jumlah nilai wajar		46.404.362.508		72.966.808.634		20.349.000.000
Tingkat bunga rata-rata obligasi per tahun		11,60%-13,39%		11,60%-13,39%		11,60%-13,39%

Biaya perolehan efek tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 26.126.115.372, Rp 49.570.285.919 dan Rp 20.000.000.000. Nilai wajar efek obligasi dan saham ditentukan berdasarkan harga pasar efek yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari terakhir bursa pada tahun tersebut. Keuntungan yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar efek pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 20.278.247.136, Rp 23.396.522.715 dan Rp 349.000.000 yang dicatat sebagai bagian komponen ekuitas lainnya.

5. INVESTASI JANGKA PENDEK (Lanjutan)

b. Efek tersedia untuk dijual (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Grup juga memiliki waran seri VI PT Bank Victoria International, Tbk sehubungan kepemilikan pada entitas asosiasi sebanyak 508.893.403 waran dan 533.990.038 waran masing-masing untuk tahun 2012 dan 2011. Waran sejumlah 508.893.403 dijadikan jaminan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dari Aldo Jusuf Tjahaja dan Barron Ventures Investment Company Pte., Ltd, Singapura (Catatan 10).

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, efek tersedia untuk dijual merupakan saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas efek tersedia untuk dijual sehingga tidak diperlukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

c. Efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

	2012		2011		2010	
	Peringkat	Rp	Peringkat	Rp	Peringkat	Rp
Obligasi korporasi						
Pihak berelasi						
Subordinasi Bank Victoria I Tahun 2007	-	-	BBB	41.000.000.000	-	-
Pihak ketiga:						
Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008	A	11.005.400.000	AAA	8.996.400.000	-	-
Federal International Finance X Tahun 2019 Seri D	AA+	1.039.500.000	AA	1.039.500.000	-	-
Lautan Luas III Tahun 2008	A-	1.027.000.000	A-	1.027.000.000	-	-
Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008	AA-	10.004.000.000	AA-	23.009.200.000	-	-
Bank Saudara I Tahun 2011 Seri B	BBB+	10.004.000.000	-	-		
Subordinasi Berkelanjutan I Permata Bank Tahun 2012	-	-	-	-	AA-	40.000.000.000
Subordinasi Bank Mega Tahun 2007	-	-	-	-	BBB-	25.000.000.000
Subnote Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2007 Tahap 1	-	-	-	-	-	15.000.000.000
Subordinasi II Bank Panin Tahun 2008	-	-	-	-	AA-	10.000.000.000
Saham						
Pihak ketiga:						
PT Bhuwanatala Indah Permai, Tbk		8.875.546.100		8.875.010.600		-
PT Bank Pan Indonesia, Tbk		1.504.367.657		2.032.929.266		-
PT Bakrie and Brothers, Tbk		369.782.143		369.782.143		-
PT Multipolar, Tbk		204.750.000		204.750.000		-
PT Panin Life, Tbk		201.000.000		-		-
PT Verena Multi Finance, Tbk		42.774.120		42.774.120		120.698.135
PT Bakrieland Development, Tbk		13.950.000		13.950.000		13.950.000
PT Unggul Indah Cahaya, Tbk		200.000		-		-
PT Jakarta Setiabudi International, Tbk		-		-		21.375.555.000
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk		-		155.827.209		311.654.419
PT Greenwood Sejahtera, Tbk		-		250.000.000		-
PT Garuda Indonesia, Tbk		-		48.500.000		-
PT Perusahaan Gas Negara, Tbk		-		300.000.000		-
PT Bukit Asam, Tbk		-		329.000.000		-
PT Anta Express Tour, Tbk		-		-		264.547.500
PT Petrocem Industries, Tbk		-		-		123.125.000

5. INVESTASI JANGKA PENDEK (Lanjutan)

c. Efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

	2012		2011		2010	
	Peringkat	Rp	Peringkat	Rp	Peringkat	Rp
Saham (lanjutan)						
Pihak ketiga (lanjutan):						
PT Tunas Baru Lampung, Tbk		-		-		100.625.000
PT Panin Insurance, Tbk		-		-		93.298.500
PT Bumi Resources Mineral, Tbk		-		-		74.295.000
PT Agung Podomoro Land, Tbk		-		40.500.000		40.500.000
PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk		-		-		20.318.125
Ditambah:						
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar		9.017.643.190		957.546.142		3.240.334.761
Nilai Wajar		53.309.913.210		88.692.669.480		115.778.901.440

Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sebesar Rp 8.060.097.048, Rp (2.282.788.619) dan Rp 11.184.906.337 masing-masing untuk tahun 2012, 2011 dan 2010 disajikan sebagai akun keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas transaksi aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi – bersih (Catatan 23).

Nilai wajar efek obligasi dan saham ditentukan berdasarkan harga pasar efek yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari terakhir bursa pada tahun tersebut.

Peringkat untuk obligasi korporasi berdasarkan peringkat yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

6. PIUTANG *REVERSE REPO*

Akun ini merupakan efek ekuitas yang dibeli Grup dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pemilik efek pada tanggal tertentu dan pada harga jual yang telah disepakati. Rincian efek ini pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2012								
Nama Efek	Nomor Kontrak/Perjanjian	Nominal	Tanggal Transaksi	Counterparty	Jatuh Tempo	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali	Pendapatan Bunga	Piutang Reverse Repo
PT Hanson International, Tbk	011D/REPO-P4/MYR/XII/2012	10.000.000.000	07/12/2012	Dwi Nugroho	11/03/2013	9.393.333.333	10.000.000.000	606.666.667	10.000.000.000
PT Hanson International, Tbk	Akta notaris No. 141	10.000.000.000	13/12/2012	Benny Tjokrosaputro	14/03/2013	9.425.333.333	10.000.000.000	574.666.667	9.516.666.666
PT Polaris Investama, Tbk	83/REPO-P9/XII/2012	10.000.000.000	19/12/2012	Kore Group Limited	18/01/2013	10.000.000.000	10.191.666.667	191.666.667	10.000.000.000
						28.818.666.666	30.191.666.667	1.373.000.001	29.516.666.666

	2011								
Nama Efek	Nomor Kontrak/Perjanjian	Nominal	Tanggal Transaksi	Counterparty	Jatuh Tempo	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali	Pendapatan Bunga	Piutang Reverse Repo
PT Polaris Investama, Tbk	03C/REPO-P3/XII/2011	20.000.000.000	22/12/2011	Kore Group Limited	20/01/2012	18.530.555.555	20.000.000.000	1.469.444.445	19.744.444.444

6. PIUTANG *REVERSE REPO* (Lanjutan)

	2010								
Nama Efek	Nomor Kontrak/Perjanjian	Nominal	Tanggal Transaksi	Counterparty	Jatuh Tempo	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali	Pendapatan Bunga	Piutang Reverse Repo
PT Gozco Plantations, Tbk.	-	100.000.000.000	15/11/2010	PT AAA Investment	07/01/2011	97.465.886.940	100.000.000.000	2.534.113.060	99.707.602.340
PT Cowell Development, Tbk	Akta notaris No. 120	20.000.000.000	23/12/2010	PT Gama Nusapala	21/02/2011	19.100.000.000	20.000.000.000	900.000.000	19.265.000.000
Eurobond Gili Tini Pte Ltd	0520AAAC100/2010	12.000.000.000	15/12/2010	PT Andalan Artha Advisindo Capital, Pte. Ltd	14/01/2011	11.750.000.000	12.000.000.000	250.000.000	11.901.785.714
						128.315.886.940	132.000.000.000	3.684.113.060	130.874.388.054

Tingkat bunga piutang *reverse repo* adalah sebesar 18%-24%, 10%-27% dan 22%-27% masing-masing untuk tahun 2012, 2011 dan 2010.

Manajemen tidak membentuk cadangan penyisihan penurunan nilai karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh nilai penjualan kembali dari efek-efek tersebut diatas sesuai dengan harga jual yang disepakati dan memiliki jaminan yang cukup.

7. PIUTANG DAN UTANG PADA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Akun ini merupakan penyelesaian efek bersih atas kliring transaksi yang dilakukan Grup melalui PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dengan rincian sebagai berikut:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Piutang transaksi bursa			
T + 1	4.473.037.000	19.820.747.500	14.619.010.500
T + 2	-	2.388.587.500	6.748.240.000
T + 3	-	10.467.496.500	7.072.757.500
Setoran jaminan	2.174.166.292	2.072.071.200	1.959.479.844
Jumlah piutang	6.647.203.292	34.748.902.700	30.399.487.844
Utang transaksi bursa			
T + 1	-	4.655.990.000	13.084.331.500
T + 2	592.951.500	7.215.175.000	14.273.920.000
T + 3	2.979.001.500	3.008.362.500	9.505.907.500
Jumlah utang	3.571.953.000	14.879.527.500	36.864.159.000

Setoran jaminan merupakan dana agunan kas yang diwajibkan oleh KPEI sebagai jaminan transaksi yang dilakukan VSI, entitas anak. Dana agunan ditempatkan pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

8. PIUTANG DAN UTANG NASABAH

Piutang Nasabah

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Berdasarkan hubungan			
Pihak ketiga			
Masing-masing lebih atau sama dengan 5% dari jumlah	12.536.844.075	13.248.844.207	30.473.966.582
Masing-masing dibawah 5% dari jumlah	658.780.421	1.657.760.792	6.454.951.472
Jumlah	13.195.624.496	14.906.604.999	36.928.918.054

8. PIUTANG DAN UTANG NASABAH (Lanjutan)

	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp
Berdasarkan jenis nasabah			
Non-kelembagaan			
Reguler	12.910.570.158	8.460.853.699	27.467.733.858
Marjin	285.054.338	6.445.751.300	9.461.184.196
Jumlah	13.195.624.496	14.906.604.999	36.928.918.054

Piutang nasabah non-kelembagaan adalah piutang atas transaksi dengan nasabah pemilik rekening efek pada Grup.

Pada umumnya, seluruh piutang diselesaikan dalam waktu singkat, biasanya dalam waktu tiga hari dari tanggal perdagangan, sehingga risiko tidak tertagihnya piutang tidak signifikan.

Grup memberikan pembiayaan transaksi marjin kepada nasabah dengan jaminan pada umumnya berupa kas dan saham nasabah.

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai/penyisihan piutang nasabah ragu-ragu karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang nasabah dapat tertagih.

Utang Nasabah

	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp
Nasabah non-kelembagaan - Pihak ketiga			
Masing-masing lebih atau sama dengan 5% dari jumlah	5.376.511.125	22.845.190.855	23.206.077.647
Masing-masing dibawah 5% dari jumlah	679.357.935	9.750.977.367	5.157.239.927
Jumlah	6.055.869.060	32.596.168.222	28.363.317.574

Utang nasabah non-kelembagaan merupakan utang atas transaksi penjualan portofolio efek oleh nasabah yang belum diselesaikan pembayarannya.

9. REKENING NASABAH

Saldo Debit

Akun ini merupakan saldo kurang dana nasabah pihak ketiga dari transaksi penjualan efek yang dilakukan oleh nasabah, dengan rincian sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Nasabah non-kelembagaan - Pihak ketiga		
Masing-masing lebih atau sama dengan 5% dari jumlah	11.228.933.554	52.663.621.953
Masing-masing dibawah 5% dari jumlah	1.193.064.510	5.303.853.146
Jumlah	12.421.998.064	57.967.475.099

9. REKENING NASABAH (Lanjutan)

Saldo Kredit

Akun ini merupakan saldo lebih dana nasabah pihak ketiga dari transaksi penjualan efek yang dilakukan oleh nasabah, dengan rincian sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Nasabah non-kelembagaan - Pihak ketiga		
Masing-masing lebih atau sama dengan 5% dari jumlah	3.683.241.350	16.259.427.889
Masing-masing dibawah 5% dari jumlah	540.592.741	819.712.028
Jumlah	4.223.834.091	17.079.139.917

10. PIUTANG LAIN-LAIN DAN UTANG LAIN-LAIN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp
Piutang			
Aldo Jusuf Tjahaja	1.250.000.000	1.250.000.000	-
Yangky Halim	1.250.000.000	1.250.000.000	-
Jumlah	2.500.000.000	2.500.000.000	-
Utang			
Aldo Jusuf Tjahaja	14.960.000.000	14.960.000.000	-
Suzanna Tanojo	8.000.000.000	-	-
Christien Tanojo	-	1.500.000.000	-
Jumlah	22.960.000.000	16.460.000.000	-
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	22.960.000.000	1.500.000.000	-
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	14.960.000.000	-

Piutang

Piutang dari Aldo Jusuf Tjahaja dan Yangky Halim timbul sehubungan dengan belum disetornya setoran modal ke VMI, entitas anak. Piutang tersebut tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan jangka waktu pengembalian yang pasti. Pada tanggal 19 Pebruari 2013, piutang ini telah dilunasi.

Utang

Aldo Jusuf Tjahaja

Pada tanggal 9 September 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman (*junior convertible loan agreement*) dengan Aldo Jusuf Tjahaja (Aldo), Direktur Utama Perusahaan. Dalam perjanjian ini, Perusahaan mendapatkan pinjaman modal kerja sebesar Rp 14.960.000.000. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan Perusahaan tidak mempunyai hak untuk melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo pada tanggal 2 Desember 2013. Perusahaan juga memberikan opsi kepada Aldo untuk mengkonversi jumlah saldo terhutang menjadi saham Perusahaan setiap saat sejak tanggal dimana Perusahaan tidak lagi mempunyai ijin sebagai perusahaan sekuritas sampai dengan tanggal 2 Desember 2013. Pinjaman ini dijamin dengan waran Bank Victoria International Seri VI BVIC-W3 sebanyak 272.000.000 waran yang dimiliki oleh Perusahaan (Catatan 5).

10. PIUTANG LAIN-LAIN DAN UTANG LAIN-LAIN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Utang (lanjutan)

Aldo Jusuf Tjahaja (lanjutan)

Berdasarkan surat dari Aldo tanggal 23 April 2012, Aldo menyatakan tidak akan mengkonversi piutangnya menjadi saham Perusahaan dan Perusahaan diwajibkan untuk melunasi seluruh pinjaman pada tanggal jatuh tempo.

Selain itu, berdasarkan perjanjian opsi untuk menjual (*call option agreement*) pada tanggal yang sama, Perusahaan juga setuju untuk menerbitkan dan menjual 272.000.000 opsi waran kepada Aldo dengan harga Rp 2 untuk 1 opsi waran. Opsi ini dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian setiap saat sebelum tanggal 3 Desember 2013. Sampai dengan tanggal pelaporan, opsi tersebut belum dilaksanakan.

Suzanna Tanojo

Pada tanggal 21 Desember 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman sebesar Rp 8 milyar dengan Suzanna Tanojo, Komisaris Utama dan pemegang saham Perusahaan. Pinjaman ini digunakan untuk penambahan modal kerja dalam rangka kelancaran kegiatan usaha Perusahaan. Pinjaman ini berjangka waktu 1 tahun, tanpa jaminan dan dikenakan tingkat bunga sebesar 8% per tahun.

Christien Tanojo

Pada tanggal 5 Januari 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman sebesar Rp 1,5 milyar dengan Christien Tanojo, pihak berelasi. Pinjaman ini digunakan untuk penambahan modal kerja dalam rangka kelancaran kegiatan usaha Perusahaan. Pinjaman ini berjangka waktu 1 tahun, tanpa jaminan dan dikenakan tingkat bunga sebesar 10,5% per tahun. Pada tanggal 29 Nopember 2012, pinjaman ini telah dilunasi.

11. PIUTANG LAIN-LAIN KEPADA PIHAK KETIGA

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
PT Nusamakmur Ciptasentosa	20.000.000.000	-	-
Greogorius Andrew Andryanto Haswin	1.250.000.000	1.250.000.000	-
Bunga	680.454.009	1.617.831.611	1.724.089.482
Lain-lain	1.011.200.332	411.267.513	232.875.255
Jumlah	22.941.654.341	3.279.099.124	1.956.964.737

Berdasarkan perjanjian pengakuan hutang tanggal 21 Desember 2012, Perusahaan memberikan pinjaman sebesar Rp 20 miliar kepada PT Nusamakmur Ciptasentosa. Pinjaman ini berjangka waktu satu bulan sampai dengan 21 Januari 2013 dan tidak dikenakan bunga, serta dijamin dengan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai No. 88/Manggar yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada tanggal 21 Januari 2013, piutang tersebut telah dilunasi.

12. INVESTASI JANGKA PANJANG

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Pihak berelasi			
Penyertaan dalam bentuk saham pada entitas asosiasi PT Bank Victoria International, Tbk	533.252.774.363	441.828.643.951	281.842.791.466
Pihak ketiga			
PT Bursa Efek Indonesia	135.000.000	135.000.000	135.000.000
PT Asuransi Maipark Indonesia	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Konsorsium Asuransi Khusus	25.000.000	25.000.000	8.000.000
PT Pemeringkat Efek Indonesia	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Jumlah	533.457.774.363	442.033.643.951	282.030.791.466

Perubahan nilai penyertaan dalam bentuk saham pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	441.828.643.951	281.842.791.466	246.311.993.509
Penambahan investasi	-	79.184.419.093	15.000.020.000
Penjualan investasi	(14.200.000)	-	(13.843.650.336)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	74.766.134.733	72.085.985.106	43.783.065.438
Bagian pendapatan komprehensif lainnya dari entitas asosiasi	16.672.195.679	8.715.448.286	(9.408.637.145)
Jumlah	533.252.774.363	441.828.643.951	281.842.791.466

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perusahaan memiliki investasi langsung pada saham PT Bank Victoria International, Tbk (BVIC) dengan persentase masing-masing sebesar 34,86%, 35,16% dan 38,21%, dan investasi tidak langsung melalui VINS, entitas anak dengan persentase masing-masing sebesar 1,51%, 1,53% dan 1,63% saham BVIC. Sehingga jumlah kepemilikan Grup pada saham BVIC menjadi sebesar 36,37%, 36,69% dan 39,84% masing-masing pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas investasi jangka panjang sehingga tidak diperlukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

13. PROPERTI INVESTASI

	2012			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan				
Tanah	871.521.758	-	-	871.521.758
Bangunan	228.478.242	-	-	228.478.242
Jumlah	-	-	-	1.100.000.000
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	8.567.934	11.423.912	-	19.991.846
Jumlah Tercatat	8.567.934			1.080.008.154

13. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

	2011			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan				
Tanah	-	871.521.758	-	871.521.758
Bangunan	-	228.478.242	-	228.478.242
Jumlah	-	1.100.000.000	-	1.100.000.000
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	-	8.567.934	-	8.567.934
Jumlah Tercatat	-			1.091.432.066

Properti investasi terdiri dari sebidang tanah dengan bangunan ruko di atasnya yang terletak di Jl. Biak No. B.2-C, Jakarta Pusat.

Beban penyusutan sebesar Rp 11.423.912 dan Rp 8.567.934 masing-masing untuk tahun 2012 dan 2011 dicatat sebagai bagian dari beban usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai properti investasi dikarenakan nilai wajar properti investasi masih melebihi jumlah tercatat.

Penentuan nilai wajar properti investasi didasarkan pada harga pasar properti sejenis di lokasi yang sama.

14. ASET TETAP

	2012				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan					
Kendaraan	4.129.037.200	293.216.000	230.000.000	-	4.192.253.200
Renovasi bangunan sewa	4.022.836.423	-	-	-	4.022.836.423
Peralatan kantor	2.290.083.573	97.996.000	-	(341.748.977)	2.046.330.596
Perlengkapan kantor	953.184.273	-	-	341.748.977	1.294.933.250
Jumlah	11.395.141.469	391.212.000	230.000.000	-	11.556.353.469
Akumulasi penyusutan					
Kendaraan	507.019.005	766.725.379	26.354.167	-	1.247.390.217
Renovasi bangunan sewa	1.032.501.279	818.209.106	-	-	1.850.710.385
Peralatan kantor	1.153.004.861	320.333.660	-	(71.197.702)	1.402.140.819
Perlengkapan kantor	216.673.698	229.397.422	-	71.197.702	517.268.822
Jumlah	2.909.198.843	2.134.665.567	26.354.167	-	5.017.510.243
Jumlah Tercatat	8.485.942.626				6.538.843.226

14. ASET TETAP (Lanjutan)

	2011			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan				
Kendaraan	2.272.700.000	3.543.437.200	1.687.100.000	4.129.037.200
Renovasi bangunan sewa	3.954.866.976	713.021.423	645.051.976	4.022.836.423
Peralatan kantor	2.351.795.892	739.615.032	801.327.351	2.290.083.573
Perlengkapan kantor	733.834.500	485.223.023	265.873.250	953.184.273
Jumlah	9.313.197.368	5.481.296.678	3.399.352.577	11.395.141.469
Akumulasi penyusutan				
Kendaraan	408.115.000	336.030.358	237.126.353	507.019.005
Renovasi bangunan sewa	287.702.790	769.391.697	24.593.208	1.032.501.279
Peralatan kantor	947.231.638	227.431.399	21.658.176	1.153.004.861
Perlengkapan kantor	148.406.956	97.633.041	29.366.299	216.673.698
Jumlah	1.791.456.384	1.430.486.495	312.744.036	2.909.198.843
Jumlah Tercatat	7.521.740.984			8.485.942.626

	2010			
	Saldo Awal	Penambahan *	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan				
Kendaraan	895.745.455	2.616.674.500	1.239.719.955	2.272.700.000
Renovasi bangunan sewa	500.000.000	3.454.866.976	-	3.954.866.976
Peralatan kantor	1.082.081.465	1.269.714.427	-	2.351.795.892
Perlengkapan kantor	663.196.000	841.584.268	770.945.768	733.834.500
Jumlah	3.141.022.920	8.182.840.171	2.010.665.723	9.313.197.368
Akumulasi penyusutan				
Kendaraan	294.824.249	765.864.444	652.573.693	408.115.000
Renovasi bangunan sewa	-	287.702.790	-	287.702.790
Peralatan kantor	717.679.238	229.552.400	-	947.231.638
Perlengkapan kantor	346.153.867	539.460.428	737.207.339	148.406.956
Jumlah	1.358.657.354	1.822.580.062	1.389.781.032	1.791.456.384
Jumlah Tercatat	1.782.365.566			7.521.740.984

*) termasuk saldo awal dari VINS, entitas anak yang diakuisisi, yang terdiri dari harga perolehan dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.578.583.768 dan Rp 1.041.808.303.

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Hasil penjualan aset tetap	229.625.000	3.577.470.216	735.510.703
Jumlah nilai buku aset tetap yang dijual	203.645.833	3.086.608.541	620.884.691
Keuntungan penjualan aset tetap	25.979.167	490.861.675	114.626.012

Jumlah beban penyusutan sebesar Rp 2.134.665.567, Rp 1.430.486.495 dan Rp 780.771.759 masing-masing untuk tahun 2012, 2011 dan 2010 dicatat sebagai bagian dari beban usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, aset tetap berupa kendaraan telah diasuransikan kepada PT Panin Insurance, Tbk, PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk dan PT Asuransi Jasa Proteksi (keseluruhan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pihak ketiga) atas risiko kerusakan dan kehilangan dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.186.737.500, Rp 1.831.100.000 dan Rp 531.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan yang menunjukkan indikasi terjadinya penurunan nilai aset tetap sehingga tidak diperlukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

15. UTANG BANK

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Pihak berelasi			
PT Bank Victoria International, Tbk	18.820.723.359	20.000.000.000	19.978.600.000
Pihak ketiga			
PT Bank Sinarmas, Tbk	9.400.000.000	7.000.000.000	35.000.000.000
PT Bank Pan Indonesia, Tbk	-	53.300.000.000	64.000.000.000
PT Bank Capital Indonesia, Tbk	-	-	9.000.000.000
Jumlah pihak ketiga	9.400.000.000	60.300.000.000	108.000.000.000
Jumlah	28.220.723.359	80.300.000.000	127.978.600.000

PT Bank Victoria International, Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangan-perpanjangan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya, terakhir pada tanggal 20 Desember 2012, PT Bank Victoria International, Tbk (BVIC) setuju untuk merubah fasilitas kredit rekening koran kepada Perusahaan yang akan digunakan untuk modal kerja dari jumlah maksimum semula sebesar Rp 20 miliar menjadi sebesar Rp 7,5 miliar dan dikenakan tingkat bunga sebesar 12% per tahun (*floating*). Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun sampai dengan 11 Desember 2013 serta dijamin dengan piutang usaha sebesar 150% dari jumlah plafon pinjaman dan jaminan pribadi dari Aldo Jusuf Tjahaja, Direktur Utama Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah saldo terutang adalah sebesar Rp 6.870.527.371.

Berdasarkan perjanjian kredit pada tanggal 24 Januari 2012, BVIC setuju untuk memberikan fasilitas kredit rekening koran kepada VSI, entitas anak, yang akan digunakan untuk modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp 12,5 miliar dan dikenakan tingkat bunga sebesar 12% per tahun (*floating*). Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 24 Januari 2014 serta dijamin dengan piutang usaha sebesar 150% dari jumlah plafon pinjaman dan jaminan pribadi dari Yangky Halim, Direktur VSI. Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah saldo terutang adalah sebesar Rp 11.950.195.988.

PT Bank Sinarmas, Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangan-perpanjangan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya, terakhir pada tanggal 23 Juli 2012, PT Bank Sinarmas, Tbk setuju untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk *demand loan* yang bersifat *revolving* dan *uncommitted* dengan jumlah maksimum sebesar Rp 35 miliar dan dikenakan tingkat bunga sebesar 11,5% per tahun (*subject to review*). Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun sampai dengan 25 Juni 2013 serta dijamin dengan piutang nasabah pihak ketiga dan *reverse repo* sebesar 150% dari jumlah plafon pinjaman, *escrow account* milik Perusahaan dan jaminan perusahaan dari PT Gratamulia Pratama, pemegang saham Perusahaan.

PT Bank Pan Indonesia, Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangan-perpanjangan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya, terakhir tanggal 19 Oktober 2011, PT Bank Pan Indonesia Tbk setuju untuk memberikan fasilitas kredit berupa pinjaman rekening koran dan pinjaman *Uncommitted Money Market* masing-masing dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30 miliar dan 35 miliar. Pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga sebesar 12,5% per tahun (dapat berubah sewaktu-waktu) untuk pinjaman rekening koran dan tingkat bunga untuk pinjaman *Uncommitted Money Market* ditentukan oleh Liquidity Division PT Bank Pan Indonesia Tbk pada saat penarikan dana. Keseluruhan fasilitas ini berjangka waktu 1 satu tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 25 September 2012. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha berupa piutang lembaga kliring dan penjaminan dan/atau piutang nasabah minimal sebesar 150% dari plafon pinjaman. Pada tanggal 18 Oktober 2012, seluruh pinjaman ini telah dilunasi.

15. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Capital Indonesia, Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 3 Juni 2010 beserta perubahannya pada tanggal 1 Juni 2011, PT Bank Capital Indonesia, Tbk setuju untuk memberikan fasilitas kredit berupa pinjaman aksep dengan jumlah maksimum sebesar Rp 9 miliar dan dikenakan tingkat bunga sebesar 12,5% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 4 Juni 2012 serta dijamin dengan piutang usaha sebesar 150% dari jumlah plafon pinjaman dan jaminan pribadi dari Aldo Jusuf Tjahaja, Direktur Utama Perusahaan. Pada tanggal 9 Maret 2012, pinjaman ini telah dilunasi.

Seluruh perjanjian pinjaman di atas mencakup adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang umumnya diharuskan untuk fasilitas-fasilitas kredit tersebut, antara lain, pembatasan untuk memperoleh pinjaman dari pihak lain berhubungan dengan jaminan yang telah diberikan oleh Grup kepada masing-masing kreditur, melakukan merger atau akuisisi dengan pihak lain, membagikan dividen/modal/aset kepada pemegang saham dan direksi, memberikan pinjaman atau jaminan kepada pihak lain, membagikan pinjaman yang diterima kepada pihak lain maupun pihak berelasi, kecuali sehubungan dengan kegiatan usaha, melakukan tindakan likuidasi, memindahkan atau mentransfer liabilitas kepada pihak lain, mengganti kegiatan usaha Grup selain yang diungkapkan di awal perjanjian dan mengubah struktur modal/anggaran dasar, pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Grup, mengubah status kelembagaan, mengubah/menambah/mengurangi spesifikasi jaminan yang sifatnya material, mengambil alih aset milik pemegang saham, mengurangi jumlah modal saham, menjual/menyewakan/mengalihkan/memberikan aset yang jumlahnya material serta membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan tertulis dari kreditur. Grup telah memenuhi pembatasan-pembatasan tertentu di atas.

16. UTANG *REPO*

	2010								
Nama Efek	Nomor Kontrak/Perjanjian	Nominal	Tanggal Transaksi	Counterparty	Jatuh Tempo	Nilai Jual	Nilai Beli Kembali	Beban Bunga	Utang Repo
Subordinasi I Bank Permata Tahun 2006	PRJAAA/30/10	40.000.000.000	01/11/2010	PT AAA Investment	24/01/2011	40.000.000.000	40.922.222.222	922.222.222	40.855.555.555
Subordinasi Bank Mega Tahun 2007	PRJAAA/30/10	25.000.000.000	01/11/2010	PT AAA Investment	24/01/2011	25.000.000.000	25.576.388.889	576.388.889	25.411.140.908
Subnote Syariah Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2007	PRJAAA/30/10	15.000.000.000	01/11/2010	PT AAA Investment	24/01/2011	15.000.000.000	15.345.833.333	345.833.333	15.245.833.334
Subordinasi II Bank Panin Tahun 2008	PRJAAA/30/10	10.000.000.000	01/11/2010	PT AAA Investment	24/01/2011	10.000.000.000	10.230.555.556	230.555.556	10.230.555.555
PT Jakarta Setiabudi International, Tbk	04/REPO/EF/00/2010	20.000.000.000	25/11/2010	PT Emperor Finance Indonesia	07/01/2011	20.000.000.000	20.368.333.333	368.333.333	20.368.333.333
PT Bank Victoria International, Tbk	05/REPO/EF/00/2010	10.000.000.000	15/12/2010	PT Emperor Finance Indonesia	14/01/2011	9.872.500.000	10.000.000.000	127.500.000	10.000.000.000
Jumlah						119.872.500.000	122.443.333.333	2.570.833.333	121.911.421.685

Kisaran tingkat bunga utang *repo* adalah 10% per tahun untuk tahun 2010. Selanjutnya, pada tanggal jatuh tempo, Grup telah membeli kembali efek tersebut diatas.

17. UTANG PAJAK

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Pajak kini (Catatan 29)	419.972.125	59.260.702	31.431.859
Pajak pertambahan nilai	75.739.050	-	97.727.751
Pajak penghasilan			
Pasal 4 (2)	42.159.276	589.797.486	130.656.374
Pasal 21	241.878.107	24.508.449	40.132.928
Pasal 23	71.290.859	312.896.595	22.653.609
Pasal 25	29.472.294	24.672.866	22.769.727
Transaksi penjualan saham	86.835.277	123.108.593	226.258.728
Jumlah	967.346.988	1.134.244.691	571.630.976

18. UTANG LAIN-LAIN KEPADA PIHAK KETIGA

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Barron Ventures Investment Company, Pte, Ltd, Singapura	10.660.428.135	10.660.428.135	-
Pendapatan bunga diterima dimuka	581.666.667	-	-
PT Emperor Finance Indonesia	-	-	30.000.000.000
PT Tridaya Investindo	-	-	3.130.000.000
Lain-lain	736.587.787	59.267.105	58.697.091
Jumlah	11.978.682.589	10.719.695.240	33.188.697.091
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	11.978.682.589	59.267.105	33.188.697.091
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	10.660.428.135	-

Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd, Singapura

Pada tanggal 9 September 2011, Perusahaan juga mengadakan perjanjian pinjaman (*junior convertible loan agreement*) dengan Barron Ventures Investment Company Pte. Ltd, Singapura (Barron). Dalam perjanjian ini, Perusahaan mendapatkan pinjaman modal kerja sebesar Rp 10.660.428.135. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan Perusahaan tidak mempunyai hak untuk melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo pada tanggal 2 Desember 2013. Perusahaan juga memberikan opsi kepada Barron untuk mengkonversi jumlah saldo terhutang setiap saat sejak tanggal dimana Perusahaan tidak lagi mempunyai ijin sebagai perusahaan sekuritas sampai dengan tanggal 2 Desember 2013. Pinjaman ini dijamin dengan waran Bank Victoria International Seri VI BVIC-W3 sebanyak 236.898.403 waran yang dimiliki oleh Perusahaan.

Berdasarkan surat dari Barron tanggal 24 April 2012, Barron menyatakan tidak akan mengkonversi piutangnya menjadi saham Perusahaan dan Perusahaan diwajibkan untuk melunasi seluruh pinjaman pada tanggal jatuh tempo.

Selain itu, berdasarkan perjanjian opsi untuk menjual (*call option agreement*) pada tanggal yang sama, Perusahaan juga setuju untuk menerbitkan dan menjual 236.898.403 opsi waran kepada Barron dengan harga Rp 2 untuk 1 opsi waran. Opsi ini dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian setiap saat sebelum tanggal 3 Desember 2013. Sampai dengan tanggal pelaporan, opsi tersebut belum dilaksanakan.

PT Emperor Finance Indonesia

Pada tahun 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas berupa *promissory note* dari PT Emperor Finance Indonesia masing-masing sebesar Rp 10 miliar dan Rp 20 miliar. Pinjaman ini berjangka waktu 31 hari yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 1 Januari 2011 dan 21 Januari 2011 dan dikenakan tingkat bunga masing-masing sebesar 13,5% per tahun dan 18,5% per tahun, serta dijamin dengan *post dated cheque* masing-masing sebesar Rp 10.084.583.333 dan Rp 20.318.611.111. Pada tanggal 21 Januari 2011, pinjaman ini telah dilunasi.

PT Tridaya Investindo

Pada tanggal 15 Januari 2009 dan 4 Nopember 2009, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Tridaya Investindo masing-masing sebesar Rp 10 miliar dan Rp 5 miliar, yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja. Pinjaman ini berjangka waktu 1 tahun, tanpa jaminan dan dikenakan tingkat bunga sebesar 10,5% per tahun. Pada tahun 2010, pinjaman tersebut telah dilunasi.

Pada tanggal 2 September 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman sebesar Rp 3,13 milyar dengan PT Tridaya Investindo. Pinjaman ini digunakan untuk tujuan pembelian saham VINS, entitas anak, yang dimiliki pihak lain. Pinjaman ini berjangka waktu 1 tahun sampai dengan 2 September 2011, dikenakan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dan dijamin dengan saham milik Perusahaan pada VINS sebanyak 9.000 lembar. Pada tanggal 15 April 2011, pinjaman ini telah dilunasi.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Grup membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Jumlah karyawan Grup yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 54, 55 dan 47 karyawan masing-masing untuk tahun 2012, 2011 dan 2010.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Biaya jasa kini	454.732.169	766.079.478	183.355.819
Dampak kurtailmen	(867.854.827)	-	-
Amortisasi biaya jasa lalu dan kerugian aktuarial yang belum diakui	36.345.164	17.727.000	-
Amortisasi kewajiban transisi	-	(482.000)	(482.000)
Biaya bunga	54.077.337	63.499.925	37.185.000
Jumlah	(322.700.157)	846.824.403	220.058.819

Liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Nilai kini liabilitas yang tidak didanai	1.438.821.447	2.303.592.823	937.738.819
Biaya jasa lalu yang belum diakui	2.419.428	-	6.063.000
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(224.548.810)	(764.200.601)	(251.594.000)
Jumlah	1.216.692.065	1.539.392.222	692.207.819

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	1.539.392.222	692.207.819	472.149.000
Penyesuaian saldo tahun lalu	-	360.000	-
Beban (pendapatan) tahun berjalan - bersih	(322.700.157)	846.824.403	220.058.819
Jumlah	1.216.692.065	1.539.392.222	692.207.819

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen untuk tahun 2012 dan 2011, dan PT Dian Artha Tama, aktuaris independen untuk tahun 2010. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

		2012
Tingkat diskonto	:	5,3% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	:	8% per tahun
Tingkat kematian	:	Commissioners Standard Ordinary (CSO) - 1980
Tingkat cacat	:	10% dari Tabel Mortalitas CSO 1980
Tingkat pengunduran diri	:	15% pada usia 20 tahun dan menurun secara bertahap ke 0% pada usia 54 tahun
Usia pensiun normal	:	55 tahun

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

		2011
Tingkat diskonto	:	5,92% - 6,5% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	:	8% - 10% per tahun
Tingkat kematian	:	Commissioners Standard Ordinary (CSO) - 1980 dan Tabel Mortalita Indonesia - II (1999)
Tingkat cacat	:	10% dari Tabel Mortalitas CSO 1980 dan 0% dari Tabel Mortalita Indonesia - II (1999)
Tingkat pengunduran diri	:	15% pada usia 20 tahun dan menurun secara bertahap ke 0% pada usia 54 tahun dan 3% pada usia 18 tahun dan menurun secara bertahap ke 1% pada usia 45 tahun
Usia pensiun normal	:	55 tahun

		2010
Tingkat diskonto	:	7,5% - 7,6% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	:	8% per tahun
Tingkat kematian	:	Commissioners Standard Ordinary (CSO) - 1980 dan Tabel Mortalita Indonesia - II (1999)
Tingkat cacat	:	10% dari Tabel Mortalitas CSO 1980
Tingkat pengunduran diri	:	15% pada usia 20 tahun dan menurun secara bertahap ke 0% pada usia 54 tahun dan 3% pada usia 18 tahun dan menurun secara bertahap ke 1% pada usia 45 tahun
Usia pensiun normal	:	55 tahun

20. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
a. Kepentingan non-pengendali atas aset bersih entitas anak			
VINS	482.568.683	459.133.215	430.211.021
VSI	559.285.713	516.911.456	-
VMI	3.748.500.000	3.750.000.000	-
Jumlah	4.790.354.396	4.726.044.671	430.211.021
b. Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) bersih entitas anak			
VINS	23.435.468	28.922.194	16.220.518
VSI	42.374.257	16.911.456	-
VMI	(1.500.000)	-	-
Jumlah	64.309.725	45.833.650	16.220.518

21. MODAL

	2012 dan 2011		
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah Modal disetor
		%	Rp
PT Gratamulia Pratama	1.721.250.000	66,20	172.125.000.000
Suzanna Tanojo	878.750.000	33,80	87.875.000.000
Jumlah	2.600.000.000	100,00	260.000.000.000

21. MODAL (Lanjutan)

Nama Pemegang Saham	2010 Jumlah Saham	2010 Persentase Pemilikan %	2010 Jumlah Modal disetor Rp
PT Gratamulia Pratama	671.250.000	43,31	67.125.000.000
Suzanna Tanojo	878.750.000	56,69	87.875.000.000
Jumlah	1.550.000.000	100,00	155.000.000.000

Berdasarkan Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Mei 2011 sebagaimana telah diaktakan dalam akta No.17 tanggal 7 Juni 2011 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp 200 miliar (2 miliar lembar saham) menjadi sebesar Rp 620 miliar (6,2 miliar lembar saham). Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-30487.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 11 Juli 2011, sebagaimana telah diaktakan dalam akta No. 41 pada tanggal 12 Juli 2011 dari Suwarni Sukiman, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula sebesar Rp 155 miliar (1,55 miliar lembar saham) menjadi sebesar Rp 260 miliar (2,6 miliar lembar saham) yang telah diambil bagian seluruhnya oleh PT Gratamulia Pratama. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-AH.01.10-25593 tanggal 8 Agustus 2011.

22. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

Akun ini merupakan bagian Perusahaan atas perubahan ekuitas entitas asosiasi, yang terutama berhubungan dengan transaksi yang mengubah persentase kepemilikan Perusahaan pada entitas asosiasi dan keuntungan yang belum direalisasi atas efek dalam kelompok tersedia untuk dijual dengan rincian sebagai berikut:

	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	43.857.120.970	27.184.925.291	18.469.477.005
Keuntungan dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual	20.278.247.136	23.396.522.715	349.000.000
Jumlah	64.135.368.106	50.581.448.006	18.818.477.005

23. PENDAPATAN HASIL INVESTASI

	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp
Bunga deposito berjangka dan obligasi	10.090.104.547	4.423.441.358	3.575.121.041
Keuntungan (kerugian) yang belum terealisasi atas transaksi aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi - bersih	8.060.097.048	(2.282.788.619)	11.184.906.337
Keuntungan terealisasi dari penjualan efek	2.687.803.376	13.476.879.075	6.043.352.240
Dividen	671.075	1.009.985.225	245.590.222
Jumlah	20.838.676.046	16.627.517.039	21.048.969.840

11,25%, 11,76% dan Nil dari pendapatan hasil investasi masing-masing pada tahun 2012, 2011 dan 2010 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 30).

24. PENDAPATAN KEGIATAN PENJAMINAN EMISI DAN PENJUALAN EFEK

Akun ini merupakan imbalan jasa yang diterima Grup sebagai penjamin emisi dan agen penjualan atas penawaran umum saham dan obligasi serta penawaran umum terbatas dengan hak memesan terlebih dahulu atas saham, dengan rincian sebagai berikut:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Jasa manajemen	13.822.550.210	18.742.130.863	1.671.426.881
Jasa agen penjualan efek	2.868.872.441	-	-
Jasa penjaminan emisi efek	905.288.000	2.117.801.584	1.777.916.804
Jumlah	17.596.710.651	20.859.932.447	3.449.343.685

29,71%, 13,58% dan 73,16% dari pendapatan kegiatan penjamin emisi dan penjualan efek masing-masing pada tahun 2012, 2011 dan 2010 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 30).

25. PENDAPATAN BUNGA - BERSIH

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Piutang *reverse repo*	7.416.363.333	3.596.450.417	4.291.417.781
Piutang nasabah - bersih	1.950.342.534	5.364.414.882	3.994.233.167
Jumlah	9.366.705.867	8.960.865.299	8.285.650.948

39,21%, 49,26% dan 12,4% dari pendapatan bunga masing-masing pada tahun 2012, 2011 dan 2010 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 30).

26. PENDAPATAN KEGIATAN PERANTARA PERDAGANGAN EFEK

Akun ini merupakan pendapatan komisi yang diperoleh dari aktivitas Grup sebagai perantara perdagangan efek.

27. BEBAN KEPEGAWAIAN

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Gaji dan tunjangan	11.652.013.066	7.668.169.427	3.219.853.330
Imbalan pasca kerja	248.470.855	846.824.403	220.058.819
Lain-lain	506.262.210	252.099.000	-
Jumlah	12.406.746.131	8.767.092.830	3.439.912.149

28. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Beban bunga dan provisi bank	7.486.403.872	8.501.010.326	4.870.265.568
Nasabah	400.792.479	1.593.885.286	3.801.547.301
Pembelian kendaraan	83.277.252	41.145.001	12.487.500
Administrasi bank dan lainnya	185.440.105	114.966.348	82.112.031
Jumlah	8.155.913.708	10.251.006.961	8.766.412.400

13,53%, 1,07% dan 1,33% dari beban bunga dan keuangan pada tahun 2012, 2011 dan 2010 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 30).

29. PAJAK PENGHASILAN

Manfaat (beban) pajak Grup terdiri dari:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Pajak kini			
Perusahaan	(493.513.644)	(711.430.508)	(365.801.189)
Entitas anak - VINS	(44.199.000)	(36.265.071)	(28.952.229)
Entitas anak - VSI	(556.538.702)	-	-
Jumlah	(1.094.251.346)	(747.695.579)	(394.753.418)
Pajak tangguhan			
Perusahaan	11.831.573	291.556.686	31.212.605
Entitas anak - VINS	(18.360.271)	69.677.601	11.489.205
Entitas anak - VSI	201.183.875	-	-
Jumlah	194.655.177	361.234.287	42.701.810
Beban pajak	(899.596.169)	(386.461.292)	(352.051.608)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	97.599.674.845	89.390.553.846	63.860.110.000
Laba sebelum pajak entitas anak dan penyesuaian di level konsolidasian	(81.286.311.944)	(76.057.493.703)	(44.029.523.995)
Laba sebelum pajak Perusahaan	16.313.362.901	13.333.060.143	19.830.586.005
Perbedaan temporer:			
Imbalan pasca kerja	(497.729.928)	568.114.000	174.462.000
Perbedaan penyusutan komersil dan fiskal	622.632.304	598.112.745	154.497.063
Bersih	124.902.376	1.166.226.745	328.959.063
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			
Pajak-pajak	957.553.564	989.821.822	259.588.577
Administrasi dan umum	28.545.554	-	-
Telekomunikasi	24.737.670	-	-
Beban kepegawaian	22.682.101	-	-
Representasi dan sumbangan	10.632.491	260.342.618	255.000.000
Pendapatan bunga atas:			
Efek utang	(3.122.743.976)	(1.296.653.432)	(2.654.691.462)
Deposito berjangka dan jasa giro	(84.465.305)	(850.962.703)	(424.397.165)
Keuntungan atas penjualan investasi yang telah direalisasi	(897.025.258)	(13.483.112.671)	(6.043.352.240)
Pendapatan sewa	(3.300.000.000)	-	-
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi akibat penyesuaian nilai wajar	(8.134.371.298)	2.846.988.619	(11.184.906.337)
Perjalanan dinas	-	166.183.631	372.414.818
Pendapatan dividen	-	(307.672.725)	(245.590.222)
Lain-lain	245.499.333	21.500.000	969.593.717
Bersih	(14.248.955.124)	(11.653.564.841)	(18.696.340.314)
Laba Kena Pajak Perusahaan	2.189.310.153	2.845.722.047	1.463.204.754

29. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Beban pajak kini - Perusahaan	493.513.644	711.430.508	365.801.189
Dikurangi pembayaran pajak dimuka			
Pajak penghasilan			
Pasal 23	181.168.582	394.027.966	90.837.472
Pasal 25	304.987.662	273.158.406	271.863.306
Utang pajak kini - Perusahaan	7.357.400	44.244.136	3.100.411
Utang pajak kini - entitas anak			
VINS	9.917.418	15.016.566	28.331.448
VSI	402.697.307	-	-
Jumlah utang pajak kini	419.972.125	59.260.702	31.431.859

Laba hasil rekonsiliasi pajak menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan). Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Grup menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*).

Pada bulan September 2008, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pajak penghasilan baru yang akan berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Dengan berlakunya peraturan baru ini, tarif pajak penghasilan badan akan berkurang menjadi tarif tetap sebesar 28% di tahun 2009 dan 25% di tahun 2010 dan seterusnya. Berdasarkan perubahan tersebut, jika peredaran bruto Grup dibawah Rp 50 Miliar, maka Grup mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari tarif yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2012	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif	Penyesuaian pajak tangguhan	31 Desember 2012
	Rp	Rp	Rp	Rp
Perusahaan				
Liabilitas imbalan pasca kerja	314.406.700	(124.432.482)	(154.968.216)	35.006.002
Aset tetap	284.894.251	155.658.076	135.574.195	576.126.522
Jumlah	599.300.951	31.225.594	(19.394.021)	611.132.524
Entitas anak				
Liabilitas imbalan pasca kerja	81.166.806	43.757.443	144.242.750	269.166.999
Aset tetap	-	(5.176.589)	-	(5.176.589)
Jumlah	81.166.806	38.580.854	144.242.750	263.990.410
Jumlah	680.467.757	69.806.448	124.848.729	875.122.934

29. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

	1 Januari 2010	Dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif	Penyesuaian pajak tangguhan	31 Desember 2010	Dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif	31 Desember 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Perusahaan						
Liabilitas imbalan pasca kerja	128.762.700	43.615.500	-	172.378.200	142.028.500	314.406.700
Aset tetap	96.741.799	38.624.266	-	135.366.065	149.528.186	284.894.251
Piutang lain-lain	51.027.161	-	(51.027.161)	-	-	-
Jumlah	276.531.660	82.239.766	(51.027.161)	307.744.265	291.556.686	599.300.951
Entitas anak						
Liabilitas imbalan pasca kerja	-	11.489.205	-	11.489.205	69.677.601	81.166.806
Jumlah	276.531.660	93.728.971	(51.027.161)	319.233.470	361.234.287	680.467.757

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	97.599.674.845	89.390.553.846	63.860.110.000
Laba sebelum pajak entitas anak dan penyesuaian di level konsolidasian	(81.286.311.944)	(76.057.493.703)	(44.029.523.995)
	16.313.362.901	13.333.060.143	19.830.586.005
Beban pajak dengan tarif berlaku	(4.024.526.831)	(3.333.265.032)	(4.957.646.502)
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	3.562.238.781	2.913.391.210	4.674.085.079
Penyesuaian pajak tangguhan	(19.394.021)	-	(51.027.161)
Beban pajak Perusahaan	(481.682.071)	(419.873.822)	(334.588.584)
Manfaat (beban) pajak entitas anak			
Pajak kini	(600.737.702)	(36.265.071)	(28.952.229)
Pajak tangguhan	182.823.604	69.677.601	11.489.205
Manfaat (beban) pajak entitas anak	(417.914.098)	33.412.530	(17.463.024)
Jumlah Beban Pajak	(899.596.169)	(386.461.292)	(352.051.608)

30. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Hubungan Pihak Berelasi

a. PT Gratamulia Pratama merupakan pemegang saham mayoritas Perusahaan.

b. Suzanna Tanojo adalah pemegang saham dan Komisaris Perusahaan.

c. Aldo Jusuf Tjahaja adalah Direktur Utama Perusahaan.

d. Yangky Halim adalah Direktur VSI, entitas anak.

e. Christien Tanojo adalah keluarga dekat dari pemegang saham Perusahaan.

f. PT Bank Victoria International, Tbk merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan Perusahaan.

30. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup mengadakan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

Pihak-Pihak Berelasi	Sifat Transaksi
PT Gratamulia Pratama	Penjamin fasilitas pinjaman Perusahaan
Suzanna Tanojo	Perolehan pinjaman
Aldo Jusuf Tjahaja	Perolehan pinjaman dan penjamin fasilitas pinjaman Perusahaan
Yangky Halim	Penjamin fasilitas pinjaman Perusahaan
Christien Tanojo	Perolehan pinjaman
PT Bank Victoria International, Tbk	Penempatan rekening giro dan deposito, investasi portofolio efek, menerima pertanggungan asuransi agunan kredit, perolehan utang pembelian kendaraan, perolehan fasilitas pinjaman rekening koran dan pendapatan kegiatan penjaminan emisi dan penjualan efek

Perusahaan juga menyediakan manfaat pada Komisaris dan Direktur Perusahaan sebagai berikut:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Komisaris			
Imbalan kerja jangka pendek	1.967.300.000	985.500.000	645.500.000
Direksi			
Imbalan kerja jangka pendek	992.156.883	565.877.048	866.354.536

Ringkasan atas transaksi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Saldo-saldo dengan pihak berelasi

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Aset			
Kas dan setara kas (Catatan 4)			
PT Bank Victoria International, Tbk	4.350.943.277	5.845.683.720	15.176.476.695
Investasi jangka pendek (Catatan 5)			
PT Bank Victoria International, Tbk	20.120.162.508	72.483.758.634	300.000.000
Piutang premi - bersih			
PT Bank Victoria International, Tbk	592.376.370	841.531.221	-
Piutang lain-lain dengan pihak-pihak berelasi (Catatan 10)			
Aldo Jusuf Tjahaja	1.250.000.000	1.250.000.000	-
Yangky Halim	1.250.000.000	1.250.000.000	-
Investasi jangka panjang (Catatan 12)			
PT Bank Victoria International, Tbk	533.252.774.363	441.828.643.951	281.842.791.466
Jumlah	560.816.256.518	523.499.617.526	297.319.268.161
Persentase dari jumlah aset	72,58%	69,62%	41,34%

30. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

a. Saldo-saldo dengan pihak berelasi (lanjutan)

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Liabilitas			
Utang bank (Catatan 15)			
PT Bank Victoria International, Tbk	18.820.723.359	20.000.000.000	19.978.600.000
Utang komisi			
PT Bank Victoria International, Tbk	76.938.338	124.917.383	-
Uang titipan nasabah			
PT Bank Victoria International, Tbk	1.357.382.751	446.075.215	-
Utang lain-lain kepada pihak-pihak berelasi (Catatan 10)			
Aldo Jusuf Tjahaja	14.960.000.000	14.960.000.000	-
Suzanna Tanojo	8.000.000.000	-	-
Christien Tanojo	-	1.500.000.000	-
Utang pembelian kendaraan			
PT Bank Victoria International, Tbk	17.522.300	42.308.244	-
Jumlah	43.232.566.748	37.073.300.842	19.978.600.000
Persentase dari jumlah liablitas	51,92%	21,46%	5,4%

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan PT Bank Victoria International, Tbk dengan rincian sebagai berikut:

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
Pendapatan hasil investasi	2.344.831.451	1.954.827.867	-
Pendapatan kegiatan penjaminan emisi dan penjualan efek	5.227.500.000	2.833.055.400	2.523.367.759
Pendapatan premi - bruto	3.563.615.932	1.216.420.056	-
Jumlah	11.135.947.383	6.004.303.323	2.523.367.759
Persentase dari jumlah pendapatan usaha	20,40%	10,57%	6,20%
Beban komisi	496.097.204	186.841.449	-
Persentase dari jumlah beban komisi	46,67%	23,67%	-
Beban klaim	151.501.509	27.823.515	-
Persentase dari jumlah beban usaha	0,63%	0,09%	-
Penghasilan bunga	219.033.180	510.130.965	52.630.958
Persentase dari jumlah penghasilan bunga	39,21%	49,26%	12,40%
Beban bunga utang bank	1.103.831.867	110.000.000	116.706.250
Persentase dari jumlah beban bunga dan keuangan	13,53%	1,07%	1,33%

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO MODAL DAN RISIKO KEUANGAN

a. Kebijakan dan Tujuan Manajemen Risiko Keuangan

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko pasar, risiko kredit dan rasio likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia.

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Aset dan liabilitas keuangan Grup yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga terutama terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan utang nasabah dan utang bank. Kebijakan Grup adalah melakukan efisiensi penggunaan pinjaman dari bank dan melakukan investasi secara berhati-hati pada instrumen keuangan dengan tingkat bunga tetap yang memberikan imbal hasil yang memadai.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko yang dihadapi Grup sebagai akibat fluktuasi nilai tukar berasal dari rasio aset dibandingkan dengan liabilitas dalam mata uang asing.

Kebijakan manajemen risiko Grup untuk meminimumkan dampak risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing adalah dengan menyeimbangkan nilai aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan tujuan untuk menghindari risiko kerugian dari perubahan nilai tukar mata uang asing.

Risiko pasar

Grup terekspos dengan risiko pasar sehubungan dengan usaha yang dijalankan entitas anak yaitu usaha asuransi kerugian (VINS) dan usaha sekuritas (VSI). VINS memiliki dan menggunakan berbagai instrumen keuangan dalam mengelola usahanya. Sebagai bagian dari usaha asuransi, VINS menerima premi dari para pemegang polis dan menginvestasikan dana tersebut dalam berbagai jenis portofolio investasi. Hasil portofolio investasi inilah yang pada akhirnya menutup klaim para pemegang polis di kemudian hari. Sedangkan, VSI terekspos terhadap risiko pasar terutama muncul dari *counterparty* yang gagal memenuhi liabilitasnya atau melalui kesalahan perdagangan dan kesalahan lainnya. Dalam transaksi perdagangan di bursa, VSI bertindak sebagai prinsipal dan kemudian menovasi kontrak tersebut ke nasabah. Kegagalan nasabah menerima perdagangan akan menyebabkan VSI terkena risiko pasar. Selain itu, VSI juga menghadapi risiko pasar terkait investasi pada aset keuangan.

Oleh karena nilai wajar dari portofolio investasi tergantung pada pasar keuangan, yang mana dapat berubah dari waktu ke waktu, entitas anak memiliki eksposur risiko pasar. Dalam rangka meminimalkan dampak perubahan pasar keuangan ini, entitas anak mendiversifikasi portofolionya dan memonitor berbagai pengukuran risiko, yang didasarkan atas durasi, sensitivitas dan rujukan yang disetujui Dewan Direksi.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau exposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak yang diakui dan kredibel. Grup memiliki kebijakan untuk semua pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi terlebih dahulu. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang ragu-ragu.

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO MODAL DAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Kebijakan dan Tujuan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek. Grup pada tanggal laporan ini memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi liabilitas jangka pendek.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang mereka.

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2012				
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Satu sampai dengan lima tahun	Lebih dari lima tahun	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset					
Kas dan setara kas	9.694.589.702	-	-	-	9.694.589.702
Investasi jangka pendek	79.214.826.671	8.000.000.000	46.404.362.508	-	133.619.189.179
Piutang *reverse repo*	29.516.666.666	-	-	-	29.516.666.666
Piutang premi dan reasuransi	2.453.969.453	-	-	-	2.453.969.453
Piutang jasa penasehat keuangan	2.022.727.273	-	-	-	2.022.727.273
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	6.647.203.292	-	-	-	6.647.203.292
Piutang nasabah	13.195.624.496	-	-	-	13.195.624.496
Piutang lain-lain	21.691.654.341	-	3.750.000.000	-	25.441.654.341
Jumlah Aset	164.437.261.894	8.000.000.000	50.154.362.508	-	222.591.624.402
Liabilitas					
Utang bank	-	28.220.723.359	-	-	28.220.723.359
Utang klaim	16.984.218	-	-	-	16.984.218
Utang reasuransi	1.889.342.262	-	-	-	1.889.342.262
Utang komisi	408.174.289	-	-	-	408.174.289
Utang lembaga kliring dan penjaminan	3.571.953.000	-	-	-	3.571.953.000
Utang nasabah	6.055.869.060	-	-	-	6.055.869.060
Biaya masih harus dibayar	326.306.088	-	-	-	326.306.088
Utang lain-lain	1.677.295.063	33.620.428.135	-	-	35.297.723.198
Utang pembelian kendaraan	91.566.006	285.668.927	309.193.392	-	686.428.325
Jumlah Liabilitas	14.037.489.986	62.126.820.421	309.193.392	-	76.473.503.799
Aset - Bersih	150.399.771.908	(54.126.820.421)	49.845.169.116	-	146.118.120.603

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO MODAL DAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Kebijakan dan Tujuan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

	2011				
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Satu sampai dengan lima tahun	Lebih dari lima tahun	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset					
Kas dan setara kas	26.662.222.334	-	-	-	26.662.222.334
Investasi jangka pendek	90.692.669.480	8.000.000.000	72.966.808.634	-	171.659.478.114
Piutang *reverse repo*	19.744.444.444	-	-	-	19.744.444.444
Piutang premi dan reasuransi	4.229.472.008	-	-	-	4.229.472.008
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	34.748.902.700	-	-	-	34.748.902.700
Piutang nasabah	14.906.604.999	-	-	-	14.906.604.999
Rekening nasabah	12.421.998.064	-	-	-	12.421.998.064
Piutang lain-lain	2.029.099.124	-	3.750.000.000	-	5.779.099.124
Jumlah Aset	205.435.413.153	8.000.000.000	76.716.808.634	-	290.152.221.787
Liabilitas					
Utang bank	-	80.300.000.000	-	-	80.300.000.000
Utang klaim	160.142.423	-	-	-	160.142.423
Utang reasuransi	3.001.224.033	-	-	-	3.001.224.033
Utang komisi	414.881.727	-	-	-	414.881.727
Utang lembaga kliring dan penjaminan	14.879.527.500	-	-	-	14.879.527.500
Utang nasabah	32.596.168.222	-	-	-	32.596.168.222
Rekening nasabah	4.223.834.091	-	-	-	4.223.834.091
Biaya masih harus dibayar	1.828.016.503	-	-	-	1.828.016.503
Utang lain-lain	59.267.105	1.500.000.000	25.620.428.135	-	27.179.695.240
Utang pembelian kendaraan	82.774.426	261.336.110	509.177.364	-	853.287.900
Jumlah Liabilitas	57.245.836.030	82.061.336.110	26.129.605.499	-	165.436.777.639
Aset - Bersih	148.189.577.123	(74.061.336.110)	50.587.203.135	-	124.715.444.148

	2010				
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Satu sampai dengan lima tahun	Lebih dari lima tahun	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset					
Kas dan setara kas	19.784.510.218	-	-	-	19.784.510.218
Investasi jangka pendek	116.078.901.440	8.000.000.000	20.349.000.000	-	144.427.901.440
Piutang *reverse repo*	130.874.388.054	-	-	-	130.874.388.054
Piutang premi dan reasuransi	201.244.679	-	-	-	201.244.679
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	30.399.487.844	-	-	-	30.399.487.844
Piutang nasabah	36.928.918.054	-	-	-	36.928.918.054
Rekening nasabah	57.967.475.099	-	-	-	57.967.475.099
Piutang lain-lain	1.956.964.737	-	-	-	1.956.964.737
Jumlah Aset	394.191.890.125	8.000.000.000	20.349.000.000	-	422.540.890.125
Liabilitas					
Utang bank	-	127.978.600.000	-	-	127.978.600.000
Utang klaim	572.196	-	-	-	572.196
Utang reasuransi	4.550.961	-	-	-	4.550.961
Utang *repo*	121.911.421.685	-	-	-	121.911.421.685
Utang lembaga kliring dan penjaminan	36.864.159.000	-	-	-	36.864.159.000
Utang nasabah	28.363.317.574	-	-	-	28.363.317.574
Rekening nasabah	17.079.139.917	-	-	-	17.079.139.917
Biaya masih harus dibayar	1.343.567.869	-	-	-	1.343.567.869
Utang lain-lain	58.697.091	33.130.000.000	-	-	33.188.697.091
Utang pembelian kendaraan	3.951.114	12.618.137	36.851.921	-	53.421.172
Jumlah Liabilitas	205.629.377.407	161.121.218.137	36.851.921	-	366.787.447.465
Aset - Bersih	188.562.512.718	(153.121.218.137)	20.312.148.079	-	55.753.442.660

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO MODAL DAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Grup yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian.

	2012		2011		2010	
	Nilai tercatat	Nilai Wajar	Nilai tercatat	Nilai Wajar	Nilai tercatat	Nilai Wajar
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset keuangan						
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	53.309.913.210	53.309.913.210	88.692.669.480	88.692.669.480	115.778.901.440	115.778.901.440
Aset keuangan tersedia untuk dijual	46.404.362.508	46.404.362.508	72.966.808.634	72.966.808.634	20.349.000.000	20.349.000.000
Pinjaman yang diberikan dan piutang						
Kas dan setara kas	9.694.589.702	9.694.589.702	26.662.222.334	26.662.222.334	19.784.510.218	19.784.510.218
Investasi jangka pendek	33.904.913.461	33.904.913.461	10.000.000.000	10.000.000.000	8.300.000.000	8.300.000.000
Piutang reverse repo	29.516.666.666	29.516.666.666	19.744.444.444	19.744.444.444	130.874.388.054	130.874.388.054
Piutang premi dan reasuransi	2.453.969.453	2.453.969.453	4.229.472.008	4.229.472.008	201.244.679	201.244.679
Piutang jasa penasehat keuangan	2.022.727.273	2.022.727.273	-	-	-	-
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	6.647.203.292	6.647.203.292	34.748.902.700	34.748.902.700	30.399.487.844	30.399.487.844
Piutang nasabah	13.195.624.496	13.195.624.496	14.906.604.999	14.906.604.999	36.928.918.054	36.928.918.054
Rekening nasabah	-	-	12.421.998.064	12.421.998.064	57.967.475.099	57.967.475.099
Piutang lain-lain	25.441.654.341	25.441.654.341	5.779.099.124	5.779.099.124	1.956.964.737	1.956.964.737
Jumlah	122.877.348.684	122.877.348.684	128.492.743.673	128.492.743.673	286.412.988.685	286.412.988.685
Jumlah Aset Keuangan	222.591.624.402	222.591.624.402	290.152.221.787	290.152.221.787	422.540.890.125	422.540.890.125
Liabilitas keuangan						
Utang bank	28.220.723.359	28.220.723.359	80.300.000.000	80.300.000.000	127.978.600.000	127.978.600.000
Utang komisi	408.174.289	408.174.289	414.881.727	414.881.727	-	-
Utang repo	-	-	-	-	121.911.421.685	121.911.421.685
Utang lembaga kliring dan penjaminan	3.571.953.000	3.571.953.000	14.879.527.500	14.879.527.500	36.864.159.000	36.864.159.000
Utang nasabah	6.055.869.060	6.055.869.060	32.596.168.222	32.596.168.222	28.363.317.574	28.363.317.574
Rekening nasabah	-	-	4.223.834.091	4.223.834.091	17.079.139.917	17.079.139.917
Biaya masih harus dibayar	326.306.088	326.306.088	1.828.016.503	1.828.016.503	1.343.567.869	1.343.567.869
Utang lain-lain	35.297.723.198	35.297.723.198	27.179.695.240	27.179.695.240	33.188.697.091	33.188.697.091
Utang pembelian kendaraan	686.428.325	686.428.325	853.287.900	853.287.900	53.421.172	53.421.172
Jumlah Liabilitas Keuangan	74.567.177.319	74.567.177.319	162.275.411.183	162.275.411.183	366.782.324.308	366.782.324.308

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang *reverse repo*, piutang premi dan reasuransi, piutang jasa penasehat keuangan, piutang lembaga kliring dan penjaminan, piutang nasabah, rekening nasabah, piutang lain-lain, utang bank, utang komisi, utang *repo*, utang lembaga kliring dan penjaminan, utang nasabah, rekening nasabah, biaya masih harus dibayar, utang lain-lain dan utang pembelian kendaraan mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

- Nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi dan tersedia untuk dijual ditetapkan berdasarkan harga pasar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal pelaporan.

Seluruh instrumen keuangan Grup yang diukur pada nilai wajar diukur menggunakan hirarki pengukuran tingkat 1, yaitu menggunakan harga kuotasi di pasar yang aktif untuk instrumen keuangan sejenis (lihat Catatan 2g dan 2h untuk hirarki pengukuran nilai wajar).

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO MODAL DAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Manajemen Risiko Modal

Grup berupaya untuk mencapai struktur modal yang optimal dalam mencapai tujuan usaha mereka, termasuk mempertahankan rasio modal yang sehat dan peringkat yang kuat, dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Entitas anak, VSI, diwajibkan untuk memelihara persyaratan Minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) seperti yang disebutkan dalam peraturan Bapepam-LK No.V.D.5 dan peraturan Bapepam-LK No.X.E.1, yang antara lain menentukan MKBD untuk perusahaan efek yang beroperasi sebagai perantara perdagangan efek dan penjamin emisi sebesar Rp 25 miliar. Jika hal ini tidak dipantau dan disesuaikan, tingkat modal kerja sesuai peraturan dapat berada di bawah jumlah minimum yang ditetapkan oleh regulator, yang dapat mengakibatkan berbagai sanksi mulai dari denda sampai dengan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Untuk mengatasi risiko ini, VSI terus mengevaluasi tingkat kebutuhan modal kerja berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang modal kerja bersih yang dipersyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

VSI telah memenuhi persyaratan MKBD pada tanggal 31 Desember 2012 dan mempunyai modal disetor di atas ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 153/KMK.010/2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek.

Selanjutnya, sehubungan dengan permodalan entitas anak, VINS, yang bergerak di bidang asuransi kerugian, telah dicanangkan bahwa modal disetor akan ditingkatkan secara bertahap mulai tahun 2013 sehingga jumlah ekuitas akan mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi diharuskan memiliki modal disetor minimum sebesar Rp 100 miliar pada akhir 2014.

32. INFORMASI SEGMEN

Untuk tujuan informasi segmen, manajemen Grup menetapkan segmen usaha berdasarkan pertimbangan risiko dan hasil terkait jasa yang diberikan, yaitu penjaminan dan perantara perdagangan efek, asuransi kerugian dan investasi.

Informasi segmen usaha Grup adalah sebagai berikut:

	2012				
	Penjaminan dan perantara perdagangan efek	Asuransi kerugian	Investasi	Eliminasi	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN					
Pendapatan dari pihak eksternal	47.336.859.983	7.238.154.991	-	-	54.575.014.974
Pendapatan antar segmen	1.775.000.000	839.280.325	-	(2.614.280.325)	-
Jumlah pendapatan	49.111.859.983	8.077.435.316	-	(2.614.280.325)	54.575.014.974
HASIL SEGMEN	25.473.405.833	1.168.404.275	(10.000.000)	4.040.000.000	30.671.810.108

32. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan)

	2012				
	Penjaminan dan perantara perdagangan efek	Asuransi kerugian	Investasi	Eliminasi	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Bagian laba entitas asosiasi					74.766.134.733
Penghasilan bunga					558.566.089
Keuntungan kurs mata uang asing					52.106.263
Keuntungan penjualan aset tetap					25.979.167
Beban bunga dan keuangan					(8.155.913.708)
Lain-lain - bersih					(319.007.807)
Laba sebelum pajak					97.599.674.845
Beban pajak penghasilan					(899.596.169)
Laba bersih					96.700.078.676
INFORMASI LAINNYA					
ASET					
Aset segmen	326.610.224.249	88.473.590.560	24.990.000.000	(205.787.415.747)	234.286.399.062
Investasi pada entitas asosiasi					533.252.774.363
Aset yang tidak dapat dialokasikan					5.103.148.824
Jumlah Aset Konsolidasian					772.642.322.249
LIABILITAS					
Liabilitas segmen	109.477.037.900	8.015.829.064	-	(34.223.073.168)	83.269.793.796
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi					-
Jumlah Liabilitas					83.269.793.796
Pengeluaran modal	60.400.000	37.596.000	-	-	97.996.000
Penyusutan	1.360.273.275	785.816.204	-	-	2.146.089.479

	2011				
	Penjaminan dan perantara perdagangan efek	Asuransi kerugian	Investasi	Eliminasi	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN					
Pendapatan dari pihak eksternal	50.779.123.607	6.020.191.717	-	-	56.799.315.324
Pendapatan antar segmen	-	3.645.863	-	(3.645.863)	-
Jumlah pendapatan	50.779.123.607	6.023.837.580	-	(3.645.863)	56.799.315.324
HASIL SEGMEN	24.734.298.419	1.665.222.846	-	-	26.399.521.265
Bagian laba entitas asosiasi					72.085.985.106
Penghasilan bunga					1.035.677.205
Kerugian kurs mata uang asing					(224.061.003)
Keuntungan penjualan aset tetap					490.861.675
Beban bunga dan keuangan					(10.251.006.961)
Lain-lain - bersih					(146.423.441)
Laba sebelum pajak					89.390.553.846
Beban pajak penghasilan					(386.461.292)
Laba bersih					89.004.092.554
INFORMASI LAINNYA					
ASET					
Aset segmen	379.706.166.512	88.238.183.485	25.000.000.000	(187.976.383.187)	304.967.966.810
Investasi pada entitas asosiasi					441.828.643.951
Aset yang tidak dapat dialokasikan					5.103.148.824
Jumlah Aset Konsolidasian					751.899.759.585
LIABILITAS					
Liabilitas segmen	185.131.986.250	8.899.243.658	-	(21.250.000.000)	172.781.229.908
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi					-
Jumlah Liabilitas Konsolidasian					172.781.229.908
Pengeluaran modal	2.021.726.203	3.427.820.475	-	-	5.449.546.678
Penyusutan	1.326.924.471	112.129.958	-	-	1.439.054.429

32. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan)

	2010				
	Penjaminan dan perantara perdagangan efek	Asuransi kerugian	Investasi	Eliminasi	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN					
Pendapatan dari pihak eksternal	39.566.440.794	1.155.097.528	-	-	40.721.538.322
Pendapatan antar segmen	17.663.648	-	-	(17.663.648)	-
Jumlah pendapatan	39.584.104.442	1.155.097.528	-	(17.663.648)	40.721.538.322
HASIL SEGMEN	29.138.150.239	(175.387.171)	-	(17.663.628)	28.945.099.440
Bagian laba entitas asosiasi					43.783.065.438
Penghasilan bunga					424.397.165
Keuntungan penjualan aset tetap					114.626.012
Beban bunga dan keuangan					(8.766.412.400)
Lain-lain - bersih					(640.665.655)
Laba sebelum pajak					63.860.110.000
Beban pajak penghasilan					(352.051.608)
Laba sebelum laba entitas anak pra-akuisisi					63.508.058.392
Laba entitas anak pra-akuisisi					(95.414.805)
Laba bersih					63.412.643.587
INFORMASI LAINNYA					
ASET					
Aset segmen	442.398.277.301	44.547.973.713	-	(54.784.020.210)	432.162.230.804
Investasi pada entitas asosiasi					281.842.791.466
Aset yang tidak dapat dialokasikan					5.103.148.824
Jumlah Aset Konsolidasian					719.108.171.094
LIABILITAS					
Liabilitas segmen	367.918.813.666	2.087.891.306	-	-	370.006.704.972
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi					-
Jumlah Liabilitas Konsolidasian					370.006.704.972
Pengeluaran modal	-	3.416.876.327	3.187.380.076	-	6.604.256.403
Penyusutan	-	171.939.631	608.832.128	-	780.771.759

33. IKATAN

a. Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 23 Juli 2012, PT Bank Sinarmas, Tbk setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan dalam bentuk bank garansi *line* (*uncommited*) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 71 miliar. Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun sampai dengan 23 Juli 2013 serta dijamin dengan *cash margin* sebesar 5% dari nominal bank garansi yang diterbitkan. Pada tanggal 31 Desember 2012, fasilitas ini belum digunakan.

b. Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 23 Juli 2012, PT Bank Sinarmas, Tbk setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada VSI, entitas anak, dalam bentuk *demand loan* yang bersifat *revolving* dan *uncommitted* dengan jumlah maksimum sebesar Rp 12,5 miliar dan dikenakan tingkat bunga sebesar 11,5% per tahun (*subject to review*). Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun sampai dengan 23 Juli 2013 serta dijamin dengan piutang nasabah pihak ketiga dan *reverse repo* sebesar 150% dari jumlah plafon pinjaman dan *escrow account* milik VSI. Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak terdapat jumlah saldo terhutang atas pinjaman tersebut.

33. IKATAN (Lanjutan)

c. Berdasarkan perjanjian kredit pada tanggal 9 Maret 2012, PT Bank Capital Indonesia, Tbk setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada VSI, entitas anak, berupa pinjaman aksep dengan jumlah sebesar Rp 9 miliar dan dikenakan tingkat bunga sebesar 12%. Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun dan dijamin dengan piutang usaha sebesar 150% dari jumlah plafon pinjaman dan jaminan pribadi dari Aldo Jusuf Tjahaja, Komisaris Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak terdapat jumlah saldo terhutang atas pinjaman tersebut.

d. Berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangan-perpanjangan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya, terakhir pada tanggal 20 Desember 2012, BVIC setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan dalam bentuk bank garansi dengan jumlah sebesar Rp 157.500.000. Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun sampai dengan 20 Desember 2013 serta dijamin dengan deposito yang ditempatkan di BVIC sebesar Rp 40.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2012, fasilitas ini belum digunakan.

34. PERKARA HUKUM

Pada tanggal 25 Januari 2011, Abdul Malik Jan melalui Kuasa Hukumnya ("Penggugat") telah mengajukan gugatan tertulis sehubungan dengan penawaran umum perdana yang dilakukan oleh PT Media Nusantara Citra, Tbk, dimana Perusahaan termasuk salah satu tergugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register perkara No. 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.

Pada tanggal 28 Juni 2011, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengeluarkan Putusan No. 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima eksepsi daripada Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 65.416.000.

Pada tanggal 8 Juli 2011, Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kepada Pengadilan Tinggi Jakarta dan telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2011.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding tersebut telah mengeluarkan Putusan No. 15/PDT/2012/PT.DKI tanggal 4 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2011;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Nopember 2012.

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, proses kasasi masih berlangsung.

35. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Informasi pendukung laporan arus kas konsolidasian sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	Catatan	2012	2011	2010
		Rp	Rp	Rp
Perolehan aset tetap melalui utang pembelian kendaraan	14	293.216.000	1.131.750.000	-
Perolehan aset sehubungan dengan akuisisi entitas anak:				
Investasi jangka pendek	5	-	-	1.410.000.000
Biaya dibayar dimuka		-	-	96.500.000
Investasi jangka panjang	12	-	-	48.000.000
Aset tetap	14	-	-	536.775.465

36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

a. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 26 Pebruari 2013 sebagaimana telah diaktakan dalam akta No. 344 pada tanggal yang sama dari Suwarni Sukiman, S.H, notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui pengalihan sebagian saham milik Suzanna Tanojo sebanyak 852.750.000 saham kepada PT Gratamulia Pratama, sehingga komposisi pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah Modal disetor
		%	Rp
PT Gratamulia Pratama	2.574.000.000	99	257.400.000.000
Suzanna Tanojo	26.000.000	1	2.600.000.000
Jumlah	2.600.000.000	100	260.000.000.000

Akta perubahan ini diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Suratnya No. AHU-AH.01.10-07389 tanggal 1 Maret 2013.

b. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perusahaan tanggal 13 Maret 2013 sebagaimana telah diaktakan dalam akta No. 33 pada tanggal yang sama dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui perubahan susunan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Suzanna Tanojo
Komisaris Independen : Peter Rulan Isman
Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja *)
Direktur : Cendrasuri Ependy **)
: Rebecca Wahjutirto Tanoyo ***)

*) Membawahi bidang operasional, pemasaran, teknologi informasi, pengembangan bisnis.
**) Membawahi bidang akuntansi dan keuangan.
***) Membawahi bidang umum, administrasi dan sumber daya manusia

Akta perubahan ini diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Suratnya No. AHU-AH.01.10-09643 tanggal 15 Maret 2013.

36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)

c. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perusahaan tanggal 27 Maret 2013 sebagaimana telah diaktakan dalam akta No. 116 pada tanggal yang sama dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, telah diputuskan antara lain yaitu:

1. Meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp 620 miliar menjadi sebesar Rp 1,5 triliun dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 260 miliar menjadi sebesar Rp 615 miliar yang akan diambil bagian secara proporsional oleh para pemegang saham Perusahaan.

2. Mengubah status Perusahaan dari Perusahaan Terbatas Tertutup/Non Publik menjadi Perusahaan Terbuka/Publik.

3. Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) Perusahaan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak-banyaknya 1,35 miliar saham.

4. Menerbitkan waran sebanyak-banyaknya 2.152.500.000 lembar waran berkaitan dengan rencana pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan melalui Penawaran Umum (*Initial Public Offering/IPO*).

5. Mendelegasikan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham-Saham Perusahaan dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Pemegang Saham dan menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka penawaran umum Perusahaan.

6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham-Saham Perusahaan.

7. Mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, serta Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

8. Menyetujui program kepemilikan saham Perusahaan oleh karyawan melalui pemberian hak opsi kepada manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Options Plan/MESOP*) sebanyak-banyaknya sebesar 5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan.

Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-17098-AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013.

d. Pada tanggal 13 Mei 2013, VSI, entitas anak dan PT Bank Panin, Tbk telah mengadakan perjanjian kredit fasilitas pinjaman rekening koran dan bank garansi dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp 12,5 miliar dan Rp 75 miliar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan menjamin kegiatan pelaksana emisi efek. Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun dan dikenakan tingkat bunga 12,5% per tahun untuk pinjaman rekening koran serta dijamin dengan piutang usaha berupa piutang nasabah minimal sebesar 150% dari jumlah plafon pinjaman rekening koran dan jaminan dari Perusahaan.

36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)

e. Berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perusahaan tanggal 19 April 2013 sebagaimana telah diaktakan dalam akta No. 102 pada tanggal yang sama dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perusahaan tanggal 27 Maret 2013 yang telah diaktakan dalam akta No. 116 pada tanggal yang sama dari notaris yang sama melalui kapitalisasi laba ditahan sebesar Rp 355 miliar atau sejumlah 3.550.000.000 saham yang dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham, sehingga komposisi pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan %	Jumlah Modal disetor Rp
PT Gratamulia Pratama	6.088.500.000	99	608.850.000.000
Suzanna Tanojo	61.500.000	1	6.150.000.000
Jumlah	6.150.000.000	100	615.000.000.000

Akta perubahan ini diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Suratnya No. AHU-AH.01.10-15909 tanggal 26 April 2013.

f. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan telah mengadakan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Saham Perdana antara Perusahaan dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai "Penjamin Pelaksana Emisi Efek" yang telah didokumentasikan dalam akta No. 120 tanggal 24 April 2013 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, notaris di Jakarta dan perubahannya dalam akta No. 214 tanggal 27 Mei 2013 dari notaris yang sama.

2. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perusahaan dengan PT Ficomindo Buana Registrar yang telah didokumentasikan dalam akta No. 122 tanggal 24 April 2013 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, notaris di Jakarta.

3. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum antara Perusahaan dengan PT Ficomindo Buana Registrar yang telah didokumentasikan dalam akta No. 123 tanggal 24 April 2013 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, notaris di Jakarta dan perubahannya dalam akta No. 215 tanggal 27 Mei 2013 dari notaris yang sama.

4. Perjanjian pendaftaran efek bersifat ekuitas di KSEI antara Perusahaan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang telah didokumentasikan dalam perjanjian No. SP-0016/PE/KSEI/0413 tanggal 24 April 2013.

g. Berdasarkan surat keputusan direksi No. 001/VI/SK-DIR/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, Perusahaan telah mengangkat Saudari Christine Wahyu Indrayani sebagai kepala audit internal sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.7 tentang "Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal" sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan.

37. INFORMASI TAMBAHAN KONSOLIDASIAN

Berikut pada halaman 68 sampai dengan halaman 71 adalah informasi keuangan P.T. Victoria Investama (induk perusahaan saja), dimana tidak termasuk saldo dari entitas anak, yang telah disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang konsisten dengan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan, kecuali untuk investasi pada entitas anak disajikan berdasarkan harga perolehan.

38. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2013.

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada publik, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang disertai beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan lainnya pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian (Catatan 1a, 1b, 2a, 2b, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2q, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 29, 30, 35, 36, 37 dan 39).

****

P.T. VICTORIA INVESTAMA (d/h P.T. VICTORIA SEKURITAS)
LAPORAN POSISI KEUANGAN INDUK PERUSAHAAN*)
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009

	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp	1 Januari 2010/ 31 Desember 2009 Rp
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas				
Pihak berelasi	119.220.742	4.286.036.721	14.823.083.336	805.766.816
Pihak ketiga	245.858.333	1.268.859.649	4.029.328.315	1.736.463.009
Piutang *reverse repo* - setelah dikurangi pendapatan bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp 483.333.334 tahun 2012, Rp 255.555.556 tahun 2011, Rp 1.125.611.946 tahun 2010 dan Rp 717.500.000 tahun 2009	19.516.666.666	19.744.444.444	130.874.388.054	29.142.500.000
Portofolio efek - bersih				
Pihak berelasi	18.320.162.508	54.234.416.329	-	-
Pihak ketiga	19.739.887.460	23.708.769.480	115.778.901.440	46.691.997.289
Piutang jasa penasihat keuangan	2.022.727.273	-	-	-
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	-	34.748.902.700	30.399.487.844	14.709.300.931
Piutang nasabah	-	14.906.604.999	36.928.918.054	18.769.565.008
Rekening nasabah	-	12.421.998.064	57.967.475.099	6.131.408.434
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	674.266.435	-	-	-
Pihak ketiga	20.154.070.528	836.691.475	1.956.964.737	96.022.480
Uang muka dan biaya dibayar di muka	163.398.517	532.717.349	497.569.659	852.169.662
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	-	572.522.010	-	-
Jumlah Aset Lancar	80.956.258.462	167.261.963.220	393.256.116.538	118.935.193.629
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi jangka panjang				
Pihak berelasi	403.075.362.737	403.089.562.737	221.968.443.644	184.832.073.980
Pihak ketiga	5.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000
Aset pajak tangguhan	611.132.524	599.300.951	307.744.265	276.531.660
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 19.991.846 tahun 2012 dan Rp 8.567.934 tahun 2011	1.080.008.154	1.091.432.066	-	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.941.177.353 tahun 2012, Rp 2.747.302.624 tahun 2011, Rp 1.619.516.753 tahun 2010 dan Rp 1.358.657.354 tahun 2009	3.024.115.520	4.791.545.620	4.276.804.288	1.782.365.566
Uang jaminan	374.420.000	295.752.000	300.252.000	289.752.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	408.170.038.935	410.007.593.374	227.013.244.197	187.320.723.206
JUMLAH ASET	489.126.297.397	577.269.556.594	620.269.360.735	306.255.916.835
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank				
Pihak berelasi	6.870.527.371	20.000.000.000	19.978.600.000	20.000.000.000
Pihak ketiga	9.400.000.000	60.300.000.000	108.000.000.000	4.400.000.000
Utang *repo* - setelah dikurangi beban bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp 126.000.000 tahun 2012 sebesar Rp 531.911.648 tahun 2010	12.060.000.000	-	121.911.421.685	-
Utang lembaga kliring dan penjaminan	-	14.879.527.500	36.864.159.000	18.736.268.500
Utang nasabah	-	32.596.168.222	28.363.317.574	12.826.731.394
Rekening nasabah	-	4.223.834.091	17.079.139.917	700.739.332
Utang pajak	374.719.671	935.722.933	543.299.530	367.721.557
Biaya yang masih harus dibayar	10.193.520	1.825.516.503	1.343.567.869	764.181.872
Liabiltas yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	44.200.000.000	1.500.000.000	-	15.000.000.000
Pihak ketiga	11.220.504.074	59.267.105	33.188.697.091	41.075.532
Utang pembelian kendaraan	318.660.601	288.278.057	-	92.500.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	84.454.605.237	136.608.314.411	367.272.202.666	72.929.218.187
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	36.210.000.000	-	
Pihak ketiga	-	10.660.428.135	-	
Utang pembelian kendaraan	116.091.425	429.939.329	-	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	140.024.007	1.214.725.000	646.611.000	472.149.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	256.115.432	48.515.092.464	646.611.000	472.149.000
Jumlah Liabilitas	84.710.720.669	185.123.406.875	367.918.813.666	73.401.367.187
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				
Modal dasar - 6.200.000.000 saham tahun 2012 dan 2011 dan 2.000.000.000 saham tahun 2010				
Modal ditempatkan dan disetor - 2.600.000.000 saham tahun 2012 dan 2011 dan 1.550.000.000 saham tahun 2010	260.000.000.000	260.000.000.000	155.000.000.000	155.000.000.000
Keuntungan dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual	18.320.162.508	21.882.416.329	-	-
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	126.095.414.220	110.263.733.390	97.350.547.069	77.854.549.648
Jumlah Ekuitas	404.415.576.728	392.146.149.719	252.350.547.069	232.854.549.648
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	489.126.297.397	577.269.556.594	620.269.360.735	306.255.916.835

*) Investasi pada entitas anak dicatat dengan menggunakan metode akuntansi biaya perolehan

INFORMASI TAMBAHAN KONSOLIDASIAN

P.T. VICTORIA INVESTAMA (D/H P.T. VICTORIA SEKURITAS)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INDUK PERUSAHAAN*)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan kegiatan penjaminan emisi dan penjualan efek	10.534.032.541	20.859.932.447	3.449.343.685
Pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek	9.462.570.425	18.026.462.984	25.194.418.347
Pendapatan bunga - bersih	6.498.559.988	10.257.518.731	10.940.342.410
Jumlah Pendapatan Usaha	26.495.162.954	49.143.914.162	39.584.104.442
BEBAN USAHA			
Beban kepegawaian	3.567.283.732	6.283.283.441	2.857.831.030
Penyusutan	1.167.865.314	1.326.924.471	608.832.128
Pajak-pajak	957.553.564	989.821.822	-
Sewa	889.829.800	850.006.400	836.118.000
Administrasi dan umum	168.601.125	2.037.289.390	703.288.916
Transaksi bursa	182.640.658	260.865.348	223.245.834
Jasa profesional	117.435.129	220.614.617	97.750.000
Komisi	90.874.042	3.963.082.413	3.523.365.592
Telekomunikasi	44.784.269	437.743.200	325.927.939
Perijinan umum	35.760.771	177.400.200	94.496.500
Pemeliharaan dan perbaikan	28.348.100	759.385.382	454.010.047
Transportasi dan perjalanan dinas	12.668.800	476.834.457	424.063.718
Representasi dan sumbangan	10.632.491	260.342.618	255.000.000
Beban penjaminan emisi dan penjualan efek	-	7.716.518.181	33.451.344
Lain-lain	32.579.815	244.695.248	8.573.135
Jumlah Beban Usaha	7.306.857.610	26.004.807.188	10.445.954.183
LABA USAHA	19.188.305.344	23.139.106.974	29.138.150.259
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH			
Pendapatan sewa	3.300.000.000	-	-
Penghasilan bunga	84.465.305	850.962.703	424.397.165
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	557.450	(332.537.314)	-
Beban bunga dan keuangan	(6.340.762.861)	(10.219.902.870)	(8.766.412.400)
Keuntungan penjualan aset tetap	-	168.269.998	114.626.012
Lain-lain - bersih	80.797.663	(272.839.348)	(1.080.175.031)
Jumlah Beban Lain-Lain - Bersih	(2.874.942.443)	(9.806.046.831)	(9.307.564.254)
LABA SEBELUM PAJAK	16.313.362.901	13.333.060.143	19.830.586.005
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(481.682.071)	(419.873.822)	(334.588.584)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	15.831.680.830	12.913.186.321	19.495.997.421
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
Keuntungan (kerugian) dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual	(3.562.253.821)	21.882.416.329	-
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	12.269.427.009	34.795.602.650	19.495.997.421

*) Investasi pada entitas anak perusahaan dicatat dengan menggunakan metode akuntansi biaya perolehan

INFORMASI TAMBAHAN KONSOLIDASIAN

P.T. VICTORIA INVESTAMA (D/H P.T. VICTORIA SEKURITAS)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INDUK PERUSAHAAN*)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

	Modal ditempatkan dan disetor Rp	Keuntungan (kerugian) dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual Rp	Saldo laba belum ditentukan penggunaannya Rp	Jumlah ekuitas Rp
Saldo per 1 Januari 2010	155.000.000.000	-	77.854.549.648	232.854.549.648
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	-	-	19.495.997.421	19.495.997.421
Saldo 31 Desember 2010	155.000.000.000	-	97.350.547.069	252.350.547.069
Penambahan setoran modal	105.000.000.000	-	-	105.000.000.000
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	-	21.882.416.329	12.913.186.321	34.795.602.650
Saldo 31 Desember 2011	260.000.000.000	21.882.416.329	110.263.733.390	392.146.149.719
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	-	(3.562.253.821)	15.831.680.830	12.269.427.009
Saldo 31 Desember 2012	260.000.000.000	18.320.162.508	126.095.414.220	404.415.576.728

* Investasi pada entitas anak dicatat dengan menggunakan metode akuntansi biaya perolehan

INFORMASI TAMBAHAN KONSOLIDASIAN

P.T. VICTORIA INVESTAMA (d/h P.T. VICTORIA SEKURITAS)
LAPORAN ARUS KAS INDUK PERUSAHAAN*)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

	2012	2011	2010
	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari (pembayaran kepada) lembaga kliring dan penjaminan	19.869.375.200	(26.334.046.356)	2.437.703.587
Penerimaan jasa penjaminan emisi dan penjualan efek	6.511.305.268	20.859.932.447	3.449.343.685
Penerimaan (pembayaran) kepada nasabah	(9.491.399.250)	58.945.334.912	(38.080.432.946)
Penerimaan bunga	7.761.372.098	13.514.725.225	7.846.871.203
Penerimaan kegiatan perantara perdagangan efek	431.173.869	7.390.338.932	7.966.159.770
Pembayaran atas pembelian piutang *reverse repo*	(66.681.331.111)	(72.513.189.307)	(143.044.636.940)
Penerimaan atas penjualan piutang *reverse repo*	66.393.220.000	182.298.520.692	43.153.750.000
Perolehan utang *repo*	21.223.500.000	-	119.872.500.000
Pembayaran utang *repo*	(9.223.500.000)	(119.872.500.000)	-
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(7.320.987.392)	(23.960.995.356)	(9.113.219.922)
Pembayaran lain-lain	(16.595.960.400)	(213.627.638)	(1.246.628.471)
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	14.876.768.282	40.114.493.551	(6.758.590.034)
Pembayaran pajak penghasilan	(526.262.090)	(670.744.589)	(364.824.019)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	14.350.506.192	39.443.748.962	(7.123.414.053)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pencairan efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	45.553.278.576	125.768.627.521	38.514.167.551
Hasil penjualan aset tetap	613.813.698	243.098.334	198.735.238
Penjualan investasi jangka panjang	149.200.000	47.965.291.827	13.843.650.336
Perolehan aset tetap	(2.825.000)	(921.726.203)	(3.187.380.076)
Penempatan efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(201.000.000)	(55.414.371.509)	(90.372.813.125)
Perolehan properti investasi	-	(1.100.000.000)	-
Penambahan investasi jangka panjang	-	(207.816.410.920)	(51.000.020.000)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	46.112.467.274	(91.275.490.950)	(92.003.660.076)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan utang bank	50.300.000.000	367.500.000.000	370.408.430.524
Pembayaran utang bank	(114.329.472.629)	(415.178.600.000)	(266.829.830.524)
Penerimaan dari pihak berelasi	8.000.000.000	16.460.000.000	-
Pembayaran kepada pihak berelasi	(2.761.237.500)	-	-
Penerimaan utang lain-lain dari pihak ketiga	-	10.660.428.135	33.130.000.000
Pembayaran utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	(33.130.000.000)	(15.000.000.000)
Pembayaran utang pembelian kendaraan	(283.465.360)	(267.982.614)	(92.500.000)
Pembayaran bunga	(6.578.615.272)	(12.509.618.814)	(6.178.844.045)
Penyetoran modal dari pemegang saham	-	105.000.000.000	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(65.652.790.761)	38.534.226.707	115.437.255.955
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(5.189.817.295)	(13.297.515.281)	16.310.181.826
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5.554.896.370	18.852.411.651	2.542.229.825
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	365.079.075	5.554.896.370	18.852.411.651

*) Investasi pada entitas anak dicatat dengan menggunakan metode akuntansi biaya perolehan

XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 116 tanggal 27 Maret 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-17098.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029189.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 serta telah diterima dan dicatat di database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-12746 tanggal 8 April 2013 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0030769.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.102 tanggal 19 April 2013 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-15909 tanggal 26 April 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038393.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 April 2013

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama ”**PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.**” (selanjutnya cukup disingkat dengan ”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan di bidang pertanian, perkebunan, telekomunikasi, perdagangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
   a. Menjalankan usaha industri untuk produksi pipa baja perangkat dan sistem komunikasi, barang-barang elektronik dan elektrik, kimia/petrokimia, serta mendirikan dan menjalankan berbagai rupa usaha industri lainnya dan memperdagangkan hasil-hasilnya.
   b. Menjalankan usaha dalam bidang kontraktor/pemborong bangunan,pabrik bahan bangunan dan bahan konstruksi, gedung, jalan, jembatan, pengairan, instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi, baik sebagai perencana maupun sebagai pelaksana.
   c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penyediaan dan pematangan lahan, termasuk antara lain menyelenggarakan pendirian gedung-gedung baru, rehabilitasi gedung-gedung yang sudah ada dan melakukan penjualan serta sewa menyewa gedung-gedung.
   d. Berusaha dalam bidang pembangunan, pemilikan pengelolaan perumahan (real estate), kawasan industri, gedung kantor, apartemen, condominium, properti serta pusat perdagangan (shopping centre) dan berusaha sebagai developer dengan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, termasuk pula pembebasan tanah (landclearing), pemerataan, pemetaan, perkavlingan dan penjualan tanah baik tanah untuk perumahan maupun tanah untuk industri berikut juga segala bangunan yang berada diatasnya.
   e. Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor, dagang antar pulau (interinsulair) dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau

badan hukum lain atasdasar komisi atau secara amanat.

f. Bertindak sebagai leveransir, grossir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain baik dari luar negeri.
g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
h. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas.

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar Rupiah) terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas milyar)saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sejumlah 6.150.000.000 (enam milyar seratus lima puluh juta) saham, dengan nilainominal seluruhnya sebesar Rp.615.000.000.000,00 (enam ratus lima belas milyar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkanpada akhir akta.

3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain.
   Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
   b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
   c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
   d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
   e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham,laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengancara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya cukup disebut dengan ”RUPS”), dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.
   Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini.

5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan:
   a. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; dan
   b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit antara lain Obligasi Konversi atau Waran), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah sahamyang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
   b. Pengeluaran Efek bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
      (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
      (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
      (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
      (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
   c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   d. Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat Ekuitas yang dipesanmelebihi jumlah Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas.
   e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat Ekuitas dan tidak diambilbagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat Ekuitastersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
   f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandunghak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
   g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia atau penggantinya.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan:
   a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
      (i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
      (ii) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
      (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) diatas;
      (iv) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir (iii) di atas tidak terpenuhi;

(v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a diatastermasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) diatas.

b. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek menentukan lain.

9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM
Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam DaftarPemegang Saham.

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.

5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, makamereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut
7. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.

9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
   a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimilikioleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
   a. nama dan alamat pemegang saham;
   b. nomor surat saham;
   c. nilai nominal saham;
   d. tanggal pengeluaran surat saham.
   5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
   a. nama dan alamat pemegang saham;
   b. nomor surat kolektif saham;
   c. nilai nominal saham;
   d. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
   6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila KomisarisUtama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketigamaka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

   Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, UUPT dan peraturan lain yang berlaku.

PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
   b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
   a. Nama dan alamat para pemegang saham;
   b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
   c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
   d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
   e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
   f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.
   Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau Pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
   Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 9

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang SahamPerseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS.
l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
   Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.
   Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.
   Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
   a. RUPS tahunan;
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS Tahunan:
   a. Direksi menyampaikan:
      (i) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
      (ii) Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
   b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
   c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
   d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar;
   e. Penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (bilamana diperlukan); dan
   f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 butir a dan b tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN
PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
   b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman akan diadakan RUPS kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas di Indonesia dan 1 (satu) yang lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas di Indonesia dan 1 (satu) yang lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
   Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
4. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.

5. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan atas permintaan tertulis para pemegang, kecuali diatur secara lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
8. Usul dari pemegang saham harus dimasukan dalam acara RUPS apabila:
   a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan;
   b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
   c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
9. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
   Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
   Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
   Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
   Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
   Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 13

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
   c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
   b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
   c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
   d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh OJK.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
    Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 14

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN
PASAL 15

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata-kata dalam likuidasi.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala utang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan dibagi menurut keputusan RUPS.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

DIREKSI
Pasal 16

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas seorang atau lebih anggota Direksi, apabila diangkat lebih dari seorang angota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
4. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris
6. a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
   b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
   c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
8. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
9. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
10. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila :
    a. meninggal dunia;
    b. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
    c. pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini; atau
    d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 17

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
   b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
   c. Menjual atau dengan cara lain melepaskan penyertaan pada anak-anak perusahaan atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan;

d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin, harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
   Dalam hal korum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan, RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang dikeluarkan secara sah.
   Dalam hal korum untuk RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
   b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.

RAPAT DIREKSI
Pasal 18

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu:
   a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Direktur Utama.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan m
    Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 19

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut,kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga menyebabkan anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, atau tidak adanya Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat 1, maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.
7. a. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
   b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
   c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
   d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
   c. pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini; atau
   d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 20

1. Dewan Komisaris melakukan: (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, (b) memberikan nasihat kepada Direksi, serta (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
   a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan
   b. Memberikan pelaporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
   c. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
   d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku yang baru dimulai.
      Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
   e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
   f. Membuat Risalah rapat Dewan Komisaris;
   g. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Rapat tersebut dalam ayat 7 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 di atas.
9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 21

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
   a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Komisaris Utama.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 22

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 24

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan mengacuh pada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok Pokok Anggaran Dasar Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekutias dan Perusahaan Publik.

XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIX Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI ketika melakukan pemesanan saham.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal No. SP-0016/PE/KSEI/0413 tanggal 24 April 2013:

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
   1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 2013.
   2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
   3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
   4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
   5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainya yang melekat pada Saham.
   6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
   7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan dan disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan:

- Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan Direksi terakhir bagi badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat di luar negeri secara lengkap dan jelas;
- Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; dan
- Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan Perseroan wajib untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham diatas tidak terpenuhi.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut sertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesanan yang bersangkutan atau sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan 2 Juli 2013 pada pukul 10.00 - 15.00 WIB, kecuali pada hari terakhir, ditutup pada pukul 12.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Juli 2013.

8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada Harga Penawaran oleh para karyawan dan manajemen Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjual selama Masa Penawaran Umum dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.

9. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT Bank Mayapada International Tbk.
KPO, Jakarta
Atas Nama: PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
Nomor Rekening : 100.300.17927

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 2 Juli 2013 pada pukul 12.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembailan uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (pooling) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada peraturan No. VIII. G. 12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-691/BL/2011 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

(I) Penjatahan Pasti ("Fixed Allotment")

Penjatahan pasti dibatasi sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah yang ditawarkan atau sebesar 1.164.000.000 (satu miliar seratus enam puluh empat juta) Saham Biasa Atas Nama, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, di dalam negeri.

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyarata persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam penawaran umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesanan perorangan.
b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir a diatas termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam penawaran umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.
c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2 huruf a angka 3)

(II) Penjatahan Terpusat ("Pooling")

Penjatahan terpusat dibatasi sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau sebesar 36.000.000 (tiga puluh enam juta) Saham Biasa Atas Nama. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

a) dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
   (i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan;
   (ii) dan dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf (I) c menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
b) dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   (i) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
   (ii) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:

i. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
ii. apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Saham melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Saham yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

12. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk menunda untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini.

Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2 setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

a. banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, peperangan atau huru-hara di Indonesia yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
b. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
c. Terjadi peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang disetujui terlebih dahulu oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan yang besarnya dihitung berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia 1 (satu) bulan yang berlaku saat itu ditambah 2% (dua persen) per tahun, yang dihitung dari hari kerja ke 3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

15. Lain-Lain

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu penawaran umum, maka Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki efek untuk portofolio efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjual Efek atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek kecuali melalui BEI jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di BEI.

Pemesan tidak bisa melakukan pembatalan atas pemesanan yang telah diajukan.

IV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS
Equity Tower Lantai 22
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telp : 021 2991 6600
Fax : 021 515 2644
Website: www.aaasecurities.com